

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
dan entitas anaknya/
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia
and its subsidiaries

Laporan keuangan konsolidasian
tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen
*Consolidated financial statements
as of December 31, 2023 for the year then ended
with independent auditor's report*

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian.....	4-5	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	6	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	7	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	8-264	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTOR'S STATEMENT
ON
THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

2. Nama/Name
Alamat kantor/Office address

Alamat domisili/sesuai KTP atau kartu identitas lain/Residential address/in accordance with personal identity card
Nomor telepon/Telephone number
Jabatan/Title

menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2023 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.
- Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
 - Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan dan entitas anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

- : Arif Suhartono
: Pelabuhan Indonesia (Persero)
: Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
: Jakarta Utara 14230, Indonesia
: Jl. Tunas Kelapa Raya/167 RT/RW 005/007 Kel.
: Sepanjang Jaya Kec. Rawa Lumbu
: Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
: 62-21-4301080
: Direktur Utama/President Director

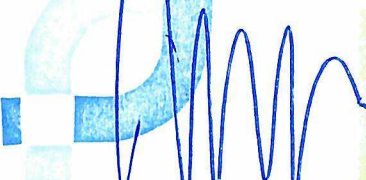
- : Mega Satria
: Pelabuhan Indonesia (Persero)
: Jl. Yos Sudarso No 9, Kec. Koja,
: Jakarta Utara 14230, Indonesia
: Jl. Senayan Blok HH 11/4 RT/RW 003/015 Kel.
: Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
: Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
: 62-21-4301080
: Direktur Keuangan/Finance Director

declare that:

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2023 and for the year then ended.
- The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- All information has been fully and correctly disclosed in the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, and
 - The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
- We are responsible for the Company and its subsidiaries internal control system.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 27 Maret 2024 / March 27, 2024



Arif Suhartono
Direktur Utama/President Director



Mega Satria
Direktur Keuangan/Finance Director



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024

*The Shareholder and the Boards of Commissioners and Directors
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia*

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Hal audit utama

Key audit matters

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying consolidated financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matters (continued)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas

Cash Flow Hedge Accounting

Penjelasan atas hal audit utama:

Description of the key audit matter:

Grup memiliki eksposur terhadap risiko mata uang asing dari pendapatan dan utang obligasi serta pinjaman sindikasi dalam mata uang Dolar AS karena mata uang fungsional Grup adalah Rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Juli 2023, Grup menetapkan beberapa hubungan lindung nilai arus kas antara pendapatan kontraktual dan non-kontraktualnya dalam mata uang Dolar AS di masa yang akan datang sebagai item lindung nilai dan utang obligasi dan pinjaman sindikasi dalam mata uang Dolar AS yang ada sebagai instrumen lindung nilai. Tujuannya adalah untuk melindungi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang atas pendapatan yang diterima dalam mata uang Dolar AS dengan utang obligasi dan pinjaman sindikasi yang ada dalam mata uang Dolar AS. Kami menganggap ini sebagai hal audit utama dalam audit tahun berjalan karena kompleksitas yang terkait dengan penerapan akuntansi lindung nilai. Penilaian item lindung nilai dan instrumen lindung nilai, penilaian efektivitas lindung nilai dan cadangan lindung nilai, serta penerapan *rebalancing* hubungan lindung nilai melibatkan model kuantitatif yang kompleks dan pertimbangan signifikan yang terkait dengan asumsi yang diterapkan dalam akuntansi lindung nilai. Disamping itu, perlakuan akuntansi tersebut menghasilkan dampak yang signifikan terhadap saldo-saldo Grup sebagai akibat dari pemilihan untuk menerapkan akuntansi lindung nilai.

The Group is exposed to foreign currency risk from revenue and bonds payable and syndicated loan in US Dollars because the Group's functional currency is Rupiah. On January 1, 2022 and July 1, 2023, the Group designated several cash flow hedge relationships between its future US Dollars contractual and non-contractual revenues as hedged items and its existing US Dollar bonds payables and syndicated loan as hedging instruments. The objective is to hedge the risk of exchange rate fluctuation on income received in US Dollars with the existing bonds payable and syndicated loan in US Dollars. We consider this as the key audit matter in the current year audit of the consolidated financial statements due to the complexities associated with the application of hedge accounting. The valuation of underlying hedged items and hedging instruments, the assessment of hedge effectiveness and hedge reserve balances, and the application of the rebalancing of hedge relationships involve complex quantitative models and significant judgement associated with the assumptions applied in hedge accounting. Furthermore, the accounting treatment results in a significant impact to the Group balances that arise as a result of the election to apply hedge accounting.

Pengungkapan terkait lindung nilai arus kas disajikan dalam Catatan 2v, 24, 25 dan 47 atas laporan keuangan konsolidasian.

The disclosures related to the cash flow hedge are presented in Notes 2v, 24, 25 and 47 to the consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Hal audit utama (lanjutan)

Key audit matters (continued)

Akuntansi Lindung Nilai Arus Kas (lanjutan)

Cash Flow Hedge Accounting (continued)

Respons audit:

Audit response:

Kami memperoleh pemahaman tentang strategi manajemen risiko dan tujuan dilakukannya lindung nilai arus kas, serta memperoleh dokumentasi penetapan hubungan lindung nilai arus kas yang dibuat oleh manajemen dan ahli eksternal yang ditunjuk oleh Grup. Kami menilai independensi, kualifikasi dan obyektivitas dari ahli manajemen eksternal tersebut. Kami mengevaluasi apakah penerapan akuntansi lindung nilai arus kas telah sesuai dengan kriteria kualifikasian dan prinsip-prinsip lainnya dalam akuntansi untuk lindung nilai arus kas sesuai dengan PSAK 71: Instrumen Keuangan. Kami menguji asumsi utama yang digunakan dalam model dan membandingkannya dengan informasi yang diperoleh dari sumber input, analisis historis, informasi yang tersedia untuk umum dan pengetahuan industri. Kami menguji akurasi aritmetika dari model yang digunakan dalam penilaian efektivitas serta penerapan *lower-of-test*. Kami menilai dan menguji dasar dan penerapan *rebalancing* atas hubungan lindung nilai. Kami juga mengevaluasi kecukupan pengungkapan mengenai hal ini di dalam laporan keuangan konsolidasian terlampir.

We obtained an understanding of the risk management strategy and objective in conducting a cash flow hedge and obtained documentation of the cash flow hedge relationships designation prepared by the management and the external expert engaged by the Group. We assessed the independence, qualification, and objectivity of the external management's expert. We evaluated whether the cash flow hedge accounting application is in compliance with the qualifying criteria and other principles in accounting for cash flow hedge in accordance with PSAK 71: Financial Instruments. We tested the key assumptions used in the model and compared them with the information obtained from input sources, historical analysis, publicly available information and industry knowledge. We tested the arithmetical accuracy of the model used for effectiveness assessment as well as the application of lower-of-test. We assessed and challenged the bases and application of the rebalancing of hedge relationships. We also evaluated adequacy of disclosures on this matter in the accompanying consolidated financial statements.

Informasi lain

Other information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2023 ("Laporan Tahunan") selain laporan keuangan konsolidasian terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report ("The Annual Report") other than the accompanying consolidated financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Informasi lain (lanjutan)

Other information (continued)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditor's Report (continued)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (lanjutan)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 (continued)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-
4/1/III/2024 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

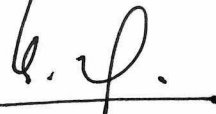
Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00379/2.1032/AU.1/06/0697-
4/1/III/2024 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)**

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our independent auditor's report unless laws or regulations preclude public disclosure about such key audit matters or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

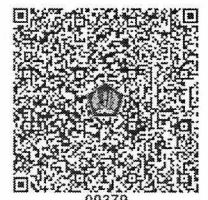
KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Moch. Dadang Syachruna

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0697/Public Accountant Registration No. AP.0697

27 Maret 2024/March 27, 2024



**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	12.491.274.250	4,44,45,46	13.597.640.823	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	3.769.584.376	5,44,45,46	3.943.051.999	Short-term investments
Piutang usaha - neto		6,45,46		Trade receivables - net
Pihak ketiga	1.056.562.835		1.130.425.885	Third parties
Pihak berelasi	291.600.099	44	319.681.316	Related parties
Piutang lain-lain - neto		7,46		Other receivables - net
Pihak ketiga	44.613.085		54.645.010	Third parties
Pihak berelasi	170.985.810	44,45	392.181.781	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	208.543.807	8	225.480.260	Advances and prepaid expenses
Pendapatan masih akan diterima		9,46		Accrued revenues
Pihak ketiga	572.269.934		543.670.248	Third parties
Pihak berelasi	152.492.130	44	107.559.957	Related parties
Persediaan	270.428.290	10	276.990.511	Inventories
Pajak dibayar di muka	1.190.287.684	23a	972.176.643	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	100.458.674	46	56.662.961	Other current assets
Total Aset Lancar	20.319.100.974		21.620.167.394	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi jangka panjang	4.708.437.323	11,46	4.118.791.190	Long-term investment
Properti investasi - neto	1.380.726.349	12	1.233.319.427	Investment properties - net
Aset tetap - neto	40.513.752.433	13	45.033.835.147	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	358.909.828	14	379.887.734	Joint operation assets - net
Aset hak-guna - neto	454.253.106	16	453.988.347	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan	844.098.609	23f	632.879.439	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	46.882.443.268	15	42.546.542.738	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.348.106.857	23a	1.109.658.955	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	1.531.236.928	17,46	1.221.507.535	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	98.021.964.701		96.730.410.512	Total Non-current Assets
TOTAL ASET	118.341.065.675		118.350.577.906	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Pinjaman bank jangka pendek	3.330.172	18,44,46	105.361.831	Short-term bank loans
Utang usaha		19,46		Trade payables
Pihak ketiga	620.890.592	45	976.563.635	Third parties
Pihak berelasi	636.747.827	44	1.092.012.208	Related parties
Pendapatan diterima di muka jangka pendek	1.393.628.171	20	1.594.355.077	Short-term unearned revenues
Utang pajak	885.558.244	23b	1.025.273.741	Taxes payable
Beban akrual	5.419.485.908	21,46	5.273.585.288	Accrued expenses
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang				Current maturities of long-term liabilities
Utang obligasi	7.574.312.147	24,45,46	8.637.804.928	Bonds payable
Utang bank	445.526.921	25,45,46	152.606.159	Bank loans
Liabilitas sewa	70.113.816	16,46	49.907.726	Lease liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya		22,46		Other current liabilities
Pihak ketiga	465.350.521		855.825.793	Third parties
Pihak berelasi	659.009.231	44	185.307.298	Related parties
Total Liabilitas Jangka Pendek	18.173.953.550		19.948.603.684	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar				Long-term liabilities - net of current maturities
Utang obligasi	25.549.740.350	24,45,46	34.116.829.197	Bonds payable
Utang bank	13.901.255.263	25,45,46	7.678.666.058	Bank loans
Liabilitas sewa	417.609.648	16,46	385.228.086	Lease liabilities
Utang lembaga keuangan non-bank		26,46		Loan from non-bank financial institution
Pihak ketiga	697.862.861		584.328.133	Third parties
Pihak berelasi	1.372.013.613	44	1.160.435.133	Related parties
Liabilitas pajak tangguhan	86.843.304	23f	231.128.682	Deferred tax liabilities
Pendapatan diterima di muka jangka panjang	4.192.970.146	27	4.544.771.276	Long-term unearned revenue
Liabilitas jangka panjang lainnya	838.428.454	28,44,45,46	1.126.588.038	Other long-term liabilities
Liabilitas imbalan kerja	6.269.173.328	29	5.769.306.844	Employee benefit liabilities
Total Liabilitas Jangka Panjang	53.325.896.967		55.597.281.447	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	71.499.850.517		75.545.885.131	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B				Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively
Modal dasar - 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham Seri B				Authorized capital - 156,000,000 shares as of December 31, 2022 and 2023, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 155,999,999 Series B shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 40.575.583 saham Seri B	40.575.584.000	30	40.575.584.000	Issued and fully paid - 40,575,584 shares as of December 31, 2023 and 2022 consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 40,575,583 Series B shares
Modal donasi	26.825.982	31	26.825.982	Donated capital
Tambahan modal disetor	(33.358.048.450)	32	(33.358.048.450)	Additional paid-in capital
Komponen ekuitas lainnya	1.466.121		1.466.121	Other equity component
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	836.905.071	1b,33	836.905.071	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	34.296.140.473		31.900.794.522	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	4.964.897.779		4.915.321.447	Unappropriated
Penghasilan komprehensif lain	(2.373.018.577)	35	(3.774.159.697)	Other comprehensive income
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - neto	44.970.752.399		41.124.688.996	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali	1.870.462.759	36	1.680.003.779	Non-controlling interests
Ekuitas - neto	46.841.215.158		42.804.692.775	Equity - net
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	118.341.065.675		118.350.577.906	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years Ended December 31,

	2023	Catatan/ Notes	2022	
Pendapatan operasi	31.018.217.702	37	29.700.604.135	Operating revenues
Pendapatan konstruksi	2.897.789.567	38	2.397.701.575	Construction revenues
Beban operasi	(24.343.231.471)	39	(23.154.429.191)	Operating expenses
Beban konstruksi	(2.897.789.567)	38	(2.397.701.575)	Construction expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	310.596.193	40	568.645.497	Other operating income - net
LABA USAHA	6.985.582.424		7.114.820.441	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	627.295.432	41	380.490.270	Finance income
Beban keuangan	(2.860.119.853)	42	(2.571.042.968)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi	370.377.560	43	302.615.692	Equity in income of associates
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	5.123.135.563		5.226.883.435	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(515.481.368)	23d	(488.229.302)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	4.607.654.195		4.738.654.133	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN BADAN				CORPORATE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(999.545.702)	23d,23e	(958.337.498)	Current
Tangguhan	404.472.770	23d	128.153.222	Deferred
LABA TAHUN BERJALAN	4.012.581.263		3.908.469.857	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti - neto setelah pajak	9.333.500	35	823.295.840	Remeasurements of defined benefit plans - net off tax
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	108.703.163	35	87.470.875	Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive income
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will be reclassified to profit or loss
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(30.153.334)	1f,35	198.045.650	Exchange differences due to financial statements translation
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	1.313.257.791	35	(2.820.468.471)	Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.413.722.383		2.196.813.751	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31,				
	2023	Catatan/ Notes	2022	
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	3.822.122.283		3.772.545.951	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	190.458.980	2c,36	135.923.906	Non-controlling interests
LABA TAHUN BERJALAN	4.012.581.263		3.908.469.857	INCOME FOR THE YEAR
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk	5.223.263.403		2.060.889.845	Owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	190.458.980	2c,36	135.923.906	Non-controlling interests
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	5.413.722.383		2.196.813.751	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	94.198	2w	92.976	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)
LABA PER SAHAM DILUSIAN (nilai penuh)	92.990	2w	91.783	DILUTED EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent entity

Catatan/ Notes	Modal Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Modal Donasi/ Donation Capital	Tambahkan modal Disetor/ Additional paid- in Capital	Komponen Ekuitas Lainnya/ Other Equity Component	Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali/ Difference in value of transactions with non- controlling interest	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lain/Other comprehensive income						Ekuitas - neto/ Equity - net	
						Ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Selisih kurs penjabaran laporan keuangan/ Exchange difference due to financial statement translation	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ Remeasurements of defined benefit plans	Perubahan nilai wajar aset keuangan melalui penghasilan komprehensif lain/ Changes in fair value of financial assets through other comprehensive income	Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas/ Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedge	Neto/ Net	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests		
Saldo per 31 Desember 2021	8.475.067.000	26.825.982	(1.128.322.898)	1.466.121	836.072.934	29.925.514.788	4.434.909.230	304.754.485	(2.213.049.091)	(154.208.985)		40.509.029.566	1.544.079.873	42.053.109.439	Balance as of December 31, 2021
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif	11,32	32.100.517.000	(32.100.517.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Additional capital based on determination of definitive value
Pembagian dividen kas	34	-	-	-	-	-	(1.316.854.000)	-	-	-	-	(1.316.854.000)	-	(1.316.854.000)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	34	-	-	-	-	1.975.279.734	(1.975.279.734)	-	-	-	-	-	-	-	General reserve
Selisih transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	11,32	-	(129.208.552)	-	-	-	-	-	-	-	-	(129.208.552)	-	(129.208.552)	Difference arising from business combination of entities under common control
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	33	-	-	-	832.137	-	-	-	-	-	-	832.137	-	832.137	Difference in value of transactions with non-controlling interest
Penghasilan komprehensif lain	35	-	-	-	-	-	-	198.045.650	823.295.840	87.470.875	(2.820.468.471)	(1.711.656.106)	-	(1.711.656.106)	Other comprehensive income
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	3.772.545.951	-	-	-	-	3.772.545.951	135.923.906	3.908.469.857	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2022	40.575.584.000	26.825.982	(33.358.048.450)	1.466.121	836.905.071	31.900.794.522	4.915.321.447	502.800.135	(1.389.753.251)	(66.738.110)	(2.820.468.471)	41.124.688.996	1.680.003.779	42.804.692.775	Balance as of December 31, 2022
Pembagian dividen kas	34	-	-	-	-	-	(1.377.200.000)	-	-	-	-	(1.377.200.000)	-	(1.377.200.000)	Distribution of cash dividend
Cadangan umum	34	-	-	-	-	2.395.345.951	(2.395.345.951)	-	-	-	-	-	-	-	General reserve
Penghasilan komprehensif lain	35	-	-	-	-	-	-	(30.153.334)	9.333.500	108.703.163	1.313.257.791	1.401.141.120	-	1.401.141.120	Other comprehensive income
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	3.822.122.283	-	-	-	-	3.822.122.283	190.458.980	4.012.581.263	Income for the year
Saldo per 31 Desember 2023	40.575.584.000	26.825.982	(33.358.048.450)	1.466.121	836.905.071	34.296.140.473	4.964.897.779	472.646.801	(1.380.419.751)	41.965.053	(1.507.210.680)	44.970.752.399	1.870.462.759	46.841.215.158	Balance as of December 31, 2023

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023
dan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years Ended December 31,**

	2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	35.444.805.305		31.671.281.588	Cash receipts from customers
Penerimaan pendapatan bunga	147.125.596		132.629.570	Receipt of interest income
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(15.326.373.675)		(14.592.877.976)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(6.373.858.615)		(5.662.070.239)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(1.187.161.753)		(1.396.604.110)	Payment for income taxes
Penerimaan (pembayaran) pajak	(179.477.232)		949.549.254	Tax receipt (payment)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	12.525.059.626		11.101.908.087	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan investasi jangka pendek	653.637.459		2.245.190.808	Withdrawal of short-term investments
Penerimaan dividen	469.784.726		366.126.855	Receipt of dividend
Hasil penjualan aset tetap	3.736.904		37.117.004	Proceed on sales assets
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud	(7.371.717.546)		(6.511.011.701)	Acquisition of fixed assets, investment properties and intangible assets
Penyerahan saham	(40.970.691)		(395.591.435)	Investment in shares
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(6.285.529.148)		(4.258.168.469)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	8.513.257.386	53	1.983.144.166	Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi	(11.074.117.654)	53	(4.221.618.857)	Payment of bank loans and bonds payable
Pembayaran bunga	(2.854.269.807)		(2.512.723.161)	Interest payment
Pembayaran dividen	(1.453.964.849)		(1.316.854.000)	Payment of dividend
Pembayaran liabilitas sewa	(417.597.215)	16,53	(138.892.333)	Payments of lease liabilities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(7.286.692.139)		(6.206.944.185)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(1.047.161.661)		636.795.433	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(59.204.912)		38.456.803	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	13.597.640.823	4	12.922.388.587	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	12.491.274.250	4	13.597.640.823	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (dahulu "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" atau "Pelindo II") ("Perusahaan" atau "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") pada awalnya didirikan sebagai Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II berdasarkan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 15 Tahun 1983 juncto PP No. 5 Tahun 1985. Perum Pelabuhan II merupakan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia.

Berdasarkan PP No. 57 Tahun 1991, Perum Pelabuhan II mengalami pengalihan bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., No. 3 tanggal 1 Desember 1992. Akta pendirian ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4754.HT.01.01. TH.93 tanggal 17 Juni 1993. Sejak terbentuknya Kementerian BUMN pada tahun 1998, Perusahaan berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta No.2 Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., tanggal 9 Februari 2022 tentang perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia (formerly "Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II" or "Pelindo II") ("the Company" or "PT Pelabuhan Indonesia (Persero)") was initially established as Perusahaan Umum ("Perum") Pelabuhan II based on Government Regulation No. 15 of 1983 as amended by Government Regulation No. 5 of 1985. Perum Pelabuhan II was a State-Owned Enterprise ("SOE") under the supervision of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia.

Based on PP No. 57 of 1991, Perum Pelabuhan II underwent a transfer of form to become a Limited Liability Company (Persero). As a follow-up to the PP, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) was established based on Deed of Notary Imas Fatimah, S.H., No. 3 dated December 1, 1992. This establishment deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by Decree no. C2-4754.HT.01.01. TH.93 dated June 17, 1993. Since the formation of the Ministry of SOE in 1998, the Company has been under the guidance of the Ministry of BUMN. The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No.2 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated February 9, 2022 regarding changes in capital structure and changes to the Articles of Association of the Company. The Deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02 Tahun 2022 dated March 1, 2022.

Based on the Notarial Deed No. 09 dated August 21, 2019, the Government of the Republic of Indonesia which in this case represented by the Minister of SOEs to changes the type of shares which originally without series, changed to be consisted of Series A Dwiwarna shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Selain lingkup usaha tersebut di atas, Perusahaan dapat pula mendirikan dan menjalankan usaha lain yang memiliki hubungan dengan usaha kepelabuhanan.

Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi jasa kepelabuhanan, logistik, jasa informasi teknologi, jasa pengerukan, jasa kepelatihan dan lainnya.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") melakukan penggabungan ke dalam Perusahaan, dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1g).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The Company's purposes and objectives are managing and operating port services and optimizing resource utilization owned by the Company to produce competitive and high quality goods and/or services to gain profits in order to increase the Company's value by applying the limited liability company principles.

Other than the above-mentioned scope of activities, the Company may establish and manage other businesses related to port business.

Currently, the Company and its subsidiaries (collectively referred to hereafter as "the Group") are involved in several businesses consisting of port services, logistic, information technology services, dredging services, training services and others.

The Company's head office is located at Gedung Pelindo Tower Jl. Yos Sudarso No. 9 Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta 14230, Indonesia.

The Company's parent and ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.

On October 1, 2021, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") merged to the Company, with the Company as the surviving entity (Note 1g).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Sehubungan dengan penggabungan tersebut di atas, Perusahaan mengelola 4 (empat) Regional yang terdiri dari:

Regional 1

Untuk menjalankan kegiatan operasinya, Regional 1 memiliki 10 (sepuluh) pelabuhan cabang yang terdiri dari Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tembilahan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, dan Kuala Tanjung.

Regional 2

Regional 2 mengelola 12 (dua belas) Cabang Pelabuhan yang terdiri dari Tanjung Priok, Banten, Panjang, Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Pangkal Balam, Sunda Kelapa dan Tanjung Pandan.

Regional 3

Regional 3 mengelola 3 (tiga) kantor sub-regional yang meliputi 16 (enam belas) Terminal Pelabuhan (Cabang) yang terdiri dari:

Sub-regional

Jawa

Cabang/Branch

Tegal, Kalimas, GSN, Kalianget, dan/and
Tanjung Tembaga

Bali Nusra

Benoa, Bima, Celukan Bawang, Maumere,
Waingapu, Kalabahi, Ende-IPPI, dan/and
Labuan Bajo

Kalimantan

Kotabaru, Pulang Pisau, dan/and Batulicin

Sub-region

Java

Bali Nusra

Kalimantan

Regional 4

Regional 4 mengelola 19 (sembilan belas) cabang yang terdiri dari Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Sorong, Ambon, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Kendari, Bontang, Nunukan, Biak, Manokwari, Tanjung Redeb, Gorontalo, Tolitoli, Fakfak dan Manado.

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

In relation to the merger as mentioned above, the Company manages 4 (four) Regions as follows:

Region 1

In providing its services, Region 1 has 13 (thirteen) port branches as follows Belawan, Dumai, Tanjungpinang, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Tembilahan, Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, and Kuala Tanjung.

Region 2

Region 2 manages 12 (twelve) Port Branches as follows Tanjung Priok, Banten, Panjang, Teluk Bayur, Pontianak, Palembang, Bengkulu, Jambi, Cirebon, Pangkal Balam, Sunda Kelapa and Tanjung Pandan.

Region 3

Region 3 manages 3 (three) regional offices which includes 16 (sixteen) Port Terminals (Branches) as follows:

Sub-region

Jawa

Bali Nusra

Kalimantan

Region 4

Region 4 manages 19 (nineteen) branches as follows Makassar, Balikpapan, Samarinda, Bitung, Sorong, Ambon, Jayapura, Tarakan, Pantoloan, Kendari, Bontang, Nunukan, Biak, Manokwari, Tanjung Redeb, Gorontalo, Tolitoli, Fakfak and Manado.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan:

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tanggal 7 Mei 2008.
- b. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, tanggal 20 Oktober 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2015.
- c. Surat Menteri Perhubungan No. HK.003/1/11. Phb 2011 tanggal 6 Mei 2011 perihal Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran terhadap PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero).
- d. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.
- e. Peraturan Menteri Perhubungan No. 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan, dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121 Tahun 2018.
- f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya antara Pemerintah dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 166 Tahun 2015.
- g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
- h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- i. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations:

- a. Act No. 17 Tahun 2008 regarding Shipping dated May 7, 2008.
- b. Government Regulation No. 61 Tahun 2009 regarding Port dated October 20, 2009, as amended by Government Regulation No. 64 Year 2015.
- c. Minister of Transportation's Letter No. HK.003/1/11. Phb 2011 dated May 6, 2011 regarding the application of Act No. 17 Tahun 2008 for Shipping Affairs for PT Pelabuhan Indonesia I, II, III and IV (Persero).
- d. Government Regulation No. 15 Tahun 2016 regarding Type and Tariff on Non-Tax Revenues types that apply to the Ministry of Transportation.
- e. Regulation of the Minister of Transportation No. 72 Tahun 2017 on Types, Structures, Classes, and Mechanisms for Determining Port Services Rates as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 121 Tahun 2018.
- f. Regulation of the Minister of Transportation No. 15 Tahun 2015 on Concessions and Other Forms of Cooperation between the Government and Business Entity Ports Sector as amended by the Regulation of the Minister of Transportation No. 166 Tahun 2015.
- g. Regulation of the Minister of Transportation No. 57 Tahun 2020 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Transportation No. 51 Tahun 2015 concerning the Operation of Seaports.
- h. Regulation of the Minister of Transportation No. 77 Tahun 2016 on Implementation Guidelines Type and Tariff for Non Tax Revenue that apply At the Directorate General of Sea Transportation.
- i. Decree of the Minister of Transportation of Republic Indonesia No.KP 133 Tahun 2011 dated March 2, 2011 regarding issuance of business permit to PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) as a Port Operation Entity ("BUP").

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Berikut adalah ketentuan kepelabuhanan dan perizinan signifikan sehubungan dengan operasional pelabuhan: (lanjutan)

- j. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 936 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebagai BUP.
- k. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1121 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- l. Keputusan Menteri Perhubungan No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan ("BUP").
- m. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 603 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- n. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 27 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.
- o. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 730 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) untuk Menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Perairan Pandu Pelabuhan Laut dan Terminal Khusus Tertentu.
- p. Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ("NIB") kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditetapkan tanggal 25 September 2018.
- q. Perjanjian konsesi (Catatan 48).

1. GENERAL (continued)

a. Establishment and General Information (continued)

The following are significant port regulations and permits in relation to port operations: (continued)

- j. Decision of Minister of Transportation No. KP 936 Tahun 2012 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as BUP.
- k. Decision of Minister of Transportation No. KP 1121 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- l. Decree of Minister of Transportation No. 10/1/30-Pelabuhan/PMDN/2018 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) as Port Operation Entity ("BUP").
- m. Decree of Minister of Transportation No. KP 603 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- n. Decision of Minister of Transportation No. KP 27 Tahun 2011 regarding the Granting of Operation Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) as Port Operation Entity.
- o. Decision of Minister of Transportation No. KP 730 Tahun 2012 regarding Granting of Permit to PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) to Conduct Pilotage Service on Sea Port and Certain Special Terminal.
- p. The Government of the Republic of Indonesia c.q OSS Organizing Management Institution based on the provisions of Article 24 paragraph 1 of government regulation number 24 year 2018 concerning electronic integrated business licensing services ("NIB") to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) which are set on September 25, 2018.
- q. Concession agreement (Note 48).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-34/MBU/02/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.11 tanggal 14 Maret 2023 dan SK-101/MBU/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No.01 tanggal 5 Juni 2023, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

31 Desember 2023

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama/
Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Agus Suhartono

Sudung Situmorang
Arif Toha Tjahjagama
Didi Sumedi
Jodi Mahardi
Heru Sukanto
Muchtari Luthfi Mutty

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan
Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum
Direktur Strategi
Direktur Investasi
Direktur Pengelola

Arif Suhartono
Hambra
Mega Satria
Ihsanuddin Usman
Prasetyo
Boy Robyanto
Putut Sri Muljanto

1. GENERAL (continued)

**b. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees**

Board of Commissioners and Directors

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-34/MBU/02/2023 dated February 22, 2023 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.11 dated March 14, 2023 and No. SK 101/MBU/05/2023 dated May 19, 2023 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.01 dated June 05, 2023, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commissioners and Directors as follows:

December 31, 2023

Board of Commissioners

Acting President/Independent
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Vice President Director
Director of Finance
Director of Human Resources and
General Affair
Strategy Director
Investment Director
Managing Director

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit,
Sekretaris Perusahaan dan Karyawan
(lanjutan)**

Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-206/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn No. 15 tanggal 17 Oktober 2022, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:
31 Desember 2022

Dewan Komisaris

Plt. Komisaris Utama/
Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Marsetio
Arif Toha Tjahjagama
Didi Sumedi
Sudung Situmorang
Antonius Rainier Haryanto
Heru Sukanto
Muchtar Luthfi Mutty

Direksi

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Keuangan dan
Manajemen Risiko
Direktur Sumber Daya
Manusia dan Umum
Direktur Strategi
Direktur Investasi
Direktur Pengelola

Arif Suhartono
Hambra
Mega Satria
Ihsanuddin Usman
Prasetyo
Boy Robyanto
Putut Sri Muljanto

Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan

Susunan Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua
Wakil Ketua
Anggota
Anggota

Heru Sukanto
Didi Sumedi
Ahmad Zakie Mubarrok
Sofia Chairunnisa

Sekretaris Perusahaan

Ali Mulyono

Karyawan

Total karyawan tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebanyak 9.494 dan 9.790 karyawan (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

**b. Board of Commissioners, Directors, Audit
Committee, Corporate Secretary and
Employees (continued)**

**Board of Commissioners and Directors
(continued)**

Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-206/MBU/09/2022 dated September 20, 2022 which stated on Notarial Deed Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No.15 dated October 17, 2022, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commissioners and Directors as follows:
December 31, 2022

Board of Commissioners

Acting President/Independent
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Vice President Director
Director of Finance and Risk
Management
Director of Human Resources and
General Affair
Strategy Director
Investment Director
Managing Director

Audit Committee and Corporate Secretary

The Company's Audit Committee and Corporate Secretary as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Audit Committee

Head
Deputy Head
Member
Member

Corporate Secretary

Employees

Total permanent employees of the Group as of December 31, 2023 and 2022 are 9,494 and 9,790 employees, respectively (unaudited).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan langsung/ Direct ownership</u>							
PT Pelindo Terminal Petikemas ("SPTP")	Surabaya	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/ Provision and operation of maritime services	99,99%	99,99%	2013	18.713.691.972	14.978.153.302
PT Pelindo Jasa Maritim ("SPJM")	Makassar	Penyelenggaraan dan pengusahaan jasa maritim/ Provision and operation of maritime services	99,99%	99,99%	2021	5.845.836.809	4.824.128.424
PT Pelindo Multi Terminal ("SPMT")	Medan	Pelayanan jasa terminal non-petikemas/ Non-container terminal services	99,98%	99,98%	2021	4.316.987.722	4.483.925.777
PT Pelindo Solusi Logistik ("SPSL")	Jakarta	Jasa logistik/Logistic services	99,98%	99,98%	2021	19.226.350.194	19.171.437.957
PT Prima Husada Cipta Medan ("PHCM")	Medan	Layanan jasa kesehatan/ Health care services	99,69%	99,69%	2016	57.449.938	59.751.417
PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDII")	Jakarta	Sistem informasi/ Information system	51,00%	51,00%	1995	39.517.393	48.170.376
PT Pelabuhan Indonesia Investama ("PII")	Jakarta	Investasi pasar modal dan konsultan bisnis/ Investment in stock exchange and business consultant	99,00%	99,00%	2017	1.136.182.103	1.083.767.903
PT Integrasi Logistik Cipta Solusi ("ILCS")	Jakarta	Sistem informasi/ Information system	99,00%	99,00%	2012	312.341.922	256.625.377
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia ("PMLI")	Jakarta	Jasa pelatihan dan pendidikan maritim dan logistik/Maritime and logistic education services	99,00%	99,00%	2013	130.534.953	144.527.982
PT Pelindo Daya Sejahtera ("PDS")	Surabaya	Layanan penyedia jasa tenaga kerja/ Human resources services	90,00%	90,00%	2008	318.619.082	357.487.370
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPTP</u>							
PT IPC Terminal Petikemas ("IPC TPK")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ Container and multicargo terminal	99,00%	99,00%	2013	1.657.747.317	1.504.100.163
PT Prima Terminal Petikemas ("PTP1")	Medan	Layanan terminal petikemas/ Container port services	99,70%	100,00%	2013	3.219.526.261	3.128.596.698
PT Terminal Teluk Lamong ("TTL")	Surabaya	Layanan terminal petikemas dan curah kering/ Container And dry bulk port services	99,50%	99,50%	2013	784.217.141	767.009.334
PT Terminal Petikemas Surabaya ("TPS")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ Container port services	99,50%	99,50%	1999	2.533.702.957	2.444.133.471
PT Berlian Jasa Terminal Indonesia ("BJTI")	Surabaya	Layanan terminal petikemas/ Container port services	96,84%	96,84%	2002	5.090.674.893	5.073.110.916
PT Kaltim Kariangau Terminal ("KKT")	Balikpapan	Layanan terminal petikemas/ Container port service	50,00%	50,00%	2012	219.707.058	193.975.803
PT Prima Multi Terminal ("PMT") ^{vi)}	Medan	Terminal petikemas dan konvensional/ Container and multicargo terminal	97,73%	97,73%	2014	3.840.359.090	3.705.299.176

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPJM</u>							
PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia ("JPPI")	Jakarta	Jasa peralatan pelabuhan/Port equipment services	99,00%	99,00%	2012	256.166.225	227.340.873
PT Jasa Armada Indonesia Tbk ("JAI") ⁱ⁾	Jakarta	Penyedia jasa transportasi laut/ Ship transportation services provider	76,89%	76,89%	2013	1.522.134.613	1.488.208.065
PT Energi Pelabuhan Indonesia ("EPI")	Jakarta	Penyedia energi listrik dan air bersih/ Electricity provider and treated water	55,00%	55,00%	2012	202.038.387	182.774.864
PT Pengerukan Indonesia ("Rukindo")	Jakarta	Pengerukan alur/ Dredging	99,91%	99,91%	1991	322.325.698	381.249.720
PT Pelindo Marine Service ("PMS")	Surabaya	Layanan jasa kapal/ Shipping services	98,23%	98,23%	2011	2.554.757.145	2.136.902.988
PT Equiport Inti Indonesia ("EII")	Makassar	Jasa pemeliharaan/ Maintenance services	99,29%	99,29%	2012	116.621.996	105.766.256
PT Berkah Industri Mesin Angkat ("BIMA") ^{vi)}	Surabaya	Jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan/ Port equipment equipment maintenance and repair service	90,00%	90,00%	2015	320.603.667	234.022.019
PT Lamong Energi Indonesia ("LEGI") ^{vii)}	Surabaya	Penyediaan energi/ Energy provider	99,00%	99,00%	2014	245.375.525	189.725.126
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPMT</u>							
PT Pelabuhan Tanjung Priok ("PTPR")	Jakarta	Terminal petikemas dan konvensional/ container and multicargo terminal	99,00%	99,00%	2013	1.071.871.432	1.338.970.877
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk ("IKT") ⁱⁱ⁾	Jakarta	Terminal kendaraan/ Car terminal	71,28%	71,28%	2012	1.788.314.387	2.191.828.371
PT Terminal Curah Utama ("TCU")	Semarang	Jasa pelayanan curah cair dan gas/Liquid bulk and gas services	51,00%	100,00%	2015	7.558.425	373.224
<u>Dimiliki melalui/Owned through SPSL</u>							
PT Akses Pelabuhan Indonesia ("API")	Jakarta	Penyertaan saham pada proyek Jalan Tol/Investment in Toll and access Road Project	99,68%	99,68%	2014	12.740.434.429	12.501.180.421
PT Menara Maritim Indonesia ("MMI")	Jakarta	Jasa pengelola properti/Building management service	99,99%	99,99%	2018	975.950.321	988.445.644
PT Prima Pengembangan Kawasan ("PPK")	Medan	Pengembangan kawasan/Region developer	90,00%	90,00%	2015	901.110.844	902.622.818
PT Prima Indonesia Logistik ("PIL")	Medan	Jasa logistik/Logistic service	99,67%	99,67%	2014	351.398.270	331.280.719
PT Multi Terminal Indonesia ("MTI") ^{v)}	Jakarta	Jasa logistik/Logistic services	99,78%	99,00%	2002	870.683.654	908.266.379
PT Nusantara Terminal Services ("NTS") ^{vii)}	Makassar	Bongkar muat/Loading unloading	-	99,16%	2013	-	90.774.652
<u>Dimiliki melalui/Owned through PDS</u>							
PT Tanjung Emas Daya Sejahtera ("TEDS")	Surabaya	Kegiatan tally/ Tally activity	99,00%	99,00%	2014	27.476.852	25.971.645

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>							
<u>Dimiliki melalui/Owned through PTPR</u>							
PT Pelindo 3 Terminal Peti Kemas ("P3TPK") ^(a)	Surabaya	Jasa terminal petikemas/ Container port services	100,00%	100,00%	2016	678.882	675.207
<u>Dimiliki melalui/Owned through BJT</u>							
PT Berkah Manyar Sejahtera ("BMS")	Surabaya	Layanan terminal/ Port services	60,00%	60,00%	2012	1.832.548.639	1.896.823.463
PT Pelindo Properti Indonesia ("PPI3")	Surabaya	Pengelolaan properti/ Property management	99,93%	99,93%	2014	231.604.656	198.754.433
<u>Dimiliki melalui/Owned through PMS</u>							
PT Alur Pelayaran Barat Surabaya ("APBS")	Surabaya	Jasa pengerukan, reklamasi dan pengelolaan alur pelayaran/ Dredging, reclamation service and management of shipping channel	93,00%	93,00%	2014	592.244.676	555.094.927
PT Pelindo Energi Logistik ("PEL")	Surabaya	Perdagangan jasa/ Trading services	98,90%	98,90%	2014	630.154.381	611.636.947
PT Berkah Multi Cargo ("BMC")	Surabaya	Jasa angkutan multi moda/ Multi-modal transportation services	99,80%	99,80%	2015	103.265.557	117.567.958
<u>Dimiliki melalui/Owned through API</u>							
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways ("CTP") (Catatan 1d/Note 1d)	Jakarta	Pengelola jalan tol/ Toll road operator	99,998%	99,998%	2006	12.717.009.033	12.443.904.147
<u>Dimiliki melalui/Owned through PIL</u>							
PT Prima Multi Peralatan ("PMP")	Medan	Jasa pemeliharaan dan perbaikan/ Equipment maintenance and repair services	99,00%	99,00%	2019	74.980.484	67.850.590
<u>Dimiliki melalui/Owned through MTI</u>							
PT Intan Sejahtera Utama ("ISMA")	Makassar	Penyediaan jasa ketenagakerjaan/ Employment services provider	99,60%	99,60%	2019	48.518.824	60.384.324

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entites with effective percentage of ownership as follows: (continued)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
<u>Kepemilikan Tidak Langsung/Indirect Ownership (lanjutan/continued)</u>							
<u>Entitas asosiasi/Associate entities</u>							
PT Rumah Sakit Pelabuhan ("RSP") ^{a)}	Jakarta	Rumah sakit/ Hospital	32,88%	32,88%	1999	534.797.409	576.419.708
PT Ambang Barito Nusapersada ("Ambapers")	Banjarmasin	Pengelolaan alur pelayanan Sungai Barito/ Management of Shipping Barito River	40,00%	40,00%	2004	190.932.072	176.137.893
PT Jasa Marga Bali Tol ("JBT")	Bali	Pengelolaan jalan tol/ Toll road operator	13,86%	13,86%	2011	1.940.424.000	1.909.164.000
PT Pelindo Husada Citra ("PHC")	Surabaya	Layanan jasa kesehatan/ Health care services	31,73%	31,73%	1999	459.313.800	450.973.393
PT Jakarta International Container Terminal ("JICT") (Catatan 49e/ Note 49e) ^{a)}	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	51,00%	51,00%	1999	15.681.892.722	17.437.073.372
<u>Dimiliki melalui/Owned through PTP1</u>							
PT Belawan New Container Terminal (BNCT) ^{b)}	Medan	Terminal petikemas/ Container Terminal	51,00%	-	2023	12.331.509	-
<u>Dimiliki melalui/Owned through IPC TPK</u>							
PT New Priok Container Terminal One ("NPCT1") (Catatan 49c/ Note 49c) ^{a)}	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	51,00%	51,00%	2014	3.614.560.817	3.765.167.657
<u>Dimiliki melalui/Owned through BJT</u>							
PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera ("BKMS")	Surabaya	Pengelolaan kawasan industri JIPE/JIPE industrial estate management	40,00%	40,00%	2012	9.876.598.590	8.068.040.527
PT Terminal Nilam Utara ("TNU")	Surabaya	Layanan terminal curah cair dan gas/ Liquid and gas bulk terminal service	40,00%	40,00%	2013	387.995.130	383.033.880
PT Energi Manyar Sejahtera ("EMS")	Surabaya	Jasa pembangkit listrik/ Power plant service	30,00%	30,00%	2015	1.101.762	1.101.762
PT Prima Citra Nutrisi ("PCN")	Surabaya	Layanan jasa catering/ Catering service	30,00%	30,00%	2016	7.217.153	13.462.006
<u>Dimiliki melalui/Owned through PEL</u>							
PT Lamong Nusantara Gas ("LNG")	Surabaya	Pembangunan, pengelolaan dan pengoperasian Terminal LNG Jawa Timur/ Development, management and operation of LNG terminal in East Java	49,00%	49,00%	2019	150.358.107	148.980.961
<u>Dimiliki melalui/Owned through PIL</u>							
PT Prima Tangki Indonesia ("PTI")	Medan	Perdagangan dan pergudangan/ Trading and warehousing	20,00%	20,00%	2013	220.351.640	216.768.273

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Operasi Bersama (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki entitas anak, entitas asosiasi dan operasi bersama dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Perusahaan/ Company name	Tempat kedudukan/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	% Kepemilikan/% Ownership		Tahun pendirian/ Year of establishment	Total aset sebelum eliminasi/ Total assets before elimination	
			31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022		31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
Operasi Bersama/Joint Operation							
Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja ("TPK Koja") (Catatan 49d/ Note 49d)	Jakarta	Terminal petikemas/ Container terminal	54,91%	54,91%	1994	6.686.387.583	7.100.250.126
Manajemen Kerjasama Operasi Maspion Terminal Kendaraan Koja ("MKO MTKI")	Gresik	Terminal kendaraan/ Car terminal	45,00%	45,00%	2015	3.212.745	2.751.810

- i) Laporan keuangan NPCT1 tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan IPC TPK, karena IPC TPK tidak memiliki pengendalian atas NPCT1.
- ii) Pada bulan Desember 2017, JAI menerbitkan saham baru sebanyak 1.215.506.500 saham atau 23% dari modal ditempatkan dan disetor JAI setelah penawaran umum perdana saham JAI di Bursa Efek Indonesia.
- iii) Pada bulan Juli 2018, IKT menerbitkan saham baru sebanyak 509.147.700 saham atau 28% dari modal ditempatkan dan disetor IKT setelah penawaran umum perdana saham IKT di Bursa Efek Indonesia.
- iv) Laporan keuangan BNCT tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan PTP1, karena PTP1 tidak memiliki pengendalian atas BNCT.
- v) Pada tanggal 1 Oktober 2023, MTI menggabungkan diri dengan NTS, dimana MTI sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha.
- vi) Pada tanggal 1 Oktober 2023, terdapat pengalihan 90% saham BIMA milik BJTI kepada SPJM.
- vii) Pada tanggal 1 November 2023, terdapat pengalihan saham LEGI milik TTL kepada SPJM.
- viii) Pada tanggal 30 Januari 2023, terdapat pengalihan 97,73% saham PMT milik Pelindo kepada SPTP.
- ix) Pada tanggal 18 April 2023, terdapat pengalihan 100% saham P3TPK milik TPS kepada PTPR.
- x) Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan mengakuisisi saham JICT dari Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) sebanyak 9.300.917 lembar saham sehingga kepemilikan saham JICT oleh Perusahaan menjadi sebesar 51%. Laporan keuangan JICT tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perusahaan karena Perusahaan tidak memiliki pengendalian atas JICT.

1. GENERAL (continued)

c. Subsidiaries, Associates and Joint Operation Entities (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Company has subsidiaries, associates and joint operation entities with effective percentage of ownership as follows: (continued)

- i) The financial statements of NPCT1 is not consolidated into IPC TPK's financial statements, due to IPC TPK has no control over NPCT1.
- ii) On December 2017, JAI issued new shares of 1,215,506,500 shares or 23% of JAI's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.
- iii) On July 2018, IKT issued new shares of 509,147,700 shares or 28% of IKT's issued and paid-up capital subsequent to the initial public offering at Indonesia Stock Exchange.
- iv) The financial statement of BNCT is not consolidated in to PTP1's financial statement, due to PTP1 has no control over BNCT.
- v) On October 1, 2023, MTI agreed to merge with NTS, where the MTI as the surviving entity.
- vi) On October 1, 2023, there was a transfer of 90% of BIMA shares owned by BJTI to SPJM.
- vii) On November 1, 2023, there was a transfer of 99% of LEGI shares owned by TTL to SPJM.
- viii) On January 30, 2023, there was a transfer of 97.73% of PMT shares owned by Pelindo to SPTP.
- ix) On April 18, 2023, there was a transfer of 100% of P3TPK shares owned by TPS to PTPR.
- x) On March 30, 2022, the Company acquired JICT shares from Hutchison Ports Jakarta Pte Ltd (HPJ) amounting to 9,300,917 shares, therefore, JICT shares ownership by the Company amounting to 51%. The financial statements of JICT is not consolidated into the Company's financial statements due to the Company has no control over JICT.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru

SPTP

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPTP:

- Saham BJTI sebanyak 1.079.138 lembar saham atau setara dengan 96,84% dengan nilai nominal Rp1.079.138.000.000 (nilai penuh).
- Saham TPS sebanyak 254.489.274 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp127.244.637.000 (nilai penuh).
- Saham TTL sebanyak 134.325 lembar saham atau setara dengan 99,50% dengan nilai nominal Rp134.325.000.000 (nilai penuh).
- Saham PTP1 sebanyak 855.724.000 lembar saham atau setara dengan 70,00% dengan nilai nominal Rp855.724.000.000 (nilai penuh).
- Saham KKT sebanyak 125 lembar saham atau setara dengan 50,00% dengan nilai nominal Rp62.500.000 (nilai penuh).
- Saham IPC TPK sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1048/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPTP menerbitkan 1.079.138 saham baru, 127.244 saham baru, 134.325 saham baru, 855.724 saham baru, 62 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT dan IPC TPK dari Perusahaan kepada SPTP.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares

SPTP

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPTP:

- BJTI shares amounting to 1,079,138 shares or equivalent to 96.84% with nominal value of Rp1,079,138,000,000 (full amount).
- TPS shares amounting to 254,489,274 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp127,244,637,000 (full amount).
- TTL shares amounting to 134,325 shares or equivalent to 99.50% with nominal value of Rp134,325,000,000 (full amount).
- PTP1 shares amounting to 855,724,000 shares or equivalent to 70.00% with nominal value of Rp855,724,000,000 (full amount).
- KKT shares amounting to 125 shares or equivalent to 50.00% with nominal value of Rp62,500,000 (full amount).
- IPC TPK shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1048/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPTP issued 1,079,138 new shares, 127,244 new shares, 134,325 new shares, 855,724 new shares, 62 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of BJTI, TPS, TTL, PTP1, KKT and IPC TPK shares from the Company to SPTP, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan
Penerbitan Saham Baru (lanjutan)**

SPTP (lanjutan)

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 8 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPTP melakukan penerbitan 5.041.993 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp5.041.993.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPTP. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

SPJM

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham JAI sebanyak 4.063.504.600 lembar saham atau setara dengan 76,89% dengan nilai nominal Rp406.350.460.000 (nilai penuh).
- Saham JPPI sebanyak 2.475.000 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).
- Saham EII sebanyak 28.050 lembar saham atau setara dengan 99,29% dengan nilai nominal Rp28.050.000.000 (nilai penuh).

1. GENERAL (continued)

**d. Transfer of Shares Ownership and Issuance
of New Shares (continued)**

SPTP (continued)

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 8 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPTP performed issuance of 5,041,993 new shares with nominal value of Rp5,041,993,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPTP. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232830 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

SPJM

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM:

- *JAI shares amounting to 4,063,504,600 shares or equivalent to 76.89% with nominal value of Rp406,350,460,000 (full amount).*
- *JPPI shares amounting to 2,475,000 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).*
- *EII shares amounting to 28,050 shares or equivalent to 99.29% with nominal value of Rp28,050,000,000 (full amount).*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Pada tanggal 1 November 2023, saham-saham milik TTL dialihkan kepada SPJM:

- Saham LEGI sebanyak 92.109 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp92.109.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPJM:

- Saham EPI sebanyak 2.400.000 lembar saham atau setara dengan 55,00% dengan nilai nominal Rp24.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PMS sebanyak 305.000.000 lembar saham atau setara dengan 98,23% dengan nilai nominal Rp305.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham Rukindo sebanyak 611.622 lembar saham atau setara dengan 99,91% dengan nilai nominal Rp611.622.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-1050/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPJM menerbitkan 406.350 saham baru, 24.750 saham baru, 28.050 saham baru, 24.000 saham baru, 305.000 saham baru dan 611.622 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham JAI, JPPI, EII, EPI, PMS dan Rukindo dari Perusahaan kepada SPJM.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

On November 1, 2023, the following shares owned by TTL were transferred to SPJM:

- LEGI shares amounting to 92,109 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp92,109,000,000 (full amount).

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPJM:

- EPI shares amounting to 2,400,000 shares or equivalent to 55.00% with nominal value of Rp24,000,000,000 (full amount).
- PMS shares amounting to 305,000,000 shares or equivalent to 98.23% with nominal value of Rp305,000,000,000 (full amount).
- Rukindo shares amounting to 611,622 shares or equivalent to 99.91% with nominal value of Rp611,622,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1050/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPJM issued 406,350 new shares, 24,750 new shares, 28,050 new shares, 24,000 new shares, 305,000 new shares and 611,622 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of JAI, JPPI, EII, EPI, PMS and Rukindo shares from the Company to SPJM, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPJM (lanjutan)

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 7 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPJM melakukan penerbitan 1.318.372 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.318.372.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPJM. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232879 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

SPMT

Pada tanggal 3 Januari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPMT:

- Saham IKT sebanyak 1.296.144.749 lembar saham atau setara dengan 71,28% dengan nilai nominal Rp129.614.474.900 (nilai penuh).
- Saham PTPR sebanyak 24.750 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui surat No. S-1049/MBU/12/2021 pada tanggal 30 Desember 2021. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPJM (continued)

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 7 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPJM performed issuance of 1,318,372 new shares with nominal value of Rp1,318,372,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPJM. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232879 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

SPMT

On January 3, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPMT:

- IKT shares amounting to 1,296,144,749 shares or equivalent to 71.28% with nominal value of Rp129,614,474,900 (full amount).
- PTPR shares amounting to 24,750 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp24,750,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry of SOE through its letter No. S-1049/MBU/12/2021 on December 30, 2021. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPMT (lanjutan)

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPMT menerbitkan 129.614 saham baru dan 24.750 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham IKT dan PTPR dari Perusahaan kepada SPMT.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 3 Januari 2022.

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 9 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPMT melakukan penerbitan 1.151.941 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp1.151.941.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPMT. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPMT (continued)

In relation to such transfer of right of shares, SPMT issued 129,614 new shares and 24,750 new shares for the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of IKT and PTPR shares from the Company to SPMT, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated January 3, 2022.

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 9 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPMT performed issuance of 1,151,941 new shares with nominal value of Rp1,151,941,000 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPMT. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0002173 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL

Pada tanggal 28 Februari 2022, saham-saham milik Perusahaan berikut dialihkan kepada SPSL:

- Saham MTI sebanyak 34.283.150 lembar saham atau setara dengan 99,00% dengan nilai nominal Rp17.141.575.000 (nilai penuh).
- Saham NTS sebanyak 60.240 lembar saham atau setara dengan 99,16% dengan nilai nominal Rp60.240.000.000 (nilai penuh).
- Saham PIL sebanyak 204.820 lembar saham atau setara dengan 99,67% dengan nilai nominal Rp204.820.000.000 (nilai penuh).
- Saham PPK sebanyak 759.000 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp759.000.000.000 (nilai penuh).
- Saham PLI (dahulu SPSL) sebanyak 101.898 lembar saham atau setara dengan 99,90% dengan nilai nominal Rp101.898.000.000 (nilai penuh).

Pengalihan saham tersebut telah melalui persetujuan Kementerian BUMN melalui suratnya No. S-133/MBU/02/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Berdasarkan surat tersebut, nilai pengambilalihan saham selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan valuasi nilai wajar oleh konsultan independen.

Sehubungan dengan pengalihan hak atas saham tersebut, SPSL menerbitkan 1.714.157 saham baru, 6.024.000 saham baru, 20.482.000 saham baru, 75.900.000 saham baru dan 10.189.800 saham baru untuk Perusahaan dengan nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh) per saham masing-masing sebagai kompensasi pengalihan saham MTI, NTS, PIL, PPK dan PLI dari Perusahaan kepada SPSL.

Peningkatan modal dasar, penerbitan saham baru serta pengalihan saham tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 1 Maret 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL

On February 28, 2022, the following shares owned by the Company were transferred to SPSL:

- MTI shares amounting to 34,283,150 shares or equivalent to 99.00% with nominal value of Rp17,141,575,000 (full amount).
- NTS shares amounting to 60,240 shares or equivalent to 99.16% with nominal value of Rp60,240,000,000 (full amount).
- PIL shares amounting to 204,820 shares or equivalent to 99.67% with nominal value of Rp204,820,000,000 (full amount).
- PPK shares amounting to 759,000 shares or equivalent to 90.00% with nominal value of Rp759,000,000,000 (full amount).
- PLI (formerly SPSL) shares amounting to 101,898 shares or equivalent to 99.90% with nominal value of Rp101,898,000,000 (full amount).

The transfer of shares has been approved by the Ministry SOE through its letter No. S-133/MBU/02/2022 on February 25, 2022. Based on the letter, the shares transfer value need to be followed by adjustment based on the fair value valuation by independent consultant.

In relation to such transfer of right of shares, SPSL issued 1,714,157 new shares, 6,024,000 new shares, 20,482,000 new shares, 75,900,000 new shares and 10,189,800 new shares for the Company with nominal value of Rp10,000 (full amount) per share as compensation for the transfer of MTI, NTS, PIL, PPK and PLI shares from the Company to SPSL, respectively.

The increase of authorized capital, the issuance of new shares and the transfers of shares has been notified to and approved by The Ministry of Law and Human Rights dated March 1, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Menindaklanjuti surat Kementerian BUMN di atas, berdasarkan Akta No. 6 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, tanggal 27 April 2022, SPSL melakukan penerbitan 77.270.475 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp772.704.750 yang seluruhnya diambil bagian oleh Perusahaan sebagai kompensasi penyesuaian nilai wajar saham entitas anak yang dialihkan dari Perusahaan ke SPSL. Nilai wajar saham entitas anak didasarkan pada laporan KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 31 Maret 2022. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0232765 tanggal 27 April 2022.

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi pengalihan saham tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan.

PTP1

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 26 Juli 2022 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, SPTP mengakuisisi saham seluruh PTP1 milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Utama Karya (Persero) masing-masing sebanyak 183.370.000 saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp187.954.250. Dengan demikian, kepemilikan SPTP pada PTP1 mengalami peningkatan dari 70,00% menjadi 100,00%. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0036981 Tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022.

SPTP telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Utama Karya (Persero) pada tanggal 25 Juli 2022.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

SPSL (continued)

To follow up the letter from the Ministry of SOE above, based on Deed No. 6 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, dated April 27, 2022, SPSL performed issuance of 77,270,475 new shares with nominal value of Rp772,704,750 which taken fully by the Company as a compensation for fair value adjustment of the subsidiaries' shares that were transferred from the Company to SPSL. The fair value of subsidiaries' shares were based on KJPP Suwendho, Rinaldy dan Rekan report, an independent appraisal, dated March 31, 2022. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.03-0232765 Tahun 2022 dated April 27, 2022.

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the transfers of shares is recognized using the pooling of interest method.

PTP1

Based on deed No. 10 dated July 26, 2022 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, SPTP acquired all PTP1 shares owned by PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Utama Karya (Persero) amounting to 183,370,000 shares, respectively, with purchase price of Rp187,954,250, respectively. Therefore, SPTP ownerships in PTP1 increased from 70.00% to 100.00%. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0036981 Year 2022 dated July 26, 2022.

SPTP has made payment of the shares transfer to PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and PT Utama Karya (Persero) on July 25, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan
Penerbitan Saham Baru (lanjutan)**

PTP1 (lanjutan)

Pengalihan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di PTP1 diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan perhitungan sebagai berikut:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ Amount recognized on transaction	
Peningkatan aset neto	302.382.814	<i>Increase in net assets</i>
Imbalan yang dialihkan	375.908.500	<i>Consideration paid</i>
Tambahan modal disetor	(73.525.686)	<i>Additional paid-in capital</i>

PMT

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya:

- Menerima dan menyetujui penambahan modal dasar dari semula Rp3.177.000.000 yang terbagi atas 3.177.000 saham menjadi Rp9.001.395.800 yang terbagi atas 56.077.000 saham, dengan rincian:
 - Saham seri A sejumlah 3.177.000 saham dengan nilai nominal Rp3.177.000.000 (Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham).
 - Saham seri B sejumlah 52.900.000 saham dengan nilai nominal Rp5.824.395.800 (Rp110.102 (nilai penuh) per saham).

1. GENERAL (continued)

**d. Transfer of Shares Ownership and Issuance
of New Shares (continued)**

PTP1 (continued)

The transfers of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position with calculation as follows:

PMT

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others:

- Received and approved the increase in authorized capital from the original Rp3,177,000,000 divided into 3,177,000 shares to Rp9,001,395,800 divided into 56,077,000 shares, with details:
 - Series A shares totaling 3,177,000 shares with a nominal value of Rp3,177,000,000 (Rp1,000,000 (full amount) per share).
 - Series B shares totaling 52,900,000 shares with a nominal value of Rp5,824,395,800 (Rp110,102 (full amount) per share).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

PMT (lanjutan)

Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, para pemegang saham PMT menyetujui diantaranya: (lanjutan)

- Menerima dan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp1.467.360.000 yang terbagi atas 1.467.360 saham menjadi sebesar Rp4.504.361.049 yang terbagi atas 2 klasifikasi saham:
 - Saham seri A (saham preferen) sejumlah 1.467.360 saham dengan nilai nominal Rp1.467.360.000 yang memiliki hak prioritas untuk menerima tahapan pembayaran dividen terlebih dahulu dari saham seri B.
 - Saham seri B (saham biasa) sejumlah 27.583.523 saham dengan nilai nominal Rp3.037.001.049, yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan dan dibayarkan dengan cara konversi pinjaman menjadi modal sebesar Rp466.878.000 dan setoran tunai sebesar Rp2.570.123.049.
- Menerima dan menyetujui pemberian hak put option kepada PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dimana saham seri A yang dimiliki PT PP (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan dibeli oleh Perusahaan dengan harga nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham ketika berdasarkan hasil valuasi penilai independen sudah mencapai harga nominal tersebut dan tidak lebih dari 7,5% diatas nominal.

Penerbitan saham tersebut di atas memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih sebesar Rp55.682.866 yang timbul atas perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

PMT (continued)

Based on the resolution of PMT's Circular Shareholders meeting dated October 24, 2022 concerning Capital Increase and Amendment to the Company's Articles of Association, PMT's shareholders approved among others: (continued)

- Received and approved the increase in issued and paid-up capital from the original Rp1,467,360,000 divided into 1,467,360 shares to Rp4,504,361,049 divided into 2 classifications of shares:
 - Series A shares (preferred shares) amounting to 1,467,360 shares with a nominal value of Rp1,467,360,000 which have priority rights to receive dividend payment tranches in advance of series B shares.
 - Series B shares (ordinary shares) totaling 27,583,523 shares with a nominal value of Rp3,037,001,049, all of which were subscribed by the Company and paid by way of conversion of loan into capital amounting to Rp466,878,000 and cash deposit amounting to Rp2,570,123,049.
- Received and approved the granting of put option rights to PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk, where the Series A shares owned by PT PP (Persero) Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk will be purchased by the Company with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share when the shares reach that value based on independent appraisal valuation and not more than 7.5% above.

The issuance of shares meet the criteria of business combination of entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control". The difference amounting to Rp55,682,866 resulting from changes in book value of investment after issuance of new shares is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan
Penerbitan Saham Baru (lanjutan)**

TCS

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 5 Desember 2022 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, SPMT mengakuisisi seluruh saham TCS milik BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing sebanyak 1.020 lembar saham dan 980 lembar saham dengan nilai pembelian masing-masing sebesar Rp153.897 dan Rp147.862. Dengan demikian, SPMT memiliki 100% saham TCS. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0088699 tanggal 19 Desember 2022.

SPMT telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada BJTI dan PT Andahanesa Abadi masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 dan 6 Desember 2022.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 2 Mei 2023, dari Dewi Sugina Mulyani, Notaris di Jakarta Utara yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0024425.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Mei 2023 TCS melakukan perubahan data perseroan menjadi PT Terminal Curah Utama ("TCU").

Berdasarkan akta No. 66 tanggal 25 Mei 2023 dari Yatiningsih, S.H., M.H., Notaris di Surabaya, SPMT mengalihkan 980 lembar saham atau 49% kepemilikan atas TCU kepada PT Indonesia Bulk Terminal dengan nilai penjualan sebesar Rp221.794, sehingga kepemilikan SPMT pada TCU menjadi 51%. Akta tersebut telah diberitahunkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09.0121757 tanggal 25 Mei 2023.

1. GENERAL (continued)

**d. Transfer of Shares Ownership and Issuance
of New Shares (continued)**

TCS

Based on Deed No. 10, dated December 5, 2022, of Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, SPMT acquired all TCS shares owned by BJTI and PT Andahanesa Abadi amounting to 1,020 shares and 980 shares, respectively, with purchase price of Rp153,897 and Rp147,862, respectively. Therefore, SPMT owned 100% TCS shares. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0088699, dated December 19, 2022.

SPMT has made payment of the shares transfer to BJTI and PT Andahanesa Abadi on December 5, 2022 and December 6, 2022, respectively.

Based on Deed no. 2, dated May 2, 2023 of Dewi Sugina Mulyani, Notary in North Jakarta which was approved by the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0024425.AH.01.02.TAHUN 2023 dated May 3, 2023 TCS changed the company data to PT Terminal Curah Utama ("TCU").

Based on Deed no. 66 dated May 25, 2023 of Yatiningsih, S.H., M.H., Notary in Surabaya, SPMT transferred 980 shares or 49% ownership of TCU to PT Indonesia Bulk Terminal with a sales value of Rp221,794, which made SPMT's ownership of TCU became 51%. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09.0121757 dated 25 May 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan Penerbitan Saham Baru (lanjutan)

P3TPK

Pada tanggal 18 April 2023, PTPR membeli saham PT Pelindo3 Terminal Petikemas (P3TPK) dari PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), dengan total 500 saham atau 100% dari total saham P3TPK, dengan skema sebagai berikut:

- Penjualan dan pengalihan 495 saham yang dimiliki oleh TPS
- Penjualan dan pengalihan 5 saham yang dimiliki oleh Kopelindo

TPS dan PTPR sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp668.949.930 (nilai penuh) untuk 495 saham. Kopelindo dan PTPR sepakat tentang harga pembelian saham sebesar Rp1.351.414 (nilai penuh) per saham, dengan total harga pembelian Rp6.757.070 (nilai penuh) untuk 5 saham.

PTPR telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada TPS dan Kopelindo pada tanggal 28 April 2023.

CTP

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada tanggal 21 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Ny. Hastuti Nainggolan, S.H., M.Kn, No. 1 tanggal 1 Oktober 2021, API membeli saham CTP yang dimiliki oleh PT Waskita Toll Road (entitas dibawah pengendalian yang sama dan tidak bersifat sementara) sebanyak 1.386.131 lembar saham yang mewakili 55,00% kepemilikan saham di CTP dengan harga beli sebesar Rp2.445.141.067 sehingga kepemilikan API pada CTP mengalami peningkatan dari 45,00% menjadi 100,00%.

API telah melakukan pembayaran atas pengalihan saham tersebut kepada PT Waskita Toll Road pada tanggal 14 Oktober 2021.

1. GENERAL (continued)

d. Transfer of Shares Ownership and Issuance of New Shares (continued)

P3TPK

On April 18, 2023, PTPR purchased shares of PT Pelindo3 Terminal Petikemas from PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) and the Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia (Kopelindo), totaling 500 shares, or 100% of the P3TPK total shares, with the following scheme:

- Sale and transfer of 495 shares owned by TPS
- Sale and transfer of 5 shares owned by Kopelindo

TPS and PTPR agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp668,949,930 (full amount) for the 495 shares. Kopelindo and PTPR agreed on a share purchase price of Rp1,351,414 (full amount) per share, with a total purchase price of Rp6,757,070 (full amount) for the 5 shares.

PTPR has made payment of the shares transfer to TPS and Kopelindo on April 28, 2023.

CTP

Based on the Conditional Sales and Purchase Agreement on July 21, 2021 and The Deed of Shares Sales and Purchase which notarized by the Notarial Deed of Ny. Hastuti Nainggolan S.H., M.Kn, No. 1 dated October 1 2021, API acquired CTP's shares which owned by PT Waskita Toll Road (an entity under common control and is not temporary) amounted to 1,386,131 shares represents 55.00% shares ownership in CTP at a purchase price of Rp2,445,141,067 which made API's ownership in CTP increased from 45.00% to 100.00%.

API has made payment of the shares transfer to PT Waskita Toll Road on October 14, 2021.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**d. Pengalihan Kepemilikan Saham dan
Penerbitan Saham Baru (lanjutan)**

CTP

Pembelian saham CTP sebesar 55,00% tersebut di atas oleh API memenuhi kategori kombinasi bisnis antara entitas sepengendali sebagaimana diuraikan di dalam PSAK 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan demikian, transaksi penambahan kepemilikan di CTP tersebut diakui menggunakan metode penyatuan kepentingan. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah penambahan aset neto di CTP diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dengan perhitungan sebagai berikut:

	Nilai yang diakui pada saat transaksi/ Amount recognized on transaction	
Total nilai tercatat aset neto	2.256.810.554	Total carrying amount of net assets
55,00% dari total nilai tercatat aset neto	1.241.245.805	55.00% of total carrying amount of net assets
Peningkatan aset neto	1.241.245.805	Increase in net assets
Imbalan yang dialihkan	2.445.141.067	Consideration paid
Tambahan modal disetor	(1.203.895.262)	Additional paid-in capital

ILCS

Berdasarkan Akta No. 200 tanggal 29 September 2023 dari Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, SPSL menyetujui pengalihan saham ILCS kepada Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok sejumlah 101.010 saham atau sebesar 1% dari total keseluruhan saham pada ILCS dengan harga transaksi Rp3.029.299. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-AH.01.09-0169539 tanggal 3 Oktober 2023.

BNCT

Pada tanggal 23 Juni 2023, PTP1 dan PT INA-DPWorld Investment ("SPS") menandatangani Perjanjian Pemegang Saham dimana PTP1 dan SPS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebanyak 10.000 lembar saham yang terbagi menjadi 5.100 lembar saham seri A yang dimiliki PTP1 dan 4.900 saham seri B yang dimiliki SPS.

1. GENERAL (continued)

**d. Transfer of Shares Ownership and Issuance
of New Shares (continued)**

CTP

The acquisition of 55.00% CTP's shares by API meet the criteria of business combination entities under common control as described in PSAK 38 (Revised 2012) concerning "Business Combinations of Entities Under Common Control", therefore, the increase in ownership of CTP transaction is recognized using the pooling of interest method. The difference between the consideration paid and the carrying amount of the net assets in CTP is recognized as part of the "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position, with calculation as follows:

ILCS

Based on Deed No. 200, dated September 29, 2023, of Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta, SPSL agreed to transfer the shares of ILCS to Koperasi Jasa Pegawai Maritim Tanjung Priok amounting to 101,010 shares or 1% of the total shares of ILCS with the purchase price of Rp3,029,299. The Deed has been notified to the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-AH.01.09-0169539 dated October 3, 2023.

BNCT

On June 23, 2023, PTP1 and PT INA-DPWorld Investment ("SPS") signed a Shareholders Agreement wherein PTP1 and SPS will establish a company with total shares amounted 10,000 shares comprising of 5,100 shares owned by PTP1 and 4,900 shares owned by SPS.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

BNCT (lanjutan)

Perusahaan tersebut didirikan dalam rangka pembangunan, pembiayaan, operasi dan pemeliharaan proyek Pelabuhan Belawan sesuai dengan Perjanjian Konstruksi dan Operasi yang telah disepakati.

Jika dalam suatu tahun buku perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan, maka distribusi akan dilakukan pertama untuk SPS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada SPS dan PTP1 sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham PTP1 pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian, oleh karena itu laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan PTP1.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian diatas bernama PT Belawan New Container Terminal ("BNCT") yang didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 1 September 2023.

e. Mata Uang Pelaporan

Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat.

Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup adalah Rupiah.

f. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian

Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, laporan keuangan TPK Koja, NPCT1 dan JICT dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan cara sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs rata-rata; dan
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

1. GENERAL (continued)

BNCT (continued)

The company was established for the purpose of construction, financing, operation and maintenance of the Belawan Port project in accordance with the agreed Construction and Operation Agreement.

If in a financial year the company has profits available for distribution, then the distribution will be made first to SPS until the permitted return has been achieved and secondly distributed proportionally to SPS and PTP1 in accordance with their respective ownerships. Other terms and conditions are stipulated in the agreement.

PTP1's ownership in the company established is not followed by control, therefore the financial statements of the company are not consolidated into the PTP1's financial statements.

The company established in relation with the above agreement is PT Belawan New Container Terminal ("BNCT") which was established based on Deed No. 2 dated September 1, 2023.

e. Reporting Currency

The Group's functional currency is Rupiah, except TPK Koja, NPCT1 and JICT which are in United States Dollar.

The presentation currency of the Group's consolidated financial statements is in Rupiah.

f. Translation into Presentation Currency

In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of TPK Koja, NPCT1 and JICT were translated to Rupiah currency based on the following:

- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;
- Income and expenses were translated using the average exchange rate; and
- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**f. Penjabaran dalam Mata Uang Penyajian
(lanjutan)**

Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	502.800.135	304.754.485	<i>Beginning balance</i>
Efek penjabaran - neto	24.974.910	198.045.650	<i>Effect due to translation - net</i>
Saldo akhir	527.775.045	502.800.135	<i>Ending balance</i>

g. Penggabungan

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") pada tanggal 1 Oktober 2021 mengatur diantaranya sebagai berikut:

- Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan yang telah diselenggarakan beserta aset pengusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selanjutnya diselenggarakan dan dimiliki atau dikuasai oleh Pelindo II;
- Pelindo II wajib melakukan penyesuaian terhadap perizinan, konsesi dan dokumen hukum paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal penggabungan;
- Nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Pelindo II ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

1. GENERAL (continued)

**f. Translation into Presentation Currency
(continued)**

Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:

g. Merger

Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 101 Year 2021 regarding the Merger of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV") into Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II ("Pelindo II") on October 1, 2021, stipulating among others:

- *Port operational activities that have been carried out along with the operational assets owned or controlled by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are subsequently managed and owned or controlled by Pelindo II;*
- *Pelindo II is required to make adjustments to permits, concessions and legal documents no later than 2 (two) years since the date of merger;*
- *The definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are combined into Pelindo II are determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOE.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tanggal 1 Oktober 2021 dari notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV setuju dan sepakat untuk menggabungkan diri dengan Pelindo II, dimana Pelindo II sebagai entitas yang melanjutkan kegiatan usaha. Rancangan penggabungan telah disetujui oleh pemegang saham masing-masing perusahaan pada tanggal yang sama sebagai berikut:

- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo I No. 1 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo II No. 2 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo III No. 3 tanggal 1 Oktober 2021.
- Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pelindo IV No. 4 tanggal 1 Oktober 2021.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, seluruh pihak menyetujui penggabungan dengan kondisi diantaranya sebagai berikut:

1. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas dari Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih kepada Pelindo II.
2. Semua izin, konsesi, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
3. Sejak tanggal efektif, seluruh aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV beralih ke Pelindo II.
4. Seluruh pekerja Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV akan menjadi pekerja Pelindo II mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja dan Berita Acara Kesepakatan antara Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dengan para pengurus serikat pekerja Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV tanggal 24 Juni 2021.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Based on the Deed of Merger No. 5 dated October 1, 2021 from the notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV agreed to merge with Pelindo II, where Pelindo II as the surviving entity. The plan design of merger was approved by the shareholders of each company on the same date as follows:

- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo I General Shareholders Meeting (GSM) No. 1 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo II General Shareholders Meeting (GSM) No. 2 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo III General Shareholders Meeting (GSM) No. 3 on October 1, 2021.*
- *Statement of the Decree of the Minister of SOE as Pelindo IV General Shareholders Meeting (GSM) No. 4 on October 1, 2021.*

Based on the Deed of Merger No. 5, all parties agreed to the merger with the following conditions among others:

1. *All operations, businesses, and activities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
2. *All permits, concessions, facilities, licenses, approvals and utilizations that have been granted by the authorities to Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
3. *Since the effective date, all assets and liabilities owned by Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV are transferred to Pelindo II.*
4. *All Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV workers will become Pelindo II workers in accordance with the provisions of the laws and regulations regarding labor and the Minutes of Agreement between Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV with the management of the Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV labor union on June 24, 2021.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Komposisi modal saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV sebelum dan setelah penggabungan adalah sebagai berikut (nilai penuh):

Sebelum Penggabungan

Pelindo I

Modal Dasar	Rp6.800.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.700.000.000

Pelindo II

Modal Dasar	Rp4.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp1.444.029.000

Pelindo III

Modal Dasar	Rp3.200.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp2.218.953.000

Pelindo IV

Modal Dasar	Rp10.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp3.112.085.000

Setelah Penggabungan

Pelindo II

Modal Dasar	Rp33.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp8.475.067.000

Saham Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV memiliki nilai nominal saham yang sama, yaitu sebesar Rp1.000 per saham. Sehubungan penggabungan, Pelindo II akan menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia sesuai dengan jumlah saham yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia pada Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV. Hal ini merupakan nilai sementara atas Pelindo II dimana nilai definitif atas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabung ke dalam Pelindo II akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri BUMN.

Berdasarkan Akta Penggabungan No. 5 tersebut, dinyatakan bahwa tanggal efektif penggabungan adalah pada saat terbitnya Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Pelindo II sehubungan penggabungan, yaitu melalui suratnya No. AHU-AH.01.10-0014401 tanggal 1 Oktober 2021. Dengan efektifnya penggabungan ini, maka Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV selaku perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar demi hukum sejak tanggal tersebut.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

The composition of the share capital of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV before and after the merger are as follows (full amount):

Before Merger

Pelindo I

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo II

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo III

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

Pelindo IV

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

After Merger

Pelindo II

Authorized capital
Issued and fully-paid capital

The shares of Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III and Pelindo IV have the same nominal value, which is Rp1,000 per share. In connection with the merger, Pelindo II will issue new shares to the Republic of Indonesia in accordance with the number of shares previously owned by the Republic of Indonesia in Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV. This is a temporary value for Pelindo II where the definitive value for Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which are merged into Pelindo II will be determined by the Minister of Finance based on the proposal of the Minister of SOEs.

Based on the above Deed of Merger No. 5, it is stated that the effective date of the merger is the date of issuance of the Receipt Notification of the Merger of the Entities from the Minister of Law and Human Rights of Pelindo II in connection with the merger, which is through its letter No. AHU-AH.01.10-0014401 dated October 1, 2021. With the commencement of this merger, Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV as the merging entities are dissolved by law since that date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah menyajikan dampak dari penggabungan tersebut.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan No. 7 tanggal 1 Oktober 2021, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya perubahan Anggaran Dasar, logo dan nama Perusahaan dari sebelumnya Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia atau disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-0053936.AH.01.02 tanggal 1 Oktober 2021.

Pengalihan aset dan liabilitas Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Pelindo II dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK No. 38, pengalihan aset, liabilitas, saham dan/atau instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Perusahaan atau entitas individual yang berada dalam Grup yang sama.

Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan harus dicatat berdasarkan nilai buku yang menggunakan metode penyatuan kepentingan.

Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama penggabungan terjadi disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode penyajian paling awal.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2021 and for the year then ended, have presented the effects of the merger.

Based on the Deed of General Meeting of Shareholders Decision No. 7 dated October 1, 2021, the shareholders approved among others the changes of Article of Association, logo and name of the Company from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia or abbreviated PT Pelabuhan Indonesia (Persero). This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0053936.AH.01.02 dated October 1, 2021.

The transfer of assets and liabilities of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to Pelindo II are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

Based on PSAK No. 38, the transfer of assets, liabilities, shares and/or other ownership instruments between entities under common control will not result in a profit or loss for the Company or individual entities that are in the same group.

Because of restructuring transactions between entities under common control do not change the economic substance of the ownership of the assets, liabilities, shares or other ownership instruments that are exchanged, the transferred assets or liabilities must be recorded at their book value using the pooling of interest method.

In applying the pool of interests method, the components of the consolidated financial statements during the merger occurred are presented as if the merger had occurred since the beginning of the earliest presentation period.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Penggabungan tersebut di atas menggunakan nilai buku berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 tanggal 4 Juni 2021 tentang Perubahan kedua atas PMK No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-21/PJ/2021 tanggal 9 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran atau Pengambilan Usaha.

Sesuai dengan peraturan tersebut, manajemen akan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan aset Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke Perusahaan. Manajemen berkeyakinan dapat memenuhi semua persyaratan yang dipersyaratkan oleh peraturan tersebut untuk menggunakan nilai buku untuk tujuan perpajakan sehubungan dengan transaksi penggabungan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 telah disajikan kembali untuk mencerminkan dampak penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode pelaporan. Penyesuaian bagian kepentingan Perusahaan atas aset neto Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV, disajikan pada "Ekuitas Merging Entity" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019. Laba neto dari entitas yang bergabung dicatat sebagai "Laba Proforma Merging Entity" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Such merger as mentioned above is using book value which based on Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia (PMK) No. 56/PMK.010/2021 dated June 4, 2021 regarding Second Amendment on PMK No. 52/PMK.010/2017 regarding The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover and General Director of Tax Regulation No. PER-21/PJ/2021 dated December 9, 2021 regarding Amendment on General Director of Tax Regulation No. PER-03/PJ/2021 regarding Procedures of Proposal and Issuance on Using Book Value for The Use of Book Value on Transfer of Assets in relation to Merger, Consolidation, Expansion or Business Takeover.

In accordance with the regulation, management will submit proposal to General Director of Tax to obtain approval for using book value on the transfers of assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company. Management believes that it can fulfill all requirements as required by such regulation for using book value for tax purposes in relation to the merger.

The consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated as if the effect of merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV into the Company had occurred since the beginning of the reporting period. The adjustment of the Company's interest in the net assets of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV is presented in "Merging Entity Equity" in the consolidated statement of financial position as of December 31, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019. Net income from entities merged are recorded as "Proforma Income from Merging Entity" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Sehubungan dengan telah ditetapkan PP No. 101 tahun 2021 tanggal 1 Oktober 2021 tentang Penggabungan Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) serta Surat Direksi Perusahaan (dahulu Pelindo II) tanggal 24 November 2021 tentang Usulan Nilai Kekayaan Definitif Perusahaan, Menteri BUMN menyampaikan usulan nilai kekayaan definitif kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui suratnya No. S-956/MBU/12/2021 tanggal 14 Desember 2021. Usulan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) berdasarkan laporan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, penilai independen, tanggal 23 September 2021.

Berdasarkan usulan Menteri BUMN tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusannya No.527/KMK.6/2021 tanggal 29 Desember 2021, menetapkan nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV yang digabungkan ke dalam Perusahaan (dahulu Pelindo II) masing-masing sebesar Rp13.373.078.900.000 (nilai penuh), Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) dan Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh).

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya:

- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp156.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).
- Pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (portepel) sejumlah 39.131.555 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) sehingga seluruhnya berjumlah Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

In relation to the establishment of PP No. 101 Year 2021 dated October 1, 2021 regarding the merger of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV to the Company (formerly Pelindo II) and the Company's (formerly Pelindo II) Directors Letter dated November 24, 2021 regarding Proposal of Definitive Net Assets Value of the Company, the Minister of SOE delivered proposal of definitive net assets value to Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its letter No. S-956/MBU/12/2021 dated December 14, 2021. Such proposed definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount) based on the report of KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan, independent appraisal, dated September 23, 2021.

Based on the proposal of the Minister of SOE as mentioned, the Minister of Finance of the Republic of Indonesia through its Decision No.527/KMK.6/2021 dated December 29, 2021 established the definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV which were merged into the Company (formerly Pelindo II) amounting to Rp13,373,078,900,000 (full amount), Rp17,323,408,459,305 (full amount) and Rp8,435,066,761,955 (full amount).

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed No. 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others:

- Increase of the Company's authorized capital to Rp156,000,000,000,000 (full amount) divided into 156,000,000 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).
- Issuance/placement of unused shares (portfolio) amounting to 39,131,555 shares, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) totalling to Rp39,131,555,000,000 (full amount) which all taken by the State of The Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

1. UMUM (lanjutan)

g. Penggabungan (lanjutan)

Berdasarkan keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Nomor S-38/MBU/01/2022 tanggal 12 Januari 2022 tentang Perubahan Struktur Permodalan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, yang telah diaktakan oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notaris di Jakarta, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Februari 2022, pemegang saham Perusahaan menyetujui diantaranya: (lanjutan)

- Penambahan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp39.131.555.000.000 (nilai penuh):
 - Sebesar Rp13.378.078.900.000 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo I ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp17.323.408.459.305 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo III ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp8.435.066.761.955 (nilai penuh) sebagai akibat penggabungan Pelindo IV ke dalam Perusahaan.
 - Sebesar Rp878.740 (nilai penuh) merupakan setoran modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan Perusahaan.

Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

h. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 27 Maret 2024. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.

1. GENERAL (continued)

g. Merger (continued)

Based on the decision of the Minister of SOE as the GMS Number S-38/MBU/01/2022 dated January 12, 2022 regarding Changes of Capital Structure and Changes of the Company's Article of Association, which has been notarized by Nanda Fauz Iwan, SH., MKn., notary in Jakarta, through Deed No. 2 dated February 9, 2022, the Company's shareholder approved among others: (continued)

- *Additional capital by the State of The Republic of Indonesia to the Company's shares amounting to Rp39,131,555,000,000 (full amount):*
 - *Amounting to Rp13,378,078,900,000 (full amount) as a result of the merger of Pelindo I to the Company.*
 - *Amounting to Rp17,323,408,459,305 (full amount) as a result of the merger of Pelindo III to the Company.*
 - *Amounting to Rp8,435,066,761,955 (full amount) as a result of the merger of Pelindo IV to the Company.*
 - *Amounting to Rp878,740 (full amount) is a capital injection by the State of The Republic of Indonesia arising from the capitalization of part of the Company's reserves..*

The Deed of changes in Article of Association as mentioned above has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Number AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 dated March 1, 2022

h. Completion of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia and its subsidiaries as of December 31, 2023 and for the year then ended are completed and authorized for issuance on March 27, 2024. The Company's Directors who signed the Directors' statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b di bawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, dibulatkan dan disajikan dalam ribuan Rupiah ("Rp"), kecuali dinyatakan lain.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards of Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or DSAK IAI) and the Regulations and Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan" or "OJK").

The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.

The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and expressed in thousands of Rupiah ("Rp"), unless otherwise stated.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan - Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan dalam mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas menjadi persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

b. Changes in Accounting Principles

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies

This amendments provide guidance to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendments aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

Amendment of PSAK 25: Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - Definition of Accounting Estimates

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas
Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal**

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama dan perbedaan temporer kena pajak dan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan
Model Pilar Dua**

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tanggahan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in Accounting Principles (continue)

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
Deferred Tax related to Assets and
Liabilities arising from a Single Transaction**

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
International Tax Reform - Pillar Two Model
Rules**

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and
- Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan
Model Pilar Dua (lanjutan)**

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode interim yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan kemampuan mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, *investor* mengendalikan *investee* jika dan hanya jika *investor* memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

b. Changes in Accounting Principles (continue)

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -
International Tax Reform - Pillar Two Model
Rules (continued)**

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any interim periods ending on or before December 31, 2023.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Thus, the Group controls an *investee* if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the *investee*, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the *investee*,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*, and
- iii) The ability to use its power over the *investee* to affect its returns.

When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an *investee*, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an *investee*, including:

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the *investee*,
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

c. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

c. Principles of Consolidation (continued)

The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

*A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including *goodwill*), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

d. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Grup menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" (Catatan 1e dan 1f).

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali TPK Koja, NPCT1 dan JICT dalam Dolar Amerika Serikat. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan, kecuali untuk selisih kurs yang dapat diatribusikan ke aset tertentu dikapitalisasi ke aset dalam penyelesaian dan aset takberwujud dan selisih kurs yang diakui di dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (nilai penuh):

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Dolar Amerika Serikat (USD) 1	15.416	15.731
Euro Eropa (EUR) 1	17.140	16.712
Dolar Singapura (SGD) 1	11.712	11.659

Transaksi dalam mata uang asing lainnya adalah tidak signifikan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

d. Foreign Currency Transactions and Balances

The Group applied PSAK No. 10 (Revised 2010), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates" (Note 1e and 1f).

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also each entity's in the Group functional currency, except KOJA, NPCT1 dan JICT whose functional currency is United States Dollar ("US Dollar"). Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period, except for foreign exchange difference that can be attributed to qualifying assets which are capitalized to construction in progress and intangible assets and foreign exchange difference recognized in other comprehensive income as effective portion of gains and losses on hedging instruments in relation to cash flow hedge.

Below are the major exchange rates used for translation as of December 31, 2023 and 2022 (full amount):

United States Dollar (USD) 1
European Euro (EUR) 1
Singapore Dollar (SGD) 1

Transactions in other foreign currencies are not significant.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 44. Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

f. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam kesepengendalian.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai investasi jangka pendek.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

e. Transactions with Related Parties

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 44. Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.

f. Business Combinations Entities Under Common Control

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.

g. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of three (3) months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Time deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year are presented as short-term investments.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Persediaan terdiri dari suku cadang kapal dan crane, bahan bakar, alat tulis kantor, obat dan alat-alat medis.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

i. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

h. Inventory

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method and specific identification. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Inventories consists of ship and crane spare part, fuels, office supplies, medicine and medical instruments.

The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

i. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**i. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan
(lanjutan)**

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**i. Impairment of Non-Financial Assets
(continued)**

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

j. Investment in Associates Entities

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.

A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas periode pelaporan yang sama dengan Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**j. Investment in Associates Entities
(continued)**

The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.

The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.

The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.

The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.

The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

j. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

k. Properti Investasi

Properti investasi merupakan properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai Grup untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha.

Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi tersebut.

Perusahaan telah memilih model biaya untuk mencatat properti investasinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis properti investasi yang berupa bangunan fasilitas pelabuhan (10 - 50 tahun) dan jalan dan bangunan (10 - 40 tahun).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

j. Investment in Associates (continued)

After application of the equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence that the investment in the associate is impaired. If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in associate and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.

Upon loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.

k. Investment Properties

Investment properties represents properties (land or building - or part of a building - or both) held by the Group to earn rental or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and any impairment in value, if any. The carrying amount includes the cost of replacement of an existing investment property in the year such costs are incurred, if the recognition criteria are met and does not include the cost of daily use of the investment property.

The Company has chosen the cost model to record for its investment properties.

Depreciation is computed using the straight-line basis over the estimated useful lives of investment properties which consist of building and port facilities (10 - 50 years) and road and building (10 - 40 years).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

k. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya ketika telah dilepaskan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak lagi digunakan secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode penghentian pengakuan. Dalam menentukan jumlah imbalan dari penghentian pengakuan properti investasi, Grup mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan imbalan yang harus dibayar kepada pembeli (jika ada).

Transfer dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika ada perubahan penggunaan. Untuk pengalihan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang diperhitungkan untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan penggunaan.

l. Aset Tetap

Seluruh aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

k. Investment Properties (continued)

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of (i.e., at the date the recipient obtains control) or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property the Group considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Group accounts for such property in accordance with the policy stated under property, plant and equipment up to the date of change in use.

l. Fixed Assets

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

<u>Jenis Aset</u>	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan fasilitas pelabuhan	2 - 50
Kapal	4 - 20
Alat fasilitas pelabuhan	2 - 20
Instalasi fasilitas pelabuhan	2 - 50
Jalan dan bangunan	2 - 50
Peralatan	3 - 25
Kendaraan	4 - 5
Emplasemen	3 - 50

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:

<u>Type of Assets</u>
<i>Building and port facilities</i>
<i>Vessels</i>
<i>Port facility equipment</i>
<i>Port facility installation</i>
<i>Roads and building</i>
<i>Equipment</i>
<i>Vehicles</i>
<i>Emplacement</i>

The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.

Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

l. Aset Tetap (lanjutan)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemeliharaan dan perbaikan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Aset kerjasama operasi merupakan kegiatan kerjasama yang meliputi pemanfaatan aset dari para pihak atas suatu kegiatan operasi yang didasarkan pada perjanjian kontraktual. Aset kerjasama operasi dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset tetap.

m. Sewa

Grup menilai pada saat inisiasi kontrak apabila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

l. Fixed Assets (continued)

Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major repairs and maintenance is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Land is stated at cost and not depreciated.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Major spare parts and stand-by equipments are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Joint operation assets are joint activities that include utilization of the assets from the parties for operational activities that is based on contractual agreements. Joint operation assets are stated at cost less accumulated depreciation and are depreciated using the straight-line method over the estimated useful lives of similar fixed assets.

m. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai Penyewa

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset pendasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang terjadi, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Jika kepemilikan aset pendasar sewa beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka penyusutan aset hak-guna dihitung menggunakan estimasi masa manfaat aset. Aset hak-guna juga dievaluasi untuk penurunan nilai.

Liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang secara wajar pasti dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran pinalti untuk mengakhiri sewa, jika masa sewa merefleksikan adanya opsi dapat mengakhiri sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Leases (continued)

The Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset. The right-of-use assets are also assessed for impairment.

Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Liabilitas sewa (lanjutan)

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") pada tanggal permulaan sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat langsung ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah kewajiban sewa ditingkatkan untuk mencerminkan akresi bunga (atas efek diskonto) dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek dan sewa dengan aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset pendasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pesewa

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

m. Lease (continued)

Lease liabilities (continued)

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its Incremental Borrowing Rate ("IBR") at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

The Group as Lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Lease income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in other operating income in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as lease income. Contingent rent are recognized as revenue in the period in which they are earned.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

n. Pengaturan bersama

Grup merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Grup dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas anak perusahaan.

Grup mengklasifikasikan kepentingannya dalam pengaturan bersama sebagai berikut:

- Ventura bersama: ketika Grup memiliki hak hanya pada aset neto dari pengaturan bersama
- Operasi bersama: ketika Grup memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas yang terkait dengan pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Grup mempertimbangkan hal-hal berikut:

- struktur pengaturan bersama
- bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah
- persyaratan pengaturan kontraktual
- ketika relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Grup mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud Grup terdiri dari aset hak konsesi, piranti lunak dan biaya ditangguhkan.

Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

n. Joint arrangements

The Group is a party to a joint arrangement when there is a contractual arrangement that confers joint control over the relevant activities of the arrangement to the Group and at least one other party. Joint control is assessed under the same principles as control over subsidiaries.

The Group classifies its interests in joint arrangements as either:

- *Joint ventures: where the Group has rights to only the net assets of the joint arrangement*
- *Joint operations: where the Group has both the rights to assets and obligations for the liabilities of the joint arrangement.*

In assessing the classification of interests in joint arrangements, the Group considers:

- *the structure of the joint arrangement*
- *the legal form of joint arrangements structured through a separate vehicle*
- *the contractual terms of the joint arrangement agreement*
- *any other facts and circumstances (including any other contractual arrangements).*

The Group accounts for its interests joint operations by recognising its share of assets, liabilities, revenues and expenses in accordance with its contractually conferred rights and obligations.

o. Intangible Assets

Intangible assets of the Group consist of concession rights asset, software and deferred charges.

Intangible assets are recognized if the Group will obtain useful economic benefit from the intangible assets and the cost of assets can be reliably measured.

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, the intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and impairment loss, if any.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi aset dan dinilai penurunan nilainya setiap kali terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas ditelaah setidaknya pada setiap akhir periode pelaporan.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi.

Aset Hak Konsesi

Grup telah menerapkan ISAK 16, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 16) dan ISAK 22, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 22).

ISAK 16 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 16 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 22 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

An intangible asset is amortized over the asset's useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss.

Concession Rights Assets

The Group has adopted ISAK 16, "Service Concession Arrangement" (ISAK 16) and ISAK 22, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 22).

ISAK 16 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 16 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator. The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 22 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengelolaan terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi terminal pelabuhan dan alur pelayaran diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") tanpa syarat.

Aset konsesi yang diberikan kepada Grup dapat dipindahkan dengan persetujuan Pemerintah/OP. Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/OP pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selain itu, Grup mengakui dan mengukur pendapatan konstruksi sesuai dengan PSAK 34 (Revisi 2010), "Kontrak Konstruksi" (PSAK 34) dan PSAK 23, "Pendapatan", untuk jasa yang dilakukannya. Ketika Grup menyediakan jasa konstruksi atau peningkatan kemampuan, imbalan yang diterima atau akan diterima oleh Grup diakui pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

The Group records for its service concession arrangement under the intangible asset model as it receives the right (license) to charge users of public service. At initial recognition, concession assets are recorded at the fair value of the benefit received or to be received. These concession assets are port terminal and shipping channel concession rights which are amortized over the remaining concession period from the date of operation of the port terminal and shipping channel. During the construction period, the accumulated port terminal and shipping channel construction cost is recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The concession assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ("OP") for no consideration.

Concession asset which granted to the Group are transferrable with approval from the Government/OP. These concession assets will be transferred to the Government/OP at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

In addition, the Group recognizes and measures construction revenue in accordance with PSAK 34 (Revised 2010), "Construction Contracts" (PSAK 34) and PSAK 23, "Revenue", for the services it performs. When the Group provides construction services or upgrades services, the consideration received or to be received by the Group is recognized at its fair value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Aset Hak Konsesi (lanjutan)

Kontrak konstruksi meliputi seluruh biaya konstruksi pembangunan aset konsesi - terminal pelabuhan dan alur pelayaran yang meliputi biaya pembangunan dermaga, pengadaan tanah dan biaya-biaya lain yang berhubungan langsung dengan pembangunan tersebut, termasuk biaya pembangunan jalan akses dan fasilitas lainnya yang disyaratkan, ditambah biaya pinjaman yang secara langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset tersebut. Biaya pinjaman dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan tersebut selesai dan dioperasikan.

Grup mengakui biaya jasa konstruksi dan peningkatan kemampuan aset konsesi sebagai aset takberwujud dimana Grup menerima hak (lisensi) untuk membebaskan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebaskan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Selama periode konstruksi, Grup mencatat aset takberwujud dan mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan kontraknya.

Biaya konstruksi merupakan nilai dari jumlah perolehan kontrak konstruksi.

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi Pemeliharaan Terminal

Dalam pengoperasian terminal, Grup mempunyai kewajiban untuk menyerahkan aset pada akhir masa konsesi kepada OP dalam kondisi baik, antara lain dengan melakukan pemeliharaan secara berkala. Provisi pemeliharaan terminal diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Concession Rights Assets (continued)

Construction contract comprehends all cost directly attributable to the construction of concession assets - port terminal and shipping channel which includes cost of port development, land acquisition and other costs directly related to the development, including the cost of construction of access roads and other facilities required, plus the cost of borrowing directly used for financing the construction of concession asset. Borrowing costs are capitalized until the construction is completed and operated.

The Group recognizes construction services and increased capacity of concession asset as intangible assets which the Group receives the rights (license) to charge users of public services. A right to charge users of public services is not an unconditional right to receive cash because the amounts depend on the extent of public using the service. During the construction period, the Group records intangible assets, and recognizes revenues and costs of construction in accordance with the contract.

Construction cost is the value of the construction contract.

The concession assets are amortized over the concession period using straight line method.

Provision for Terminal Maintenance

In operating terminal, the Group has the obligation to transfer assets to OP at the end of concession period in good condition, among others by performing regular maintenance. The estimated net provision for terminal maintenance is discounted to its present value that reflects current provision.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

o. Aset Takberwujud (lanjutan)

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya-biaya sehubungan dengan perolehan sistem perangkat lunak yang mempunyai masa manfaat 4-5 tahun, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

p. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi Grup.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai maksudnya.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima di muka disajikan sebagai bagian dari "liabilitas jangka panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

o. Intangible Assets (continued)

Software

Software represents expenses relating to systems software cost, which benefits extend over a period of 4-5 years, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method.

p. Borrowing Cost

Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets are completed for their intended use.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "long term liabilities" in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban**

Grup mengadopsi PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dengan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan bagaimana, kapan, dan berapa banyak pendapatan yang harus diakui. Standar ini menyediakan model lima langkah (*5-steps model*) tunggal berbasis prinsip untuk penentuan dan pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan, sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Menetapkan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Selain itu, dalam mengadopsi PSAK 72, Grup juga memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak memperhitungkan dampak komponen pembiayaan ketika periode antara pembayaran untuk barang atau jasa yang dijanjikan dan pengalihan untuk barang atau layanan tersebut kepada pelanggan kurang dari satu tahun.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses**

The Group adopted PSAK 72 "Revenue from Contracts with Customers" by providing a comprehensive framework for determining how, when and how much revenue should be recognized. This standard provides a principle-based, single 5-step model for revenue determination and recognition to be applied to all contracts with customers, as follows:

1. Identify contract(s) with a customer.
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and value added tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer.
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

In addition, in adopting PSAK 72, the Group has also chosen to apply practical guidance not to take into account the impact of the financing component when the period between payment for the goods or services promised and the transfer for the goods or services to the customer is less than one year.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Di bawah ini adalah ringkasan kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan Grup untuk pendapatan pelayanan terminal petikemas, perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik, pelayanan jasa terminal, pelayanan jasa kapal, jasa logistik, pelayanan kesehatan, pendapatan pas pelabuhan, perusahaan peralatan, pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi, pelayanan jasa barang, jasa keuangan, pendapatan dan pendapatan jasa lain-lain.

Pendapatan dari pemberian jasa diakui pada saat terjadinya penyerahan jasa kepada pengguna. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara handal tanpa memperhitungkan kapan pembayaran dilakukan. Pendapatan jasa diakui pada saat jasa telah selesai dilakukan dan berita acara diterbitkan.

Grup menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup bertindak sebagai prinsipal jika menanggung dampak manfaat dan risiko signifikan terkait dengan penjualan barang dan jasa.

Fitur yang mengindikasikan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal mencakup:

- a. Pada dasarnya entitas bertanggung jawab dalam pemenuhan dan penerimaan;
- b. Entitas memiliki risiko pada inventory sebelum dan sesudah pengalihan kepada pelanggan;
- c. Entitas memiliki keleluasaan dalam menetapkan harga.

Grup telah melakukan analisa atas transaksi penjualan dan menyimpulkan bahwa Grup bertindak sebagai prinsipal pada semua perjanjian pendapatan.

Pada tanggal pelaporan, pendapatan yang sudah diakui namun belum ditagihkan dicatat sebagai "Pendapatan Yang Masih Akan Diterima" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Below is a summary of the Group's revenue recognition accounting policies for revenue from container services, land, building, water and electricity, terminal services, vessel services, logistic services, medical services, port entry fee, equipment services, network services and consultant of information system, cargo services, financial services, cleaning services and other services.

Revenue from service provision is recognized when the service is rendered to the user. Revenue is recognized when it is probable that economic benefits will be obtained by the Group and the amount can be measured reliably regardless of when the payment is made. Service revenues are recognized when the services are completed and the minutes are issued.

The Group assesses its revenue arrangements against certain criteria to determine whether it is acting as principal or agent. The Group acts as the principal if it bears the impact of significant benefits and risks associated with the sale of goods and services.

Features that indicate that the Group is acting as a principal include:

- a. The entity is primarily responsible for fulfillment and acceptability;*
- b. The entity has inventory risk before or after transfer to customer;*
- c. The entity has discretion in setting price.*

The Group has analyzed the sales transaction and concluded that the Group acts as the principal in all revenue agreements.

At reporting date, revenues earned but not yet billed to customer are recorded as "Accrued Income" in the consolidated statement of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

s. Perpajakan

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Revenue from Contracts with Customers
and Recognition of Expenses (continued)**

Lease Income

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expenses Recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

s. Taxation

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari "Pajak Penghasilan Badan - Kini".

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Current Tax (continued)

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of "Corporate Income Tax - Current" in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of "Corporate Income Tax - Current".

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if filed an objection, when the result of the objection is determined.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;*
- ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.*

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali: (lanjutan)

ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except: (continued)

ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognised subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- *Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

s. Perpajakan (lanjutan)

Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak
Penghasilan

Sesuai dengan ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak yang mengandung ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan ditentukan dengan mempertimbangkan apakah diperlakukan secara terpisah atau bersamaan, penggunaan asumsi tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak tidak pasti oleh otoritas perpajakan, pertimbangan apakah besar kemungkinan Otoritas Pajak akan menerima perlakuan pajak tidak pasti dan penilaian kembali pertimbangan atau estimasi yang disyaratkan jika terjadi perubahan fakta dan keadaan.

Jika penerimaan perlakuan pajak dimungkinkan oleh Otoritas Pajak, pengukuran tersebut sejalan dengan pengisian pajak penghasilan. Jika penerimaan perlakuan pajak oleh Otoritas Pajak tidak memungkinkan, Grup menggunakan jumlah pajak dengan menggunakan metode yang memberikan prediksi resolusi yang lebih baik (yaitu jumlah yang paling mungkin atau nilai yang diharapkan).

Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa interpretasi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Imbalan Pascakerja

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti (Program Pensiun) untuk semua karyawan tetapnya yang telah memenuhi kriteria dan liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai yang ditentukan berdasarkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang berlaku.

Liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai tersebut dihitung dengan membandingkan imbalan yang akan diterima oleh karyawan pada usia normal pensiun dari Program Pensiun dengan imbalan sesuai dengan KKB, setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi pemberi kerja dan hasil pengembangannya. Jika bagian pemberi kerja pada imbalan Program Pensiun kurang dari imbalan yang diharuskan oleh KKB, Perusahaan akan mencadangkan kekurangan tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

s. Taxation (continued)

Uncertainty over Income Tax

In accordance with ISAK 34: Uncertainty Over Income Tax Treatments which is effective on January 1, 2019, stated that the recognition and measurement of tax assets and liabilities that contain uncertainty over income tax are determined by considering whether to be treated separately or together, the assumptions used in the examination of tax treatments by the Tax Authorities, consideration the probability that the Tax Authorities will accept uncertain tax treatment and re-consideration or estimation if there is a change in facts and circumstances.

If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is probable, the measurement is in line with income tax fillings. If the acceptance of the tax treatment by the Tax Authorities is not possible, the Group measures its tax balances using the method that provides the better predict of resolution (i.e. most likely amount or expected value).

Accordingly, management believes that the interpretation did not have a significant impact on the consolidated financial statements.

Post-Employment Benefits

The Company has a defined contribution retirement plan (Pension Plan) covering all of its qualified permanent employees and an unfunded employee benefit liability determined in accordance with the existing Collective Labor Agreement (CLA).

The unfunded employee benefit liability is calculated by comparing the benefit that will be received by an employee at normal pension age from the Pension Plan with the benefit as stipulated in the CLA, after deducting the accumulated employer contribution and the related investment results. If the employer-funded portion of the Pension Plan benefit is less than the benefit as required by the CLA, the Company reserves for such shortfall.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja

Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Perusahaan memberikan imbalan kerja lainnya, seperti imbalan kesehatan dan uang penghargaan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Estimasi biaya imbalan ini diakui sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Kewajiban imbalan pensiun tersebut merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*.

Beban untuk imbalan kerja berdasarkan KKB/UU/imbalan kesehatan pascakerja ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Laba atau rugi aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi total 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*present value of the defined benefit obligation*) pada tanggal tersebut.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits

Post-Employment Benefits (continued)

The Company also provides other post-employment benefits, such as healthcare benefits and service pay to their retirees. The entitlement to these benefits are usually based on the employee remaining in service up to retirement age and the completion of a minimum service period. The estimation costs of these benefits are accrued over the period of employment, using an accounting methodology similar to defined benefit pension plans.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognized actuarial gains or losses and prior service costs. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the *projected-unit-credit* method.

The costs of providing employee benefits under the CLA/Law/post-retirement healthcare benefits plan are determined using the *projected-unit-credit* method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the present value of the defined benefit obligation at that date.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- Beban atau penghasilan bunga neto.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

PP 35/2021 mengatur mengenai perjanjian kerja waktu tertentu (karyawan tidak tetap), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus diberikan kepada karyawan. Penerapan peraturan tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini.

Keuntungan atau kerugian yang melebihi ketentuan 10% diakui selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Lebih lanjut, biaya jasa lalu yang terjadi ketika Perusahaan memperkenalkan program imbalan pasti atau terjadinya perubahan atas imbalan yang terhutang dari program yang berlaku saat ini harus diamortisasi selama periode sampai imbalan tersebut telah menjadi hak karyawan (*vested*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and
- ii) Net interest expense or income.

On February 2, 2021, the Government promulgated Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities.

PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain period (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be provided to employees. The implementation of the new regulation did not result in major changes to the Group's accounting policy and had no material impact on the amounts reported for the current.

These gains or losses in excess of the 10% threshold are amortized on a straight-line basis over the average of remaining working period of the employees estimates. Further, past service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefits payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya termasuk cuti besar yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perusahaan. Perkiraan beban ini dihitung dan diakui sepanjang masa kerja karyawan dengan menggunakan metode yang diterapkan dalam menghitung kewajiban imbalan pascakerja. Kewajiban ini dihitung minimum satu tahun sekali oleh aktuaris independen. Imbalan jangka panjang lainnya yang telah menjadi hak karyawan diakui segera sebagai beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Program Iuran Pasti

Program iuran pasti merupakan program imbalan pascakerja, dimana entitas membayar iuran tetap kepada suatu entitas terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum ataupun konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Kewajiban untuk membayar iuran secara regular merupakan biaya imbalan kerja karyawan untuk periode dimana jasa diberikan oleh pekerja.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") menerbitkan siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 *Employee Benefits*. Siaran pers tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19*. Grup telah menerapkan siaran pers tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi terkait atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan sebelumnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Other long term employment benefits included the long services leave benefit which is determined in compliance with the Company's Regulation. The expected costs of these benefits are calculated and recognized over the year of employment, using the method which is applied in calculating obligation for post-employment benefits. These obligations are calculated on a minimum once a year by an independent actuary. Other long term employment benefits that are vested, are recognized as expense immediately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Defined Contribution Plans

A defined contribution plan is a post-employment benefit plan in which the entity pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay further amounts. Obligations for the regular contributions constitute employee benefit costs for the period during which services are rendered by employees.

Changes in Accounting Policy

In April 2022, the Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board ("DSAK IAI") issued a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: *Employee Benefits*. The press release conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the *IFRS Interpretation Committee ("IFRIC") Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service IAS 19*. The Company has adopted the said press release and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Pada tahun-tahun sebelumnya, Grup mengatribusikan imbalan berdasarkan formula imbalan program imbalan pasti berdasarkan masa kerja sejak tanggal pekerja memberikan jasa hingga usia pensiun. Berdasarkan siaran pers Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") di bulan April 2022, Grup telah mengubah kebijakan akuntansinya untuk mengatribusikan imbalan berdasarkan program tersebut, yaitu dari tanggal ketika jasa pekerja pertama kali menghasilkan imbalan dalam program sampai dengan tanggal ketika jasa pekerja selanjutnya tidak akan menghasilkan jumlah imbalan yang material dibawah program tersebut. Namun, perubahan tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan dan telah dibebankan pada periode berjalan.

u. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2r.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

t. Employee Benefits (continued)

Changes in Accounting Policy (continued)

In prior years, the Group attribute benefits under the defined benefit plan's benefit formula to periods of service from the date when employees provide their services until their retirement age. Based on the press release of the Board of Financial Accounting Standard ("DSAK") in April 2022, the Group change the policy for attributing benefits under the plan to the date when employee service first leads to benefits under the plan until the date when further employee service will lead to no material amount of further benefits under the plan. However, the impact is not material to the financial statements and charged to current period.

u. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2r.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa pendauran laba dan rugi kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLRL).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, investasi pada penyertaan saham dan investasi pada surat utang yang merupakan bagian dari investasi jangka panjang, aset lancar lainnya dan aset tidak lancar lainnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost includes cash and cash equivalents, short-term investment, trade receivables, other receivables, accrued revenues, investment in share of stocks and investment in bonds under long-term investment, other current assets and other non-current assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

*Aset keuangan pada NWPKL dengan
pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen
utang)*

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Aset keuangan pada NWPKL dengan pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen utang) (lanjutan)

Instrumen utang Grup yang diukur pada NWPKL termasuk investasi pada instrumen utang dengan kuotasi yang termasuk dalam aset keuangan tidak lancar lainnya.

Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi keuntungan dan kerugian kumulatif setelah pelepasan (instrumen ekuitas).

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tidak dapat dikembalikan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah didaur ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments) (continued)

The Group's debt instruments at FVOCI includes investments in quoted debt instruments included under other non-current financial assets.

Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.

The Group elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana oleh Grup diklasifikasikan secara tak terbatalkan pada NWPKL. Dividen atas investasi ekuitas yang tercatat di bursa diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")

Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.

This category includes derivative instruments and listed equity investments which the Group had not irrevocably elected to classify at FVOCI. Dividends on listed equity investments are recognized as other income in the statement of profit or loss when the right of payment has been established.

A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir;
Atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
Or
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset*

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (forward-looking) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

Untuk instrumen utang pada NWPKL, Grup menerapkan penyederhanaan sehubungan dengan risiko kredit rendah. Setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut.

Instrumen utang Grup pada NWPKL hanya terdiri dari obligasi kuotasi yang dinilai dalam kategori investasi teratas. Oleh karena itu, dianggap sebagai investasi dengan risiko kredit rendah. Merupakan kebijakan Grup untuk mengukur KKE pada instrumen tersebut setiap 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak diterbitkan, penyisihan akan didasarkan pada KKE sepanjang umurnya.

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya, utang bank jangka panjang, utang obligasi, utang lembaga keuangan non-bank, liabilitas jangka panjang lainnya, dan liabilitas sewa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial assets (continued)

Impairment (continued)

For debt instruments at FVOCI, the Group applies the low credit risk simplification. At every reporting date, the Group evaluates whether the debt instrument is considered to have low credit risk using all reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort. In making that evaluation, the Group reassesses the internal credit rating of the debt instrument.

The Group's debt instruments at FVOCI comprise solely of quoted bonds that are graded in the top investment category. Therefore, are considered to be low credit risk investments. It is the Group's policy to measure ECLs on such instruments on a 12-month basis. However, when there has been a significant increase in credit risk since origination, the allowance will be based on the lifetime ECL.

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other current liability, long-term bank loans, bonds payable, loan from non-bank financial institution, other non-current liabilities, and lease liabilities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

(ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefits liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

u. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**v. Instrumen keuangan dan akuntansi
lindung nilai**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup menggunakan instrumen keuangan berupa utang obligasi untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai lindung nilai arus kas ketika melakukan lindung nilai atas eksposur terhadap variabilitas dalam arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui atau prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi atau risiko mata uang asing dalam komitmen pasti yang tidak diakui.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

u. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**v. Financial instruments and hedge
accounting**

Initial Recognition and Measurement

The Group uses financial instruments in the form of bonds payable to hedge its foreign currency risk.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as cash flow hedges when hedging the exposure to variability in cash flows that is either attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction or the foreign currency risk in an unrecognized firm commitment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Instrumen keuangan dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Pada saat inisiasi hubungan lindung nilai, Grup secara formal menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang mana ingin diterapkan akuntansi lindung nilai dan tujuan serta strategi manajemen risiko untuk melakukan lindung nilai.

Dokumentasi mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item lindung nilai, sifat risiko yang dilindung nilai dan bagaimana Grup akan menilai apakah hubungan lindung nilai memenuhi persyaratan efektivitas lindung nilai (termasuk analisis sumber ketidakefektifan lindung nilai dan bagaimana rasio lindung nilai ditentukan). Hubungan lindung nilai memenuhi syarat untuk akuntansi lindung nilai jika memenuhi semua persyaratan efektivitas berikut:

- Ada 'hubungan ekonomik' antara item lindung nilai dan instrumen lindung nilai.
- Pengaruh risiko kredit tidak 'mendominasi perubahan nilai' yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut.
- Rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama yang dihasilkan dari kuantitas item lindung nilai yang aktual digunakan oleh Grup melindungi nilai sejumlah kuantitas instrumen lindung nilai yang secara aktual digunakan oleh Grup untuk melindungi sejumlah kuantitas item lindung nilai.

Lindung nilai atas arus kas

Grup menggunakan utang obligasi sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Initial Recognition and Measurement
(continued)

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item, the nature of the risk being hedged and how the Group will assess whether the hedging relationship meets the hedge effectiveness requirements (including the analysis of sources of hedge ineffectiveness and how the hedge ratio is determined). A hedging relationship qualifies for hedge accounting if it meets all of the following effectiveness requirements:

- There is 'an economic relationship' between the hedged item and the hedging instrument.
- The effect of credit risk does not 'dominate the value changes' that result from that economic relationship.
- The hedge ratio of the hedging relationship is the same as that resulting from the quantity of the hedged item that the Group actually hedges and the quantity of the hedging instrument that the Group actually uses to hedge that quantity of hedged item.

Cash flow hedges

The Group uses bonds payable to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Instrumen keuangan dan akuntansi
lindung nilai (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Bagian yang efektif atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai "Penghasilan komprehensif lain" pada bagian ekuitas. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung sebagai laba atau rugi. Jumlah akumulasi keuntungan atau kerugian dalam ekuitas dibebankan sebagai laba atau rugi komprehensif ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba neto. Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan maupun kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan sebagai laba atau rugi.

Cadangan lindung nilai atas arus kas disesuaikan dengan jumlah yang lebih rendah antara keuntungan atau kerugian kumulatif dari instrumen lindung nilai dan perubahan kumulatif nilai wajar dari item lindung nilai.

w. Laba per Saham

Labanya per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023.

Labanya per saham dilusian dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun pelaporan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif.

Pada tahun 2023 dan 2022, labanya per saham dihitung menggunakan total rata-rata tertimbang saham yang beredar setelah terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali (Catatan 1g).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Financial instruments and hedge
accounting (continued)**

Initial Recognition and Measurement
(continued)

The effective portion of changes in the fair value of the financial instruments that are designated and qualified as cash flow hedges are recognized in "Other comprehensive income" and reported to equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in profit or loss. Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods in which the hedged item will affect net profit. When a hedging instrument expires, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time is charged to profit or loss.

The cash flow hedge reserve is adjusted to the lower of the cumulative gain or loss on the hedging instrument and the cumulative change in fair value of the hedged item.

w. Earnings per Share

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023.

Diluted earning per share is calculated by dividing profit for the year attributable to owners of the parent by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the reporting year, adjusted to assume conversion of all potential dilutive ordinary shares.

On 2023 and 2022, earnings per share is computed using total weighted-average number of shares after the event of business combination of entities under common control (Note 1g).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)**

x. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Provisi untuk biaya pembongkaran aset diestimasi berdasarkan beberapa asumsi dan disajikan pada nilai wajar sesuai dengan tingkat diskonto yang berlaku.

y. Informasi Segmen

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk atau jasa tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk atau jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perusahaan dan Entitas Anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

x. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Provision for asset dismantling costs is estimated based on certain assumptions and carried at fair value based on applicable discount rates.

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the Group that is engaged either in providing certain products or services (business segment), or in providing products or services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. Segments are determined before intra-group balances and intra-group transactions are eliminated as part of consolidation process.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

z. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

aa. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

z. Current and Non-Current Classification

The Group presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- 1) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- 2) held primarily for the purpose of trading,
- 3) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or
- 4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months months after the reporting period, or
- iv) there is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least twelve months months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

aa. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i) In the principal market for the asset or liability, or
- ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

aa. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

aa. Fair Value Measurement (continued)

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.*
- ii) *Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.*
- iii) *Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

aa. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara *level* dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan *level* pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Maret 2024:

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

aa. Fair Value Measurement (continued)

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.

External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective**

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of March 31, 2024:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2024

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang
dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menangguhkan pelunasan,
- hak untuk menangguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menangguhkan liabilitas, dan
- hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

Effective beginning on or after
January 1, 2024

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities
with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- what is meant by a right to defer settlement,
- the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal
1 Januari 2024 (lanjutan)**

**Amendemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang
dengan Kovenan (lanjutan)**

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

**Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam
Jual Beli dan Sewa-balik**

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amendemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

**Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan
Pembiayaan Pemasok**

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amendemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amendemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after
January 1, 2024 (continued)**

**Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities
with Covenants (continued)**

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

**Amendment of PSAK 73: Lease liability in a
Sale and Leaseback**

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right of use it retains.

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

**Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier
Finance Arrangements**

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ab. Standar Akuntansi yang Telah Diterbitkan
Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1
Januari 2025**

PSAK 74: Kontrak Asuransi

Standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, pada saat berlaku efektif PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62: *Kontrak Asuransi*. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung dan reasuransi, terlepas dari entitas yang menerbitkannya, serta untuk jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat, serta beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan dari PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk asuradur.

PSAK 74 berlaku efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025, dengan mensyaratkan angka komparatif. Penerapan dini diperkenankan bila entitas juga menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72 pada atau sebelum tanggal penerapan awal PSAK 74. Standar ini tidak diharapkan memiliki dampak pada pelaporan keuangan Grup pada saat diadopsi untuk pertama kali.

**ac. Dasar Penyajian Informasi Keuangan Entitas
Induk**

Laporan keuangan tersendiri disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Tersendiri" (Catatan 54).

PSAK No. 4 (Revisi 2009) menyatakan bahwa ketika sebuah entitas induk memilih untuk menyajikan laporan keuangan terpisah, laporan keuangan tersebut seharusnya hanya disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan tersendiri yang disajikan oleh entitas induk, di mana investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi dan entitas dikendalikan bersama dicatat berdasarkan atas kepemilikan langsung dan bukan berdasarkan hasil yang dilaporkan dan aset neto entitas investasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ab. Accounting Standards Issued but Not Yet
Effective (continued)**

**Effective beginning on or after January 1,
2025**

PSAK 74: Insurance Contracts

A comprehensive new accounting standard for insurance contracts covering recognition and measurement, presentation and disclosure, upon its effective date, PSAK 74 will replace PSAK 62: *Insurance Contracts*. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts, life, non-life, direct insurance and re-insurance, regardless of the entities issuing them, as well as to certain guarantees and financial instruments with discretionary participation features, while a few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that is more useful and consistent for insurers.

PSAK 74 is effective for reporting periods beginning on or after January 1, 2025, with comparative figures required. Early application is permitted, provided the entity also applies PSAK 71 and PSAK 72 on or before the date of initial application of PSAK 74. This standard is not expected to have any impact to the financial reporting of the Group upon first-time adoption.

**ac. Basis of Preparation of Parent Entity
Financial Information**

The separate financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements" (Note 54).

PSAK No. 4 (Revised 2009) provides that when a parent entity chose to present the separate financial statements, such financial statements should only be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by a parent, in which the investments in the subsidiary, associate entity and jointly controlled entity are accounted for on the basis of the direct equity interest rather than on the basis of the reported results and net assets of the investees.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**ac. Dasar Penyajian Informasi Keuangan Entitas
Induk (continued)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan informasi keuangan entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anak, kecuali untuk investasi pada entitas anak.

Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2009), entitas induk mencatat investasi pada entitas anak menggunakan metode biaya.

Entitas Induk juga mengakui dividen dari entitas anak dan entitas asosiasi pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ac. Basis of Preparation of Parent Entity
Financial Information (continued)**

Accounting policies adopted in the preparation of the parent entity financial information are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the Company and its subsidiaries consolidated financial statements, except for investments in subsidiaries.

In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2009), the parent entity recorded the accounting for investments in subsidiaries using cost method.

The Parent Entity also recognizes dividends from subsidiaries and associate in profit or loss in its separate financial statements when its right to receive the dividends is established.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

Judgements

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian: (lanjutan)

Perpajakan (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 23.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 16.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements: (continued)

Taxes (continued)

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 23.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 16.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak -
Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari setiap entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi sebagian besar pendapatan, biaya dan pendanaan masing-masing entitas.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2u.

Perjanjian konsesi jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Lease term of contracts with renewal and
termination options - the Group as lessee
(continued)

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Determination of functional currency

The functional currency of each entity within the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that mainly influence the revenues, costs and financing of each of the respective entities.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by complying the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2u.

Service concession arrangement

ISAK 16 outlines an approach to account for service concession arrangement arising from entities providing public services. ISAK 16 provides that the operator (concession right beneficiary) should not account for the infrastructure as fixed assets, but should recognize a financial asset and/or an intangible asset.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Otoritas Pelabuhan ("OP") memberikan hak kepada Perusahaan termasuk hak untuk melaksanakan proyek, hak untuk memasuki, mengakses dan menggunakan area konsesi dengan tujuan melaksanakan proyek dengan tanpa membatasi hak OP dalam menjalankan wewenangnya, sesuai dengan Perjanjian Konsesi dan hukum yang berlaku (Catatan 48).

Pada akhir masa konsesi jasa, Grup harus menyerahkan terminal pelabuhan dan alur pelayaran kepada OP bebas dari setiap bentuk pembebanan, termasuk tanah reklamasi, aset tidak bergerak dan aset bergerak yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian terminal pelabuhan dan alur pelayaran.

Grup berpendapat bahwa Perjanjian Konsesi memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, di mana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

Grup diharuskan oleh ISAK 16 untuk menyajikan unsur pendapatan yang merefleksikan pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi atau peningkatan kemampuan aset konsesi yang dilakukan selama berjalan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mengakui pendapatan dari jasa konstruksi atas aset konsesi masing-masing sebesar dan Rp2.897.789.567 dan Rp2.397.701.575.

Grup mengakui pendapatan konstruksi aset konsesi dan biaya konstruksi atas aset konsesi sesuai dengan PSAK 34. Grup mengukur pendapatan konstruksi atas aset konsesi pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau akan diterima tanpa margin.

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan

Untuk piutang usaha dan aset kontrak, Grup menerapkan panduan praktis dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Grup tidak mengidentifikasi perubahan dalam risiko kredit, melainkan mengukur penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekpektasian sepanjang kepemilikan aset pada tanggal pelaporan. Grup telah membentuk matriks provisi yang didasarkan pada data historis kerugian kredit, disesuaikan dengan faktor-faktor perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus terkait pelanggan dan lingkungan ekonomi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Port Authority ("OP") granted the rights to the Company, including the right to implement the project, the right to enter, access and use the concession area with the objective of implementing the project without limiting the right of OP in running its authority, in accordance with the Concession Agreement and applicable law (Note 48).

Upon expiry of the service concession period, the Group shall handover the port terminal and shipping channel free of any form of charges, including reclamation land, non-removable assets and movable assets therein directly related to, and in connection with, the operation of the port terminal and shipping channel.

The Group has made judgement that the Concession Agreement qualifies under the intangible asset model, wherein the concession asset is recognized as an intangible asset in accordance with PSAK 19, "Intangible Assets".

The Group is required by ISAK 16 to present an income line reflecting the income from construction or improvements to concession assets made during the year in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. For the year ended December 31, 2023 dan 2022, the Group recognized construction revenue amounting to and Rp2,897,789,567 and Rp2,397,701,575, respectively.

The Group recognizes construction revenue of concession asset and construction costs of concession asset in accordance with PSAK 34. The Group measures construction revenue at the fair value of the consideration received or to be received without margin.

Expected Credit Loss for Financial Assets

For trade receivables and contract assets, the Group applies practical guidelines in calculating expected credit losses. Accordingly, the Group does not identify changes in credit risk, but rather measures the allowance for losses based on expected credit losses as long as the assets hold at the reporting date. The Group has established a provisioning matrix based on historical data on credit losses, adjusted for specific forward-looking factors related to customers and the economic environment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Kerugian Kredit Ekpektasian untuk Aset Keuangan
(lanjutan)

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, Grup menerapkan metode yang disederhanakan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Dalam melakukan evaluasi itu, Grup menilai kembali peringkat kredit eksternal dari instrumen utang. Selain itu, Grup menganggap bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika pembayaran kontrak lebih dari 30 hari tunggakan.

Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa piutang usaha mengalami penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, dihitung berdasarkan kondisi terkini dan tingkat ketertagihan historis piutang usaha. Provisi ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan taksiran. Rincian atas sifat dan jumlah tercatat provisi penurunan nilai piutang diungkapkan pada Catatan 6 dan 7.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Expected Credit Loss for Financial Assets
(continued)

For debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, the Group applies the simplified method. At each reporting date, the Group evaluates whether a debt instrument is considered to have low credit risk using all available information without undue cost or effort. In conducting this evaluation, the Group reassesses the external credit rating of the debt instrument. In addition, the Group considers that there has been a significant increase in credit risk when the contract payment is more than 30 days in arrears.

The Group evaluates whether there is objective evidence that trade receivables are impaired at the end of each reporting period. Provision for impairment of trade and other receivables is calculated based on the current condition and historical collectibility of trade receivables. These provisions are adjusted periodically to reflect actual and estimated results. Details of the nature and carrying amount of provision for impairment of receivables are disclosed in Notes 6 and 7.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL atas piutang usaha. Tarif provisi didasarkan pada hari yang lewat jatuh tempo untuk mengelompokkan pelanggan ke segmen yang memiliki pola kerugian serupa. Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif *default* yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi kedepan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default* di sektor usaha Grup, tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi ke depan dianalisa kembali.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang dapat diamati secara historis, taksiran kondisi ekonomi dan ECL adalah estimasi yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual *default* pelanggan yang sebenarnya di masa depan.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Masa manfaat dari masing-masing aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset.

Dengan demikian, hasil operasi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns. The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Estimate useful lives of fixed assets

The useful life of each of the item of the Group's fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2l. Tidak terdapat perubahan dalam estimasi masa manfaat aset tetap selama tahun berjalan.

Penurunan nilai aset nonkeuangan

Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil operasi Grup.

Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 2j, 2k, 2l, 2o, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 17.

Pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 23.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas pada laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak jika besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal akan memadai untuk pemanfaatan perbedaan temporer yang diakui. Estimasi manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang diakui berdasarkan kemungkinan waktu terealisasinya dan jumlah laba fiskal pada masa mendatang serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2s dan 23.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Estimate useful lives of fixed assets (continued)

Estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2l. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the year.

Impairment of non-financial assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of the Group's operations.

Further details are disclosed in Notes 2h, 2j, 2k, 2l, 2o, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 17.

Income tax

Significant judgement is involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of taxable income. Further details are disclosed in Note 23.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all temporary differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective taxes bases to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Notes 2s and 23.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah tepat dan wajar, namun demikian, perbedaan signifikan pada hasil aktual, atau perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi tersebut dapat berdampak signifikan pada jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo liabilitas imbalan kerja karyawan masing-masing sebesar Rp6.269.173.328 (2022: Rp5.769.306.844) (Catatan 29).

Penyusutan aset hak-guna

Biaya perolehan aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset hak-guna antara 1 (satu) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Employee benefits

The measurement of the Group's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the period in which they occur.

While it is believed that the management's assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of employee benefits liability. As of December 31, 2023, employee benefits liability amounted to Rp6,269,173,328 (2022: Rp5,769,306,844) (Note 29).

Depreciation of right-of-use assets

The costs of right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these leased assets to be within 1 (one) to 33 (thirty three) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa (lanjutan)

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

Amortisasi aset hak konsesi

Grup melakukan amortisasi aset konsesi selama masa konsesi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pemeliharaan aset konsesi

Provisi pemeliharaan aset konsesi ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan sehubungan dengan kewajiban penyerahan aset kepada OP dalam kondisi baik pada akhir masa konsesi.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
Kas	5.950.787	39.387.247	Cash on hand
Bank	4.113.239.062	6.321.179.839	Cash in banks
Deposito berjangka	8.372.084.401	7.237.073.737	Time deposits
Total kas dan setara kas	<u>12.491.274.250</u>	<u>13.597.640.823</u>	Total cash and cash equivalents

a. Kas

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
Rupiah	<u>5.950.787</u>	<u>39.387.247</u>	Rupiah

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimating the Incremental Borrowing Rate of a Lease (continued)

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

Amortization of concession assets

The Group decided to amortized concession assets using straight line method over the concession period.

Provision for concession assets maintenance

Provision for concession assets maintenance will be recorded periodically based on the estimated provision needed for maintenance in relation to the obligation to transfer assets to OP in good condition at the end of concession period.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

a. Cash on hand

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

b. Bank

b. Cash in banks

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	217.830.230	306.183.071	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	60.069.815	58.413.072	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	50.404.689	61.649.190	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	2.440.426	408.410	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank BTPN Tbk	1.162.837	-	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BCA Syariah	1.019.735	736.496	PT Bank BCA Syariah
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	1.742.849	2.539.415	Others (each below Rp1 billion)
Pihak berelasi (Catatan 44a)	3.310.531.140	4.394.220.513	Related parties (Note 44a)
Subtotal	3.645.201.721	4.824.150.167	Sub-total
Dolar AS:			US Dollar:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.408.090	1.431.311	PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1 miliar)	19.137	402.884	Others (each below Rp1 billion)
Pihak berelasi (Catatan 44a)	466.610.114	1.495.195.477	Related parties (Note 44a)
Subtotal	468.037.341	1.497.029.672	Sub-total
Total bank	4.113.239.062	6.321.179.839	Total cash in banks

c. Deposito berjangka

c. Time deposits

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah:			Rupiah:
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	331.000.000	474.600.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia	320.000.000	93.000.000	PT Bank Muamalat Indonesia
PT Bank Mayapada International Tbk	72.000.000	-	PT Bank Mayapada International Tbk
PT Bank BTPN Tbk	56.000.000	-	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank BTPN Syariah Tbk	27.000.000	45.000.000	PT Bank BTPN Syariah Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	18.600.000	15.100.000	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	10.000.000	10.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	8.000.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	5.000.000	5.500.000	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	2.000.000	2.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	-	45.000.000	PT Bank Permata Tbk
Pihak berelasi (Catatan 44a)	6.304.411.208	6.377.884.801	Related parties (Note 44a)
Subtotal	7.154.011.208	7.068.084.801	Sub-total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

c. Deposito berjangka (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Dolar AS:		
Pihak ketiga		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	1.047.611.884	-
Pihak berelasi (Catatan 44a)	170.461.309	168.988.936
Subtotal	1.218.073.193	168.988.936
Total deposito berjangka	8.372.084.401	7.237.073.737

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Rupiah	5,00% - 7,35%	3,21% - 6,00%
Dolar AS	1,15% - 6,90%	0,20% - 4,25%

Rekening bank yang terdiri dari rekening penampungan dijadikan jaminan atas fasilitas kredit bilateral yang diperoleh BMS dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan atas fasilitas pinjaman bank sindikasi yang diperoleh CTP dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, dan PT Bank DKI (Catatan 25).

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

c. Time deposits (continued)

	US Dollar:
	Third parties
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
	Related parties (Note 44a)
	Sub-total
Total time deposits	Total time deposits

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

The cash in bank consists of escrow account as collateral for bilateral credit facilities from BMS obtained from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk and from syndicated loan obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Pan Indonesia Tbk, and PT Bank DKI (Note 25).

5. INVESTASI JANGKA PENDEK

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Deposito berjangka		
Rupiah:		
Pihak ketiga		
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	20.000.000
Pihak berelasi (Catatan 44b)	2.675.000.000	1.667.500.000
Dolar AS:		
Pihak berelasi (Catatan 44b)	1.094.582.414	2.255.550.108
Total deposito berjangka	3.769.582.414	3.943.050.108
Efek yang diperdagangkan	1.962	1.891
Total investasi jangka pendek	3.769.584.376	3.943.051.999

5. SHORT-TERM INVESTMENTS

	Time deposits
	Rupiah:
	Third parties
PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk
	Related parties (Note 44b)
	US Dollar:
	Related parties (Note 44b)
	Total time deposits
	Marketable securities
Total short-term investments	Total short-term investments

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

5. INVESTASI JANGKA PENDEK (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun serta tidak dijadikan jaminan.

Rincian suku bunga tahunan deposito berjangka berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year Ended December 31,

	2023	2022	
Rupiah	4,00% - 7,66%	3,15% - 6,05%	Rupiah
Dolar AS	3,00% - 6,37%	0,30% - 4,15%	US Dollar

Efek yang diperdagangkan merupakan instrumen keuangan dalam bentuk reksadana pasar uang.

5. SHORT-TERM INVESTMENTS (continued)

Time deposits represent deposits with maturities of more than 3 (three) months but not more than 1 (one) year and were not used as collateral.

The annual interest rates of the above time deposits based on their currency denomination are as follows:

Marketable securities represent financial instrument in money market mutual funds.

6. PIUTANG USAHA

a. Berdasarkan pelanggan

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	1.841.322.791	1.929.970.138	Private
Perorangan	22.553.520	11.689.593	Individuals
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(807.313.476)	(811.233.846)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	1.056.562.835	1.130.425.885	Third parties - net
Pihak berelasi	630.076.618	644.413.405	Related parties
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(338.476.519)	(324.732.089)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto (Catatan 44c)	291.600.099	319.681.316	Related parties - net (Note 44c)
Total piutang usaha - neto	1.348.162.934	1.450.107.201	Total trade receivables - net

6. TRADE RECEIVABLES

a. By customer

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah	2.462.924.818	2.501.225.677	Rupiah
Dolar AS	31.018.794	84.847.459	US Dollar
Dolar SG	9.317	-	SG Dollar
Total	2.493.952.929	2.586.073.136	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)	Allowance for impairment
Neto	1.348.162.934	1.450.107.201	Net

b. By currency

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

- c. Mutasi saldo penyisihan atas penurunan nilai selama periode pelaporan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Saldo awal	1.135.965.935	1.161.228.927
Penyisihan	66.694.712	57.355.739
Pemulihan	(56.870.652)	(82.618.731)
Saldo akhir	1.145.789.995	1.135.965.935

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Tabel berikut menyajikan analisis umur piutang usaha.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Belum jatuh tempo	462.294.078	263.711.508
Lewat jatuh tempo		
1-90 hari	707.857.139	949.936.337
91-180 hari	130.920.890	217.120.498
Lebih dari 180 hari	1.192.880.822	1.155.304.793
Subtotal	2.493.952.929	2.586.073.136
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)
Neto	1.348.162.934	1.450.107.201

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

- c. Movements in the balance of allowance for impairment during the reporting period are as follows:

Beginning balance
Allowance for impairment
Reversal
Ending balance

Based on the results of review for impairment at the end of the year, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

The following table presents the aging analysis of trade receivables.

Not yet overdue
Overdue
1-90 days
91-180 days
More than 180 days
Sub-total
Less:
Allowance for impairment
Net

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Swasta	91.431.732	105.476.103
Perorangan	7.265.270	7.022.243
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(54.083.917)	(57.853.336)
Pihak ketiga - neto	44.613.085	54.645.010
Pihak berelasi	192.224.567	420.385.729
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(21.238.757)	(28.203.948)
Pihak berelasi - neto (Catatan 44d)	170.985.810	392.181.781
Piutang lain-lain - neto	215.598.895	446.826.791

7. OTHER RECEIVABLES

Third parties
Private
Individuals
Less:
Allowance for impairment
Third parties - net
Related parties
Less:
Allowance for impairment
Related parties - net (Note 44d)
Other receivables - net

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	86.057.284	158.627.341	<i>Beginning balance</i>
Pemulihan tahun berjalan	(10.734.610)	(72.570.057)	<i>Recovery for the year</i>
Saldo akhir	75.322.674	86.057.284	<i>Ending balance</i>

Berdasarkan hasil penelaahan keadaan masing-masing piutang pada akhir tahun pelaporan, manajemen Grup berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

7. OTHER RECEIVABLES

The movement in the allowance for impairment of other receivable are as follows:

Based on review of the status of each individual other receivable accounts at the end of the reporting year, the Group's management believes that the allowance for impairment loss is adequate to cover possible losses from uncollectible other receivables.

8. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Uang muka			<i>Advances</i>
Operasional	98.158.135	101.992.679	<i>Operational</i>
Lain-lain	36.482.420	16.008.986	<i>Others</i>
Subtotal	134.640.555	118.001.665	<i>Sub-total</i>
Beban dibayar di muka			<i>Prepaid expenses</i>
Kerja sama mitra usaha	19.334.188	3.208.355	<i>Partnership</i>
Asuransi	11.707.441	29.205.098	<i>Insurance</i>
Pegawai	10.113.663	24.814.892	<i>Employees</i>
Umum	6.940.539	7.765.609	<i>General</i>
Sewa	4.652.231	22.346.127	<i>Rental</i>
Pemeliharaan	1.263.330	974.611	<i>Maintenance</i>
Lain-lain	19.891.860	19.163.903	<i>Others</i>
Subtotal	73.903.252	107.478.595	<i>Sub-total</i>
Total	208.543.807	225.480.260	<i>Total</i>

8. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

9. PENDAPATAN MASIH AKAN DITERIMA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pihak ketiga	572.269.934	543.670.248	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 44e)	152.492.130	107.559.957	<i>Related parties (Note 44e)</i>
Total	724.762.064	651.230.205	<i>Total</i>

9. ACCRUED REVENUES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

10. PERSEDIAAN

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Suku cadang	209.207.446	212.364.275	Spareparts
Bahan bakar	63.957.583	67.065.664	Fuels
Alat tulis dan barang cetakan	341.076	188.794	Stationaries and printings
Obat, bahan, dan alat medis	455.367	288.194	Medicines, materials, and medical equipment
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp250 juta)	7.461.249	4.467.560	Others (each below Rp250 million)
Total	281.422.721	284.374.487	Total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan persediaan usang	(10.994.431)	(7.383.976)	Allowance for inventory obsolescence
Neto	270.428.290	276.990.511	Net

10. INVENTORIES

Mutasi penyisihan persediaan usang adalah sebagai berikut:

The movements are the allowance for inventory obsolescence is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal	7.383.976	8.484.930	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	3.716.227	693.962	Allowance for the year
Penghapusan selama tahun berjalan	(105.772)	(1.794.916)	Write-off during the year
Saldo akhir	10.994.431	7.383.976	Ending balance

11. INVESTASI JANGKA PANJANG

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Investasi pada entitas asosiasi	3.981.210.179	3.483.541.212	Investment in associates entities
Investasi pada penyertaan saham	34.840.893	35.239.244	Investment in share of stocks
Investasi pada surat utang	692.386.251	600.010.734	Investment in bonds
Total	4.708.437.323	4.118.791.190	Total

11. LONG-TERM INVESTMENT

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

a. Investasi pada entitas asosiasi

a. Investment in associates entities

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Metode ekuitas			Equity method
BKMS	1.593.511.334	1.238.232.578	BKMS
JICT (Catatan 49g)	1.032.753.955	1.029.969.681	JICT (Note 49g)
NPCT1 (Catatan 49c)	456.415.776	483.859.214	NPCT1 (Note 49c)
PHC	117.779.582	96.292.473	PHC
TNU	77.332.921	30.975.946	TNU
LNG	72.857.573	72.322.343	LNG
RSP	62.064.984	46.976.836	RSP
PTI	35.655.696	21.977.341	PTI
Ambapers	33.287.648	29.483.810	Ambapers
BNCT	4.363.877	-	BNCT
JBT	3.684.958	13.911.836	JBT
PCN	230.665	2.186.625	PCN
EMS	330.529	330.529	EMS
NWPKL			FVOCI
PBM IHC	490.940.681	417.022.000	PBM IHC
Total	3.981.210.179	3.483.541.212	Total

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

The movements of investments in associates are as follows:

31 Desember/December 31, 2023						
Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Nilai tercatat/ Carrying value		
Metode ekuitas						Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	51,00%	249.961.243	297.284.256	485.508.456	1.032.753.955	JICT
PHC	31,73%	45.060.000	73.398.576	(678.994)	117.779.582	PHC
RSP	32,88%	13.706.360	44.867.544	3.491.080	62.064.984	RSP
Ambapers	40,00%	6.000.000	27.062.508	225.140	33.287.648	Ambapers
JBT	13,86%	131.048.000	(127.341.175)	(21.867)	3.684.958	JBT
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	Portek Indonesia
Dimiliki melalui BJTI						Owned through the BJTI
BKMS	40,00%	800.000.000	794.086.991	(575.657)	1.593.511.334	BKMS
TNU	40,00%	68.500.000	8.834.969	(2.048)	77.332.921	TNU
PCN	30,00%	1.500.000	(1.279.704)	10.369	230.665	PCN
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	EMS
Dimiliki melalui IPC TPK						Owned through IPC TPK
NPCT1	51,00%	173.770.056	213.422.503	69.223.217	456.415.776	NPCT1
Dimiliki melalui PMS						Owned through the PMS
LNG	49,00%	71.050.000	1.807.573	-	72.857.573	LNG
Dimiliki melalui PIL						Owned through the PIL
PTI	20,00%	18.000.000	17.655.696	-	35.655.696	PTI
Dimiliki melalui PTP1						Owned through the PTP1
BNCT	51,00%	5.100.000	(736.123)	-	4.363.877	BNCT
NWPKL						FVOCI
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	202.190.681	490.940.681	PBM IHC
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	(20.628.000)	-	PT Djakarta Llyod
Total		1.896.044.159	1.346.423.643	738.742.377	3.981.210.179	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

a. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

a. Investment in associates entities (continued)

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements of investments in associates are as follows: (continued)

	31 Desember/December 31, 2022					
	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Harga perolehan/ Cost	Akumulasi bagian laba (rugi) entitas asosiasi/ Accumulated equity in net income (loss) of associates	Penghasilan (rugi) komprehensif lain/ Other comprehensive income (loss)	Nilai tercatat/ Carrying value	
Metode ekuitas						Equity method
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
JICT	51,00%	249.961.243	289.367.055	490.641.383	1.029.969.681	JICT
PHC	31,73%	45.060.000	51.716.789	(484.316)	96.292.473	PHC
RSP	32,88%	13.706.360	32.446.516	823.960	46.976.836	RSP
Ambapers	40,00%	6.000.000	23.401.854	81.956	29.483.810	Ambapers
JBT	13,86%	131.048.000	(117.082.973)	(53.191)	13.911.836	JBT
Portek Indonesia	49,00%	2.670.500	(2.670.500)	-	-	Portek Indonesia
Dimiliki melalui BJTI						Owned through the BJTI
BKMS	40,00%	800.000.000	438.187.227	45.351	1.238.232.578	BKMS
TNU	40,00%	68.500.000	(37.524.054)	-	30.975.946	TNU
PCN	30,00%	1.500.000	686.625	-	2.186.625	PCN
EMS	30,00%	300.000	30.529	-	330.529	EMS
Dimiliki melalui IPC TPK NPCT1	51,00%	173.770.056	280.432.975	29.656.183	483.859.214	Owned through IPC TPK NPCT1
Dimiliki melalui PMS LNG	49,00%	71.050.000	1.272.343	-	72.322.343	Owned through the PMS LNG
Dimiliki melalui PIL PTI	20,00%	18.000.000	3.977.341	-	21.977.341	Owned through the PIL PTI
NWPKL						FVOCI
Dimiliki melalui Perusahaan						Owned through the Company
PBM IHC	6,00%	288.750.000	-	128.272.000	417.022.000	PBM IHC
PT Djakarta Llyod	2,90%	20.628.000	-	(20.628.000)	-	PT Djakarta Lloyd
Total		1.890.944.159	964.241.727	628.355.326	3.483.541.212	Total

b. Investasi pada saham

b. Investment in share of stock

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
NWPKL			FVOCI
PT Astra International Tbk	14.125.000	14.250.000	PT Astra International Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	7.564.936	7.428.876	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	4.951.368	4.217.832	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	2.076.000	1.236.000	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	6.123.589	8.106.536	Others (each below Rp2 billion)
Total	34.840.893	35.239.244	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

11. INVESTASI JANGKA PANJANG (lanjutan)

11. LONG-TERM INVESTMENT (continued)

c. Investasi pada surat utang

c. Investment in bonds

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	68.747.400	57.277.510	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	20.242.500	20.834.400	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	10.866.900	11.799.700	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Samator Indo Gas Tbk	10.450.000	10.715.000	PT Samator Indo Gas Tbk
PT Merdeka Gold Copper Tbk	10.318.000	-	PT Merdeka Gold Copper Tbk
PT Mora Telematika Indonesia Tbk	10.244.000	10.798.250	PT Mora Telematika Indonesia Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	10.190.000	-	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Angkasa Pura I (Persero)	10.000.000	10.607.800	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	10.000.000	-	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Oki Pulp & Paper Mills	9.996.500	-	PT Oki Pulp & Paper Mills
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5.222.500	5.175.000	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Medco Power Indonesia	-	50.512.500	PT Medco Power Indonesia
Lain-lain (dalam Reksadana)	40.151.100	-	Others (on Mutual funds)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp2 miliar)	475.957.351	422.290.574	Others (each below Rp2 billion)
Total	692.386.251	600.010.734	Total

12. PROPERTI INVESTASI

12. INVESTMENT PROPERTIES

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/
Year Ended December 31, 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	824.489.045	32.227.505	-	6.850.293	863.566.843	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	702.192.357 176.269.950	- -	- -	37.155.081 95.341.149	739.347.438 271.611.099	Building and port facilities Roads and buildings
Total	1.702.951.352	32.227.505	-	139.346.523	1.874.525.380	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan Jalan dan bangunan	(437.731.763) (30.373.352)	(24.086.699) (1.219.002)	- -	(128.098) 1.266.693	(461.946.560) (30.325.661)	Building and port facilities Roads and buildings
Total	(468.105.115)	(25.305.701)	-	1.138.595	(492.272.221)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(1.526.810)	-	-	-	(1.526.810)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	1.233.319.427				1.380.726.349	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

12. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

12. INVESTMENT PROPERTIES (Continued)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/
Year Ended December 31, 2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	576.010.187	248.478.858	-	-	824.489.045	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	700.131.110	2.061.247	-	-	702.192.357	Building and port facilities
Jalan dan bangunan	28.074.591	-	-	148.195.359	176.269.950	Roads and buildings
Total	1.304.215.888	250.540.105	-	148.195.359	1.702.951.352	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(416.980.942)	(20.750.821)	-	-	(437.731.763)	Building and port facilities
Jalan dan bangunan	(12.274.158)	(482.441)	-	(17.616.753)	(30.373.352)	Roads and buildings
Total	(429.255.100)	(21.233.262)	-	(17.616.753)	(468.105.115)	Total
Dikurangi:						Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.526.810)	-	-	-	(1.526.810)	Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	873.433.978				1.233.319.427	Net carrying value

Beban penyusutan properti investasi dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Depreciation expenses of investment properties are recorded as part of operating expenses.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp37.960.742.762 dan Rp36.963.174.503, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas properti investasi.

The fair value of investment properties as of December 31, 2023 and 2022 are calculated amounting to Rp37,960,742,762 and Rp36,963,174,503, respectively, which determined based on Sales Value of Tax Object (NJOP) of the investment properties.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp103.541.622, reklasifikasi aset tetap dalam penyelesaian menjadi properti investasi sebesar Rp38.477.468 dan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap sebesar Rp1.533.972.

Reclassification as of December 31, 2023 includes reclassification of fixed assets into investment property amounting to Rp103,541,622, reclassification of fixed assets under construction into investment properties amounting to Rp38,477,468 and reclassification of investment property into fixed asset amounting to Rp1,533,972.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/
Year Ended December 31, 2023

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	3.743.932.670	4.569.699	-	(246.269.312)	3.502.233.057	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	20.767.002.876	684.494.266	(883.943)	808.552.993	22.259.166.192	Building and port facilities
Kapal	5.758.866.093	50.705.194	-	154.120.349	5.963.691.636	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.649.210.544	408.441.220	(31.986.246)	509.763.156	17.535.428.674	Port facility equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	3.676.364.496	9.969.936	(2.965.259)	16.484.273	3.699.853.446	Port facility installation
Jalan dan bangunan	6.266.749.811	42.361.147	(16.305.516)	295.273.533	6.588.078.975	Roads and buildings
Peralatan	1.535.155.304	17.051.598	(30.479.569)	120.093.244	1.641.820.577	Equipment
Kendaraan	177.809.769	1.899.909	(4.796.426)	5.075.399	179.988.651	Vehicles
Emplasemen	654.521.177	397.876	(858.593)	43.723.352	697.783.812	Emplacement
Subtotal	59.229.612.740	1.219.890.845	(88.275.552)	1.706.816.987	62.068.045.020	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	6.679.813.380	2.118.483.817	(269.438.610)	(5.478.774.636)	3.050.083.951	Construction in progress
Total	65.909.426.120	3.338.374.662	(357.714.162)	(3.771.957.649)	65.118.128.971	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(5.559.755.780)	(1.556.683.145)	445.883	(7.287.673)	(7.123.280.715)	Building and port facilities
Kapal	(2.489.818.281)	(235.548.892)	-	625.689	(2.724.741.484)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(8.190.134.463)	(1.377.728.553)	30.014.833	(20.216.845)	(9.558.065.028)	Port facility equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.324.610.489)	(196.295.985)	2.903.656	15.044.881	(1.502.957.937)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(1.761.782.334)	(247.220.670)	959.725	(5.404.385)	(2.013.447.664)	Roads and buildings
Peralatan	(1.158.052.412)	(122.139.552)	27.283.483	388.148	(1.252.520.333)	Equipment
Kendaraan	(134.142.934)	(13.395.517)	3.927.255	3.172.934	(140.438.262)	Vehicles
Emplasemen	(223.477.580)	(29.594.664)	-	1.508.434	(251.563.810)	Emplacement
Total	(20.841.774.273)	(3.778.606.978)	65.534.835	(12.168.817)	(24.567.015.233)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(33.816.700)	(4.277.605)	733.000	-	(37.361.305)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	45.033.835.147				40.513.752.433	Net carrying value

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/
Year Ended December 31, 2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition Costs
Tanah	3.403.711.516	6.848.233	-	333.372.921	3.743.932.670	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	19.113.857.430	58.521.316	(2.614.969)	1.597.239.099	20.767.002.876	Building and port facilities
Kapal	5.945.716.876	1.131.369	(5.828.290)	(182.153.862)	5.758.866.093	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	16.712.741.883	31.934.176	(152.712.503)	57.246.988	16.649.210.544	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	3.498.893.462	38.151.166	(1.193.710)	140.513.578	3.676.364.496	Port facility installation
Jalan dan bangunan	5.779.160.164	254.628.539	(6.007.112)	238.968.220	6.266.749.811	Roads and buildings
Peralatan	1.669.392.356	46.793.573	(26.010.299)	(155.020.326)	1.535.155.304	Equipment
Kendaraan	178.116.172	3.552.476	(4.002.888)	144.009	177.809.769	Vehicles
Emplasemen	662.029.394	763.729	-	(8.271.946)	654.521.177	Emplacement
Subtotal	56.963.619.253	442.324.577	(198.369.771)	2.022.038.681	59.229.612.740	Sub-total
Aset dalam penyelesaian	7.933.244.086	1.516.684.153	(27.116.331)	(2.742.998.528)	6.679.813.380	Construction in progress
Total	64.896.863.339	1.959.008.730	(225.486.102)	(720.959.847)	65.909.426.120	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(4.401.196.283)	(1.063.910.949)	1.570.254	(96.218.802)	(5.559.755.780)	Building and port facilities
Kapal	(2.332.572.149)	(159.853.661)	5.484.195	(2.876.666)	(2.489.818.281)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(7.428.092.453)	(736.070.333)	144.492.420	(170.464.097)	(8.190.134.463)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(1.154.558.120)	(173.308.240)	830.814	2.425.057	(1.324.610.489)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(1.693.743.550)	(90.397.111)	3.889.623	18.468.704	(1.761.782.334)	Roads and buildings
Peralatan	(1.199.778.545)	(129.120.835)	24.201.233	146.645.735	(1.158.052.412)	Equipment
Kendaraan	(117.378.975)	(9.155.247)	3.251.447	(10.860.159)	(134.142.934)	Vehicles
Emplasemen	(205.674.269)	(24.994.148)	-	7.190.837	(223.477.580)	Emplacement
Total	(18.532.994.344)	(2.386.810.524)	183.719.986	(105.689.391)	(20.841.774.273)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(63.686.073)	-	9.023.472	20.845.901	(33.816.700)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	46.300.182.922				45.033.835.147	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Beban penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mengasuransikan aset tetap sebagai berikut:

31 Desember 2023

Perusahaan Asuransi/ Insurance Company
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Asuransi Tri Pakarta
PT Asuransi Ramayana Tbk
PT MS Amlin
Shipowners Mutual Protection Indemnity Association
PT Asuransi Central Asia
PT Asuransi FPG Indonesia
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
PT Asuransi Jasaraharja Putera

31 Desember 2022

Perusahaan Asuransi/ Insurance Company
PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Asuransi Tri Pakarta
PT Asuransi Ramayana Tbk
PT MS Amlin
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Shipowners Mutual Protection Indemnity Association
PT Asuransi Central Asia
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
PT Asuransi FPG Indonesia
PT Asuransi Wahana Tata
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang diasuransikan.

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp103.541.622, reklasifikasi aset tetap menjadi aset tetap tersedia untuk dijual sebesar Rp4.928.627, reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset takberwujud sebesar Rp3.057.814.606, reklasifikasi aset tetap menjadi aset kerjasama operasi sebesar Rp5.368.675, reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi properti investasi sebesar Rp38.477.468 dan reklasifikasi properti investasi menjadi aset tetap Rp1.533.972.

13. FIXED ASSETS (continued)

Depreciation expense of fixed assets are recorded as part of operating expenses.

As of December 31, 2023 and 2022, the Group insured its fixed assets as follows:

December 31, 2023

Risiko Asuransi/ Insurable Risk	Nilai Pertanggungan Asuransi/Insurance Coverage Amount
Risiko kebakaran, <i>property all risk, industrial all risk</i> dan risiko lainnya/ <i>Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks</i>	Rp37.596.304.247; USD593.000.000

December 31, 2022

Risiko Asuransi/ Insurable Risk	Nilai Pertanggungan Asuransi/Insurance Coverage Amount
Risiko kebakaran, <i>property all risk, industrial all risk</i> dan risiko lainnya/ <i>Risk of fire, property all risk, industrial all risk and other risks</i>	Rp46.585.743.730; USD547.000.000

In management's opinion, the above insurance coverage is adequate to cover any possible losses that may arise from such risks.

Reclassification as of December 31, 2023 includes reclassification of fixed assets into investment property amounting to Rp103,541,622, reclassification of fixed assets into fixed asset for sale amounting to Rp4,928,627, reclassification of assets under construction into intangible assets amounting to Rp3,057,814,606, reclassification of fixed asset into joint operation assets amounting to Rp5,368,675, reclassification of assets under construction into investment properties amounting to Rp38,477,468 and reclassification of investment properties into fixed asset Rp1,533,972.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Reklasifikasi pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk reklasifikasi aset tetap menjadi properti investasi sebesar Rp126.582.190, reklasifikasi aset dalam penyelesaian menjadi aset takberwujud sebesar Rp34.148.365, reklasifikasi aset tetap menjadi aset takberwujud sebesar Rp822.386.523, reklasifikasi aset tidak lancar lainnya menjadi aset tetap sebesar Rp150.272.583 dan reklasifikasi aset takberwujud menjadi aset tetap sebesar Rp111.884.648.

Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap

Pada tahun 2023 dan 2022, Grup menjual dan menghapusbukukan beberapa aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2023/Year 2023

Penjualan aset tetap/Sale of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai pelepasan/Sales value	Nilai buku/Book value	Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) on sales	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	3.569.722	1.557.539	2.012.183	No. 101/DK/PI/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 dan 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ No. 101/DK/PI/XII-2022 dated December 19, 2022 and No. 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021
EDII	167.182	244.303	(77.120)	No. KS-045/LEG/SISTEK-PELINDO/XII/2022 tanggal Desember 2022 dan No. SK.03/9/12/1/PBAN/UTMA/PLND-22 tanggal Desember 2022/ No. KS-045/LEG/SISTEK-PELINDO/XII/2022 dated December, 2022 and SK.03/9/12/1/PBAN/UTMA/PLND-22 dated December, 2022
Total	3.736.904	1.801.842	1.935.063	

Penghapusan aset tetap/Write-off of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai buku/Book value	Rugi penghapusan/ Loss on disposals	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	5.676.381	(5.676.381)	Nota Dinas No: KU.02.08/21/12/1/ASTP/KUMR-22 tanggal 21 Desember 2022/ No. Nomor: KU.02.08/21/12/1/ASTP/KUMR-22 dated December 21, 2022
SPTP	14.165.964	(14.165.964)	Nota Dinas No.: PD.02/5/12/1/BRPR/BRPR-23 tanggal Desember 2023; KU.02.08/28/11/1/BRPR/BRPR-23 tanggal November 2023; dan PD.01/19/12/5/BRPR/BRPR-23 tanggal Desember 2023/ Nota Dinas No.: PD.02/5/12/1/BRPR/BRPR-23 dated December 2023; KU.02.08/28/11/1/BRPR/BRPR-23 dated November 2023; dan PD.01/19/12/5/BRPR/BRPR-23 dated December 2023
SPMT	363.530	(363.530)	No.PP.01/27/12/1/AKPJ/DIRUT/IKT-23 tanggal 27 Desember 2023/ No.PP.01/27/12/1/AKPJ/DIRUT/IKT-23 dated Desember 27, 2023
Total	20.205.875	(20.205.875)	

13. FIXED ASSETS (continued)

Reclassification as of December 31, 2022 includes reclassification of assets into investment property amounting to Rp126,582,190, reclassification of assets under construction into intangible assets amounting to Rp34,148,365, reclassification of assets into intangible assets amounting to Rp822,386,523, reclassification of other non-current assets to assets amounting to Rp150,272,585 and reclassification of intangible assets to assets amounting to Rp111,884,648.

Sale and Write-off of Fixed Assets

In 2023 and 2022, the Group sold and written-off several fixed assets with details as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. FIXED ASSETS (continued)

**Penjualan dan Penghapusan Aset Tetap
(lanjutan)**

Sale and Write-off of Fixed Assets (continued)

Tahun 2022/Year 2022

Penjualan aset tetap/Sale of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai pelepasan/Sales value	Nilai buku/Book value	Laba (rugi) penjualan/Gain (loss) on sales	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	1.549.243	2.385.969	(836.726)	No. 101/DK/PI/XII-2022 tanggal 19 Desember 2022 dan 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ No. 101/DK/PI/XII-2022 dated December 19, 2022 and No. 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021
Perusahaan/ The Company	1.839.654	1.075.161	764.493	SK Menteri no. S-546/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021, 54/DKP/PI.II/IX-2021 tanggal 15 September 2021/ Ministerial Decree No. S-546/MBU/07/2021 dated July 30, 2021 and 54/DKP/PI.II/IX-2021 dated September 15, 2021
Perusahaan/ The Company	6.690.122	6.253.210	436.911	SK Menteri No. S-724/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ Ministerial Decree No. S-724/MBU/09/2021 dated September 23, 2021
Total	10.079.019	9.714.340	364.678	

Penghapusan aset tetap/Write-off of fixed assets

Entitas/Entity	Nilai buku/Book value	Rugi penghapusan/ Loss on disposals	Persetujuan pemegang saham/Dewan Komisaris/Shareholders/Board of Commissioners Approval
Perusahaan/ The Company	520.468	(520.468)	Surat Menteri No. S-546/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021/ Ministerial Decree No. S-546/MBU/07/2021 dated July 30, 2021
BJTI	2.955.783	(2.955.783)	No.KU.03.02/22/12/1/PAPU/KUPP/PLTP-22 tanggal 22 Desember 2022/ No. KU.03.02/22/12/1/PAPU/KUPP/PLTP-22 dated December 22, 2022
EDII	401.274	(401.274)	No.2632/D01/KU.280/09/2022 tanggal 21 September 2022/ No. 2632/D01/KU.280/09/2022 dated September 21, 2022
Perusahaan/ The Company	1.057.920	(1.057.920)	SK Menteri No. S-724/MBU/09/2021 tanggal 23 September 2021/ Ministerial Decree No. S-724/MBU/09/2021 dated September 23, 2021
Total	4.935.445	(4.935.445)	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian terdiri dari:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.872.428.282	5.053.381.370
Instalasi fasilitas pelabuhan	199.206.366	90.024.952
Jalan dan bangunan	180.066.566	397.044.977
Alat fasilitas pelabuhan	171.003.412	188.442.169
Peralatan	58.349.198	113.439.856
Emplasemen	60.407.721	465.103.753
Kapal	55.915.229	333.792.155
Lainnya	452.707.177	38.584.148
Total	3.050.083.951	6.679.813.380

Persentase penyelesaian dan taksiran jangka waktu penyelesaian atas aset dalam penyelesaian yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	76,97% - 95,00%
Pekerjaan pembangunan kapal	14,82%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	84,89%
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	7,80% - 99,00%
Instalasi fasilitas pelabuhan	30,00% - 99,00%
Jalan dan bangunan	5,00% - 99,00%

31 Desember 2022

Jenis aset	Persentase penyelesaian/ Percentage of Completion
Pekerjaan peninggian, perkuatan, dan pendalaman dermaga	9,11% - 94,62%
Pekerjaan pembangunan kapal	80,4% - 82,88%
Pekerjaan perkuatan lapangan penumpukan	16,58% - 93,10%
Bangunan dan alat fasilitas pelabuhan	6,37% - 95,00%
Instalasi fasilitas pelabuhan	10,00% - 92,18%

Biaya perolehan aset dalam penyelesaian tersebut di atas termasuk beban pinjaman yang dikapitalisasi sebesar Rp71.560.858 dan Rp47.306.746 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

13. FIXED ASSETS (continued)

Construction in Progress

Construction in progress consists of:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Bangunan fasilitas pelabuhan	1.872.428.282	5.053.381.370
Instalasi fasilitas pelabuhan	199.206.366	90.024.952
Jalan dan bangunan	180.066.566	397.044.977
Alat fasilitas pelabuhan	171.003.412	188.442.169
Peralatan	58.349.198	113.439.856
Emplasemen	60.407.721	465.103.753
Kapal	55.915.229	333.792.155
Lainnya	452.707.177	38.584.148
Total	3.050.083.951	6.679.813.380

The percentages of completion and estimated completion periods of significant construction in progress as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

December 31, 2023

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2024 - 2025	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2024	Construction of ship
2024	Construction of yard
2024 - 2025	Building and port equipment facilities
2024	Port facility installation
2024 - 2025	Roads and buildings

December 31, 2022

Target penyelesaian/ Target of completion	Type of assets
2023 - 2025	Elevation, reinforcement and dredging of dock project
2023	Construction of ship
2023	Construction of yard
2023 - 2026	Building and port equipment facilities
2023	Port facility installation

Cost of construction in progress includes capitalized borrowing cost amounting to Rp71,560,858 and Rp47,306,746 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

14. ASET KERJASAMA OPERASI

Aset kerjasama operasi merupakan aset yang diserahkan untuk dikelola oleh TPK Koja dan MKO MTKI masing-masing berdasarkan perjanjian kontraktual dengan PT Hutchison Ports Indonesia (Catatan 49d) dan PT Maspion Industrial Estate, dengan rincian sebagai berikut:

14. JOINT OPERATION ASSETS

Jointly controlled assets represent assets that are transferred to be managed by TPK Koja and MKO MTKI based on contractual agreement with PT Hutchison Ports Indonesia (Note 49d) and PT Maspion Industrial Estate, respectively, with details as follow:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ Year ended December 31, 2023						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Tanah	-	-	-	4.960.306	4.960.306	Land
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	86.424.759	-	-	-	86.424.759	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port facility installation
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	1.433.443	2.515.554	Roads and buildings
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	876.747.147	-	-	6.393.749	883.140.896	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(422.773.568)	(20.456.148)	-	(60.467)	(443.290.183)	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(65.656.972)	(5.215.664)	-	-	(70.872.636)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(5.133.256)	(323.210)	-	-	(5.456.466)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(486.871)	(115.837)	-	(1.022.733)	(1.625.441)	Roads and buildings
Peralatan	(1.505.107)	-	-	-	(1.505.107)	Equipment
Emplasemen	(1.243.172)	(177.596)	-	-	(1.420.768)	Emplacement
Total	(496.798.946)	(26.288.455)	-	(1.083.200)	(524.170.601)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(60.467)	-	-	-	(60.467)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	379.887.734				358.909.828	Net carrying value
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/ Year ended December 31, 2022						
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan						Acquisition cost
Bangunan fasilitas pelabuhan	772.669.489	-	-	-	772.669.489	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	87.538.706	-	-	(1.113.947)	86.424.759	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	10.504.447	-	-	-	10.504.447	Port facility installation
Jalan dan bangunan	1.082.111	-	-	-	1.082.111	Roads and buildings
Peralatan	1.535.821	-	-	-	1.535.821	Equipment
Emplasemen	4.530.520	-	-	-	4.530.520	Emplacement
Total	877.861.094	-	-	(1.113.947)	876.747.147	Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(402.256.954)	(20.516.614)	-	-	(422.773.568)	Building and port facilities
Alat fasilitas pelabuhan	(59.719.821)	(5.985.692)	-	48.541	(65.656.972)	Port equipment
Instalasi fasilitas pelabuhan	(4.810.046)	(323.210)	-	-	(5.133.256)	Port facility installation
Jalan dan bangunan	(429.977)	(56.894)	-	-	(486.871)	Roads and buildings
Peralatan	(1.505.107)	-	-	-	(1.505.107)	Equipment
Emplasemen	(1.065.576)	(177.596)	-	-	(1.243.172)	Emplacement
Total	(469.787.481)	(27.060.006)	-	48.541	(496.798.946)	Total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(60.467)	-	-	-	(60.467)	Less: Allowance for impairment
Nilai tercatat neto	408.013.146				379.887.734	Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAK BERWUJUD

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Aset hak konsesi	44.839.160.393	42.332.482.771	Concession rights assets
Piranti lunak	1.446.934.743	1.386.093.582	Software application
Lisensi	93.271.515	93.784.038	License
Lainnya	222.898.942	104.379.824	Others
Aset dalam penyelesaian	3.612.121.799	1.649.219.115	Construction in progress
Subtotal	50.214.387.392	45.565.959.330	Sub-total
Akumulasi amortisasi dan penyisihan penurunan nilai	(3.331.944.124)	(3.019.416.592)	Accumulated amortization allowance for impairment
Neto	46.882.443.268	42.546.542.738	Net

15. INTANGIBLE ASSETS

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset takberwujud tidak dijaminan.

As of December 31, 2023 and 2022, intangible assets are not pledged as collateral.

Aset hak konsesi

Aset hak konsesi merupakan aset yang dibangun berdasarkan hak yang diberikan oleh Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk membangun dan mengoperasikan terminal pelabuhan dan jalan tol Cibitung - Cilincing berdasarkan Perjanjian Konsesi (Catatan 48a).

Concession rights assets

Concession rights assets represent assets which were constructed based on the right granted by Port Authority to the Company to develop and operate port terminal and the Cibitung - Cilincing toll road based on Concession Agreement (Note 48a).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, persentase rata-rata penyelesaian pembangunan terminal pelabuhan dan konstruksi jalan tol masih dalam konstruksi adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022, the average percentage completion of port and toll road construction are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ Port Terminal and Toll Road	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Kalibaru	76,09%	69,79%
Kijing	96,87%	95,62%
Teluk Lamong	100,00%	100,00%
Manyar Gresik	100,00%	91,00%
Makassar New Port	100,00%	94,00%
Cibitung-Cilincing Toll Road	100,00%	98,80%

Biaya pinjaman yang dikapitalisasi dalam aset hak konsesi pembangunan terminal pelabuhan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Borrowing costs capitalized for the concession assets of port terminal for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Terminal Pelabuhan dan Jalan Tol/ Port Terminal and Toll Road	2023	2022
Kalibaru	144.066.595	143.445.657
Kijing	109.285.433	240.350.899
Makassar New Port	113.218.770	256.123.548
Cibitung-Cilincing Toll Road	57.424.475	404.690.477
Manyar Gresik	-	15.136.177

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

15. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset hak konsesi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Piranti lunak

Piranti lunak merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi *Port Wide Solution* untuk pelayanan *car terminal*, *container terminal* dan pergudangan beserta *Annual Technical Support (ATS)* dan *change request*, aplikasi piranti lunak yang berlisensi yang digunakan untuk proses pertukaran data secara elektronik (*electronic data interchange*), aplikasi bidang operasional, ERP (sistem informasi keuangan, personalia, teknik), pengembangan *Port Community System/Inaportnet*, aplikasi *dash board system* untuk menyajikan informasi mengenai performansi operasional, integrasi antar sistem, integrasi *autogate* dan VGM untuk sistem operasi terminal.

16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA

Mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023/ Year ended December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harqa perolehan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	283.428.093	289.805.700	(314.122.196)	(1.588.230)	257.523.367
Kapal	148.030.137	92.316.087	(1.374.212)	(71.403.456)	167.568.556
Alat fasilitas pelabuhan	1.754.274	7.869.901	(6.224.254)	1.754.274	5.154.195
Peralatan	3.038.404	3.812.936	(709.054)	-	6.142.286
Tanah	188.946.426	-	(30.502.421)	(1.588.230)	156.855.775
Kendaraan	76.915.310	36.601.358	(6.789.929)	(6.953.493)	99.773.246
Subtotal	702.112.644	430.405.982	(359.722.066)	(79.779.135)	693.017.425
Akumulasi penyusutan					
Bangunan fasilitas pelabuhan	(93.211.612)	(22.459.417)	8.787.051	5.433.960	(101.450.018)
Kapal	(99.568.953)	(27.446.752)	3.586.070	-	(123.429.635)
Alat fasilitas pelabuhan	(1.754.274)	(11.021.528)	4.469.980	71.403.456	63.097.634
Peralatan	(1.455.887)	(1.967.645)	1.247.267	(1.754.274)	(3.930.539)
Tanah	(7.073.892)	(9.251.669)	8.160.102	-	(8.165.459)
Kendaraan	(45.059.680)	(33.857.778)	10.923.393	3.107.763	(64.886.302)
Subtotal	(248.124.298)	(106.004.789)	37.173.863	78.190.905	(238.764.319)
Nilai tercatat neto	453.988.346				454.253.106

15. INTANGIBLE ASSETS (continued)

The Group's management believes that there was no impairment in the value of concession rights assets as of December 31, 2023 and 2022.

Software

Software application represents cost incurred for the development of *Port Wide Solution* application for *car terminal* services, *container terminal* services and *warehouse* and *Annual Technical Support (ATS)* and *change request*, licensed software application used for *electronic data interchange*, *operational application*, *ERP (finance, human resources, technical information system)*, *development of Port Community System/Inaportnet*, *dash board system* application to present information regarding operational performance, *system integration*, *autogate integration* and *VGM* for terminal operating system.

16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES

The movements in right-of-use assets are as follows:

Acquisition costs
Port facilities
Vessels
Port equipment
Equipments
Lands
Vehicles

Accumulated depreciation
Port facilities
Vessels
Port equipment
Equipment
Lands
Vehicles

Subtotal
Net carrying value

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

**16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022/
Year ended December 31, 2022

	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga perolehan						Acquisition costs
Bangunan fasilitas pelabuhan	203.669.947	206.935.857	(127.177.711)	-	283.428.093	Port facilities
Kapal	119.407.557	38.428.227	(9.805.647)	-	148.030.137	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	25.697.627	986.764	(24.930.117)	-	1.754.274	Port equipment
Peralatan	98.735.557	587.533	(96.284.686)	-	3.038.404	Equipments
Tanah	173.665.160	31.991.371	(16.710.105)	-	188.946.426	Lands
Kendaraan	36.365.322	42.604.722	(2.054.734)	-	76.915.310	Vehicles
Subtotal	657.541.170	321.534.474	(276.963.000)	-	702.112.644	Subtotal
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Bangunan fasilitas pelabuhan	(71.811.896)	(21.496.959)	97.243	-	(93.211.612)	Port facilities
Kapal	(84.619.316)	(19.067.430)	4.117.793	-	(99.568.953)	Vessels
Alat fasilitas pelabuhan	(18.432.755)	(13.422.030)	30.100.511	-	(1.754.274)	Port equipment
Peralatan	(10.742.429)	(4.442.654)	13.729.196	-	(1.455.887)	Equipment
Tanah	(3.576.677)	(9.760.737)	6.263.523	-	(7.073.891)	Lands
Kendaraan	(16.355.908)	(28.703.772)	-	-	(45.059.680)	Vehicles
Subtotal	(205.538.981)	(96.893.582)	54.308.266	-	(248.124.297)	Subtotal
Nilai tercatat neto	452.002.189				453.988.347	Net carrying value

Rincian liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The detail of lease liabilities is as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas sewa			Lease liabilities
Bagian jangka pendek	70.113.816	49.907.726	Current portion
Bagian jangka panjang	417.609.648	385.228.086	Long-term portion
Total	487.723.464	435.135.812	Total

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

Amounts recognized on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban penyusutan aset hak-guna	106.004.789	96.893.582	Depreciation of right-of-use assets
Bunga atas liabilitas sewa	34.441.109	30.313.025	Interest on lease liabilities
Total	140.445.898	127.206.607	Total

Jumlah yang diakui dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in statement of cash flow are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Jumlah kas keluar untuk:			Total cash outflow for:
Pembayaran liabilitas sewa	379.979.003	106.561.367	Payment of lease liabilities
Pembayaran bunga	37.618.212	32.330.966	Payment of interests
Total	417.597.215	138.892.333	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**16. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA
(lanjutan)**

Beberapa transaksi sewa mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
<u>Liabilitas sewa</u>		
Saldo awal	435.135.812	333.885.711
Penambahan selama tahun berjalan	430.405.982	321.534.474
Arus kas	(417.597.215)	(138.892.333)
Perubahan non-kas	42.703.592	38.288.643
Terminasi kontrak	(2.924.707)	(119.680.683)
Saldo akhir	487.723.464	435.135.812

Berdasarkan penilaian manajemen Grup, tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**16. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE
LIABILITIES (continued)**

Some leases contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within its control.

Summary of component of changes in the liabilities arising from leases is as follow:

<u>Lease liabilities</u>
Beginning balance
Additions during the year
Cash flow
Non-cash change
Contract termination
Ending balance

Based on the evaluation of the Group's management, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of right-of-use assets as of December 31, 2023 and 2022.

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Piutang sewa pembiayaan (Catatan 49p)	504.781.807	-
Piutang pemulihan investasi	278.418.557	80.303.277
Uang muka pembelian aset tetap	277.204.540	535.957.148
Piutang perluasan kawasan industri	118.495.097	124.811.321
Pajak final dibayar di muka	108.318.331	113.836.681
Uang jaminan	48.007.618	34.422.211
Jaminan pelaksanaan	37.000.000	37.000.000
Goodwill	32.550.784	42.266.304
Biaya transaksi pinjaman sindikasi	-	29.506.875
Piutang pajak	-	28.361.374
Aset lain-lain	410.965.701	567.274.678
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai	(284.505.507)	(372.232.334)
Total	1.531.236.928	1.221.507.535

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS

Finance lease receivables (Note 49p)
Receivable investment recovery
Advances for purchase of fixed assets
Receivable for expansion of industrial estate
Prepaid final tax
Guarantee
Performance guarantee
Goodwill
Syndicated loan transaction fee
Tax receivables
Other assets
Less:
Accumulated depreciation and impairment

Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Uang muka pembelian aset tetap terutama merupakan uang muka atas pengadaan kapal, pembangunan Terminal Kalibaru dan pembangunan proyek *Bali Maritime Tourism Hub* (BMTH) di Benoa, Bali.

Piutang perluasan kawasan industri merupakan piutang dari BKMS.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara BJTI dengan BKMS No. KKS.005-00/II/BJTI-2020 tanggal 26 Februari 2020, BJTI menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp200.000.000 dalam rangka perluasan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Jangka waktu pinjaman adalah 5 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Bunga pinjaman sebesar 9,5% per tahun yang dibayar setiap bulan dan akan dikenakan denda jika melewati jatuh tempo. Sampai dengan 31 Desember 2023, BKMS telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp200.000.000 dan dibayar sebagian oleh BKMS sehingga saldo pinjaman per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp118.495.097 dan Rp124.811.321.

Pajak final dibayar di muka merupakan pajak final atas pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1, Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang dibayarkan di muka oleh SPSL kepada NPCT1 (Catatan 49c).

Piutang pemulihan investasi adalah piutang atas laba neto TPK Koja yang belum didistribusikan ke Perusahaan.

Jaminan pelaksanaan merupakan bank garansi kepada Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok sehubungan dengan jaminan pelaksanaan pembangunan terminal Kalibaru dan Kijing (Catatan 48a).

Goodwill terutama merupakan *goodwill* yang timbul dari transaksi akuisisi 45,00% kepemilikan saham di CTP (dahulu MTDX) senilai Rp31.407.481 pada tahun 2015.

Uang jaminan diantaranya merupakan jaminan instalasi listrik di Tanjung Priok, bank garansi, telepon, jaringan internet dan mesin fotokopi.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Advances for purchase of fixed assets mainly represent advances for ship procurement, construction of the Kalibaru Terminal and construction for Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) in Benoa, Bali.

Receivable for expansion of industrial estate represents receivables from BKMS.

According to the Loan Facility Agreement between BJTI and BKMS No. KKS.005-00/II/BJTI-2020 dated February 26, 2020, BJTI agreed to provide a loan facility amounting to Rp200,000,000 for the purpose of the extension of industrial estate facilities which is integrated with the port. The loan period is 5 years from the signing date of the agreement. The loan interest is at 9.5% which is paid monthly and will be charged with penalty if it passes the due date. Until December 31, 2023, BKMS has withdrawn the loan amounting to Rp200,000,000 and partially paid by BKMS, therefore, with the loan balance as of December 31, 2023, and 2022 amounting to Rp118,495,097 and Rp124,811,321, and respectively.

Prepaid final tax represents the final tax for the construction and operation of Container Terminal 1, Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port which was paid in advance by SPSL to NPCT1 (Note 49c).

Investment recovery receivables represents receivables from net income of TPK Koja which has not been distributed to the Company.

Performance bond represents bank guarantee to the Port Authority Tanjung Priok in relation to the development of Kalibaru terminal and Kijing Terminal (Note 48a).

Goodwill mainly represents goodwill arising from acquisition of 45.00% shares ownership in CTP (formerly MTDX) amounting to Rp31,407,481 in 2015.

Security deposits represents among others electricity deposits at Tanjung Priok, bank guarantee, deposits for telephone, internet connection and photocopy machine.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

Biaya transaksi pinjaman sindikasi merupakan beban ditangguhkan atas pinjaman sindikasi ke PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang belum efektif per 31 Desember 2022.

Piutang pajak merupakan piutang kelebihan pembayaran pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Piutang pajak telah dibebankan pada tahun berjalan.

Aset tetap tidak produktif merupakan aset tetap yang tidak dapat dioperasikan lagi dalam kegiatan operasional Grup, yang sebagian besar terdiri atas kapal, dan alat-alat fasilitas pelabuhan seperti *transtainer*, *Rubber Tired Gantry Crane (RTGC)*, *forklift*, *reach stacker*, dan *harbour mobile crane*.

Aset lain-lain terutama merupakan biaya yang ditangguhkan dari pengerukan kolam, peralatan *vessel traffic service*, relokasi aset dan perbaikan kapal keruk.

18. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek terdiri dari:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Rupiah		
Pihak ketiga		
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.330.172	2.255.302
Pihak berelasi (Catatan 44f)	-	103.106.529
Total	<u>3.330.172</u>	<u>105.361.831</u>

EDII

Pada tanggal 13 November 2012, EDII memperoleh fasilitas dari PT Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") dimana atas perjanjian tersebut terakhir diperpanjang berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 152/BBL-GSH-COMM/PPP/XI/2022 tanggal 28 November 2022. Adapun fasilitas yang diberikan adalah Fasilitas Rekening Koran sebesar Rp4.000.000 dengan suku bunga 10,25% per tahun; Fasilitas Bank Garansi Rp10.000.000 dan Fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp10.000.000 dengan suku bunga 10,25% per tahun *floating*. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 28 Juni 2024.

17. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)

Syndicated loan transaction fee represent deferred charges on syndicated loans to PT Bank BTPN Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk which have not yet been effective as of 31 December 2022.

Tax receivables represents overpayment of Tax of Land and Building (PBB) and Value Added Tax (VAT). Tax receivables charged to current period.

Unproductive fixed assets are fixed assets that cannot be operated anymore in the Group's operational activities, which mostly consist of ships and port facilities such as transtainer, Rubber Tired Gantry Crane (RTGC), forklift, reach stacker, and harbour mobile crane.

Other assets mainly represents deferred charge for dredging, vessel traffic service equipment, asset relocation and dredges repairment.

18. SHORT-TERM BANK LOANS

Short-term bank loans consist of:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Rupiah		
Third parties		
PT Bank OCBC NISP Tbk	3.330.172	2.255.302
Related party (Note 44f)	-	103.106.529
Total	<u>3.330.172</u>	<u>105.361.831</u>

EDII

On November 13, 2012, EDII obtained a facility from PT Bank OCBC NISP ("Bank OCBC") which the agreement was recently extended based on Amendment to Loan Agreement No. 152/BBL-GSH-COMM/PPP/XI/2022 on November 28, 2022. The facilities provided are Current Account Facility of Rp4,000,000 with an interest rate of 10.25% p.a; Bank Guarantee facility of Rp10,000,000 and Demand Loan Facility of Rp10,000,000 with an interest rate of 10.25% p.a floating. This agreement expires on June 28, 2024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

19. UTANG USAHA

a. Berdasarkan pemasok

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pihak ketiga			Third parties
Swasta	593.671.619	968.720.686	Private
Perorangan	27.218.973	7.842.949	Individuals
Subtotal - pihak ketiga	620.890.592	976.563.635	Subtotal - third parties
Pihak berelasi (Catatan 44g)	636.747.827	1.092.012.208	Related parties (Note 44g)
Total	1.257.638.419	2.068.575.843	Total

b. Berdasarkan mata uang

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah	1.253.627.740	2.044.081.525	Rupiah
Dolar AS	4.010.679	24.494.318	US Dollar
Total	1.257.638.419	2.068.575.843	Total

19. TRADE PAYABLES

a. Based on suppliers

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Third parties			Third parties
Private	593.671.619	968.720.686	Private
Individuals	27.218.973	7.842.949	Individuals
Subtotal - third parties	620.890.592	976.563.635	Subtotal - third parties
Related parties (Note 44g)	636.747.827	1.092.012.208	Related parties (Note 44g)
Total	1.257.638.419	2.068.575.843	Total

b. By currency

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Rupiah	1.253.627.740	2.044.081.525	Rupiah
US Dollar	4.010.679	24.494.318	US Dollar
Total	1.257.638.419	2.068.575.843	Total

**20. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA
PENDEK**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Sewa kuartalan (Catatan 49c dan 49d)	680.459.940	683.682.059	Quarterly rent (Notes 49c and 49d)
Pelayanan jasa perusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	324.642.525	402.204.627	Land, building, water and electricity services
Uang untuk diperhitungkan Pihak ketiga	245.192.878	292.643.156	Advances from customers Third parties
Pihak berelasi (Catatan 44h)	25.275.606	8.286.359	Related parties (Note 44h)
Pendapatan diterima di muka jangka pendek - lainnya	45.794.794	36.400.194	Other short-term unearned revenues
Subtotal	1.321.365.743	1.423.216.395	Sub-total
Bagian lancar pendapatan diterima di muka jangka panjang (Catatan 27)	72.262.428	171.138.682	Current portion of long-term unearned revenue (Note 27)
Total	1.393.628.171	1.594.355.077	Total

Uang untuk diperhitungkan merupakan penerimaan uang di muka dari pelanggan yang akan memperoleh pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik dari Grup.

Advances from customers represents advances received from customers who will receive ship services, goods services, container services and logistic services from the Group.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

21. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pegawai	1.769.464.584
Kerjasama mitra usaha Umum	1.012.776.488
Bunga	689.845.064
Bahan	372.120.797
Pemeliharaan	351.465.388
Asuransi	326.517.786
Biaya konsesi	30.102.165
Lain-lain	21.221.922
Total	845.971.714

Beban akrual - pegawai terutama merupakan beban akrual untuk biaya bonus dan tantiem.

Beban akrual - kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi atas kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan serta beban pegawai nonorganik.

Beban akrual - umum terutama merupakan akrual beban pelatihan dan pendidikan.

Beban akrual - biaya konsesi merupakan biaya konsesi yang harus dibayarkan kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Perjanjian Konsesi (Catatan 48a).

21. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	1.543.094.665	<i>Employees</i>
	1.023.263.751	<i>Partnership</i>
	662.233.036	<i>General</i>
	379.603.334	<i>Interest</i>
	239.342.300	<i>Material</i>
	449.258.262	<i>Maintenance</i>
	30.272.043	<i>Insurance</i>
	40.277.983	<i>Concession fee</i>
	906.239.914	<i>Others</i>
Total	5.273.585.288	Total

Accrued expenses - employees mainly represents accrued expenses for employee's bonus and directors' tantiem.

Accrued expenses - the partnership expenses mainly represents the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports and outsourcing expenses.

Accrued expenses - general mainly represents accrued expenses for training and education.

Accrued expenses - concession fee represents concession fee to be paid to Port Authority in accordance with Concession Agreement (Note 48a).

22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak ketiga	465.350.521
Pihak berelasi (Catatan 44i dan 44j)	659.009.231
Total	1.124.359.752

22. OTHER CURRENT LIABILITIES

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	855.825.793	<i>Third parties</i>
	185.307.298	<i>Related parties</i>
	1.041.133.091	<i>(Notes 44i and 44j)</i>
Total	1.041.133.091	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**22. LIABILITAS JANGKA PENDEK LAINNYA
(lanjutan)**

Rincian liabilitas jangka pendek lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Uang titipan dari pihak ketiga		
Pelanggan swasta	302.322.135	280.341.599
Lain-lain	12.240.669	37.919.696
Pihak berelasi (Catatan 44i)	58.921.643	75.209.277
Subtotal	<u>373.484.447</u>	<u>393.470.572</u>
Lain-lain		
Pihak ketiga	150.787.717	537.564.498
Pihak berelasi (Catatan 44j)	600.087.588	110.098.021
Subtotal	<u>750.875.305</u>	<u>647.662.519</u>
Total	<u>1.124.359.752</u>	<u>1.041.133.091</u>

Uang titipan dari pihak ketiga - pelanggan swasta terutama merupakan sisa uang pengguna jasa kapal, jasa barang, jasa petikemas, dan jasa logistik yang belum dibayarkan kembali kepada pelanggan atau akan diperhitungkan dengan pelayanan berikutnya.

Uang titipan dari pihak ketiga - lain-lain terutama merupakan uang titipan yang berasal dari gaji bulanan pegawai untuk iuran jamsostek, asuransi dan koperasi pegawai.

Liabilitas jangka pendek lainnya - lain-lain pihak ketiga terutama merupakan utang yang timbul dari penerimaan uang jaminan penyediaan listrik.

22. OTHER CURRENT LIABILITIES (continued)

Details of other current liabilities as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Deposit from third parties
Private customers
Others
Related parties (Note 44i)
Sub-total
Others
Third parties
Related parties (Note 44j)
Sub-total
Total

Deposit from third parties - private customers mainly represents remaining deposits from customers for ship services, goods services, container services and logistic services which have not been settled with the customer or will be taken into account with subsequent services.

Deposit from third parties - others mainly represents deposit from employee monthly salary for jamsostek contribution, insurance and employee co-operatives.

Other current liabilities others third party mainly represents payables from deposits received for electricity provision.

23. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	224.505.044	154.235.105
Pajak Penghasilan	149.933.546	159.117.505
Subtotal	<u>374.438.590</u>	<u>313.352.610</u>
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai	468.322.807	524.525.927
Pajak Penghasilan	347.526.287	134.298.106
Subtotal	<u>815.849.094</u>	<u>658.824.033</u>
Total	<u>1.190.287.684</u>	<u>972.176.643</u>

23. TAXATION

a. Prepaid taxes

The Company
Value Added Tax
Income Taxes
Sub-total
Subsidiaries
Value Added Tax
Income Taxes
Sub-total
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

Taksiran tagihan restitusi pajak

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai		
2021	-	5.441.845
Pajak Penghasilan		
2023	454.109.733	-
2022	387.003.886	314.475.286
2021	-	178.467.687
2019	279.182.732	279.182.732
Subtotal	<u>1.120.296.351</u>	<u>777.567.550</u>
Entitas anak		
Pajak Pertambahan Nilai		
2023	1.572.586	-
2022	129.871.913	94.869.273
2021	-	54.509.697
2020	-	16.401.295
2019	-	73.216.764
Pajak Penghasilan	96.366.007	93.094.376
Subtotal	<u>227.810.506</u>	<u>332.091.405</u>
Total	<u>1.348.106.857</u>	<u>1.109.658.955</u>

23. TAXATION (continued)

a. Prepaid taxes (continued)

Estimated claims for tax refund

The Company
Value Added Tax
2021
Income Tax
2023
2022
2021
2019
Sub-total
Subsidiaries
Value Added Tax
2023
2022
2021
2020
2019
Income Tax
Sub-total
Total

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Perusahaan		
Pajak Pertambahan Nilai	230.219.334	248.557.423
Pajak Penghasilan		
Pasal 4(2)	39.904.172	49.651.601
Pasal 21	96.290.015	59.464.194
Pasal 22	322.304	306.414
Pasal 23/26	8.465.992	11.191.059
Lainnya	-	2.861.827
Subtotal	<u>375.201.817</u>	<u>372.032.518</u>
Entitas anak		
PPH badan (Pasal 29)		
2023	136.679.481	-
2022	8.924.517	387.288.280
2021	-	4.390
Pajak Pertambahan Nilai	135.139.413	139.893.953
Pajak Penghasilan		
Pasal 4(2)	13.282.484	14.261.967
Pasal 15	156.467	1.626.972
Pasal 21	140.831.320	59.710.349
Pasal 22	278.136	336.066
Pasal 23/26	30.126.661	24.082.450
Pasal 25	42.945.372	12.533.946
Lainnya	1.992.576	13.502.850
Subtotal	<u>510.356.427</u>	<u>653.241.223</u>
Total	<u>885.558.244</u>	<u>1.025.273.741</u>

The Company
Value Added Tax
Income Taxes
Article 4(2)
Article 21
Article 22
Article 23/26
Others
Sub-total
Subsidiaries
Corporate Income Tax (Article 29)
2023
2022
2021
Value Added Tax
Income Taxes
Article 4(2)
Article 15
Article 21
Article 22
Article 23/26
Article 25
Others
Sub-total
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.607.654.195	4.738.654.133
Dikurangi:		
Laba entitas anak sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	4.205.705.684	3.481.280.655
Pembalikan atas jurnal eliminasi Reversal of intercompany antar perusahaan pada saat konsolidasian	(3.889.251.825)	(2.582.197.428)
Laba sebelum pajak penghasilan badan - Perusahaan	4.291.200.336	3.839.570.906
<u>Beda temporer:</u>		
Penyisihan imbalan kerja karyawan	425.177.136	282.215.912
Bonus dan tantiem	(212.350.451)	424.251.278
Penyisihan penurunan nilai	56.626.951	18.457.408
Penyusutan dan amortisasi	13.721.459	(669.152.231)
<u>Beda permanen:</u>		
Beban umum	624.441.322	569.693.452
Beban kesejahteraan karyawan	111.325	220.737.839
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final	(3.267.104.919)	(3.216.650.190)
Beban berkaitan pajak penghasilan final	1.466.545.415	827.839.493
Bagian laba (neto) entitas asosiasi	(3.168.665.657)	(2.630.034.201)
Beban-beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	230.705.573	461.512.703
Pendapatan yang bukan merupakan objek pajak	(662.781.952)	(24.642.749)
Subtotal	(4.493.573.798)	(3.735.771.286)
Taksiran laba (rugi) pajak	(202.373.462)	103.799.620

23. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax

The reconciliation between income before corporate income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Less:
Income before final and corporate income tax of subsidiaries
elimination entries during consolidation
Income before corporate income tax expenses - the Company
<u>Temporary differences:</u>
Provision for employee benefits
Bonus and tantiem
Allowance for impairment
Depreciation and amortization
<u>Permanent differences:</u>
General expenses
Employees social welfare expenses
Income subject to final income tax
Expenses related to final income tax
Equity in net income of associates
Expenses that are not deductible for tax purposes
Income that are not subject for tax purposes
Sub-total
Estimated taxable income (loss)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan badan dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Laba sebelum pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4.607.654.195	4.738.654.133
Dikurangi: Pendapatan kena pajak final	4.147.656.307	3.484.410.122
Laba sebelum pajak penghasilan badan	459.997.888	1.254.244.011
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	101.199.535	275.933.682
<u>Dampak perbedaan permanen:</u> Beban yang tidak dapat dikurangkan	(275.584.850)	(209.938.623)
Beban pajak penghasilan badan - Perusahaan	(174.385.315)	65.995.059
Beban pajak penghasilan badan - Entitas anak	769.458.247	764.189.217
Total	595.072.932	830.184.276

Untuk tujuan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan, Perusahaan melakukan perhitungan taksiran laba (rugi) pajak secara tahunan.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak pada tahun 2023 akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2023.

23. TAXATION (continued)

c. Corporate income tax (continued)

Reconciliation between corporate income tax expenses and the theoretical tax amount on profit before corporate income tax using the applicable tax rate are as follows:

Income before corporate income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Less:
Income subject to final tax
Income before corporate income tax expenses
Income tax calculated at applicable rate
<u>Effect of permanent differences:</u>
Non deductible expenses
Corporate income tax expense - The Company
Corporate income tax expense - Subsidiaries
Total

For the purpose of filling the annual corporate income tax return, the Company calculate the taxable income (loss) on annual basis.

The calculation of estimated taxable income for the year 2023 will be used as a basis in filling the Annual Corporate Income Tax Return for the year 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

d. Rincian beban pajak penghasilan dan final adalah sebagai berikut:

d. The details of Income tax expenses and final tax expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban pajak final			Final tax expense
Perusahaan	340.249.585	333.173.903	The Company
Entitas anak	175.231.783	155.055.399	Subsidiaries
Total	515.481.368	488.229.302	Total
Beban pajak penghasilan badan			Corporate income tax expense
Kini			Current
Perusahaan	-	22.835.916	The Company
Entitas anak	999.545.702	935.501.582	Subsidiaries
Subtotal	999.545.702	958.337.498	Sub-total
Tangguhan			Deferred
Perusahaan	(174.385.315)	43.159.143	The Company
Entitas anak	(230.087.455)	(171.312.365)	Subsidiaries
Subtotal	(404.472.770)	(128.153.222)	Sub-total
Total	595.072.932	830.184.276	Total

e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Taksiran laba kena pajak			Estimated taxable income
Perusahaan	-	103.799.620	The Company
Entitas anak	1.746.489.525	4.252.279.916	Subsidiaries
Jumlah taksiran penghasilan kena pajak	1.746.489.525	4.356.079.536	Total estimated taxable income
Beban pajak penghasilan badan tahun berjalan			Corporate income tax expense - current
Perusahaan	-	22.835.916	The Company
Entitas anak	999.545.702	935.501.582	Subsidiaries
Jumlah beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	999.545.702	958.337.498	Corporate income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Perhitungan beban pajak penghasilan kini - tahun berjalan dan taksiran lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

- e. The calculation of current income tax expense - current year and estimated overpayment and underpayment of corporate income tax are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka			<i>Less prepaid income tax</i>
Perusahaan	454.109.733	413.888.075	<i>The Company</i>
Entitas anak	908.611.559	590.000.142	<i>Subsidiaries</i>
Jumlah pajak penghasilan dibayar di muka	1.362.721.292	1.003.888.217	<i>Total prepaid income tax</i>
Taksiran utang pajak penghasilan - Pasal 29			<i>Estimated income tax payable - Article 29</i>
Perusahaan	-	-	<i>The Company</i>
Entitas anak	136.679.481	387.288.280	<i>Subsidiaries</i>
Total	136.679.481	387.288.280	Total
Taksiran tagihan restitusi pajak penghasilan			<i>Estimated claims for tax refund</i>
Perusahaan	454.109.733	593.658.018	<i>The Company</i>
Entitas anak	45.745.338	41.786.840	<i>Subsidiaries</i>
Total	499.855.071	635.444.858	Total

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Grup menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

23. TAXATION (continued)

f. Pajak tangguhan

f. Deferred taxes

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as follows:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023/ Year Ended December 31, 2023						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	1.167.736.119	93.538.970	(22.483.386)	22.483.387	1.261.275.090	Employers benefit liabilities
Cadangan beban pegawai	93.335.281	(46.717.099)	-	55.089.939	101.708.121	Reserve for employee expense
Penyisihan penurunan nilai piutang	179.284.211	12.457.929	-	17.094.585	208.836.725	Provision for impairment of receivables
Penyusutan dan amortisasi	(1.186.469.982)	3.018.721	-	(218.922.108)	(1.402.373.369)	Depreciation and amortization
Rugi fiskal	-	44.522.162	-	-	44.522.162	Fiscal loss
Subtotal	253.885.629	106.820.683	(22.483.386)	(124.254.197)	213.968.729	Sub-total
Entitas anak	378.993.810	274.865.031	(624.919)	(23.104.042)	630.129.880	Subsidiaries
Total	632.879.439	381.685.714	(23.108.305)	(147.358.239)	844.098.609	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(231.128.682)	(9.467.530)	11.946	153.740.962	(86.843.304)	Subsidiaries
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022/ Year Ended December 31, 2022						
Dibebankan pada/Charged to						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive income	Ekuitas/ Equity	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Aset Pajak Tangguhan						Deferred Tax Assets
Perusahaan						The Company
Liabilitas imbalan kerja	1.507.790.375	62.087.501	(224.584.339)	(177.557.418)	1.167.736.119	Employers benefit liabilities
Cadangan beban pegawai	55.089.940	93.335.281	-	(55.089.940)	93.335.281	Reserve for employee expense
Penyisihan penurunan nilai piutang	191.845.572	4.060.630	-	(16.621.991)	179.284.211	Provision for impairment of receivables
Penyusutan dan amortisasi	(1.319.415.061)	(147.213.491)	-	280.158.570	(1.186.469.982)	Depreciation and amortization
Subtotal	435.310.826	12.269.921	(224.584.339)	30.889.221	253.885.629	Sub-total
Entitas anak	151.958.012	269.100.988	-	(42.065.190)	378.993.810	Subsidiaries
Total	587.268.838	281.370.909	(224.584.339)	(11.175.969)	632.879.439	Total
Liabilitas Pajak Tangguhan						Deferred Tax Liabilities
Entitas anak	(105.071.621)	(127.083.810)	1.026.749	-	(231.128.682)	Subsidiaries

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak

Perusahaan

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada 27 April 2020, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 sebesar Rp49.937.711. Pemeriksaan pajak telah dimulai tanggal 14 Januari 2021, namun Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian 2019 pada 9 April 2021 yang mengubah lebih bayar pajak penghasilan 2019 menjadi Rp71.958.443.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") sebesar Rp46.291.415 atas pajak penghasilan badan tahun 2019. Selisih antara penyajian kembali lebih bayar pajak penghasilan 2019 dengan SKPLB adalah sebesar Rp25.667.030 yang dicatat sebagai bagian dari beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian tahun 2021.

Pada tanggal 31 Maret 2022, Perusahaan telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp25.215.774. Selisih antara SKPLB dengan pengembalian pajak yang diterima sebesar Rp21.075.639 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2022.

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 27 April 2020, Perusahaan melaporkan lebih bayar pajak penghasilan badan 2019 sebesar Rp152.258.584. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tanggal 21 April 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas pajak penghasilan badan tahun 2019 sebesar Rp126.924.148, beserta keputusan lebih bayar pajak penghasilan badan yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp149.312.463. Pada tanggal 19 Mei 2021, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pokok dan sanksi bunga serta mencatat aset tidak lancar lainnya sebesar Rp126.924.148.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter

The Company

1. Tax assessment for fiscal year 2019

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 27, 2020, the Company submitted overpayment of corporate income tax 2019 amounting to Rp49,937,711. The tax audit has been started on January 14, 2021, but the Company restated the 2019 consolidated financial statement on April 9, 2021 which adjusted the overpayment of income tax 2019 to Rp71,958,443.

On October 28, 2021, the Company received Tax Overpayment Assessment Letter ("SKPLB") related to corporate income tax for year 2019 amounting to Rp46,291,415. The difference between restatement of overpayment of income tax 2019 with SKPLB amounting to Rp25,667,030 recorded as part of income tax expense on the 2021 consolidated statement of profit loss and other comprehensive income.

On March 31, 2022, the Company received a tax refund amounting Rp25,215,774, the difference between SKPLB with tax refund received amounting Rp21,075,639 has been recorded in the 2022 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Regional II (ex. Pelindo II)

On April 27, 2020, the Company submitted overpayment of corporate income tax for fiscal year 2019 amounting to Rp152,258,584. Based on the result of tax audit dated on April 21, 2021, the Company received Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") for the 2019 corporate income tax amounting to Rp126,924,148, along with the decision of Company's overpayment applications were approved by the tax office amounting to Rp149,312,463. On May 19, 2021, the Company has paid the principal and interest penalties and recorded the underpayment in other non-current assets amounting to Rp126,924,148.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

1. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2019 (lanjutan)

Regional II (ex. Pelindo II) (lanjutan)

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPh badan 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 tanggal 7 Juli 2022, memutuskan menolak keberatan Perusahaan.

Pada tanggal 16 September 2022, Perusahaan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Hingga penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan, pengajuan banding oleh Perusahaan masih dalam proses sidang di pengadilan.

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 28 Juni 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp92.435.704 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2020 dari yang diajukan sebesar Rp96.483.977. Atas selisih nilai yang diajukan dengan nilai yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp4.048.272 telah dicatat pada laporan laba rugi.

Regional III (ex. Pelindo III)

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp49.182.325 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2020. Seluruh pengajuan lebih bayar Perusahaan disetujui oleh kantor pajak.

23. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

1. Tax assessment for fiscal year 2019 (continued)

Regional II (ex. Pelindo II) (continued)

On July 15, 2021, the Company filed an objection to the 2019 corporate income tax SKPKB. Based on the Decree of the Director General of Taxes No. KEP-00706/KEB/PJ/WPJ.19/2022 dated July 7, 2022, decided to reject the Company's objection.

On September 16, 2022, the Company filed an appeal to the tax court. Until the issuance of the consolidated statements of the Company, the Company's appeal is still in the process of being heard in court.

2. Tax assessment for fiscal year 2020

Regional II (ex. Pelindo II)

On June 28, 2022, the Company received SKPLB amounting to Rp92,435,704 for overpayment of corporate income tax for fiscal year 2020 from the amount submitted of Rp96,483,977. The difference between the amount submitted and the amount approved by the tax office amounting to Rp4,048,272 has been recorded in the income statement.

Regional III (ex. Pelindo III)

On April 22, 2022, the Company received SKPLB amounting to Rp49,182,325 for the overpayment of corporate income tax for the 2020 fiscal year. The Company's overpayment applications were approved by the tax office.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

2. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020 (lanjutan)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada tanggal 22 April 2022, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp37.244.098 atas pajak penghasilan badan tahun 2020 dari yang diajukan sebesar Rp39.043.430.

Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak untuk masa pajak yang sama, jumlah yang diterima sebesar Rp30.395.852. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp1.799.332 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2022.

3. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Regional II (ex. Pelindo II)

Pada tanggal 13 April 2023, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp139.777.013 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2021 dari yang diajukan sebesar Rp160.812.150. Atas selisih nilai yang diajukan dengan nilai yang disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp21.035.137 telah dicatat laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain konsolidasian tahun 2023.

Regional III (ex. Pelindo III)

Pada tanggal 13 April 2023, Perusahaan menerima SKPLB sebesar Rp45.869.918 atas lebih bayar pajak penghasilan badan tahun pajak 2021. Seluruh pengajuan lebih bayar Perusahaan disetujui oleh fiskus. Pada tanggal 27 April 2023 Perusahaan menerima SPMKP sebesar Rp45.869.918. Pengembalian pajak sebesar SPMKP tersebut telah diterima pada tanggal 30 November 2023.

23. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

2. Tax assessment for fiscal year 2020 (continued)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 22, 2022, the Company received SKPLB related to corporate income tax for year 2020 amounting to Rp37,244,098.

After being compensated for the underpayment of tax for the same tax periods, the amount received was Rp30,395,852. The difference between the proposed amount and the agreed amount of Rp1,799,332 has been recorded in the 2022 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. Tax assessment for fiscal year 2021

Regional II (ex. Pelindo II)

On April 13, 2023, the Company received SKPLB amounting to Rp139,777,013 for overpayment of corporate income tax fiscal year 2021 from the amount submitted of Rp160,812,150. The difference between the amount submitted and the amount approved by the tax authorities amounting to Rp21,035,137 has been recorded in the 2023 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Regional III (ex. Pelindo III)

On April 13, 2023, the Company received SKPLB amounting to Rp45,869,918 for the overpayment of corporate income tax for the 2021 fiscal year. The Company's overpayment applications were approved by the tax authorities. On April 27, 2023, the Company received SPMKP amounting to Rp45,869,918. The tax refund in the amount of the SPMKP was received on November 30, 2023.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

- g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

3. Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021 (lanjutan)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

Pada tanggal 10 April 2023, Perusahaan menerima SKPLB atas pajak penghasilan badan tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp16.212.238 dari yang diajukan sebesar Rp16.573.211. Selisih antara SKPLB dengan jumlah yang diajukan sebesar Rp360.973 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Pada 10 April 2023, Perusahaan menerima SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") untuk masa pajak September 2021 dengan jumlah sebesar Rp9.805.956 dari yang diajukan sebelumnya lebih bayar sebesar Rp5.441.845. Jumlah SKPKB dan yang dilaporkan sebelumnya sebesar Rp15.247.801 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

IPC TPK

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Pada tanggal 8 Juni 2023, IPC TPK menerima SKPLB atas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp10.465.100 dari yang diajukan sebesar Rp12.050.719. Setelah dikompensasikan dengan kurang bayar pajak untuk masa pajak yang sama, jumlah yang diterima sebesar Rp9.382.434. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp1.585.619 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

23. TAXATION (continued)

- g. Tax Assessment Letter (continued)

The Company (continued)

3. Tax assessment for fiscal year 2021 (continued)

Regional IV (ex. Pelindo IV)

On April 10 2023, the Company received SKPLB for corporate income tax for the 2021 fiscal year with agreed amount of Rp16,212,238 from the proposed amount of Rp16,573,211. The difference between the SKPLB and the proposed amount of Rp360,973 has been recorded in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On April 10 2023, the Company received a SKPKB for Value Added Tax ("VAT") for the September 2021 tax period with amount of Rp9,805,956 from the previously proposed overpayment of Rp5,441,845. The sum of SKPKB and previously proposed amounting to Rp15,247,801 has been recorded in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

IPC TPK

Tax assessment for fiscal year 2021

On June 8, 2023, IPC TPK received tax SKPLB for fiscal year 2021, with agreed amount is Rp10,465,100 from proposed amount of Rp12,050,719. After being compensated with underpayment for the same tax periods, the net refund received amounted to Rp9,382,434. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp1,585,619 had been recorded in the current year's profit or loss and other comprehensive income statement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IPC TPK (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Pada tanggal 18 Mei 2022, IPC TPK menerima SKPLB atas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2020 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp22.138.083 dari yang diajukan sebesar Rp12.232.653. Atas kelebihan tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke utang pajak sebesar Rp837.382, sehingga nilai penerimaan lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2020 adalah sebesar Rp21.300.701 dan sudah diterima oleh IPC TPK pada tanggal 31 Mei 2022. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui senilai Rp9.068.048 telah dicatat di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

PTP1

Pada tanggal 4 Februari 2022, PTP1 menerima SKPLB atas PPN untuk masa pajak Desember 2019 dan Desember 2020 masing-masing sebesar Rp111.137.216 dan Rp8.764.186.

Kemudian, PTP1 juga menerima SKPKB atas PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2019 dan 2020 dengan nilai pokok kurang bayar sebesar Rp119.901.402 dan denda sebesar Rp89.926.051.

PTP1 telah menerima pencairan restitusi tersebut pada tanggal 24 Februari 2022 dan 2 Maret 2022 dengan nilai masing-masing sebesar Rp8.764.186 dan Rp111.137.216. Untuk pembayaran atas nilai SKPKB telah dibayarkan pada tanggal 28 April 2022 dengan nilai pembayaran sejumlah Rp88.554.088 yang dicatat sebagai penambah klaim restitusi pajak pertambahan nilai.

Atas terbitnya SKPLB dan SKPKB tersebut, PTP1 mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 7 Februari 2023. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding tersebut masih dalam proses di pengadilan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IPC TPK (continued)

Tax assessment for fiscal year 2020

On May 18, 2022, IPC TPK received tax SKPLB for fiscal year 2020, with agreed amount is Rp22,138,083 from proposed amount of Rp12,232,653. The amount had been compensated to tax expenses amounted to Rp837,382, thus the overpaid nominal of income tax for fiscal year 2020 is amounted Rp21,300,701 and had been received by the IPC TPK on May 31, 2022. The difference between the proposed amount and agreed amount with nominal Rp9,068,048 had been recorded in the current year's profit or loss and other comprehensive income statement.

PTP1

On February 4, 2022, PTP1 received SKPLB regarding VAT for tax period in December 2019 and December 2020, each amounting Rp111,137,216 and Rp8,764,186.

Furthermore, PTP1 also received SKPKB regarding VAT for various tax period in 2019 and 2020 with principal amount was Rp119,901,402 and penalty amount was Rp89,926,051.

PTP1 had been received the SKPLB disbursement on February 24, 2022 and March 2, 2022, each amounting Rp8,764,186 and Rp111,137,216. For payment of SKPKB had been paid on April 28, 2022 with amount paid was Rp88,554,088 and recorded as additional in claim for restitution of VAT.

For the issuance of the SKPLB and SKPKB, PTP1 had filed an appeal to tax court on February 7, 2023. Until the issuance date of this report, the appeal was still being proceed at the tax court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

PTPR

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2020

Pada tanggal 22 Juli 2022, PTPR menerima SKPLB atas PPh Badan tahun fiskal 2020 sebesar Rp22.158.342. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan PTPR sebesar Rp1.421.158 telah dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini. Pada tanggal 11 Agustus 2022, PTPR telah menerima pengembalian lebih bayar tersebut sebesar Rp21.426.306 setelah dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan pasal 21 dan 23 sebesar Rp732.036.

SPSL

Pada tanggal 8 November 2022, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB atas Penghasilan Badan, SKPKB atas Pajak Pertambahan Nilai, dan SKPKB atas Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2017 masing-masing sebesar USD5.271.655, Rp59.140.947 dan Rp797.535.

Disamping itu, SPSL juga menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2017 sebesar Rp4.116.157.

Pada tanggal 3 Februari 2023, Perusahaan telah melakukan pembayaran sebesar Rp140.374.086 dan dicatat sebagai pajak dibayar di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 6 Februari 2023, SPSL mengajukan keberatan atas SKPKB Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2017 ke pengadilan pajak dengan nilai yang diajukan keberatan masing-masing sebesar USD5.177.601, Rp59.140.947, dan Rp431.493.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

PTPR

Tax assessment for fiscal year 2020

On July 22, 2022, PTPR received SKPLB on Corporate Income Tax ("CIT") for fiscal years 2020 amounting to Rp22,158,342. The difference of the tax assessment with the PTPR's record amounting to Rp1,421,158 has been recorded as part of current tax expense. On August 11, 2022, the PTPR has received this overpayment assessment amounting to Rp21,426,306 after being compensated with income tax payable of article tax 21 and 23 amounting to Rp732,036.

SPSL

On November 8, 2022, the Directorate General of Taxes issued SKPKB for the Company corporate income tax, SKPKB for the Company value-added tax, SKPKB for the Company income tax article 21 for fiscal year 2017 amounted to USD5,271,655, Rp59,140,947 and Rp797,535, respectively.

Furthermore, SPSL also received Tax Collection Notices ("STP") for the Company value-added tax for fiscal year 2017 as amounted Rp4,116,157.

On February 3, 2023, the Company has made a payment of Rp140,374,086 which is recorded as prepaid tax in the current year consolidated statement of financial position.

On February 6, 2023, SPSL had filed an appeal the tax court for the SKPKB corporate income tax, Value Added-tax and Income tax Article 21 for fiscal year 2017 amounted to USD5,177,601, Rp59,140,947 and Rp431,493, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 5 Desember 2023, Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Ketetapan nya mengabulkan seluruh keberatan terhadap SKPKB Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai setelah dikompensasi dengan STP PPN dan tahun 2017 masing-masing sebesar USD5.177.601 dan Rp55.024.790. Namun, Direktorat Jenderal Pajak menolak keberatan terhadap SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2017 sebesar Rp431.493. Atas penolakan keberatan SKPKB PPh 21 tersebut telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2023.

MTI

Pada tanggal 18 Agustus 2022 dan 14 Oktober 2022, MTI menerima SKPLB atas Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2020 dengan jumlah yang disetujui masing-masing sebesar Rp2.543.627 dan Rp3.236.955 dari yang diajukan masing-masing sebesar Rp2.564.466 dan Rp3.309.401.

Disamping itu, pada tanggal 18 Agustus 2022, MTI menerima SKPKB atas Pajak Penghasilan pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun fiskal 2020 masing-masing sebesar Rp24.392 dan Rp16.641. MTI juga menerima surat tagihan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai tahun fiskal 2020 sebesar Rp98.386.

Pada tanggal 1 November 2022, MTI telah mencatat pengembalian lebih bayar setelah dikurangi kurang bayar serta tagihan pajak dengan total pengembalian sebesar Rp5.641.164 pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Pada tanggal 12 April 2023, MTI menerima SKPLB atas PPh Badan dan PPN Masa Januari sampai dengan Maret dan PPN Masa Mei sampai dengan Oktober dan Desember untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui masing-masing sebesar Rp780.691 dan Rp1.916.896 dari yang diajukan masing-masing sebesar Rp799.443 dan Rp2.025.621.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

SPSL (lanjutan)

On December 5, 2023, the Directorate General of Taxes, through its Letter of Determination, granted all objections to the Corporate Income Tax and Value Added Tax after being compensated with VAT STP and 2017 respectively in the amount of USD5,177,601 and Rp55,024,790. However, the Directorate General of Taxes rejected the objection to the Corporate Income Tax Article 21 of 2017 amounting to IDR431,493. The rejection of this tax objection has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income for 2023.

MTI

On August 18, 2022 and October 14, 2022, MTI received an SKPLB for Income Tax Article 23 and Value-Added Tax for the fiscal year 2020 with approved amounting to Rp2,543,627 and Rp3,236,955 from proposed amounting Rp2,564,466 and Rp3,309,401, respectively.

Furthermore, on August 18, 2022, MTI received SKPKB for Income Tax Article 23 and Value-Added Tax for the fiscal year 2020 amounting to Rp24,392 and Rp16,641, respectively. MTI also received tax collection notices for Value-Added Tax fiscal year 2020 amounting to Rp98,386.

On November 1, 2022, MTI has recorded the tax overpayment after compensated with the tax underpayment and tax collection notices with total tax refund amounting to Rp5,641,164 in the current year's statement of profit or loss and other comprehensive income.

Tax assessment for fiscal year 2021

On April 12, 2023, MTI received an SKPLB on Corporate Income Tax and VAT for the January to March Period and VAT for the May to October and December Periods for fiscal year 2021 with an approved amount of Rp780,691 and Rp1,916,896 respectively from the proposed amount of Rp799,443 and Rp2,025,621 respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

MTI (lanjutan)

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021
(lanjutan)

Atas lebih bayar tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke SKPKB atas PPN Masa April dan November, PPh 21 dan PPh 23 untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp246.015, Rp35.655 dan Rp57.180.

Pada berbagai tanggal di bulan Mei 2023, MTI telah menerima lebih bayar tersebut sebesar Rp2.358.736. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui dan kompesasi telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2022

Pada tanggal 20 Maret 2023, MTI menerima SKPLB dan STP atas PPN Masa Februari tahun fiskal 2022 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp941.334 dari yang diajukan sebesar Rp949.910. Pada tanggal 4 April 2023, MTI telah menerima lebih bayar tersebut sebesar Rp941.334. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 25 September 2023, MTI menerima SKPLB atas PPN beberapa Masa untuk tahun fiskal 2022 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp343.780 dari yang diajukan sebesar Rp377.276. Atas lebih bayar pajak tersebut dikompensasi ke SKPKB atas PPN Masa April dan September tahun 2022 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp8.576 dan Rp11.996. Pada berbagai tanggal di bulan Oktober 2023, MTI telah menerima lebih bayar tersebut sebesar Rp323.207. Selisih antara jumlah yang diajukan dengan jumlah yang disetujui dan kompesasi telah dicatat sebagai beban operasi lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

MTI (continued)

Tax assessment for fiscal year 2021
(continued)

The over payment was first compensated to the SKPKB on VAT for April and November Periods, Income Tax 21 and Income Tax 23 for fiscal year 2021 in the amount of Rp246,015, Rp35,655 and Rp57,180, respectively.

On various dates in May 2023, MTI has received the overpayment amounting to Rp2,358,736. The difference between the proposed amount and the approved amount and the compensation has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Tax assessment for fiscal year 2022

On March 20, 2023, MTI received SKPLB and STP on VAT for February period of fiscal year 2022 with an approved amount of Rp941,334 from the proposed amount of Rp949,910. On April 4, 2023, MTI has received the overpayment amounting to Rp941,334. The difference between the amount proposed and the amount approved has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

On September 25, 2023, MTI received SKPLB on several VAT periods for fiscal year 2022 with an approved amount of Rp343,780 from the proposed amount of Rp377,276. The tax overpayment was compensated to SKPKB on VAT for the April and September Periods of 2022 in the amount of Rp8,576 and Rp11,996, respectively. On various dates in October 2023, MTI has received the overpayment amounting to Rp323,207. The difference between the amount submitted and the amount approved and compensated has been recorded as other operating expenses in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

Rukindo

Pada tahun 2022, Rukindo mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai Desember sebesar Rp6.167.909. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp5.983.564 yang sudah diterima oleh Rukindo pada bulan Agustus 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan Rukindo sebesar Rp184.346 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

JAI

Pada tahun 2020, JAI mencatat lebih bayar atas PPN masa Januari sampai Desember sebesar Rp17.707.446. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp17.208.810 yang sudah diterima oleh JAI pada bulan Februari 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan JAI sebesar Rp498.636 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

SPJM

Pada tahun 2022, SPJM mencatat lebih bayar atas PPN masa Mei, Juni, dan Agustus sebesar Rp73.457.760. Atas lebih bayar tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa jumlah lebih bayar yang disetujui adalah sebesar Rp68.979.179 yang sudah diterima oleh SPJM pada bulan Desember 2022. Selisih hasil pemeriksaan pajak tersebut dengan catatan SPJM sebesar Rp4.478.581 telah dicatat sebagai bagian dari beban operasi lainnya.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

Rukindo

In 2022, Rukindo recorded an overpayment of VAT for the January to December period of Rp6,167,909. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the amount of the approved overpayment was Rp5,983,564 which had been received by Rukindo in August 2022. The difference in the results of the tax audit with Rukindo's records was Rp184,346 have been recorded as part of other operating expenses.

JAI

In 2020, JAI recorded an overpayment of VAT for the January to December period amounted Rp17,707,446. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp17,208,810 which had been received by JAI in February 2022. The difference in the results of the tax audit with JAI's records amounted Rp498,636 has been recorded as part of other operating expenses.

SPJM

In 2022, SPJM recorded an overpayment of VAT for the May, June, and August period amounted Rp73,457,760. For this overpayment, the Directorate General of Taxes stated that the approved overpayment amounted to Rp68,979,179 which had been received by SPJM in December 2022. The difference in the results of the tax audit with SPJM's records amounted Rp4,478,581 has been recorded as part of other operating expenses.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

BMS

Pada tanggal 9 Juni 2023, BMS telah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Desember 2022 sejumlah Rp41.299.433 dari Rp41.301.115. Lebih bayar pajak tersebut sudah diterima oleh BMS pada tanggal 6 Juli 2023.

Pada tanggal 1 Maret 2023, BMS menerima SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp1.919.732. Lebih bayar pajak tersebut sudah diterima oleh BMS pada tanggal 30 Maret 2023.

Pada tanggal 20 Juni 2022, BMS menerima SKPLB pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp125.114 dari tagihan lebih bayar pajak Rp800.908. Selisih senilai Rp675.794 diperhitungkan dengan kurang bayar pajak pertambahan nilai periode Maret 2016. BMS tidak setuju dengan keputusan ini dan telah mengajukan banding senilai Rp675.794. Pengajuan banding atas selisih pajak penghasilan badan tahun 2020 yang diperhitungkan dengan kurang bayar pertambahan nilai periode Maret 2016 senilai Rp675.794 tersebut telah diterima oleh BMS secara berkala dengan penerimaan terakhir pada tanggal 31 Agustus 2023.

BIMA

Pada tanggal 1 Juli 2022, BIMA telah menerima Surat Ketetapan Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Mei - Desember 2020 sejumlah Rp7.157.879 dari tagihan lebih bayar pajak Rp7.170.274. Selisih senilai Rp12.395 dibebankan sebagai beban pajak.

Pada tanggal 30 Juni 2022, BIMA telah menerima Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang menyetujui lebih bayar pajak pertambahan nilai periode Januari - Desember 2021 dan periode Januari - Maret 2022 sejumlah Rp15.434.007 dari tagihan lebih bayar pajak Rp15.090.337. Selisih senilai Rp343.670 disajikan sebagai tagihan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

BMS

On June 9, 2023, BMS has received Tax Assessment Letter approving the overpayment of value added tax for the period of December 2022 amounting to Rp41,299,433 out of Rp41,301,115 claim for tax refund. The overpayment was received by BMS on July 6, 2023.

On March 1, 2023, BMS received SKPLB on corporate income tax for 2021 amounting to Rp1,919,732. The overpayment was received by BMS on March 30, 2023.

On June 20, 2022, BMS has received SKPLB of corporate income tax 2020 amounted to Rp125,114 out of Rp800,908 claim for tax refund. The difference of Rp675,794 was calculated by underpayment of value added tax for the period March 2016. BMS disagreed with this decision and submitted an appeal letter amounting to Rp675,794. The consent of appeals regarding the difference in 2020 corporate income tax calculated with the underpayment of value added for the March 2016 period amounting to Rp675,794 has been received by BMS periodically with the last receipt on August 31, 2023.

BIMA

On July 1, 2022, BIMA receiving Tax Assessment Letter approving the overpayment of value added tax for the period of May - December 2020 amounting to Rp7,157,879 out of Rp7,170,274 claim for tax refund. The difference amounting to Rp12,395 was charged to tax expense.

On June 30, 2022, BIMA received Refund of Overpayment Tax approving the overpayment of value added tax for the period of January - December 2021 and period of January - March 2022 amounting to Rp15,434,007 out of Rp15,090,337 claim for tax refund. The difference amounting to Rp343,670 was presented as estimated claim for tax refund.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

IKT

Pada berbagai tanggal di tahun 2023, IKT menerima surat tagihan pajak atas pajak penghasilan lain untuk berbagai masa pajak di tahun 2019, 2020 dan 2023 dan PPN untuk berbagai masa pajak di tahun 2020. IKT mengakui beban sebesar Rp21.831 sehubungan dengan tagihan tersebut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

EDII

Surat ketetapan pajak untuk tahun pajak 2021

Pada tanggal 21 Juni 2023, EDII menerima SKPLB atas pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp1.915.272 dari yang diajukan sebesar Rp1.915.272. Atas SKPLB tersebut terlebih dahulu dikompensasikan ke utang pajak sebesar Rp931.202, sehingga nilai penerimaan lebih bayar pajak penghasilan untuk tahun fiskal 2021 adalah sebesar Rp984.070 dan sudah diterima oleh EDII pada tanggal 13 Juli 2023.

ILCS

Pajak Pertambahan Nilai Tahun Fiskal 2020

Pada tanggal 22 April 2022, ILCS menerima SKPLB atas PPN tahun 2020 dengan jumlah yang disetujui sebesar Rp2.949.278 dari yang diajukan sebesar Rp5.464.046. Pada tanggal 1 Juli 2022, ILCS mengajukan keberatan atas surat tagihan pajak sebesar Rp1.063.970. Selain itu, sebesar Rp1.338.304 dan Rp112.494 diajukan sebagai potongan surat ketetapan pajak kurang bayar luar negeri dan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 23.

Pada tanggal 10 November 2022, keberatan yang diajukan sebesar Rp1.063.970 telah ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak dan telah dibebankan oleh Perusahaan pada tersebut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 22 April 2022, ILCS menerima SKPKB PPh Badan untuk tahun fiskal 2020 sebesar Rp1.645.250 dari yang diajukan Lebih Bayar sebesar Rp2.069.176. Pada tanggal 15 Juli 2022, ILCS mengajukan surat keberatan atas hasil SKPKB PPh Badan 2020 tersebut.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

IKT

On various date in 2023, IKT also received tax underpayment for other income taxes for various tax periods in 2019, 2020 and 2023 and VAT for various tax periods in 2020. IKT recognized an expense of Rp21,831 in relation to these claims in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

EDII

Tax assessment for fiscal year 2021

On June 21, 2023, EDII received SKPLB for fiscal year 2021, with agreed amount is Rp1,915,272 from proposed amount of Rp1,915,272. The SKPLB had been compensated to tax expenses amounted to Rp931,202, thus the overpaid nominal of income tax for fiscal year 2021 is amounted Rp984,070 and had been received by EDII on July 13, 2023.

ILCS

Value Added Tax Fiscal Year 2020

On April 22, 2022, ILCS received an SKPLB of VAT for fiscal year 2020 with approved amount of Rp2,949,278 from proposed amount of Rp5,464,046. On July 1, 2022, ILCS filed an objection to the tax collection letter amounted to Rp1,063,970. In addition, Rp1,338,304 and Rp112,494 was proposed for deductions of foreign tax underpayment and income tax article 23 underpayment, respectively.

On November 10, 2022, the objection submitted amounting to Rp1,063,970 has been denied by the Director General of Taxes and has been charged by the Company in the income statement and other comprehensive income for the current year.

On April 22, 2022, ILCS received an SKPKB of corporate income tax for fiscal year 2020 amounting to Rp1,645,250 from the proposed overpayment of Rp2,069,176. On July 15, 2022, ILCS submitted an objection letter to the results of the 2020 Corporate Income Tax underpayments assessment letters.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. PERPAJAKAN (lanjutan)

g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)

ILCS (lanjutan)

Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2020

Pada tanggal 12 Mei 2023, ILCS menerima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak keberatan wajib pajak. Pada tanggal 10 Agustus 2023, ILCS mengajukan permohonan banding terhadap keputusan tersebut. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengajuan banding oleh ILCS masih dalam proses di pengadilan pajak.

Pajak Penghasilan Badan Tahun Fiskal 2019

Pada tanggal 19 Mei 2021, ILCS menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2019 sebesar Rp15.032.728 dari yang sebelumnya diajukan Lebih Bayar sebesar Rp2.039.287. Pada tanggal 5 Agustus 2021, ILCS mengajukan Surat Keberatan atas hasil ketetapan tersebut. Pada tanggal 10 Juni 2022, pengajuan keberatan oleh ILCS tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Direktur Jenderal Pajak dan mengurangi jumlah SKPKB menjadi sebesar Rp14.867.681. Pada tanggal 5 September 2022, ILCS telah mengajukan banding ke pengadilan pajak yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2023.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, ILCS sedang menunggu putusan final dari pengadilan pajak.

23. TAXATION (continued)

g. Tax Assessment Letter (continued)

ILCS (continued)

Corporate Income Tax Fiscal Year 2020

On May 12, 2023, ILCS received a letter from the Director General of Taxes rejecting the taxpayer's objection. On August 10, 2023, ILCS filed an appeal against the decision. Until the issuance date of these financial statements, the appeal is still in process at the tax court.

Corporate Income Tax Fiscal Year 2019

On May 19, 2021, ILCS received an SKPKB of corporate income tax for fiscal year 2019 amounting to Rp15,032,728 from the previously proposed overpayment of Rp2,039,287. On August 5, 2021, ILCS submitted an objection letter to the decision. On June 10, 2022, the objection by ILCS was partially granted by the Director General of Taxes and reduced the amount of SKPKB to Rp14,867,681. On September 5, 2022, ILCS submitted an appeal to the tax court which was held on February 20, 2023.

Until the issuance date of these consolidated financial statements, ILCS is awaiting for the final decision from the tax court.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut:

24. BONDS PAYABLE

As of December 31, 2023 and 2022, the details of bonds payable are as follows:

31 Desember/December 31, 2023							
Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/ Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Total/ Total	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Discount and Transaction Cost	Neto/ Net	Jangka Pendek/ Current	Jangka Panjang/ Non- current
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD1.036.157.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	15.958.233.289	(31.673.503)	15.926.559.786	-	15.926.559.786
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD465.200.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	7.171.523.200	(121.775.059)	7.049.748.141	-	7.049.748.141
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014	USD491.859.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ the Company (formerly Pelindo III)	7.582.498.344	(8.186.197)	7.574.312.147	7.574.312.147	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ the Company (formerly Pelindo I)	50.000.000	(58.056)	49.941.944	-	49.941.944
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/Year 2018 Tranche B	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	1.725.000.000	(798.399)	1.724.201.601	-	1.724.201.601
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	800.000.000	(711.122)	799.288.878	-	799.288.878
Total/Total					33.124.052.497	7.574.312.147	25.549.740.350

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rincian dari utang obligasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

24. BONDS PAYABLE (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the details of bonds payable are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2022							
Obligasi/ Bonds	Pokok Utang/ Debt Principal	Penerbit/ Issuer	Total/ Total	Diskonto dan Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Discount and Transaction Cost	Neto/ Net	Jangka Pendek/ Current	Jangka Panjang/ Non- current
Senior Notes, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD1.058.375.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	16.649.297.125	(56.502.824)	16.592.794.301	-	16.592.794.301
Senior Notes Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015	USD468.850.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo II)/ the Company (formerly Pelindo II)	7.375.479.350	(128.462.209)	7.247.017.141	-	7.247.017.141
Senior Notes Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014	USD491.859.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ the Company (formerly Pelindo III)	7.737.433.929	(15.463.015)	7.721.970.914	-	7.721.970.914
Senior Notes Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018	USD500.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo III)/ the Company (formerly Pelindo III)	7.865.500.000	(7.476.391)	7.858.023.609	7.858.023.609	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C	Rp400.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ the Company (formerly Pelindo I)	400.000.000	(132.700)	399.867.300	399.867.300	-
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D	Rp50.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo I)/ the Company (formerly Pelindo I)	50.000.000	(81.279)	49.918.721	-	49.918.721
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A	Rp380.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	380.000.000	(85.981)	379.914.019	379.914.019	-
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/Year 2018 Tranche B	Rp1.820.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	1.707.297.043	(1.302.648)	1.705.994.395	-	1.705.994.395
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/Year 2018 Tranche C	Rp800.000.000	Perusahaan (dahulu melalui Pelindo IV)/ the Company (formerly Pelindo IV)	800.000.000	(866.275)	799.133.725	-	799.133.725
Total/Total			42.965.007.447	(210.373.322)	42.754.634.125	8.637.804.928	34.116.829.197

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

24. BONDS PAYABLE (continued)

Other information in relation to bonds payables as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Obligasi/ Bonds	Peringkat/ Rating	Wali Amanat/ Trustee	Tempat Pencatatan/Listed	Tanggal Terbit/Issue Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Periode Pembayaran Bunga/Intere st Payment Period	Tingkat Bunga per Tahun/ Interest Rate per Annum
Senior Notes, USD1.100.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2025/ May 5, 2025	Setengah tahunan/ Semi-Annually	4,25%
Senior Notes, USD500.000.000, Pelindo II, Penerbitan Tahun 2015/ Issued in 2015 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	5 Mei 2015/ May 5, 2015	5 Mei 2045/ May 5, 2045	Setengah tahunan/ Semi-Annually	5,375%
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2014/ Issued in 2014 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	1 Oktober 2014/ October 1, 2014	1 Oktober 2024/ October 1, 2024	Setengah tahunan/Semi -Annually	4,875%
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2018/ Issued in 2018 i)	Baa2, BBB (Moody's Investors Service, Inc. dan/and (Fitch Ratings Inc.)	The Bank of New York Mellon Corporation	Singapore Exchange Securities Trading Limited	2 Mei 2018/ May 2, 2018	2 Mei 2023/ May 2, 2023	Setengah tahunan/Semi -Annually	4,500%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ Year 2016 Tranche C ii)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2023/ June 21, 2023	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,250%
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri D/ Year 2016 Tranche D ii)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	21 Juni 2016/ June 21, 2016	21 Juni 2026/ June 21, 2026	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,500%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ Year 2018 Tranche A i)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2023/ July 4, 2023	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	8,000%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri B/ Year 2018 Tranche B i)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2025/ July 4, 2025	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,150%
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri C/ Year 2018 Tranche C i)	idAAA/Stable (PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"))	PT Bank Tabungan Negara Tbk	Bursa Efek Indonesia	4 Juli 2018/ July 4, 2018	4 Juli 2028/ July 4, 2028	3 (tiga) bulanan/ Quarterly	9,350%

Jaminan

- i) Tidak dijamin
ii) Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan (dahulu Pelindo I) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHP.

Collateral

- i) Unsecured
ii) These bonds are not guaranteed by special collaterals, but are guaranteed by all the Company's (formerly Pelindo I) assets, both moving and immovable goods, both existing and existing in the future to become collateral for bondholders in accordance with the provisions in articles 1131 and 1132 of the KUHP.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

24. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi digunakan untuk melunasi pinjaman dan rencana ekspansi Perusahaan serta tujuan umum Perusahaan. Perusahaan juga diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu.

Pelunasan utang obligasi

Pada tahun 2023, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas utang obligasi dengan rincian sebagai berikut:

Obligasi/ Bonds	Tanggal pelunasan/ Redemption date	Keterangan/ Description	Nilai nominal/ Face value
Senior Notes USD500.000.000, Penerbitan Tahun 2018/ <i>Issued in 2018</i>	27 April/April 2023	Pelunasan/ Redemption	USD500.000.000
Obligasi I Pelindo I Gerbang Nusantara Tahun 2016 Seri C/ <i>Year 2016 Tranche C</i>	20 Juni/June 2023	Pelunasan/ Redemption	Rp400.000.000
Obligasi I Pelindo IV Tahun 2018 Seri A/ <i>Year 2018 Tranche A</i>	22 Juni/June 2023	Pelunasan/ Redemption	Rp 380.000.000

Lindung nilai arus kas

Proporsi dari Senior Notes USD1.100.000.000 Penerbitan Tahun 2015, Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2015 dan Senior Notes USD500.000.000 Penerbitan Tahun 2014 telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, laba selisih kurs dari proporsi Senior Notes tersebut dalam mata uang asing dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain - neto sebesar Rp1.313.257.791 pada tahun 2023 dan pada tahun 2022 dicatat sebagai rugi komprehensif lain sebesar Rp2.820.468.471. Penghasilan komprehensif lain tersebut akan terealisasi ke laba rugi hingga tahun 2024, 2025 dan 2045 sesuai dengan jatuh tempo dari masing-masing Senior Notes tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, penghasilan komprehensif lain tersebut telah terealisasi ke laba rugi masing-masing sebesar Rp1.441.444.980 dan Rp131.422.241.

24. BONDS PAYABLE (continued)

Proceeds from the bond offering were used to refinance loan and will be used for the Company's expansion plan and the Company's general purposes. The Company must also maintain certain financial ratios.

Redemptions of bonds payable

On 2023, the Company have made redemptions of bonds payable with the following details:

Cash flow hedge

Proportions of Senior Notes USD1,100,000,000 Issued in 2015, Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2015 and Senior Notes USD500,000,000 Issued in 2014 are designated as effective cash flow hedges. Therefore, the gain on foreign exchange of proportions of Senior Notes denominated in foreign currency were reported as part of other comprehensive income - net amounting to Rp1,313,257,791 in 2023 and in 2022 recorded as other comprehensive loss amounting to Rp2,820,468,471. Such other comprehensive income will be recycled to profit or loss until 2024, 2025 and 2045 in accordance with the maturity of each Senior Notes. For the year ended December 31, 2023 and 2022, such other comprehensive income has been recycled to profit or loss amounted to Rp1,441,444,980 and Rp131,422,241, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG

25. LONG-TERM BANK LOANS

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Utang bank jangka panjang	14.346.782.184	7.831.272.217	Long-term bank loans
Bagian lancar	(445.526.921)	(152.606.159)	Current portion
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian lancar	13.901.255.263	7.678.666.058	Long-term bank loans, net of current portion

31 Desember 2023	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/Long term portion	Total	December 31, 2023
Perusahaan				The Company
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	128.473.090	2.440.988.710	2.569.461.800	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk	128.473.090	2.440.988.710	2.569.461.800	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	77.072.292	1.464.373.548	1.541.445.840	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	51.381.528	976.249.032	1.027.630.560	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Subtotal	385.400.000	7.322.600.000	7.708.000.000	Sub-total
Entitas Anak				Subsidiaries
BMS				BMS
Bilateral				Bilateral
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	18.146.848	663.457.306	681.604.154	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
CTP				CTP
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.920.251	1.449.784.539	1.464.704.790	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.945.967	1.606.345.599	1.621.291.566	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	9.965.488	966.652.334	976.617.822	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.969.883	870.078.693	879.048.576	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.987.193	483.757.762	488.744.955	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	2.305.399	286.332.550	288.637.949	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	2.496.178	285.716.663	288.212.841	PT Bank DKI
Subtotal	58.590.359	5.948.668.140	6.007.258.499	Sub-total
Total pokok utang	462.137.207	13.934.725.446	14.396.862.653	Total principal of loans
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(16.610.286)	(33.470.183)	(50.080.469)	Less: Unamortized costs of loans
Total	445.526.921	13.901.255.263	14.346.782.184	Total

31 Desember 2022	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/ Long term portion	Total	December 31, 2022
Entitas Anak				Subsidiaries
PTP1				PTP1
Bilateral				Bilateral
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	55.259.147	1.019.918.076	1.075.177.223	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.205.138	428.294.981	451.500.119	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Indonesia Infrastructure Finance	23.205.138	428.294.981	451.500.119	PT Indonesia Infrastructure Finance
BMS				BMS
Bilateral				Bilateral
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	5.767.279	454.461.565	460.228.844	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
Subtotal	107.436.702	2.330.969.603	2.438.406.305	Sub-total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

31 Desember 2022	Bagian lancar/ Current portion	Bagian jangka panjang/ Long term portion	Total	December 31, 2022
CTP				CTP
Pinjaman Bank Sindikasi				Syndicated Bank Loans
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.085.466	1.400.637.983	1.412.723.449	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.657.250	1.339.248.405	1.350.905.655	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	8.063.089	934.373.568	942.436.657	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.257.124	840.964.004	848.221.128	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.049.709	469.023.952	473.073.661	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	1.613.436	186.953.337	188.566.773	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
PT Bank DKI	1.612.568	186.866.462	188.479.030	PT Bank DKI
Subtotal	46.338.642	5.358.067.711	5.404.406.353	Sub-total
Total pokok utang	153.775.344	7.689.037.314	7.842.812.658	Total principal of loans
Dikurangi: Biaya pinjaman yang belum diamortisasi	(1.169.185)	(10.371.256)	(11.540.441)	Less: Unamortized costs of loans
Total	152.606.159	7.678.666.058	7.831.272.217	Total

Perusahaan

Berdasarkan Akta Perjanjian Ketentuan Umum Pembiayaan No. 19 tanggal 23 Desember 2022 dari Notaris Julius Purnawan, SH, MSi, notaris di Jakarta, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit sindikasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Agen Fasilitas Global.

Perusahaan memperoleh fasilitas Pinjaman Term Loan dan Term Financing AI Musyarakah sebesar maksimal USD750.000.000 dengan opsi akordion sebesar USD250.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

The Company

Based on the Deed of Agreement on General Provisions for Financing No. 19 dated December 23, 2022 from Notary Julius Purnawan, SH, MSi, notary in Jakarta, the Company obtained syndicated credit facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk and PT Bank Muamalat Indonesia Tbk with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as the Facility Global Agent.

The Company obtained AI Musyarakah Term Loan and Term Financing facilities maximum amounting USD750,000,000 with accordion option amounting USD250,000,000, with the following details:

Agen Pinjaman Sindikasi/ Syndicated Loan Agent	Fasilitas A/ Facility A	Fasilitas B/ Facility B
Fasilitas Konvensional/Conventional Facilities		
PT Bank BTPN Tbk	USD166.675.000	USD83.325.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	USD166.675.000	USD83.325.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	USD99.990.000	USD50.010.000
Fasilitas Musyarakah/ Musyarakah Facility		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	USD66.660.000	USD33.340.000
Total	USD 500.000.000	USD 250.000.000

Pinjaman tersebut berjangka waktu 5 tahun digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perusahaan, termasuk pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga mengambang tahunan sebesar SOFR 3 bulan + margin 1%.

The loan will mature in 5 years period and was used to finance the Company operational activities, including the refinancing of its outstanding loan. The loan will bore interest at the annual floating rate of SOFR 3 Months + margin 1%.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Fasilitas Konvensional yang diberikan oleh para kreditur awal terdiri dari:

- Fasilitas Konvensional A: fasilitas pinjaman berjangka dengan komitmen, dan
- Fasilitas Konvensional B: fasilitas pinjaman berjangka tanpa komitmen.

Fasilitas Musyarakah yang diberikan oleh peserta Musyarakah awal terdiri dari:

- Fasilitas Musyarakah A: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* dengan komitmen, dan
- Fasilitas Musyarakah B: fasilitas pembiayaan berjangka *al musyarakah* tanpa komitmen.

Perusahaan akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk *general corporate purpose*, termasuk pembiayaan investasi maupun pembiayaan kembali pinjaman yang telah ada.

Berdasarkan surat permohonan No. KU.02.07/12/4/3/SKKS/KUMR/PLND-23 dan No. KU.02.07/12/4/4/SKKS/KUMR/PLND-23 pada tanggal 12 April 2023, Perusahaan mengajukan permohonan penarikan Fasilitas Konvensional term loan dengan Komitmen senilai USD433.340.000 dan penarikan Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Syariah dengan Komitmen senilai USD66.660.000.

Pada tanggal 26 April 2023, Perusahaan memperoleh Distribusi Penarikan Fasilitas Kredit Konvensional dan Fasilitas Musyarakah seri A (dengan komitmen) senilai USD500.000.000.

Pinjaman ini dijamin dengan seluruh aset milik Perusahaan atau Entitas Anak Perusahaan Material. Pembayaran angsuran pinjaman tersebut untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USDNihil. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman dari fasilitas ini adalah sebesar USD500.000.000.

Proporsi dari pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk sejumlah USD433.340.000 telah memenuhi kriteria dan berlaku efektif sebagai lindung nilai arus kas. Oleh karenanya, rugi selisih kurs dari proporsi pinjaman tersebut dalam mata uang asing dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Conventional facilities provided by the initial lenders consist of:

- *Conventional Facility A: committed term loan facility, and*
- *Conventional Facility B: uncommitted term loan facility.*

Musyarakah facilities provided by the initial Musyarakah participants consist of:

- *Musyarakah Facility A: comitted term financing al musyarakah, and*
- *Musyarakah Facility B: uncommitted term financing al musyarakah.*

The Company will use all the amount borrowed by it based on the facility for general corporate purpose, including investment financing and refinancing existing loans.

Based on application letter No. KU.02.07/12/4/3/SKKS/KUMR/PLND-23 and No. KU.02.07/12/4/4/SKKS/KUMR/PLND-23 on April 12, 2023, the Company submitted an application for withdrawal of the Conventional Term Facility loan with a Commitment of USD433,340,000 and withdrawal of the Sharia Syndicated Financing Facility with a Commitment of USD66,660,000.

On April 26, 2023, the Company obtained a Series of Withdrawal Distribution of Conventional Credit Facility and Musyarakah Facility (with commitment) amounted USD500,000,000.

The loans are collateralized by all assets owned by the Company or Material Subsidiaries. Total installments payment for the year ended December 31, 2023 amounted to USDNil. As of December 31, 2023, the outstanding loan from this facility amounted to USD500,000,000.

Proportion of loans from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk totalling to USD433,340,000 are designated as effective cash flow hedges. Therefore, the losses on foreign were reported as part of other comprehensive income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Penghasilan komprehensif lain tersebut akan terrealisasi ke laba rugi hingga tahun 2027 sesuai dengan jatuh tempo pinjaman tersebut. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, belum terdapat penghasilan komprehensif lain yang terrealisasi ke laba rugi.

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2023-2027)	5	Tingkat suku bunga sebesar SOFR 3 bulan ditambah margin 1,00%/ Interest rate of 3 months average SOFR plus margin 1.00%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ The facility is guaranteed with collateral as follows: 1. Seluruh aset milik Perusahaan atau Entitas Anak Perusahaan Material/ All assets owned by the Company or Material Subsidiaries.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Such other comprehensive income will be recycled to profit or loss until 2027 in accordance with the maturity of loans. For the year ended December 31, 2023, there is no other comprehensive income has been recycled to profit or loss.

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PTP1					
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2030)	12	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,85%/ Interest rate of 3 months average JIBOR plus margin 3.85%	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ The facility is guaranteed with collateral as follows: 1. Fidusia atas hasil klaim/proceed atas jaminan pembayaran (bank guarantee) dan/atau SBLC dan/atau asuransi atas proyek/ Fiduciary over the results of claims/proceed for bank guarantees and/or SBLC and/or insurance for the project. 2. Fidusia atas peralatan dan perlengkapan terminal petikemas BICT Fase II atas nama PTP1 yang dibiayai oleh kreditur sindikasi/ Fiduciary on BICT Phase II container terminal equipment and supplies on behalf of PTP1 financed by syndicated creditors. 3. Seluruh agunan tersebut wajib diasuransikan dengan mencantumkan banker's clause dengan nama agen jaminan atau nama kreditur sindikasi sebagai tertanggung oleh perusahaan asuransi rekanan kreditur sindikasi/ All collateral must be insured by including the banker's clause with the name of the collateral agent or the name of the syndicated creditor as insured by the syndicated creditor's partner insurance company.

As of December 31, 2023, the Company has complied all financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
PTP1					
Fasilitas Kredit Bilateral/ <i>Bilateral</i> Credit Facility	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2015-2030)	15	Tingkat suku bunga sebesar JIBOR 3 bulan ditambah margin 3,35%/ <i>Interest</i> <i>rate of 3</i> <i>months</i> <i>average JIBOR</i> <i>plus margin</i> <i>3.35%</i>	Pinjaman ini dijamin oleh jaminan berikut/ <i>The</i> <i>facility is guaranteed with collateral as follows:</i> 1. Tanah, bangunan dermaga dan container yard serta benda-benda lain yang melekat di atas tanah Terminal Petikemas Belawan Fase II dan dan diikat dengan <i>Security Coverage Ratio</i> minimal 120% dari limit fasilitas kredit/ <i>Land, jetty buildings</i> <i>and container yards as well as other objects</i> <i>attached to the land of the Belawan Container</i> <i>Terminal Phase II and bound with a Security</i> <i>Coverage Ratio of at least 120% of the credit</i> <i>facility limit.</i> 2. Seluruh hasil klaim atas garansi dan asuransi terhadap proyek pembangunan infrastruktur Dermaga dan Terminal Petikemas BICT II/ <i>All</i> <i>results of claims for guarantees and insurance on</i> <i>infrastructure development projects of Jetty and</i> <i>BICT II.</i>

PTP1

Pada tanggal 21 Maret 2023, PTP1 telah melakukan pelunasan seluruh fasilitas kredit sindikasi dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan Bank Mandiri. Pada tanggal 18 April 2023, PTP1 telah melakukan pelunasan seluruh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri.

PTP1

On March 21, 2023, PTP1 has repaid all the syndicated credit facilities from PT Indonesia Infrastructure Finance and Bank Mandiri. On April 18, 2023, PTP1 has repaid the all investment credit facility from Bank Mandiri.

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
BMS					
Fasilitas Kredit Bilateral/ <i>Bilateral</i> Credit Facility	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2022-2029)	7	2,95% per tahun dengan JIBOR (selama periode konstruksi) dan 2,65% per tahun + JIBOR (setelah periode konstruksi selesai)/ <i>2.95% per</i> <i>annum with JIBOR</i> <i>(during the</i> <i>construction period)</i> <i>and 2.65% per</i> <i>annum + JIBOR</i> <i>(after the</i> <i>construction period</i> <i>is completed)</i>	Pinjaman ini dijamin oleh Rekening Penampungan dan <i>debt service reserve</i> <i>account (DSRA)</i> (Catatan 4) / <i>This loan is</i> <i>guaranteed by Escrow Account and debt</i> <i>service reserve account (DSRA) (Note 4).</i>

Pada tanggal 31 Desember 2023, BMS telah memenuhi seluruh persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

As of December 31, 2023, BMS has complied all financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

Informasi lain mengenai utang bank jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

Other information in relation to long-term bank loans as of December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

Fasilitas Pinjaman/ Credit Facility	Kreditur/ Creditor	Jadwal Pembayaran/ Repayment Schedule	Jangka Waktu (Tahun)/ Period (Year)	Tingkat Bunga/ Interest Rates	Jaminan/ Collateral
CTP					
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	Periode sebelum 22 Juni 2023/For the period before June 22, 2023: Tranche A: periode konstruksi	Pinjaman ini dijamin dengan hak konsesi, seluruh tagihan dan pendapatan operasional, rekening penampung (Catatan 4), tagihan atas klaim asuransi, jaminan CTP dari API dan gadai atas saham yang dimiliki oleh API, surat pernyataan tentang kesediaan CTP menggunakan konsultan pengawas penggunaan kredit serta surat pernyataan Notaris dari API selaku pemegang saham CTP yang menyatakan turut serta menyelesaikan proyek, memenuhi kewajiban rasio-rasio keuangan yang diwajibkan kepada CTP dan API selaku pemegang saham akan meminta ijin terlebih dahulu kepada para kreditur melalui agen fasilitas apabila API akan melakukan divestasi /
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank CIMB Niaga Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	/construction period ATD+4.15% (min equiv. 6.80%) Tranche B:	
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	periode konstruksi /construction period ATD+6.19% (min equiv. of 9.00%) Tranche C:	
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	periode konstruksi /construction period ATD+4.15% (min equiv. of 6.80%)	This loan is secured by concession rights, all invoices and operating revenues, escrow accounts (Note 4), receivables for insurance claims, CTP's guarantee from API and pledge of shares owned by API, statement letter regarding CTP's willingness to use a consultant to supervise the use of credit and a notarial statement from API as a shareholder of CTP stating that he participates in completing the project, fulfills the financial ratios required of CTP and API as the shareholder will seek prior permission from the creditors through the facility agent if API will divest.
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Pan Indonesia Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	Periode setelah 23 Juni 2023/For the period after June 23, 2023: Tranche A: periode operasional	
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	/operational period ATD+3.90% (min equiv. 6.55%) Tranche B:	
Pinjaman Bank Sindikasi/ Syndicated loan	PT Bank DKI	Beberapa cicilan/several installment (2018-2033)	15	Periode operasional/ operational period ATD+5.94% (min equiv. of 9.00%) Tranche C:	
				operasional period ATD+3.90% (min equiv. of 6.55%)	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

CTP

Sesuai dengan perjanjian pinjaman, fasilitas-fasilitas tersebut mengharuskan Grup untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan.

Berdasarkan Akta No. 24 tanggal 30 Agustus 2023 oleh notaris Ariani Lakshmijati Rachim tentang perubahan keempat terhadap akta pernyataan kembali atas kredit sindikasi No. 31 tanggal 26 Februari 2019, CTP mendapatkan tambahan fasilitas kredit *Tranche C* dengan limit maksimal sebesar Rp930.000.000 dari kreditur Bank Mandiri, Bank Jatim dan Bank DKI masing-masing sebesar Rp519.870.000, Rp205.065.000 dan Rp205.065.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023, CTP tidak memenuhi sebagian persyaratan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman sehingga CTP mengirimkan surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Pada tanggal 21 Desember 2023, CTP telah memperoleh surat pengesampingan atas tidak terpenuhinya persyaratan rasio keuangan tersebut.

26. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Rupiah		
Pihak ketiga		
PT Indonesia Infrastruktur Finance	697.862.861	584.328.133
Pihak berelasi (Catatan 44k)		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.372.013.613	1.160.435.133
Total	2.069.876.474	1.744.763.266

CTP

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 45 tanggal 21 Desember 2018 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta yang dinyatakan kembali berdasarkan akta Pernyataan Kembali atas Akta Notaris Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 tanggal 26 Februari 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., Notaris di Jakarta. CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") dan lembaga keuangan perbankan lainnya (Catatan 25) dimana SMI menjadi kreditur fasilitas *tranche B* yang bersifat Subordinasi.

25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)

CTP

Based on the loan agreement, the facilities requires the Group to comply to certain requirement, among others financial ratios as stipulated in the Loan Agreement.

Based on Deed No. 24 dated August 30, 2023 by notary Ariani Lakshmijati Rachim regarding the fourth amendment to the deed of restatement of syndicated loan No. 31 dated February 26, 2019, CTP obtained additional *Tranche C* credit facilities with a maximum limit of Rp930,000,000 from creditors Bank Mandiri, Bank Jatim and Bank DKI amounting to Rp519,870,000, Rp205,065,000 and Rp205,065,000, respectively.

As of December 31, 2023, CTP did not comply to several financial ratio covenants as stipulated in the loan agreement so that CTP sent the waiver letter on the incompliance of financial ratio covenant until December 31, 2023. On December 21, 2023, CTP has obtained waiver letters for non-fulfillment of the financial ratio requirements.

26. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL INSTITUTION

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Rupiah		
Third parties		
PT Indonesia Infrastruktur Finance	697.862.861	584.328.133
Related parties (Notes 44k)		
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.372.013.613	1.160.435.133
Total	2.069.876.474	1.744.763.266

CTP

Based on the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 45 dated December 21, 2018 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta which was restated based on the deed of Restatement of the Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 31 dated February 26, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a Notary in Jakarta. CTP entered into a Loan Syndicated with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Tbk ("SMI") and other banking financial institution (Note 25) in which SMI is the creditor of the Subordinated *tranche B* facility.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**26. UTANG LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK
(LANJUTAN)**

CTP (lanjutan)

Sesuai keputusan Kreditur Sindikasi untuk partisipasi dalam pembiayaan sindikasi CTP untuk keperluan Kredit Investasi pembiayaan pembangunan memiliki limit fasilitas kredit investasi sebesar Rp7.404.162.000, dimana limit fasilitas kredit tranche B sebesar Rp1.000.000.000 dengan jangka waktu maksimum 180 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit termasuk *grace period* dengan suku bunga masa konstruksi adalah Reference Rate + Margin eqv. 12,50% untuk *tranche B* yang bersifat Subordinasi.

Berdasarkan Pemberitahuan Pernyataan Penundukan Diri tertanggal 22 Oktober 2019, dinyatakan bahwa PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") selaku kreditur baru telah bergabung dengan pola incremental option dan telah menjadi salah satu kreditur untuk fasilitas *tranche B* dalam Perjanjian Kredit dengan limit pinjaman Rp521.248.000.

Pada tanggal 17 Desember 2019, para pihak sepakat untuk melakukan perubahan pertama terhadap Akta Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 31 Tanggal 26 Februari 2019, dimana para pihak sepakat untuk merubah limit fasilitas kredit investasi menjadi maksimal sebesar Rp7.321.248.000 dengan limit fasilitas kredit *tranche B* sebesar Rp1.521.248.000.

Berdasarkan surat Agen Fasilitas nomor SSK/3.2/1528 tanggal 9 Juni 2022, perihal perubahan masa penarikan fasilitas kredit CTP, para pihak sepakat untuk mengubah jangka waktu penarikan *Tranche A* dan *B* sampai dengan tanggal 30 September 2023 (57 bulan sejak tanggal perjanjian ini) atau paling lambat 9 bulan sejak tanggal pengoperasian keseluruhan proyek, mana yang lebih dulu terjadi.

Perjanjian kredit sindikasi telah mengalami perubahan keempat melalui Akta Nomor 24 tanggal 30 Agustus 2023 pada akta pernyataan kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 31 Tanggal 26 Februari 2019. Akta perubahan keempat tersebut mencakup penyesuaian tingkat suku bunga fasilitas kredit *Tranche B* selama masa konstruksi dari ATD+6,94% (equiv.9,48%) menjadi ATD+6,19% (min equiv. sebesar 9%) dan selama masa operasi dari ATD+6,69% (equiv. 9,23%) menjadi ATD+5,94% (min equiv. sebesar 9%).

**26. LOAN FROM NON-BANK FINANCIAL
INSTITUTION (CONTINUED)**

CTP (continued)

In accordance with the decision of the Syndicated Creditor for participation in the syndicated financing of CTP for the purpose of development financing investment has an Investment Credit facility limit of Rp7,404,162,000, which the credit facility limit of tranche B is Rp1,000,000,000 with a maximum period of 180 months from the signing of the credit agreement including grace period with the construction interest rate is the Reference Rate + Margin eqv. 12.50% for tranche B which is Subordinated.

Based on the Notification of Self-Submission Statement dated October 22, 2019, it was stated that PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") as a new creditor had joined the incremental option pattern and had become one of the creditors for tranche B facilities in the Credit Agreement with a loan limit of Rp521,248,000.

On December 17, 2019, the parties agreed to make the first amendment to the Deed of Restatement of Syndicated Credit Agreement No. 31 Dated February 26, 2019, where the parties agreed to change the investment credit facility limit to a maximum of Rp7,321,248,000 with credit facility limit of tranche B is Rp1,521,248,000.

Based on the Facility Agent's letter number SSK/3.2/1528 dated June 9, 2022, regarding the Amendment of Withdrawal Period of CTP Credit Facility, the parties agreed to amend the withdrawal period of Tranche A and B until September 30, 2023 (57 months from the date of this agreement) or no later than 9 months from the date of operation of the entire project, whichever occurs first.

The Syndicated Credit Agreement has enacted the Fourth Amendment through Deed Number 24 dated August 30, 2023, which pertains to the restatement deed of Syndicated Credit Agreement Number 31 dated February 26, 2019. This amendment incorporates an adjustment to the interest rate for the Tranche B credit facility during the construction phase from ATD+6.94% (equiv. 9.48%) to ATD+6.19% (equiv. at least 9%). Additionally, during the operational phase, the rate is adjusted from ATD+6.69% (equiv. 9.23%) to ATD+5.94% (equiv. at least 9%).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

27. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA JANGKA PANJANG

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Premium JICT (Catatan 49h)	1.839.652.629	1.968.510.521
Sewa diterima di muka - NPCT1 (Catatan 49c)	1.121.591.603	1.170.100.949
Sewa tanah dan/atau bangunan	900.357.563	1.147.399.530
Premium TPK Koja (Catatan 49d)	402.163.542	429.898.958
Tanki Penyimpanan	1.467.237	-
Total	4.265.232.574	4.715.909.958
Bagian lancar (Catatan 20)	(72.262.428)	(171.138.682)
Total bagian jangka panjang	4.192.970.146	4.544.771.276

27. LONG-TERM UNEARNED REVENUE

JICT Premium (Note 49h)
Advance rental fee - NPCT1 (Note 49c)
Land and/or building rental TPK Koja Premium (Note 49d)
Storage Tank
Total
Current portion (Note 20)
Total long-term portion

28. LIABILITAS JANGKA PANJANG LAINNYA

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Pihak ketiga		
Provisi pemeliharaan terminal Sea Terminal Management and Service Pte. Ltd., Singapura	579.260.245	400.217.319
Provisi pemeliharaan jalan tol	249.536.973	254.635.841
	4.709.465	2.387.365
Subtotal pihak ketiga	833.506.683	657.240.525
Pihak berelasi (Catatan 44i)	4.921.771	469.347.513
Total	838.428.454	1.126.588.038

28. OTHER LONG-TERM LIABILITIES

Third parties
Provison for terminal maintenance Sea Terminal Management and Services Pte. Ltd., Singapura
Provison for toll road maintenance
Subtotal third parties
Related parties (Note 44i)
Total

Utang kepada Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), merupakan pinjaman sebesar USD15.096.000 yang diperoleh dan digunakan untuk setoran modal IPC TPK di NPCT1 berikut bunga terhutang (Catatan 49j).

Payable to Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd. ("STMS"), represents loan amounting to USD15,096,000 which was obtained and used by IPC TPK for acquisition of share capital in NPCT1 including the interest payable (Note 49j).

Provisi pemeliharaan terminal dan jalan tol merupakan provisi atas pemeliharaan terminal dan jalan tol terkait penerapan ISAK 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa (Catatan 48a).

Provison for terminal and toll road maintenance represents provision for terminal maintenance and toll road related to the application of ISAK 16 concerning Service Concession Arrangements (Note 48a).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen, Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan, Konsultan Aktuaria Arya Bagiastra, PT Tower Watson Purbajaga, Kantor Konsultan Aktuaria Enny Diah Awal, PT Emerald Delta Consulting, Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafril dan Amran Nangasan, Kantor Konsultan Aktuaria Riana dan Rekan (dahulu PT Padma Radya Aktuaria), Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Utama dan Kantor Konsultan Aktuaria Hanung Budiarto dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Berikut adalah asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam laporan aktuaris independen:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto	5,18% - 8,19%	5,52% - 7,44%	<i>Discount rate</i>
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	1,00% - 10,00%	2,00% - 10,00%	<i>Salary increase projection rate</i>
Tingkat mortalitas	TMI 2019 & TMI IV 2019	TMI 2019 & TMI IV 2019	<i>Mortality rate</i>
Tingkat cacat tetap	1-10% dari tabel amortisasi/ 1,00% untuk karyawan dibawah 30-40 tahun akan menurun sampai 0% pada usia 46-56 tahun/ 1.00% for employees under 30-40 years old will decrease to 0% at 46-56 years old	1-10% of amortization table	<i>Permanent disability rate</i>
Tingkat pengunduran diri	56 tahun/years	56 tahun/years	<i>Level of resignation</i>
Usia pensiun normal			<i>Normal pension age</i>

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The employee benefit liabilities are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Perusahaan			The Company
Program pensiun	712.369.101	630.783.130	<i>Pension program</i>
Program penghargaan masa bhakti	1.204.600.114	974.454.474	<i>Gratuity and compensation benefits</i>
Program kesehatan pensiunan	3.415.466.823	3.318.712.560	<i>Pension healthcare program</i>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	400.632.551	383.941.290	<i>Other long-term employee benefits</i>
Subtotal	<u>5.733.068.589</u>	<u>5.307.891.454</u>	<i>Sub-total</i>
Entitas anak			Subsidiaries
Program pensiun, penghargaan masa bhakti dan imbalan pasca-kerja lainnya	536.104.739	461.415.390	<i>Pension program, gratuity and compensation benefits and other post-benefits program</i>
Total	<u><u>6.269.173.328</u></u>	<u><u>5.769.306.844</u></u>	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan pensiun untuk karyawan tetap yang dipekerjakan pada tahun 2001 dan sebelumnya dan dikelola oleh Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") dan untuk yang dipekerjakan sejak tahun 2004 dikelola oleh Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Liabilitas imbalan kerja dan pencadangan biaya imbalan kerja atas program pensiun ini adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas	1.668.051.605	1.600.593.581	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	(1.100.657.945)	(1.166.992.320)	<i>Fair value of plan assets</i>
Defisit program	567.393.660	433.601.261	<i>Deficit in plan</i>
Dampak batas atas aset	144.975.441	197.181.869	<i>Effect of asset ceiling</i>
Liabilitas yang diakui	712.369.101	630.783.130	<i>Recognized liabilities</i>

The Company has a pension benefit plan covering permanent employees hired in and before 2001 and managed by Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4") and for employees hired with permanent status since 2004 managed by Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3").

Employee benefits liabilities and employee benefits expenses for the pension program are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Biaya jasa kini	55.438.831	53.995.760	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	(1.698.323)	-	<i>Past service cost</i>
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti - neto:			<i>Net Interest on the net defined benefit liability (asset) - net:</i>
- Bunga obligasi	29.045.591	29.758.706	<i>Bond interest -</i>
- Bunga aset	(35.419.980)	(34.469.739)	<i>Asset interest -</i>
- Bunga aset <i>ceiling</i>	6.374.388	4.711.033	<i>Ceiling asset interest -</i>
- Bunga atas kewajiban imbalan pasti	82.470.459	75.169.548	<i>Interest on the defined - benefit obligation</i>
- Pendapatan bunga atas aset program	(47.022.359)	(47.457.823)	<i>Interest income on plan assets -</i>
- Bunga atas dampak batas aset	3.785.257	8.193.913	<i>Interest on the impact of the - asset limit</i>
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	3.773.332	-	<i>Remeasurement of other long term employee benefits</i>
Beban yang diakui	96.747.196	89.901.398	<i>Recognized expense</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Liabilitas awal tahun	630.783.130	626.265.347
Aplikasi IFRIC IAS 19		(19.375.565)
Beban yang diakui dalam laba rugi	96.747.196	89.901.398
Penghasilan komprehensif lain	81.720.380	57.169.146
luran pemberi kerja	(47.497.239)	(89.555.943)
Pembayaran manfaat	(49.384.366)	(33.621.253)
Liabilitas akhir tahun	712.369.101	630.783.130

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas - awal tahun	1.600.593.581	1.675.085.208
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	(19.375.565)
Biaya jasa kini	55.438.831	53.995.760
Biaya jasa lalu	(1.698.323)	-
luran peserta program	1.567.352	883.604
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	82.470.459	75.169.548
Biaya bunga obligasi	29.045.591	29.758.706
Pembayaran manfaat	(189.499.185)	(172.883.907)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	90.133.299	(42.039.773)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.668.051.605	1.600.593.581

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai wajar aset program awal tahun	1.166.992.320	1.237.653.038
Pendapatan bunga atas aset program	47.022.359	47.457.823
luran pemberi kerja	47.497.239	89.555.943
luran peserta program	1.567.352	883.604
Pembayaran manfaat	(140.114.819)	(142.885.218)
Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas/aset imbalan pasti- neto	(25.883.817)	(29.330.638)
Imbal hasil ekspektasian aset program	35.419.980	34.469.739
Keuntungan (kerugian) aktuarial	(9.526.831)	(70.811.971)
Imbalan yang dibayarkan	(22.315.838)	-
Nilai wajar aset program akhir tahun	1.100.657.945	1.166.992.320

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

*Liabilities at beginning of year
Application of IFRIC IAS 19
Expense recognized in profit or loss
Other comprehensive income
Employer's contributions
Benefits payment
Liabilities at end of year*

*Present value of liabilities
- beginning of year
Application of IFRIC IAS 19
Current service cost
Past service cost
Plan participants' contributions
Interest on the defined benefit obligation
Bond interest costs
Benefits payment
Actuarial loss (gain)
Present value of
liabilities - end of year*

*Fair value of program assets -
beginning of year
Interest income
on plan asset
Employer's contributions
Plan participants' contributions
Benefits payment*

*The return on plan assets,
excluding amounts included
in net interest on the net
defined benefit liability/asset*

*The expected return on plan assets
Actuarial gain (loss)
Rewards paid*

*Fair value of program assets -
end of year*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

a. Program Pensiun (lanjutan)

Aset program yang dimiliki oleh Grup adalah sebagai berikut:

- Aset Tetap 21,30%
- Reksa Dana 31,14%
- Investasi Saham 1,00%
- Surat Utang Negara 42,56%
- Deposito berjangka 0,92%
- Penyertaan langsung 3,08%

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Jatuh tempo <= 1 tahun	818.004.029	584.363.267
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	443.453.983	371.234.614
Jatuh tempo > 5 tahun	2.879.297.208	2.625.280.853
Total	4.140.755.220	3.580.878.734

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	1.574.406.095	1.782.279.525
Biaya jasa kini	47.562.008	62.499.330
Nilai kini liabilitas	1.747.747.493	1.599.470.482
Biaya jasa kini	61.121.068	50.618.171

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

a. Pension Program (continued)

Plan assets owned by the Group is as follows:

- Fixed Assets 21.30%
- Mutual Funds 31.14%
- Investment in Shares 1.00%
- State Bonds 42.56%
- Time Deposits 0.92%
- Direct Investment 3.08%

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years
Total

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

Present value of liabilities
Current service cost

Present value of liabilities
Current service cost

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti

Manfaat yang diperhitungkan dalam penghargaan masa bhakti mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Dana Pensiun. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan dengan definisi gaji yang meliputi gaji merit dan tunjangan perumahan. Program ini tidak didanai.

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits

Benefits that are calculated in the gratuity and compensation benefits refer to the Collective Labor Agreement and the Regulations of the Pension Fund. Participants are all permanent employees of the company with the salary definition including merit pay and housing allowance. This program is not funded.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas	1.204.600.114	974.454.474	Present value of liabilities
Nilai wajar aset program	-	-	Fair value of plan assets
Liabilitas yang diakui	1.204.600.114	974.454.474	Recognized liabilities
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	2022	
Biaya jasa kini	67.896.144	56.865.507	Current service cost
Biaya jasa lalu	224.978	-	Past service cost
Biaya bunga	66.608.465	56.055.310	Interest cost
Beban yang diakui	134.729.587	112.920.817	Recognized expense
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas awal tahun	974.454.474	915.903.689	Liabilities at beginning of year
Beban yang diakui dalam laba rugi	134.729.587	112.920.817	Expense recognized in profit or loss
Rugi komprehensif lain	145.531.867	(5.277.252)	Other comprehensive loss
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(50.115.814)	(49.092.780)	Current year benefit payment
Liabilitas akhir tahun	1.204.600.114	974.454.474	Liabilities at end of year
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	974.454.474	915.903.689	Present value of liabilities - beginning of year
Biaya jasa kini	67.896.144	56.865.507	Current service cost
Biaya jasa lalu	224.978	-	Past service cost
Biaya bunga	66.608.465	56.055.310	Interest cost
Pembayaran manfaat dari pemberi kerja	(50.115.814)	(49.092.780)	Payment of benefits from the employer
Keuntungan (kerugian) aktuarial	145.531.867	(5.277.252)	Actuarial gain (loss)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	1.204.600.114	974.454.474	Present value of liabilities - end of year

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

b. Penghargaan masa bhakti (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Jatuh tempo <= 1 tahun	8.453.888	41.411.641	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	44.069.556	337.191.119	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	222.368.180	4.328.045.387	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	274.891.624	4.706.648.147	Total

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.108.236.859	1.316.091.162	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	61.250.565	75.704.759	<i>Current service cost</i>
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	1.307.806.412	1.113.640.675	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	75.228.027	61.535.242	<i>Current service cost</i>

c. Program kesehatan pensiunan

Perusahaan memberikan imbalan kerja berupa program kesehatan pensiunan dan keluarga. Program tersebut berupa bantuan pengobatan dari Perusahaan dalam jumlah tertentu dan telah terdaftar di Perusahaan. Program ini tidak didanai.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas	3.415.466.823	3.318.712.560	<i>Present value of liabilities</i>
Nilai wajar aset program	-	-	<i>Fair value of plan assets</i>
Liabilitas yang diakui	3.415.466.823	3.318.712.560	Recognized liabilities

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

b. Gratuity and compensation benefits (continued)

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

c. Pension healthcare program

The Company also provides long term post-employment benefits in form of healthcare program for pensioners and family. The program is in the form of medical assistance from the Company in certain amounts and after registering with the Company. This program is not funded.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Biaya jasa:		
- Biaya jasa kini	129.501.698	104.587.487
Bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti - neto:		
- Bunga atas kewajiban imbalan pasti	139.903.714	183.255.911
- Bunga obligasi	94.842.286	90.945.250
Beban yang diakui	364.247.698	378.788.648

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Liabilitas awal tahun	3.318.712.560	4.126.658.787
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	772.559
Beban yang diakui dalam laba rugi	364.247.698	378.788.648
Penghasilan komprehensif lain	(125.256.492)	(1.063.155.721)
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(142.236.943)	(124.351.713)
Liabilitas akhir tahun	3.415.466.823	3.318.712.560

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas - awal tahun	3.318.712.560	4.126.658.787
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	772.559
Biaya jasa kini	129.501.698	104.587.487
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	234.746.000	274.201.161
Pembayaran manfaat	(142.236.943)	(208.798.557)
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(125.256.492)	(978.708.877)
Nilai kini liabilitas akhir tahun	3.415.466.823	3.318.712.560

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Jatuh tempo <= 1 tahun	146.165.067	90.994.133
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	742.353.102	627.265.306
Jatuh tempo > 5 tahun	7.278.377.704	7.255.897.622
Total	8.166.895.873	7.974.157.061

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statement of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Maturity <= 1 year
Maturity > 1 year and <= 5 years
Maturity > 5 years
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

c. Program kesehatan pensiunan (lanjutan)

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	2.932.632.919	4.048.341.746
Biaya jasa kini	101.293.883	168.656.292

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti besar merupakan manfaat yang diperhitungkan mengacu kepada Peraturan Perusahaan. Peserta adalah seluruh pegawai tetap perusahaan yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus dan diberikan bantuan cuti besar sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap. Program ini tidak didanai.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas	400.649.556	383.958.216
Nilai wajar aset program	(17.005)	(16.926)
Liabilitas yang diakui	400.632.551	383.941.290

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Biaya jasa kini	30.981.013	34.049.867
Biaya jasa lalu	2.812.493	-
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	24.519.205	19.783.906
Bunga obligasi	882.665	1.837.332
Pendapatan bunga atas aset program	(1.189)	(8.258)
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	(18.624.664)	(27.349.354)
<i>Net Actuarial Losses (gains) recognized in year (OLTEB)</i>	16.614.202	-
Beban yang diakui	57.183.725	28.313.493

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

c. Pension healthcare program (continued)

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease
Nilai kini liabilitas	2.932.632.919	4.048.341.746
Biaya jasa kini	101.293.883	168.656.292

d. Other long-term employee benefits

Other long-term permanent employee benefits are in the form of long service leave benefits that are calculated in reference to the Company's Regulation. Participants include all employees that have worked at least 6 (six) years of continuous service and given assistance amounting to 1 (one) time the regular income. This program is not funded.

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Nilai kini liabilitas	400.649.556	383.958.216
Nilai wajar aset program	(17.005)	(16.926)
Liabilitas yang diakui	400.632.551	383.941.290

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,	
	2023	2022
Biaya jasa kini	30.981.013	34.049.867
Biaya jasa lalu	2.812.493	-
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	24.519.205	19.783.906
Bunga obligasi	882.665	1.837.332
Pendapatan bunga atas aset program	(1.189)	(8.258)
Pengukuran kembali manfaat jangka panjang	(18.624.664)	(27.349.354)
<i>Net Actuarial Losses (gains) recognized in year (OLTEB)</i>	16.614.202	-
Beban yang diakui	57.183.725	28.313.493

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

**d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
lainnya (lanjutan)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Liabilitas awal tahun	383.941.290	434.967.735	<i>Liabilities at beginning of year</i>
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	(55.156.686)	<i>Application of IFRIC IAS 19</i>
Beban yang diakui dalam laba rugi	57.183.725	28.313.493	<i>Expense recognized in profit or loss</i>
Beban (penghasilan) yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	201.452	(6.147.805)	<i>Expenses (income) that recognized in other comprehensive incomes</i>
Pembayaran imbalan tahun berjalan	(40.693.916)	(18.035.447)	<i>Current year benefit payment</i>
Liabilitas akhir tahun	400.632.551	383.941.290	<i>Liabilities at end of year</i>

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai kini liabilitas - awal tahun	383.958.216	435.094.715	<i>Present value of liabilities - beginning of year</i>
Aplikasi IFRIC IAS 19	-	(55.156.686)	<i>Application of IFRIC IAS 19</i>
Biaya jasa kini	30.981.013	34.049.867	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	2.812.493	-	<i>Past service cost</i>
Bunga atas kewajiban imbalan pasti	24.519.205	19.783.906	<i>Interest on the defined benefit obligation</i>
Bunga obligasi	882.665	1.837.332	<i>Bond interest</i>
Pembayaran manfaat	(40.693.916)	(18.035.447)	<i>Benefits payment</i>
Kerugian (keuntungan) aktuarial	(1.810.120)	(33.615.471)	<i>Actuarial loss (gain)</i>
Nilai kini liabilitas akhir tahun	400.649.556	383.958.216	<i>Present value of liabilities - end of year</i>

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai wajar aset program awal tahun	16.926	126.980	<i>Fair value of program assets - beginning of year</i>
Pendapatan bunga atas aset program	1.189	8.258	<i>Interest income on program assets</i>
Pembayaran manfaat dari aset program	-	(113.747)	<i>Benefit paid by plan asset</i>
Imbal hasil atas aset program tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	(1.110)	(4.565)	<i>The return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)</i>
Nilai wajar aset program akhir tahun	17.005	16.926	<i>Fair value of program assets - end of year</i>

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

**d. Other long-term employee benefits
(continued)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

d. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Rincian liabilitas imbalan kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Jatuh tempo <= 1 tahun	47.500.786	63.595.287	<i>Maturity <= 1 year</i>
Jatuh tempo > 1 tahun dan <= 5 tahun	208.761.068	166.258.175	<i>Maturity > 1 year and <= 5 years</i>
Jatuh tempo > 5 tahun	1.591.413.220	1.423.190.288	<i>Maturity > 5 years</i>
Total	1.847.675.074	1.653.043.750	Total

Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	375.198.220	429.369.303	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	28.343.674	34.049.977	<i>Current service cost</i>
	Kenaikan/ Increase	Penurunan/ Decrease	
Nilai kini liabilitas	426.404.620	377.388.928	<i>Present value of liabilities</i>
Biaya jasa kini	33.797.470	28.516.138	<i>Current service cost</i>

e. Program pensiun iuran pasti

Grup menyediakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang dipekerjakan sejak tahun 2002. Iuran program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3"). Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, iuran program yang dibayarkan Grup masing-masing sebesar Rp54.919.295 dan Rp31.061.140.

29. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

d. Other long-term employee benefits (continued)

The details of the employee benefit liabilities in the consolidated statements of financial position based on the maturity date as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits obligations are as follows:

e. Defined contribution plan

The Group provides a defined contribution pension plan for employees hired with permanent status since 2002. The contribution plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3"). For the year ended December 31, 2023 and 2022, the contribution plans established by the Group amounted to Rp54,919,295 and Rp31,061,140, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah:

Pemegang saham	Total Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Nominal/ Amount	Shareholders
Negara Republik Indonesia	40.575.584	100,00%	40.575.584.000	Republic of Indonesia

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang telah diaktakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 15 Agustus 2008 dari Notaris Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., modal dasar Perusahaan sebesar Rp4.000.000.000 terdiri dari 4.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp1.009.958.000 atau sebanyak 1.009.958 saham.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan sebagai berikut:

- 1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp7.652.976.
- 2) Penambahan penyertaan modal negara tersebut berasal dari pengalihan barang milik negara Kementerian Perhubungan berupa dermaga beton hasil kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan Sintete-Sambas, Kalimantan Barat, yang pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyetujui pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) sebesar 7.653 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham sebesar Rp7.653.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia.

30. SHARE CAPITAL

The Shareholders of the Company as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Based on General Meeting of Shareholders held on August 15, 2008 that was notarized through Notarial Deed No. 2 of Agus Sudiono Kuntjoro, S.H., the Company's authorized capital amounted to Rp4,000,000,000 divided into 4,000,000 shares with par value of Rp1,000,000 (full amount) per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp1,009,958,000 divided into 1,009,958 shares.

Based on the Regulation of Government of The Republic of Indonesia No. 58 Year 2011 dated December 22, 2011 about Additional Participation Capital of The Republic of Indonesia in the Company as follows:

- 1) The additional share capital of the government amounted to Rp7,652,976.
- 2) Additional share capital by the government came from the transfer of concrete jetty owned by Ministry of Transportation as a result of port development activities in Sintete-Sambas, West Kalimantan, provided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (State Revenue and Expenditure Budget) in 2005.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows:

- 1) Approved the disbursement/placement of shares that were still in portfolio of 7,653 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share amounting to Rp7,653,000, which was fully taken by the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2011 tersebut di atas, diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perusahaan yang tertuang dalam Risalah RUPSLB No. RIS-269/MBU/S/2012 tanggal 18 Juli 2012 dengan keputusan sebagai berikut: (lanjutan)

- 2) Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan sebesar Rp7.653.000 melalui:
 - a) Sebesar Rp7.652.976 merupakan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan;
 - b) Sebesar Rp24 berasal dari kapitalisasi cadangan Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dalam surat No. 020/LA-PL.II/V/12 tanggal 25 Mei 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 03 tanggal 2 Agustus 2013, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN menambah penyertaan modal ke dalam Perusahaan sebesar Rp426.418.000 yang berasal dari pengalihan seluruh modal saham milik Negara RI pada Rukindo dalam rangka restrukturisasi Rukindo.

Dengan adanya penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia tersebut, maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan yang semula sebesar Rp1.017.611.000 menjadi sebesar Rp1.444.029.000.

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 tanggal 21 Agustus 2019, Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan jenis saham yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B.

30. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 58 Year 2011, the Extraordinary General Shareholders Meeting of the Company was conducted as stipulated in the Minutes of Meeting No. RIS-269/MBU/S/2012 dated July 18, 2012 with decision as follows: (continued)

- 2) Approved additional paid-in capital of the Company owned by the Republic of Indonesia amounting to Rp7,653,000 through:
 - a) Rp7,652,976 as additional share capital of the government as stated in Government Regulation No. 58 Year 2011 regarding Additional Capital contribution by the Government of the Republic of Indonesia into the Company's share capital;
 - b) Rp24 taken from the Company's reserve capitalization as stated in the 2011 financial statements audited by KAP Hadori Sugiarto Adi & Rekan through letter No. 020/LA-PL.II/V/12 dated May 25, 2012.

Based on the Deed of Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders of the Company as notarized in the Notarial Deed No. 03 of Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., dated August 2, 2013, the Government of the Republic of Indonesia which in this case was represented by the Minister of SOEs increased its investment in the Company by Rp426,418,000 which was derived from the transfer of the entire share capital owned by the Republic of Indonesia in Rukindo for restructuring of Rukindo.

With the additional capital contribution by the Republic of Indonesia, the issued and fully paid capital of the Company changed from Rp1,017,611,000 to Rp1,444,029,000.

Based on Minister of SOEs Decree Statement as The General Meeting of Shareholders of the Company, which was notarized in Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 09 dated August 21, 2019, The Government of the Republic of Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the types of shares that were originally without series became consisted of Series A Dwiwarna Shares and Series B shares.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dengan adanya perubahan jenis saham tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp4.000.000.000 yang terdiri dari 4.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 3.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp1.444.029.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 1.444.028 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan penggabungan dengan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), dengan Perusahaan sebagai perusahaan hasil penggabungan (Catatan 1g).

Dengan adanya penggabungan tersebut, modal dasar Perusahaan adalah sebesar Rp33.000.000.000 yang terdiri dari 33.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 32.999.999 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah di ambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp8.475.067.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 8.475.066 lembar saham Seri B, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri BUMN Negara No. S-38/MBU/01/2022 yang diaktakan dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No. 02 tanggal 9 Februari 2022, Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri BUMN melakukan perubahan struktur permodalan dan perubahan Anggaran Dasar.

30. SHARE CAPITAL (continued)

With the changes in types of shares, Company's authorized capital of the Company is Rp4,000,000,000 consisting of 4,000,000 shares and divided into one Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 3,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp1,444,029,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 1,444,028 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

On October 1, 2021, the Company merged with Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I ("Pelindo I"), Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III ("Pelindo III") and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ("Pelindo IV"), with the Company as the surviving entity (Note 1g).

With such merger, the Company's authorized capital of the company is Rp33,000,000,000 consisting of 33,000,000 shares and divided into 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 32,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp8,475,067,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 8,475,066 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

Based on Minister of SOEs Decree Statement as No. S-38/MBU/01/2022 which was notarized on Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. No. 02 dated February 9, 2022, The Government of the Republic Indonesia, in this case represented by the Minister of SOEs, changed the company's capital structure and Articles of Association.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

30. MODAL SAHAM (lanjutan)

Dengan adanya perubahan struktur permodalan tersebut, modal dasar perseroan adalah Rp156.000.000.000 yang terbagi atas 156.000.000 lembar saham dan terbagi atas satu lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 dan 155.999.999 saham Seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh). Modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia sebanyak Rp40.575.584.000 yang terdiri dari 1 lembar saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (nilai penuh) dan 40.575.583 saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui suratnya No. AHU-0014773.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022.

31. MODAL DONASI

Pada tahun 1997, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa tanah dan gedung CDC dari Yayasan Sekar Laut masing-masing sebesar Rp1.820.092 dan Rp23.957.447.

Pada tahun 2009, Perusahaan memperoleh modal donasi berupa gedung stasiun pandu dari Pemerintah Daerah Cilegon sebesar Rp1.048.443.

30. SHARE CAPITAL (continued)

With the changes in capital structure, Company's authorized capital of the Company is Rp156,000,000,000 consisting of 156,000,000 shares and divided into 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 155,999,999 Series B shares, each with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount). The capital that has been taken part and fully paid by The Republic of Indonesia as much as Rp40,575,584,000 consisting of 1 Series A Dwiwarna share with nominal value Rp1,000,000 (full amount) and 40,575,583 Series B share, each with nominal value of Rp1,000,000 (full amount).

The amendment to the Company's Articles of Association has obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights through its letter No. AHU-0014773.AH.01.02.Year 2022 dated March 1, 2022.

31. DONATED CAPITAL

In 1997, the Company received donated capital in the form of land and CDC building from Yayasan Sekar Laut amounting to Rp1,820,092 and Rp23,957,447, respectively.

In 2009, the Company received donated capital in form of pilotage station building from the Local Government of Cilegon amounting to Rp1,048,443.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
<u>Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali</u>			<u>Difference in value of business combination transaction of entities und common control</u>
PHC	239.860.000	239.860.000	PHC
RSP	134.385.547	134.385.547	RSP
BMS	38.697.264	38.697.264	BMS
APBS	33.152.625	33.152.625	APBS
MMI	(8.565.613)	(8.565.613)	MMI
ILCS	(21.792.779)	(21.792.779)	ILCS
PMS	(34.886.436)	(34.886.436)	PMS
PMT (Catatan 1d)	(55.682.866)	(55.682.866)	PMT (Note 1d)
PTP1 (Catatan 1d)	(73.525.686)	(73.525.686)	PTP1 (Note 1d)
Rukindo	(317.597.475)	(317.597.475)	Rukindo
TPS	(514.813.986)	(514.813.986)	TPS
CTP (Catatan 1d)	(1.203.895.262)	(1.203.895.262)	CTP (Note 1d)
Transaksi penggabungan entitas sepengendali (Catatan 1g)	(32.100.517.000)	(32.100.517.000)	Merger transactions of entities under common control (Note 1g)
<u>Pengalihan barang milik negara</u>			<u>Transfer of government's assets</u>
Fasilitas Pelabuhan Dumai 2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	414.128.745	414.128.745	Dumai Port Facility 2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port
Dermaga Gunung Sitoli	53.560.436	53.560.436	Gunung Sitoli Jetty
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	37.991.647	37.991.647	Gunung Sitoli Port Facility
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	19.203.989	19.203.989	3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	1.686.300	1.686.300	1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port
	562.100	562.100	
Total	(33.358.048.450)	(33.358.048.450)	Total

a. Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitif sebesar Rp32.100.517.000 merupakan selisih nilai kekayaan definitif Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV sejumlah Rp39.131.554.121 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2021 dengan nilai modal saham Pelindo I, Pelindo III dan Pelindo IV pada saat penggabungan ke dalam Perusahaan, yaitu sebesar Rp7.031.038.000 (Catatan 1g). Penambahan modal tersebut akan dicatat sebagai modal saham pada saat telah disetujui dalam RUPS dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

a. Additional capital based on determination of definitive value amounting to Rp32,100,517,000 represents difference of definitive net assets value of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV totalling to Rp39,131,554,121, which have been determined by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia on December 29, 2021, with the share capital of Pelindo I, Pelindo III and Pelindo IV at the time of merger to the Company, which amounting to Rp7,031,038,000 (Note 1g). The additional capital will be recorded as share capital upon approval of GMS and upon approval from the Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Transaksi penggabungan tersebut di atas menimbulkan selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali sebesar Rp32.100.517.000 sesuai dengan metode penyatuan kepemilikan (Catatan 1g).

- b. Pada tanggal 2 Agustus 2013, Perusahaan menerima pengalihan seluruh saham Rukindo milik Pemerintah Negara Republik Indonesia dengan nilai pengalihan sebesar Rp426.418.000. Atas pengalihan tersebut, Perusahaan memiliki 100% saham Rukindo.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto Rukindo pada tanggal pengalihan	108.820.525
Nilai pengalihan	426.418.000
Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(317.597.475)

- c. Berdasarkan Perjanjian Pengambilan Saham Bersyarat pada tanggal 30 Juni 2020, PBM IHC melakukan pengambilalihan 103.166 lembar saham RSP yang dimiliki oleh Perusahaan (67%) senilai Rp167.500.000 dengan mekanisme sebagai berikut:
- PBM IHC menerbitkan sejumlah 584.372 lembar saham baru kepada Perusahaan yang mewakili 2% saham di PBM IHC senilai Rp96.250.000. Sehingga PBM IHC memperoleh sebanyak 59.282 lembar saham RSP milik Perusahaan (38,5%).
 - PBM IHC melakukan pembelian sejumlah 43.884 lembar saham RSP milik Perusahaan (28,5%) dengan mekanisme jual beli saham senilai Rp71.250.000.

PBM IHC telah melakukan penyetoran kas kepada Perusahaan pada tanggal 7 Agustus 2020 sejumlah Rp71.250.000.

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

The merger transaction as stated above created the difference in value of business combination transaction of entities under common control amounting to Rp32,100,517,000 in accordance with the pooling of interest method (Note 1g).

- b. On August 2, 2013, the Company received the transfer of all of Rukindo's shares owned by the Government of the Republic of Indonesia amounting to Rp426,418,000. After the transfer, the Company owned 100% shares of Rukindo.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of Rukindo as of transfer date	108.820.525
Transfer amount	426.418.000
Difference arising from business combination of entites under common control	(317.597.475)

- c. Based on Decision-Shares Conditional Agreement on June 30, 2020, PBM IHC takeover 103,166 RSP shares owned by the Company (67%) worth Rp167,500,000 by using the following mechanism:
- PBM IHC issued 584,372 new shares to the Company which represent 2% of the shares of PBM IHC amounting to Rp96,250,000. Therefore, PBM IHC acquired 59,282 RSP shares of the Company (38.5%).
 - PBM IHC purchased a total of 43,884 RSP shares owned by the Company (28.5%) with a share sale and purchase mechanism worth Rp71,250,000.

PBM IHC have transferred cash to the Company amounted Rp71,250,000 on August 7, 2020 to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham mengenai perubahan anggaran dasar RSP tanggal 7 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 September 2020.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto RSP pada tanggal pengalihan	33.114.453
Nilai pengalihan	167.500.000

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(134.385.547)
--	----------------------

- d. Berdasarkan akta jual beli saham tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan mengakuisisi kepemilikan saham PT Multimedia Nusantara pada ILCS sebanyak 4.900.000 lembar saham atau setara dengan 49% porsi kepemilikan saham ILCS dengan nilai pengalihan sebesar Rp49.200.000.

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto ILCS pada tanggal pengalihan	27.407.221
Nilai pengalihan	49.200.000

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(21.792.779)
--	---------------------

- e. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MMI No. 54 tanggal 16 April 2021, SPSL mengakuisisi kepemilikan saham PT PP Properti Tbk pada MMI sebanyak 656.250.000 lembar saham atau setara dengan 21,13% porsi kepemilikan saham MMI dengan nilai pengalihan sebesar Rp70.087.500.

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

The Deed of Shareholder Decree Statement regarding the amendment to the RSP's articles of association dated August 7, 2020 has been notified to and received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on September 4, 2020.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of RSP as of transfer date
Transfer amount

Difference arising from business combination of entites under common control

- d. Based on share sales purchase agreement dated October 9, 2020, the Company acquired the share ownership of PT Multimedia Nusantara in ILCS of 4,900,000 shares or equivalent to 49% of the share ownership of ILCS with transfer value of Rp49,200,000.

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

Net assets of ILCS as of transfer date
Transfer amount

Difference arising from business combination of entites under common control

- e. Based on the Decision of the Meeting Deed of MMI No. 54 dated April 16, 2021, SPSL acquired the share ownership of PT PP Properti Tbk in MMI of 656,250,000 shares or equivalent to 21.13% of the share ownership of MMI with transfer value of Rp70,087,500.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Selisih antara nilai pengalihan dan nilai tercatat aset neto dicatat sebagai selisih nilai transaksi bisnis kombinasi entitas sepengendali sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor, dengan perhitungan sebagai berikut:

Aset neto MMI pada tanggal pengalihan	61.521.887
Nilai pengalihan	70.087.500

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(8.565.613)
--	--------------------

- f. Tambahan modal disetor APBS merupakan selisih antara nilai nominal saham dengan setoran modal saham yang diterima dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV masing-masing sebesar Rp33.152.625 pada tanggal 31 Desember 2022.
- g. Tambahan modal disetor PMS merupakan selisih antara nilai nominal saham milik APBS yang dibeli oleh PMS dari Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV dan PT Gerbang Samudra Utama dengan setoran modal saham sebesar masing-masing Rp29.236.335 dan Rp29.223.425 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
- h. Tambahan modal disetor TPS sebesar Rp514.813.986 merupakan selisih antara nilai nominal saham milik TPS yang dibeli oleh Perusahaan dari P&O Dover (Holdings) Limited dengan setoran modal saham.
- i. Tambahan modal disetor PHC merupakan selisih antara nilai nominal saham milik PHC yang dibeli oleh PBM IHC dari Perusahaan dengan setoran modal saham Rp239.860.000 pada tanggal 31 Desember 2020.
- j. Tambahan modal disetor PTP1 merupakan selisih antara nilai buku investasi PTP1 pada tanggal pengalihan dengan nilai pembelian saham yang dibeli oleh SPTP.

Aset neto PTP1 pada tanggal pengalihan	302.382.814
Nilai pengalihan	375.908.500

Selisih nilai transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali	(73.525.686)
--	---------------------

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Difference between transfer prices and the carrying value of net assets is recorded as difference arising from business combination of entites under common control as part of paid in capital account is as follows:

<i>Net assets of MMI as of transfer date</i>	
<i>Transfer amount</i>	

Difference arising from business combination of entites under common control

- f. *Paid in capital of APBS represents the difference between the par value and the capital contribution received from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV amounting to Rp33,152,625 as of December 31, 2022.*
- g. *Paid in capital of PMS represents the difference between the par value owned by APBS which was purchased by PMS from Van Oord Dredging and Marine Contractor, BV and PT Gerbang Samudra Utama with the capital contribution received amounting to Rp29,236,335 and Rp29,223,425 as of December 31, 2021 and 2020, respectively.*
- h. *Paid in capital of TPS amounting to Rp514,813,986 represents the difference between the par value owned by TPS which was purchased by the Company from P&O Dover (Holdings) Limited with the capital contribution received.*
- i. *Paid in capital of PHC represents the difference between the par value owned by PHC which was purchased by the PBM IHC from the Company with the capital contribution received amounting to Rp239,860,000 as of December 31, 2020.*
- j. *paid-in capital of PTP1 represents the difference between the book value of PTP1's investment and the purchase value of shares purchased by SPTP.*

<i>Net assets of PTP1 as of transfer date</i>	
<i>Transfer amount</i>	

Difference arising from business combination of entites under common control

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

32. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

k. Tambahan modal disetor PMT merupakan Selisih yang timbul perubahan nilai buku investasi setelah penerbitan saham baru dicatat sebagai tambahan modal disetor. Berdasarkan keputusan RUPS Sirkuler PMT tanggal 24 Oktober 2022, para pemegang saham PMT menyetujui:

- Penambahan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp1.467.360.000 yang terbagi atas 1.467.360 saham menjadi sebesar Rp4.504.361.049 sejumlah 27.583.523 saham dengan nilai nominal Rp3.037.001.049, yang seluruhnya diambil oleh Perusahaan.
- Pemberian hak put option kepada PP dan Waskita, dimana saham seri A yang dimiliki PP dan Waskita akan dibeli oleh Perusahaan dengan harga nominal Rp1.000.000 (nilai penuh).

l. Tambahan modal disetor yang berasal dari pengalihan barang milik negara merupakan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah ("PP") No. 10 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019 sebesar Rp527.133.217 yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011.

Rincian Barang Milik Negara yang dialihkan tersebut adalah sebagai berikut:

Fasilitas Pelabuhan Dumai	414.128.745
2 (dua) unit kapal tunda di Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Lhokseumawe	53.560.436
Dermaga Gunung Sitoli	37.991.647
Fasilitas Pelabuhan Gunung Sitoli	19.203.989
3 (tiga) unit forklift 3 ton dan 3 (tiga) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Malahayati	1.686.300
1 (satu) unit forklift 3 ton dan 1 (satu) unit forklift 5 ton di Pelabuhan Gunung Sitoli	562.100
Total	527.133.217

32. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

k. *Paid-in capital of PMT represents the difference arising from the change in book value of investment after the issuance of new shares is recorded as additional paid-in capital based on the resolution of PMT's Circular GMS dated October 24, 2022, PMT's shareholders approved:*

- *Increase in issued and paid-up capital from the original Rp1,467,360,000 divided into 1,467,360 shares to Rp4,504,361,049 totaling 27,583,523 shares with a nominal value of Rp3,037,001,049, all of which were subscribed by the Company.*
- *Granting put option rights to PP and Waskita, where series A shares owned by PP and Waskita will be purchased by the Company at a nominal price of Rp1,000,000 (full amount).*

l. *Additional paid-in capital arise from transfer of government's assets represents additional capital investment from the Republic of Indonesia which stipulated through Government Regulation ("PP") No. 10 Year 2019 dated February 22, 2019 amounting to Rp527,133,217 resulting from the transfer of Government's Assets under the Ministry of Transportation which provided from the Indonesian State Budget Year 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011.*

The details of the transferred Government's Assets are as follows:

Dumai Port Facility
2 (two) units of tugboat in Malahayati and Lhokseumawe Port
Gunung Sitoli Jetty
Gunung Sitoli Port Facility
3 (three) unit of 3 ton forklift and 3 (three) unit of 5 ton forklift in Malahayati Port
1 (one) unit of 3 ton forklift and 1 (one) unit of 5 ton forklift in Gunung Sitoli Port
Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**33. SELISIH NILAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK
NONPENGENDALI**

Rincian selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Penawaran saham perdana IKT	565.027.539	565.027.539
Penawaran saham perdana JAI	271.045.395	271.045.395
Peningkatan kepemilikan saham TCS	832.137	832.137
Total	836.905.071	836.905.071

Penurunan kepemilikan saham Perusahaan sehubungan dengan penawaran saham perdana di IKT dan JAI tidak disertai dengan hilangnya pengendalian.

34. DIVIDEN DAN CADANGAN UMUM

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2023:

Perusahaan/ The Company	Rapat Umum Pemegang Saham/General Meeting of Shareholders	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	Cadangan Umum/General Reserve	Tanggal Pembayaran Dividen/ Date of Dividend Payment
Perusahaan (dahulu Pelindo I,II,III,IV) (formerly Pelindo I,II,III,IV)	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.04 tanggal 19 Juni 2023/General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 04 dated June 19, 2023	36,51% dari laba neto atau Rp1.377.200.000/ 36.51% of net income or amounted to Rp1,377,200,000	63,49% dari laba neto atau sebesar Rp2.395.345.951/ 63.49% of net income or amounted to Rp2,395,345,951	14 Juli 2023, 15 September 2023, dan 15 November 2023/ July 14, 2023, September 15, 2023, and November 15, 2023

Berikut merupakan rincian pembagian dividen dan pembentukan cadangan umum pada tahun 2022:

Perusahaan/ The Company	Rapat Umum Pemegang Saham/General Meeting of Shareholders	Pembagian Dividen/Dividend Distribution	Cadangan Umum/General Reserve	Tanggal Pembayaran Dividen/ Date of Dividend Payment
Perusahaan (dahulu Pelindo I,II,III,IV) (formerly Pelindo I,II,III,IV)	Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPS PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No.02 tanggal 18 Mei 2022/General Meeting of Shareholders (GMS) as outlined in the Minutes of the GMS of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No. 02 dated May 18, 2022	40,00% dari laba neto atau Rp1.316.854.000/ 40.00% of net income or amounted to Rp1,316,854,000	60,00% dari laba neto atau sebesar Rp1.975.279.734/ 60.00% of net income or amounted to Rp1,975,279,734	16 Juni 2022/ June 16, 2022

**33. DIFFERENCE IN VALUE OF TRANSACTIONS
WITH NON-CONTROLLING INTEREST**

The details of difference in value of transactions with non-controlling interest are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Initial public offering of IKT	565.027.539	565.027.539
Initial public offering of JAI	271.045.395	271.045.395
Increase in share ownership of TCS	832.137	832.137
Total	836.905.071	836.905.071

The decrease in company ownership in connection with the initial public offerings in IKT and JAI which is not accompanied by loss of control.

34. DIVIDEND AND GENERAL RESERVE

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2023:

The following represents details of dividend distribution and general reserve in 2022:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

35. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

35. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(1.380.419.751)	(1.389.753.251)	Remeasurement of defined benefit plans
Perubahan nilai wajar aset keuangan pada nilai wajar melalui rugi komprehensif lain	41.965.053	(66.738.110)	Change in fair value of financial assets at fair value through other comprehensive loss
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(1.507.210.680)	(2.820.468.471)	Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedges
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	472.646.801	502.800.135	Exchange difference due to financial statements translation
Total	(2.373.018.577)	(3.774.159.697)	Total

Selisih kurs penjabaran laporan keuangan terutama merupakan penjabaran laporan keuangan JICT, NPCT1 dan TPK Koja yang mata uang fungsionalnya adalah Dolar Amerika Serikat.

Exchange difference due to financial statements translation mainly represents translation of financial statements of JICT, NPCT1 and TPK Koja which functional currency is United States Dollar.

36. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

36. NON-CONTROLLING INTERESTS

	Aset Neto/Net Assets		Laba (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)		
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31, 2023 2022		
BJTI	513.166.587	462.406.181	50.760.406	27.329.060	BJTI
IKT	353.278.198	294.896.513	58.381.685	56.554.399	IKT
PTP1	315.692.501	315.597.771	94.730	-	PTP1
PMT	204.653.911	203.492.958	1.160.953	(37.066.607)	PMT
JAI	193.636.892	153.894.814	39.742.078	18.218.861	JAI
PMS	148.138.184	124.272.635	23.865.549	60.590.274	PMS
EPI	60.318.262	56.500.933	3.817.329	1.776.922	EPI
KKT	43.232.339	36.522.483	6.709.856	3.720.848	KKT
PDS	18.087.578	17.523.553	564.025	4.068.275	PDS
TPS	16.027.924	13.288.411	2.739.513	2.582.856	TPS
MTI	7.202.531	6.984.080	218.451	903.367	MTI
TTL	5.400.518	4.929.027	471.491	718.496	TTL
PIL	1.027.943	955.795	72.148	84.032	PIL
EII	658.962	602.414	56.548	147.540	EII
PHCM	169.114	157.283	11.831	13.348	PHCM
EDII	(10.228.685)	(12.021.072)	1.792.387	(3.717.765)	EDII
Total	1.870.462.759	1.680.003.779	190.458.980	135.923.906	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

37. PENDAPATAN OPERASI

37. OPERATING REVENUES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pelayanan terminal petikemas	13.454.823.324	12.927.659.143	Container services
Pelayanan jasa kapal	5.978.487.372	5.090.014.199	Vessel services
Pelayanan jasa terminal	4.843.880.284	4.499.450.059	Terminal services
Pengusahaan tanah, bangunan, air dan listrik	3.869.774.935	3.787.257.944	Land, building, water and electricity services
Kerjasama dan <i>fee for services</i>	986.715.808	1.233.329.761	Partnership and fee for services
Pelayanan jasa barang	439.614.764	515.398.786	Cargo services
Pendapatan pas pelabuhan dan terminal	414.078.774	441.126.796	Port and terminal entry fee
Pengusahaan peralatan	356.232.673	370.796.897	Equipment services
Jasa maritim dan pengerukan	264.941.242	405.778.070	Marine and dredging services
Jasa logistik	180.968.551	159.334.977	Logistic services
Pelayanan jaringan dan konsultasi sistem informasi	119.849.121	155.363.848	Network services and consultant of information system
Pelayanan kesehatan	24.198.978	16.448.305	Medical services
Lain-lain	84.651.876	98.645.350	Others
Total	31.018.217.702	29.700.604.135	Total

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pelanggan dengan total penjualan kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2023 and 2022, there were no sales made from any single customer with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

38. PENDAPATAN DAN BEBAN KONSTRUKSI

38. CONSTRUCTION REVENUES AND EXPENSES

Pendapatan konstruksi merupakan jasa kompensasi yang diakui oleh Perusahaan dalam pembangunan terminal Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Fase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya dan Jalan Tol Cibitung - Cilincing. Pendapatan konstruksi dinilai dengan menggunakan metode biaya yang mana seluruh biaya dapat diatribusikan langsung sebagai nilai perolehan aset.

Construction revenue is the compensation of the service recognized by the Company for construction of Kalibaru, Kijing, Teluk Lamong, Manyar Gresik, Kuala Tanjung, Belawan Phase II, Makassar New Port, Alur Pelayaran Barat Surabaya and Cibitung - Cilincing Toll Road. Construction revenue is measured using cost method, where all costs are directly attributable to the acquiring cost of the assets.

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan konstruksi	2.897.789.567	2.397.701.575	Construction revenues
Beban konstruksi	(2.897.789.567)	(2.397.701.575)	Construction expenses

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

39. BEBAN OPERASI

39. OPERATING EXPENSES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pegawai	5.801.056.215	5.801.903.082	Employee
Kerja sama mitra usaha	5.397.062.045	6.550.559.411	Partnership
Umum	3.733.733.087	3.309.282.651	General
Penyusutan dan amortisasi	3.673.836.192	3.567.862.133	Depreciation and amortization
Bahan bakar dan bahan habis pakai	3.372.092.843	2.367.251.451	Fuels and supplies
Pemeliharaan	1.801.592.392	1.030.572.335	Maintenance
Asuransi	447.830.815	433.675.572	Insurance
Administrasi kantor	116.027.882	93.322.556	Office administration
Total	24.343.231.471	23.154.429.191	Total

Kerjasama mitra usaha terutama merupakan beban pembagian pendapatan yang timbul dari perjanjian dengan mitra terseleksi seperti perusahaan-perusahaan operator fasilitas pelabuhan yang menyediakan kegiatan pelayanan jasa bongkar muat, pemindahan lapangan penumpukan dan *lift on* dan *lift off* di pelabuhan.

The partnership expenses mainly represent the revenue sharing costs arising from the agreements with selected partners such as port facilities' management companies for providing loading and unloading activities, cargodoring, and lift-on and lift-off facilities at the ports.

Beban umum terutama merupakan beban jasa konsultan, penyisihan penurunan nilai piutang, kontribusi kepada pihak lain, imbalan kerja, perjalanan dinas, pendidikan dan pelatihan dan pemasaran.

General expenses mainly consist of consultants, allowance for impairment of receivables, contribution to the other parties, employee benefits, business travelling, education and training and marketing expenses.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada transaksi dari satu pemasok dengan total pembelian kumulatif yang melebihi 10% dari total pendapatan konsolidasian.

During the year ended as of December 31, 2023 and 2022, there were no purchase made from any single supplier with a cumulative amount exceeding 10% of the total consolidated revenue.

40. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA - NETO

40. OTHER OPERATING INCOME - NET

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Amortisasi premium (Catatan 49e dan 49f)	154.194.408	161.033.845	Amortization of premium (Notes 49e and 49f)
Laba (rugi) selisih kurs - neto	59.054.235	(182.036.994)	Gain (loss) on foreign exchange - net
Pendapatan denda	42.869.047	92.212.745	Income from penalties
Penerimaan aset <i>build, operate, transfer</i>	38.842.587	26.537.083	Receive of build, operate, transfer assets
Keuntungan dari transaksi peningkatan kepemilikan saham pada entitas asosiasi	2.093.130	141.671.533	Gain from transaction of shares ownership increase in associate
Laba (rugi) penjualan aset tetap - neto	1.935.063	(748.245)	Gain (loss) on sale of fixed asset - net
Beban denda	(68.567.655)	(34.792.709)	Expenses from penalties
Efek penyesuaian IFRIC 19	-	82.855.722	Effect of IFRIC 19 adjustment
Lain-lain - neto	80.175.378	281.912.517	Others - net
Total	310.596.193	568.645.497	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

41. PENDAPATAN KEUANGAN

41. FINANCE INCOME

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Pendapatan bunga deposito	480.169.836	247.860.700	<i>Interest income from deposits</i>
Pendapatan jasa giro	127.747.368	104.501.094	<i>Interest income on current account</i>
Pendapatan bunga pinjaman	19.378.228	28.128.476	<i>Interest income from loan</i>
Total	627.295.432	380.490.270	Total

42. BEBAN KEUANGAN

42. FINANCE COSTS

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
Beban bunga, amortisasi diskonto dan biaya transaksi	1.780.775.179	2.036.128.007	<i>Interest expenses, amortization of discount and transaction cost</i>
Beban bunga pinjaman bank	910.572.589	391.025.313	<i>Interest expense from bank loans</i>
Beban bunga provisi konsesi	117.504.090	96.208.028	<i>Provision interest expenses</i>
Beban bunga sewa	34.441.109	30.313.025	<i>Lease interest expenses</i>
Beban lain-lain	16.826.886	17.368.595	<i>Other expenses</i>
Total	2.860.119.853	2.571.042.968	Total

43. BAGIAN LABA ENTITAS ASOSIASI

43. EQUITY IN INCOME OF ASSOCIATES

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,		
	2023	2022	
BKMS	355.909.536	164.502.001	<i>BKMS</i>
Ambapers	13.921.206	3.040.547	<i>Ambapers</i>
PTI	11.741.432	2.951.271	<i>PTI</i>
RSP	11.740.049	10.210.479	<i>RSP</i>
PHC	8.156.012	(24.198.315)	<i>PHC</i>
JICT	7.917.201	62.413.034	<i>JICT</i>
TNU	2.349.252	(7.601.852)	<i>TNU</i>
LNG	535.730	380.592	<i>LNG</i>
BNCT	(736.124)	-	<i>BNCT</i>
PCN	(1.927.628)	102.185	<i>PCN</i>
JBT	(10.258.202)	(14.278.018)	<i>JBT</i>
NPCT1	(28.970.904)	105.093.768	<i>NPCT1</i>
Total	370.377.560	302.615.692	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Entitas dianggap berelasi jika entitas tersebut, antara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mengendalikan atau mengendalikan bersama, atau memiliki pengaruh signifikan atas Grup dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasional. Entitas juga dianggap berelasi jika entitas tersebut sepengeendalian dengan Grup.

Pemerintah Republik Indonesia adalah pemegang saham Perusahaan. Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta entitas dimana Pemerintah Republik Indonesia memiliki pengaruh signifikan merupakan pihak berelasi.

Sifat hubungan berelasi

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Pemegang saham/ <i>Controlling Shareholder</i>	Negara Republik Indonesia	Jasa konsesi/ <i>Concession service</i>
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government-related entity</i>	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Jasa Perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Bank Raya Indonesia Tbk	Jasa perbankan/ <i>Banking services</i>
	PT Wika Haka Joint Operation	Jasa Pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Pertamina (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)Tbk	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES**

In the normal course of business, the Group enters into transactions with related parties. Entities are considered to be related if, among these, the Company has the ability, directly or indirectly, to control or jointly control or have significant influence over these entities in making financial and operating decisions. Entities are also considered to be related if they are under common control with the Group.

The Government of the Republic of Indonesia is the controlling shareholder of the Company. All entities that are owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia and also entities where the Republic of Indonesia has significant influence are related parties.

Nature of relationship with related parties

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ <i>Government-related entity (continued)</i>	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	PT Pertamina Patra Niaga	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	Koperasi Pegawai Maritim	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ <i>Sales and operational activities</i>
	Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan ("DP4")	Jasa pensiun/ <i>Pension services</i>
	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Utama Karya (Persero)	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	Direktorat Jenderal Pajak	Perpajakan/ <i>Taxation</i>
	Badan Layanan Umum Sekretariat Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Pinjaman/ <i>Loan</i>
	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Jasa pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT BNI Danareksa Sekuritas	Jasa perbankan dan pinjaman/ <i>Banking services and loans</i>
	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Jasa Klasifikasi dan Registrasi Kapal/ <i>Ship classification and registration services</i>
	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Jasa Pembangunan/ <i>Construction services</i>
	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>
	PT Semen Padang (Persero)	Penjualan jasa/ <i>Sales</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ Government-related entity (continued)	Koperasi Pegawai PT Pelindo III	Penjualan jasa/ Sales
	PT Yodya Karya (Persero)	Konsultan/ Consultant
	PT Indonesia Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Pinjaman/Loan
	PT Bukit Asam Tbk	Penjualan jasa/Sales
	PT Adhi Guna Putera	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Belawan New Container Terminal	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	Indonesia National Single Window	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	Konsorsium PP – Waskita	Jasa Pembangunan/ Construction Services
	Perum DAMRI	Pinjaman/ Loan
	PT Bank Mandiri Taspen	Jasa Perbankan / Banking Services
	PT Telekomunikasi Selular	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Jawa Satu Power	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

***Nature of relationship with related parties
(continued)***

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/Government-related entity (continued)	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Djakarta Lloyd (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Dharma Lautan Nusantara	Penjualan jasa/Sales
	Tentara Nasional Indonesia	Penjualan jasa/Sales
	Instansi Pemerintah	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Kesehatan	Penjualan jasa/Sales
	PT BNI Life Insurance	Penjualan jasa/Sales
	PT Pertamina Trans Kontinental	Penjualan jasa/Sales
	PT Semen Tonasa	Penjualan jasa/Sales
	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	Penjualan jasa/Sales
	Dana Pensiun Pelindo Purnakarya ("DP3")	Jasa Pensiun/Pension services
	PT Perikanan Nusantara (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Petrokimia Gresik	Penjualan jasa/Sales
	PT Prima Citra Nutrindo	Jasa Boga/Catering
	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT PP Presisi Tbk	Jasa pembangunan/ Construction services
	PT Bukit Prima Bahari	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operating activities
	PT Sarana Bandar Nasional	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Portek Indonesia	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities
	PT Pengembangan Listrik Nasional Energi Gas	Jasa dan operasional/ Sales and operating activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/Government-related entity (continued)	PT Taspen (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	BPJS Ketenagakerjaan	Penjualan jasa/Sales
	PT Daya Radar Utama	Penjualan jasa/Sales
	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Penjualan jasa/Sales
	PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	Lembaga Manajemen Aset Negara	Piutang pembebasan lahan/ Land acquisition receivables
	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Penjualan jasa/Sales
	PT Asuransi Kredit Indonesia	Jasa asuransi/Insurance services
	PT Asuransi Jiwasraya	Jasa asuransi/Insurance services
	PT Pertamina Hulu Energi	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Waskita Beton Precast Tbk	Jasa Pembangunan/ Construction services
	PT Asuransi Jasa Indonesia	Jasa Asuransi/Insurance services
	PT Berdikari (Persero)	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities
	PT Terminal Nilam Utara	Penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Sales and operational activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Sifat hubungan berelasi (lanjutan)

**Nature of relationship with related parties
(continued)**

Ringkasan sifat hubungan dan transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Summary of the nature of the relationship and significant transactions with related parties is as follows: (continued)

Sifat relasi/ Nature of relationship	Nama pihak berelasi/ Name of related party	Jenis transaksi/ Nature of transaction
Entitas asosiasi/Associate entities	JICT	Sewa dan royalti/ Rental and royalty
	NPCT1	Investasi/Investment
	RSP	Jasa Kesehatan/Health services
	PHC	Jasa Kesehatan/Health services
	KSO TPK KOJA	Penjualan/Sales
	BKMS	Pinjaman, penjualan jasa dan kegiatan operasional/ Loan, sales and operational activities
	Ambapers	Penjualan jasa/Sales

Transaksi dengan pihak berelasi

Transactions with related parties

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:

a. Kas dan setara kas (Catatan 4)

a. Cash and cash equivalents (Note 4)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
Bank					Cash in banks
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.744.005.878	1,39	1.724.537.132	1,46	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.362.043.409	1,09	2.450.226.104	2,07	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	73.860.457	0,06	137.311.483	0,12	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	71.014.197	0,06	9.016.541	0,01	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	59.607.199	0,05	73.129.253	0,06	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Total	3.310.531.140	2,65	4.394.220.513	3,72	Total
<u>Dolar AS</u>					<u>US Dollar</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	455.167.517	0,36	1.478.727.324	1,25	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.940.651	0,01	6.829.657	0,01	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.195.150	0,00	9.588.955	0,01	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	-	49.541	0,00	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Lain-lain	306.796	0,00	-	-	Others
Total	466.610.114	0,37	1.495.195.477	1,27	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

a. Kas dan setara kas (Catatan 4) (lanjutan)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Deposito Berjangka				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	2.561.806.538	2,05	2.441.799.450	2,06
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.111.935.636	1,69	1.160.768.887	0,98
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	830.499.034	0,66	1.269.942.345	1,07
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	703.000.000	0,56	463.064.119	0,39
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.020.000	0,05	1.032.310.000	0,87
PT Bank Raya Indonesia Tbk	32.150.000	0,03	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	-	-	10.000.000	0,01
Total	6.304.411.208	5,04	6.377.884.801	5,38
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	80.387.729	0,06	79.720.239	0,07
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	78.511.580	0,06	77.470.447	0,07
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.562.000	0,01	11.798.250	0,01
Total	170.461.309	0,13	168.988.936	0,15

*) dari total aset

b. Investasi jangka pendek (Catatan 5)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Deposito berjangka				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Tabungan				
Negara (Persero) Tbk	2.660.000.000	2,13	1.052.500.000	0,89
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000	0,10	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	615.000.000	0,52
<u>Dolar AS</u>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.094.582.414	0,87	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1.736.427.108	1,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	519.123.000	0,44
Total	3.769.582.414	3,10	3.923.050.108	3,32

*) dari total aset

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

a. Cash and cash equivalents (Note 4) (continued)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Time Deposits				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	2.561.806.538	2,05	2.441.799.450	2,06
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.111.935.636	1,69	1.160.768.887	0,98
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	830.499.034	0,66	1.269.942.345	1,07
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	703.000.000	0,56	463.064.119	0,39
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	65.020.000	0,05	1.032.310.000	0,87
PT Bank Raya Indonesia Tbk	32.150.000	0,03	-	-
PT Bank Mandiri Taspen	-	-	10.000.000	0,01
Total	6.304.411.208	5,04	6.377.884.801	5,38
<u>US Dollar</u>				
PT Bank Rakyat				
Indonesia (Persero) Tbk	80.387.729	0,06	79.720.239	0,07
PT Bank Negara				
Indonesia (Persero) Tbk	78.511.580	0,06	77.470.447	0,07
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.562.000	0,01	11.798.250	0,01
Total	170.461.309	0,13	168.988.936	0,15

*) from total assets

b. Short-term investment (Note 5)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Time deposits				
<u>Rupiah</u>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2.660.000.000	2,13	1.052.500.000	0,89
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000	0,10	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	615.000.000	0,52
<u>US Dollar</u>				
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.094.582.414	0,87	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-	1.736.427.108	1,47
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	-	519.123.000	0,44
Total	3.769.582.414	3,10	3.923.050.108	3,32

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

c. Piutang usaha (Catatan 6)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	
PT Pertamina Trans Kontinental	171.754.949	0,15	186.892.251	0,16	PT Pertamina Trans Kontinental
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	118.796.482	0,10	37.605.527	0,03	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	82.285.569	0,07	77.330.943	0,07	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
PT Jakarta Lloyd (Persero)	51.974.106	0,04	61.088.111	0,05	PT Jakarta Lloyd (Persero)
PT Petrokimia Gresik	32.069.443	0,03	32.354.443	0,03	PT Petrokimia Gresik
PT Freeport Indonesia	31.674.056	0,03	-	-	PT Freeport Indonesia
PT Jakarta International Container Terminal	19.104.905	0,02	366.255	0,00	PT Jakarta International Container Terminal
PT Pertamina Patra Niaga	12.832.734	0,01	25.444.746	0,02	PT Pertamina Patra Niaga
PT Bahtera Adhiguna	10.658.801	0,01	10.300.147	0,01	PT Bahtera Adhiguna
PT Perikanan Nusantara (Persero)	8.147.254	0,01	8.327.660	0,01	PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	7.809.747	0,01	9.061.653	0,01	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
KOJA	7.778.172	0,01	-	-	KOJA
PT Semen Tonasa	6.665.686	0,01	4.235.056	0,00	PT Semen Tonasa
PT Berdikari (Persero)	5.827.746	0,00	10.859.875	0,01	PT Berdikari (Persero)
PT Dharma Lautan Nusantara Instansi Pemerintah	5.652.008	0,00	5.650.682	0,00	PT Dharma Lautan Nusantara Government Institution
PT Semen Padang (Persero)	861.145	0,00	-	-	PT Semen Padang (Persero)
Tentara Nasional Indonesia	5.068.433	0,00	5.100.009	0,00	Indonesian Armed Forces
PHC	4.240.565	0,00	7.165.459	0,01	PHC
PT Pertamina (Persero)	4.377.923	0,00	1.529.954	0,00	PT Pertamina (Persero)
PT Semen Baturaja Tbk	4.376.233	0,00	3.750.749	0,00	PT Semen Baturaja Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	4.365.599	0,00	-	-	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.738.940	0,00	-	-	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Bandar Nasional	2.661.926	0,00	6.093.250	0,00	PT Sarana Bandar Nasional
PT Portek Indonesia	1.856.489	0,00	-	-	PT Portek Indonesia
PT Telekomunikasi Seluler	1.802.165	0,00	2.004.544	0,00	PT Telekomunikasi Seluler
PT Bukit Asam Tbk	716.485	0,00	-	-	PT Bukit Asam Tbk
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1.255.090	0,00	5.311	0,00	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	1.219.656	0,00	9.593.112	0,01	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bukit Prima Bahari	414.388	0,00	2.306.689	0,00	PT Bukit Prima Bahari
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	160.558	0,00	1.761.863	0,00	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Pembangkitan Jawa Bali	69.591	0,00	81.055.047	0,07	PT Pembangkitan Jawa Bali
PCN	64.961	0,00	53.653	0,00	PCN
PT Terminal Nilam Utara	32.144	0,00	12.053.974	0,01	PT Terminal Nilam Utara
PT Jawa Satu Power	-	-	11.412.148	0,01	PT Jawa Satu Power
PT PP Presisi Tbk	-	-	4.203.201	0,00	PT PP Presisi Tbk
PT Pertamina Hulu Energi	-	-	1.885.037	0,00	PT Pertamina Hulu Energi
BPJS Ketenagakerjaan	-	-	1.301.141	0,00	BPJS Ketenagakerjaan
PT Kawasan Berikat Nusantara	-	-	1.180.620	0,00	PT Kawasan Berikat Nusantara
BPJS Kesehatan	-	-	1.082.366	0,00	BPJS Kesehatan
PT Daya Radar Utama	-	-	991.081	0,00	PT Daya Radar Utama
PT Pupuk Sriwidjaya Palembang	-	-	5.303	0,00	PT Pupuk Sriwidjaya Palembang
Lain-lain	20.762.669	0,02	20.361.545	0,02	Others
Subtotal	630.076.618	0,52	644.413.405	0,53	Sub-total
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(338.476.519)	(0,29)	(324.732.089)	(0,27)	Less: Allowance for impairment
Total	291.600.099	0,23	319.681.316	0,26	Total

*) dari total aset

*) from total assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

d. Piutang lain-lain (Catatan 7)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BKMS	102.572.777	0,09	196.458.486	0,17
LMAN	42.700.027	0,04	142.604.259	0,12
Perum DAMRI	12.663.900	0,01	11.989.210	0,01
PT Jakarta Lloyd (Persero)	8.617.024	0,01	10.594.266	0,01
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	8.195.542	0,01	8.826.829	0,01
Direktorat Jenderal Pajak	4.924.357	0,00	-	-
JICT	3.336.220	0,00	16.457.437	0,01
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	1.090.646	0,00	-	-
PT Terminal Nilam Utara	-	-	2.833.149	0,00
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	-	-	2.601.775	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	-	-	1.732.395	0,00
NPCT1	-	-	99.549	0,00
PT Adhi Karya (Persero)	-	-	63.593	0,00
Lain-lain	8.124.074	0,01	26.124.781	0,02
Subtotal	192.224.567	0,17	420.385.729	0,35
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(21.238.757)	(0,02)	(28.203.948)	(0,02)
Total	170.985.810	0,15	392.181.781	0,33

*) dari total aset

Piutang dari Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN") merupakan dana talangan yang telah dibayarkan oleh CTP kepada pemilik lahan dan akan diganti oleh LMAN sesuai dengan amendemen Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Cibitung-Cilincing dimana CTP menyediakan dana talangan dengan nilai maksimum sebesar Rp4.560.709.011. Piutang ini digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 25).

Piutang lain-lain BKMS merupakan pinjaman dari BJTI ke BKMS sehubungan dengan pengembangan lahan BKMS.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

d. Other receivables (Note 7)

BKMS	196.458.486	0,17
LMAN	142.604.259	0,12
Perum DAMRI	11.989.210	0,01
PT Jakarta Lloyd (Persero)	10.594.266	0,01
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	8.826.829	0,01
Directorate General of Taxes	-	-
JICT	16.457.437	0,01
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	-	-
PT Terminal Nilam Utara	2.833.149	0,00
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.601.775	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	1.732.395	0,00
NPCT1	99.549	0,00
PT Adhi Karya (Persero)	63.593	0,00
Others	26.124.781	0,02
Sub-total	420.385.729	0,35
Less: Allowance for impairment	(28.203.948)	(0,02)
Total	392.181.781	0,33

*) from total assets

Receivables from the State Assets Management Body ("LMAN") represent bailout funds that have been paid by CTP to land owners and will be reimbursed to LMAN in accordance with the Toll Operation Cibitung-Cilincing Toll Road Agreement amendments where CTP provides funding with a maximum of Rp4,560,709,011. These receivables used as collateral for bank loan (Note 25).

Other receivables of BKMS are loan from BJTI to BKMS in relation to BKMS's land development.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

e. Pendapatan masih akan diterima (Catatan 9)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Indonesia Power	40.677.156	0,03
PT Pertamina Patra Niaga	27.834.079	0,02
PT Jawa Satu Power	9.882.774	0,01
PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas	8.937.774	0,01
PT Adhi Guna Putera	7.422.853	0,01
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	5.115.200	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.652.963	0,00
PT Pertamina Trans Kontinental	4.580.771	0,00
PT Semen Padang (Persero)	3.123.712	0,00
BPJS Kesehatan	2.376.347	0,00
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.825.458	0,00
BNCT	1.476.861	0,00
Indonesia National Single Window JICT	1.132.225	0,00
Lainnya	33.453.957	0,03
Total	152.492.130	0,11

*) dari total aset

f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	-

**) dari total liabilitas

Kredit Non-Sindikasi

Berdasarkan Akta Notaris Perjanjian Kredit Non-Sindikasi No. 83 tanggal 22 Maret 2019 oleh Ariani L. Rachim, S.H., notaris di Jakarta, CTP telah menandatangani Perjanjian Kredit Non-Sindikasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. CTP memperoleh fasilitas kredit maksimum sebesar Rp1.920.000.000 yang terbagi menjadi 2 (dua) tranche.

Pada tanggal 23 Oktober 2023, CTP telah melunasi seluruh nilai pinjaman dan selanjutnya fasilitas ini telah berakhir.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

e. Accrued revenues (Note 9)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Indonesia Power	23.021.589	0,02
PT Pertamina Patra Niaga	13.558.963	0,01
PT Jawa Satu Power	-	-
PT Pengembang Listrik Nasional Energi Gas	-	-
PT Adhi Guna Putera	-	-
PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore	861.800	0,00
PT Pertamina (Persero)	44.085.855	0,04
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-
PT Semen Padang (Persero)	-	-
BPJS Kesehatan	-	-
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	-
BNCT	-	-
Indonesia National Single Window JICT	345.929	0,00
Others	25.685.821	0,02
Total	107.559.957	0,09

*) from total assets

f. Short-term bank loans (Note 18)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	103.106.529	0,14

**) from total liabilities

Non-Syndicated Loan

Based on the Non-Syndicated Credit Agreement Notarial Deed No. 83 dated March 22, 2019 by Ariani L. Rachim, S.H., a notary in Jakarta, CTP entered into a Non-Syndicated Loan with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk with a maximum credit facility of Rp1,920,000,000, divided in 2 (two) tranches.

On October 23, 2023, CTP has fully paid the loan and subsequently, this loan facility has ended.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18) (lanjutan)

Kredit Non-Sindikasi (lanjutan)

Fasilitas kredit maksimum pada *tranche* I dan *tranche* II masing-masing adalah sebesar Rp890.000.000 dan Rp1.030.000.000. Fasilitas kredit tersebut ditujukan untuk pembiayaan dana talangan tanah pembebasan lahan tol ruas Cibitung-Cilincing.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 (2 tahun setelah tanggal perjanjian). Denda 2% akan dihitung untuk semua saldo yang belum dibayar baik untuk pokok dan bunga.

Selain itu, CTP juga diwajibkan untuk mematuhi *negative covenant* antara lain:

- Mengubah bentuk, status badan hukum, dan lingkup kegiatan usaha debitur, dan investasi serta penyertaan bidang lain;
- Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dan *go public*;
- Mengubah susunan pemegang saham
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang;
- Melunasi dan atau membayar hutang kepada pemegang saham;
- Melakukan pembagian dividen;
- Mengalihkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit; dan
- Mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Pada tanggal 5 Agustus 2022, para pihak sepakat untuk mengubah jumlah maksimum fasilitas kredit menjadi Rp1.494.685.000 dengan rincian sebagai berikut:

- Tranche* I: Rp890.000.000
- Tranche* II: Rp604.685.000

Para pihak juga sepakat untuk mengubah jangka waktu perjanjian menjadi 23 April 2023 dan suku bunga menjadi 7,25% per tahun.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

- f. Short-term bank loans (Note 18) (continued)

Non-Syndicated Loan (continued)

Maximum credit facilities for *tranche* I and II amounted to Rp890,000,000, and Rp1,030,000,000. The credit facility is intended to finance land bailout funds for land acquisition for the Cibitung-Cilincing toll road section.

This loan is subject to fixed interest rate of 8.50% per annum which shall mature in 2021 (2 years after the agreement date). A 2% penalty shall be calculated for all unpaid balances for both principal and interest.

In addition, CTP is required to adhere to the following negative covenants, among others:

- Change the form, status of legal entity, and scope of business activities, and investment and participation in other fields;
- Conduct mergers, acquisitions, sale of Company assets and go public;
- Change the composition of shareholders;
- Be bound as guarantor of debt;
- Pay off and or pay debts to shareholders;
- Declare dividends;
- Transfer to another party, in part or in whole of the rights and obligations arising in connection with the credit facility; and
- Declare bankruptcy.

On August 5, 2022, both parties agreed to amend the maximum credit facility to become Rp1,494,685,000 with each *tranche* as follows:

- Tranche* I: Rp890,000,000
- Tranche* II: Rp604,685,000

Both parties also agreed to change the maturity of the agreement to be on April 23, 2023 and the fixed interest rate to become 7.25% per annum.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**f. Pinjaman bank jangka pendek (Catatan 18)
(lanjutan)**

Beban bunga yang diakui untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar RpNihil dan Rp16.516.834, yang dikapitalisasi ke aset dalam hak pengusahaan jalan tol (Catatan 15).

g. Utang usaha (Catatan 19)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	529.297.017	0,74	864.094.284	1,14
PT Waskita Beton Precast Tbk	19.090.673	0,03	39.704.746	0,05
Konsorsium PP - Waskita	15.465.927	0,02	-	0,00
DP3 Dana Pensiun	12.498.442	0,02	1.408.640	0,00
Koperasi Pegawai Pelindo III	10.541.980	0,01	6.388.546	0,01
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6.508.760	0,01	10.800.841	0,01
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	5.335.337	0,01	22.995.319	0,03
DP4	2.117.598	0,00	2.117.598	0,00
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	1.790.529	0,00	2.047.567	0,00
PT BNI Life Insurance	1.200.353	0,00	1.156.648	0,00
RSP	674.428	0,00	21.947.420	0,03
PT Pertamina Patra Niaga	601.950	0,00	3.778.502	0,00
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	136.699	0,00	-	0,00
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	-	-	51.388.396	0,07
Koperasi Pegawai Maritim	-	-	4.778.047	0,01
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	3.931.110	0,01
Instansi Pemerintah	-	-	2.597.226	0,00
BKMS	-	-	2.294.563	0,00
JICT	-	-	2.135.352	0,00
PT Yodya Karya	-	-	1.677.099	0,00
BPJS Ketenagakerjaan	-	-	1.567.265	0,00
PT Pertamina (Persero)	-	-	1.012.396	0,00
Lain-lain	31.488.134	0,04	44.190.643	0,07
Total	636.747.827	0,88	1.092.012.208	1,43

***) dari total liabilitas

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

f. Short-term bank loans (Note 18) (continued)

Interest expenses recognized for the year ended December 31, 2023 and 2022 amounted to RpNil and Rp16,516,834, respectively, which were all capitalized to toll road access rights during the period (Note 15).

g. Trade payable (Note 19)

PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk
Konsorsium PP - Waskita
DP3 Dana Pensiun
Koperasi Pegawai Pelindo III
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance
DP4
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT BNI Life Insurance
RSP
PT Pertamina Patra Niaga
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Koperasi Pegawai Maritim
PT Pertamina Trans Kontinental
Government Institution
BKMS
JICT
PT Yodya Karya
BPJS Ketenagakerjaan
PT Pertamina (Persero)
Others
Total

***) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

h. Uang untuk diperhitungkan (Catatan 20)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Asuransi Jasa Indonesia	10.803.176	0,02	-	-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2.691.009	0,00	-	-
PT Krakatau Bandar Samudera	1.035.057	0,00	-	-
PT Pertamina Trans Kontinental	915.772	0,00	3.183.827	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	367.841	0,00	48.593	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	302.213	0,00	405.336	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	293.622	0,00	575.387	0,00
PT Pertamina (Persero)	232.353	0,00	101.018	0,00
PHC	63.661	0,00	63.661	0,00
PT Pertamina Patra Niaga (Persero) Tbk	12.962	0,00	8.867	0,00
PT Perusahaan Listrik Negara	9.785	0,00	-	-
Tentara Nasional Indonesia	4.183	0,00	3.213	0,00
Instansi Pemerintah	2.704	0,00	28.333	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	6.073	0,00	-	-
PT Semen Padang	-	0,00	35.619	0,00
Lain-lain	8.535.195	0,02	3.832.505	0,01
Total	25.275.606	0,04	8.286.359	0,01

**) dari total liabilitas

i. Uang titipan pelanggan (Catatan 22)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Ketenagakerjaan	9.127.469	0,01	10.928.576	0,01
PT BNI Life Insurance	8.935.603	0,01	6.476.284	0,01
PT Taspen (Persero)	7.598.818	0,01	323.100	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.881.770	0,01	4.925.638	0,01
Jiwasraya	3.245.154	0,01	-	-
BPJS Kesehatan	1.611.227	0,00	6.349.579	0,01
PHC	1.025.824	0,00	-	-
DP3	739.884	0,00	-	-
PT Semen Tonasa	449.211	0,00	-	-
DP4	392.591	0,00	2.157.999	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	329.348	0,00	2.330.595	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	194.640	0,00	597.895	0,00
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	147.735	0,00	5.394.034	0,01
TNI dan Polri	69.464	0,00	989.182	0,00
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	6.843.520	0,01
Lain-lain	20.172.905	0,03	27.892.875	0,04
Total	58.921.643	0,08	75.209.277	0,10

**) dari total liabilitas

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

h. Advances from customer (Note 20)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Asuransi Jasa Indonesia	10.803.176	0,02	-	-
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	2.691.009	0,00	-	-
PT Krakatau Bandar Samudera	1.035.057	0,00	-	-
PT Pertamina Trans Kontinental	915.772	0,00	3.183.827	0,00
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	367.841	0,00	48.593	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	302.213	0,00	405.336	0,00
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero)	293.622	0,00	575.387	0,00
PT Pertamina (Persero)	232.353	0,00	101.018	0,00
PHC	63.661	0,00	63.661	0,00
PT Pertamina Patra Niaga (Persero) Tbk	12.962	0,00	8.867	0,00
PT Perusahaan Listrik Negara	9.785	0,00	-	-
Tentara Nasional Indonesia	4.183	0,00	3.213	0,00
Instansi Pemerintah	2.704	0,00	28.333	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	6.073	0,00	-	-
PT Semen Padang	-	0,00	35.619	0,00
Lain-lain	8.535.195	0,02	3.832.505	0,01
Total	25.275.606	0,04	8.286.359	0,01

**) from total liabilities

i. Deposits from customer (Note 22)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
BPJS Ketenagakerjaan	9.127.469	0,01	10.928.576	0,01
PT BNI Life Insurance	8.935.603	0,01	6.476.284	0,01
PT Taspen (Persero)	7.598.818	0,01	323.100	0,00
PT Pertamina (Persero)	4.881.770	0,01	4.925.638	0,01
Jiwasraya	3.245.154	0,01	-	-
BPJS Kesehatan	1.611.227	0,00	6.349.579	0,01
PHC	1.025.824	0,00	-	-
DP3	739.884	0,00	-	-
PT Semen Tonasa	449.211	0,00	-	-
DP4	392.591	0,00	2.157.999	0,00
PT Hutama Karya (Persero)	329.348	0,00	2.330.595	0,00
PT Asuransi Kredit Indonesia	194.640	0,00	597.895	0,00
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	147.735	0,00	5.394.034	0,01
TNI dan Polri	69.464	0,00	989.182	0,00
PT Pertamina Trans Kontinental	-	-	6.843.520	0,01
Lain-lain	20.172.905	0,03	27.892.875	0,04
Total	58.921.643	0,08	75.209.277	0,10

**) from total liabilities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

j. Liabilitas jangka pendek lainnya (Catatan 22)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Lain-Lain		
BLU Set-BPJT	464.538.398	0,65
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	33.292.279	0,05
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,04
PHC	26.043.474	0,04
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	12.023.798	0,02
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	9.237.116	0,01
PT BNI Danareksa Sekuritas	4.376.000	0,01
DP3	3.272.923	0,00
Industri Sandang Nusantara Persero	2.375.255	0,00
Lain-lain	13.262.227	0,02
Total	600.087.588	0,84

**) dari total liabilitas

Utang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing.

Liabilitas jangka pendek lainnya - lain-lain kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan akrual retensi atas pekerjaan pembangunan dermaga PTFI dan fasilitas pendukungnya di Terminal Manyar Pelabuhan Gresik PT Berlian Manyar Sejahtera.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) merupakan kekurangan pembayaran kompensasi atas pemindahan dan pengosongan Galangan III DKB ke Pulau Batam berdasarkan Surat Perjanjian No.HK.566/27/11/PI.II-11 dan No. 024/Kontr/I/DKB/2011 tanggal 15 Agustus 2011.

Liabilitas jangka pendek lainnya kepada PT Pelindo Husada Cipta ("PT PHC") merupakan pembayaran manajemen fee pelayanan kesehatan kepada PT PHC atas pelayanan kesehatan pegawai.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

j. Other current liabilities (Notes 22)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
Lain-Lain		
BLU Set-BPJT	2.000.000	0,00
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	31.666.118	0,04
PHC	24.857.416	0,03
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	12.023.798	0,02
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	9.237.116	0,01
PT BNI Danareksa Sekuritas	4.376.000	0,00
DP3	13.807.186	0,02
Industri Sandang Nusantara Persero	2.375.255	0,00
Lain-lain	9.755.132	0,02
Total	110.098.021	0,14

Others
BLU Set-BPJT
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Dok & Perkapalan
Kodja Bahari (Persero)
PHC
PT Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT BNI Danareksa Sekuritas
DP3
Industri Sandang
Nusantara Persero
Others

**) from total liabilities

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project.

Other current liabilities - others to PT Adhi Karya (Persero) Tbk represents the retention accrual for development projects of Jetty PTFI and its supporting facilities at Manyar Terminal Gresik Port PT Berlian Manyar Sejahtera.

Other current liabilities to PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) represents a shortage of payment of compensation to DKB for the removal and emptying of Galangan III in Batam Island based on Letter Agreement No. HK.566/27/11/PI.II-11 and No. 024/Kontr/I/DKB/2011 dated August 15, 2011.

Other current liabilities to PT Pelindo Husada Cipta ("PT PHC") represents payment of health service management fees to PT PHC for employee health services.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**44. SALDO, SIFAT HUBUNGAN DAN JENIS
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut: (lanjutan)

k. Utang Lembaga Keuangan Non-Bank (Catatan 26)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.372.013.613	1,92
**) dari total liabilitas		

l. Liabilitas jangka panjang lainnya (Catatan 28)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT PLN	3.458.284	0,00
BLU Set-BPJT	-	-
Lain-lain	1.463.487	0,00
Total	4.921.771	0,00
**) dari total liabilitas		

Utang kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") merupakan pinjaman biaya pergantian atas pembelian tanah untuk proyek jalan tol Cibitung-Cilincing.

m. Remunerasi personil manajemen kunci

Total gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya yang dibayar atau diakru untuk Dewan Komisaris dan Direksi Grup adalah sebesar Rp726.121.037 dan Rp632.651.119 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**44. BALANCE, NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTION WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Transactions with related parties (continued)

Details of significant accounts with related parties (government, government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows: (continued)

k. Loan from non-bank financial institution (Note 26)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.160.435.133	1,54
**) from total liabilities		

l. Other long-term liabilities (Notes 28)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	Total/ Total	Persentase (%)*/ Percentage (%)*
PT PLN	4.626.619	0,01
BLU Set-BPJT	464.538.398	0,61
Lain-lain	182.496	0,00
Total	469.347.513	0,62
**) from total liabilities		

Payable to the Ministry of Public Works and Public Housing - Badan Layanan Umum Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") represents a loan for replacement costs for the purchase of land for the Cibitung-Cilincing toll road project.

m. Key management personnel remuneration

Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp726,121,037 and Rp632,651,119, for the year ended December 31, 2023 and 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

45. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

45. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

31 Desember 2023/December 31, 2023

		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ <i>In foreign currencies (full amount)</i>	Setara dalam Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	109.374.062	1.686.110.534	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	71.003.011	1.094.582.414	Short-term investments
Piutang usaha	USD	2.012.117	31.018.794	Trade receivables
Piutang usaha	SGD	796	9.317	Trade receivables
Piutang lain-lain	USD	547.107	8.434.201	Other receivables
Total aset			2.820.155.260	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	260.163	4.010.679	Trade payables
Utang obligasi	USD	1.993.216.000	30.727.417.856	Bonds payables
Utang bank jangka panjang	USD	500.000.000	7.708.000.000	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	249.536.973	Other long-term liabilities
Total liabilitas			38.688.965.508	Total liabilities
Liabilitas neto			35.868.810.248	Net liabilities

31 Desember 2022/December 31, 2022

		Dalam mata uang asing (nilai penuh)/ <i>In foreign currencies (full amount)</i>	Setara dalam Rupiah/ <i>Equivalent in Rupiah</i>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas	USD	105.906.720	1.666.018.608	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	USD	143.382.500	2.255.550.108	Short-term investments
Piutang usaha	USD	5.393.647	84.847.459	Trade receivables
Piutang lain-lain	USD	547.107	8.606.540	Other receivables
Total aset			4.015.022.715	Total assets
Liabilitas				Liabilities
Utang usaha	USD	1.557.073	24.494.318	Trade payables
Utang obligasi	USD	2.519.084.000	39.419.805.966	Bonds payables
Liabilitas jangka panjang lainnya	USD	16.186.882	254.635.841	Other long-term liabilities
Total liabilitas			39.698.936.125	Total liabilities
Liabilitas neto			35.683.913.410	Net liabilities

Untuk memitigasi risiko akibat selisih aset dan liabilitas valuta asing tersebut, Grup telah melakukan transaksi lindung nilai (Catatan 24)

To mitigate the risk arising from the gap between assets and liabilities in foreign currencies, the Group has entered into hedging transactions (Note 24).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat, yang juga merefleksikan nilai wajarnya, dari instrumen keuangan Grup:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Aset Keuangan		
Kas dan setara kas	12.491.274.250	13.597.640.823
Investasi jangka pendek	3.769.584.376	3.943.051.999
Piutang usaha - neto	1.348.162.934	1.450.107.201
Piutang lain-lain - neto	215.598.895	446.826.791
Pendapatan masih akan diterima	724.762.064	651.230.205
Aset lancar lainnya	100.458.674	56.662.961
Investasi jangka panjang - investasi pada penyertaan saham	34.840.893	35.239.244
Investasi jangka panjang - investasi pada surat utang	692.386.251	600.010.734
Aset tidak lancar lainnya	986.703.079	1.189.307.537
Total	20.363.771.416	21.970.077.495
Liabilitas Keuangan		
Pinjaman bank jangka pendek	3.330.172	105.361.831
Utang usaha	1.257.638.419	2.068.575.843
Beban akrual	5.419.485.908	5.273.585.288
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.124.359.752	1.041.133.091
Utang bank jangka panjang	14.346.782.184	7.831.272.217
Utang obligasi	33.124.052.497	42.754.634.125
Utang lembaga keuangan non-bank	2.069.876.474	1.744.763.266
Liabilitas jangka panjang lainnya	838.428.454	1.126.588.038
Liabilitas sewa	487.723.464	435.135.812
Total	58.671.677.324	62.381.049.511

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table sets out the carrying values, which also reflects the estimated fair values, of the Group's financial instruments:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
Financial Assets		
Cash and cash equivalents	12.491.274.250	13.597.640.823
Short-term investments	3.769.584.376	3.943.051.999
Trade receivables - net	1.348.162.934	1.450.107.201
Other receivables - net	215.598.895	446.826.791
Accrued revenues	724.762.064	651.230.205
Other current assets	100.458.674	56.662.961
Long-term investment - investment in share of stocks	34.840.893	35.239.244
Long-term investment - investment in bonds	692.386.251	600.010.734
Other non-current assets	986.703.079	1.189.307.537
Total	20.363.771.416	21.970.077.495
Financial Liabilities		
Short-term bank loans	3.330.172	105.361.831
Trade payables	1.257.638.419	2.068.575.843
Accrued expenses	5.419.485.908	5.273.585.288
Other current liabilities	1.124.359.752	1.041.133.091
Long-term bank loan	14.346.782.184	7.831.272.217
Bonds payable	33.124.052.497	42.754.634.125
Loan from non-bank financial institution	2.069.876.474	1.744.763.266
Other non-current liabilities	838.428.454	1.126.588.038
Lease liabilities	487.723.464	435.135.812
Total	58.671.677.324	62.381.049.511

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:

- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, investasi jangka pendek - deposito berjangka, investasi jangka pendek - aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, piutang usaha, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima, aset lancar lainnya, pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- Investasi jangka pendek - efek yang diperdagangkan dan investasi jangka panjang - penyertaan saham dinyatakan pada nilai wajarnya dengan menggunakan kuotasi harga pasar. Investasi jangka panjang - surat utang dinyatakan pada nilai wajar dengan referensi harga dari surat berharga yang sejenis pada tanggal pelaporan.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- Estimasi nilai wajar utang obligasi, liabilitas sewa, utang bank dan liabilitas jangka panjang lainnya ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk instrumen dengan syarat, risiko kredit dan jatuh tempo yang serupa.

**46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:

- The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, short-term investments - time deposits, short-term investments - financial assets measured at fair value through profit or losses, trade receivables, other receivables, accrued revenues, other current assets, short-term bank loans, trade payables, accrued expenses and other current liabilities, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discounting.
- Short-term investments - marketable securities and long-term investments - investment in share of stocks are presented at fair value using market price quotation. Long-term investments - bonds are presented at fair value by reference to similar bond price at reporting date.
- The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.
- The estimated fair values of bonds payable, lease liability, bank loans and other long-term liabilities are determined by discounting the future cash flows using market interest rates for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**46. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, hirarki nilai wajar Grup untuk aset yang nilai wajarnya diungkapkan adalah sebagai berikut:

**46. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(continued)**

As of December 31, 2023 and 2022, fair value hierarchy of the Group for assets which fair value were disclosed are as follows:

31 Desember 2023/December 31, 2023				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 12)	37.960.742.762	-	37.960.742.762	-
				Investment properties (Note 12)
31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Total/ Total	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan				Assets for which fair value are disclosed
Aset tidak lancar				Non-current Assets
Properti investasi (Catatan 12)	36.963.174.503	-	36.963.174.503	-
				Investment properties (Note 12)

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar Tingkat 1 dan Tingkat 2 dan tidak ada pengalihan dari Tingkat 3 pengukuran nilai wajar.

As of December 31, 2023, there is no transfer between measurement of fair value of Level 1 and Level 2 and no transfer from Level 3 fair value measurements.

Tidak terdapat aset dan liabilitas lain yang diukur dan diungkapkan berdasarkan nilai wajar selain yang telah dijelaskan di atas.

No other assets and liabilities have been measured and disclosed based on fair value other than above explained.

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN**

Grup terpengaruh terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga atas arus kas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Grup menerapkan manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Pengelolaan risiko tersebut memberikan keyakinan kepada Grup bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan *risk appetite*.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES**

The Group is exposed to foreign exchange risk, interest rate risk of cashflow, credit risk and liquidity risk. The Group applies risk management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to the Group that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk appetite.

Grup menerapkan kebijakan pengelolaan risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.

The Group applies policies for managing each of these risks which is summarized below.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko perubahan nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan yang berfluktuasi sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing yang digunakan oleh Grup. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang obligasi dalam mata uang USD.

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing yang ada pada saat ini diungkapkan pada Catatan 45. Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 1% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:

	(Kenaikan) penurunan nilai tukar mata uang/ (Increases) decreases on foreign exchange rates
Perubahan kurs mata uang asing 2023	(+)-100bps (-)-100bps
Perubahan kurs mata uang asing 2022	(+)-100bps (-)-100bps

Dalam mengelola risiko nilai tukar mata uang asingnya, Grup menggunakan utang obligasi dan pinjaman sindikasi sebagai lindung nilai dari eksposur risiko mata uang asing dalam pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang.

Risiko suku bunga atas arus kas

Risiko suku bunga atas arus kas merupakan suatu risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Pinjaman dengan suku bunga mengambang menimbulkan risiko arus kas.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal untuk lindung nilai atas risiko suku bunga. Kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam mengantisipasi risiko suku bunga yaitu dengan mengevaluasi secara periodik perbandingan suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar. Manajemen juga melakukan survei di perbankan untuk mendapatkan perkiraan mengenai suku bunga yang relevan.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Foreign currency risk

Foreign currency risk is a risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate as a result of changes in foreign currency exchange rates used by the Group. Exposure of the Group against exchange rate fluctuations is mainly derived from debt arising from bonds payable denominated in USD.

The current exposure to the foreign currency risk is disclosed in Note 45. Sensitivity analysis of a 1% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:

Dampak/ Effect	
	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2023</i>
(358.688.102)	
358.688.102	
	<i>Fluctuation in the foreign exchange rates 2022</i>
(356.925.200)	
356.925.200	

In managing its foreign currency risk, the Group uses bond payables and syndicated loan to hedge its exposure to foreign currency risk for revenues to be received in the future.

Cash flows interest rate risk

Cash flows interest rate risk is a risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Loans at variable rates are exposed to cash flows risk.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures. Measures taken by management in anticipation of interest rate risk is to evaluate by periodically comparing fixed rates to floating interest rates in line with relevant changes in interest rates in the market. Management also conducts a survey on banks to obtain an estimate of the relevant interest rates.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko suku bunga atas arus kas (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat berdasarkan jatuh tempo dari aset dan liabilitas Grup yang terekspos terhadap risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2023.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
Aset					
Kas dan setara kas	4.119.189.850	-	8.372.084.400	-	12.491.274.250
Investasi jangka pendek	-	-	3.769.584.376	-	3.769.584.376
Total aset	4.119.189.850	-	12.141.668.776	-	16.260.858.626
Liabilitas					
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	-	1.099.718.293	-	1.099.718.293
Utang bank jangka panjang	462.137.207	13.934.725.446	-	-	14.396.862.653
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	21.145.867	-	-	21.145.867
Liabilitas sewa	-	-	67.904.105	419.819.358	487.723.464
Utang Obligasi	-	-	7.582.498.344	25.969.559.708	33.552.058.052
Total liabilitas	462.137.207	13.955.871.313	8.750.120.742	26.389.379.066	49.557.508.329

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Grup mengendalikan risiko kredit dengan cara melakukan hubungan usaha dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas, memberikan batasan atau plafon kepada pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan kredit dengan Grup dan melakukan pemantauan atas posisi piutang pelanggan secara teratur.

Grup memiliki risiko kredit yang terutama berasal dari simpanan di bank, investasi jangka pendek, piutang usaha dan piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan aset lain-lain.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Cash flows interest rate risk (continued)

The following table presents the carrying amount by maturity of the Group's assets and liabilities exposed to interest rate risk as of December 31, 2023.

	Suku bunga mengambang/ <i>Floating interest rate</i>		Suku bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>		Total
	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	≤ 1 tahun/ ≤ 1 year	> 1 tahun/ > 1 year	
Assets					
Cash and cash equivalent	4.119.189.850	-	8.372.084.400	-	12.491.274.250
Short-term investments	-	-	3.769.584.376	-	3.769.584.376
Total assets	4.119.189.850	-	12.141.668.776	-	16.260.858.626
Liabilities					
Other current liabilities	-	-	1.099.718.293	-	1.099.718.293
Long-term bank loan	462.137.207	13.934.725.446	-	-	14.396.862.653
Other long-term liabilities	-	21.145.867	-	-	21.145.867
Lease liabilities	-	-	67.904.105	419.819.358	487.723.464
Bonds Payable	-	-	7.582.498.344	25.969.559.708	33.552.058.052
Total liabilities	462.137.207	13.955.871.313	8.750.120.742	26.389.379.066	49.557.508.329

Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.

The Group manages and controls the credit risk by dealing only with recognized and credit worthy parties, providing limits or ceiling to a third party who will engage in credit trade with the Group and monitoring the outstanding trade receivables on a regular basis.

The Group is exposed to credit risk primarily from deposits with banks, short-term investments, trade and other receivables, accrued revenues and other assets.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Aset Keuangan		
Bank dan setara kas	12.485.323.463	13.558.253.576
Investasi jangka pendek	3.769.584.376	3.943.051.999
Piutang usaha	1.348.162.934	1.450.107.201
Piutang lain-lain	215.598.895	446.826.791
Pendapatan masih akan diterima	724.762.064	651.230.205
Aset lancar lainnya	100.458.674	56.662.961
Aset tidak lancar lainnya	708.284.522	1.221.507.535
Total	<u>19.352.174.928</u>	<u>21.327.640.268</u>

Salah satu risiko kredit utama yang dihadapi oleh Grup adalah kredit yang diberikan kepada pelanggan. Untuk meringankan risiko kredit ini, Grup memiliki kebijakan dimana Grup melakukan verifikasi kredit untuk memastikan bahwa pelanggan yang diberikan kredit oleh Grup memiliki sejarah kredit yang baik dan dapat dipercaya. Selain itu, saldo piutang Grup dipantau secara berkala untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tak tertagih.

Tabel berikut ini menyajikan analisis umur piutang usaha:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Belum jatuh tempo	462.294.078	263.711.508
Lewat jatuh tempo		
1-90 hari	707.857.139	949.936.337
91-180 hari	130.920.890	217.120.498
Lebih dari 180 hari	1.192.880.822	1.155.304.793
Subtotal	2.493.952.929	2.586.073.136
Dikurangi:		
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)
Neto	<u>1.348.162.934</u>	<u>1.450.107.201</u>

Risiko piutang usaha yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai untuk mengalami penurunan nilai adalah kecil karena pelanggan yang diberi kredit memiliki sejarah dan jejak kredit yang baik dengan Grup. Penyisihan khusus mungkin dibuat jika piutang dianggap tak tertagih menurut penilaian Grup.

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Credit Risk (continued)

Credit risk exposure relating to assets in the consolidated statements of financial position is as follow:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
			Financial Assets
			Cash in banks and cash equivalents
			Short-term investments
			Trade receivables
			Other receivables
			Accrued revenues
			Other current assets
			Other non-current assets
Total	<u>19.352.174.928</u>	<u>21.327.640.268</u>	Total

One of the main credit risk faced by the Group is credit granted to customers. To mitigate this credit risk, the Group has a policy in which the Group performs credit verification to ensure that customers who are granted credit by the Group have a good credit history and are trustworthy. In addition, the Group's receivables balances are monitored regularly to reduce the possibility of uncollectible receivables.

The following table presents the aging analysis of trade receivables:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>	
Belum jatuh tempo	462.294.078	263.711.508	Not yet overdue
Lewat jatuh tempo			Overdue
1-90 hari	707.857.139	949.936.337	1-90 days
91-180 hari	130.920.890	217.120.498	91-180 days
Lebih dari 180 hari	1.192.880.822	1.155.304.793	More than 180 days
Subtotal	2.493.952.929	2.586.073.136	Sub-total
Dikurangi:			Less:
Penyisihan penurunan nilai	(1.145.789.995)	(1.135.965.935)	Allowance for impairment
Neto	<u>1.348.162.934</u>	<u>1.450.107.201</u>	Net

The risk of trade receivables that are neither past due nor impaired to be impaired is small because customers who are granted credit have a good credit history and track record with the Group. Specific allowance may be made if receivables are deemed uncollectible in the Group's judgement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang dapat terjadi dimana pendapatan jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek.

Mengingat bahwa kebutuhan dana Grup saat ini cukup signifikan sebagai akibat dari meningkatnya aktivitas pengembangan atau perluasan bisnis, maka dalam mengelola risiko likuiditas, Grup terus menerus memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas agar memadai untuk membiayai kebutuhan operasional Grup.

Selain itu, Grup juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas, termasuk jadwal jatuh tempo liabilitas jangka panjang dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk inisiatif penempatan dan penggalangan dana yang meliputi pinjaman bank, penerbitan ekuitas pasar modal dan ekuitas utang.

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

2023						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	3.330.172	-	-	-	3.330.172	Short-term bank loan
Utang usaha	1.257.638.419	-	-	-	1.257.638.419	Trade payables
Beban akrual	5.419.485.907	-	-	-	5.419.485.907	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.124.359.752	-	-	-	1.124.359.752	Other short-term liabilities
Utang obligasi	7.574.312.147	17.650.761.389	49.941.944	7.849.037.017	33.124.052.497	Bonds payable
Utang bank jangka panjang	1.084.191.562	1.504.135.476	3.733.687.086	9.839.629.436	16.161.643.560	Long-term bank loan
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	1.935.621	659.014	251.242.132	253.836.767	Other Long-term liabilities
Liabilitas sewa	198.521.076	223.698.044	184.163.981	5.584.468.622	6.190.851.723	Lease liabilities
Total	16.661.839.035	19.380.530.530	3.968.452.025	23.524.377.207	63.535.198.797	Total
2022						
	< 1 tahun/ < 1 year	1 - 2 tahun/ 1 - 2 years	2 - 3 tahun/ 2 - 3 years	> 3 tahun/ > 3 years	Jumlah/ Total	
Pinjaman bank jangka pendek	105.361.831	-	-	-	105.361.831	Short-term bank loan
Utang usaha	2.068.575.843	-	-	-	2.068.575.843	Trade payables
Beban akrual	5.273.585.288	-	-	-	5.273.585.288	Accrued expenses
Liabilitas jangka pendek lainnya	1.041.133.091	-	-	-	1.041.133.091	Other short-term liabilities
Utang obligasi	8.637.804.928	-	24.314.765.215	9.802.063.981	42.754.634.124	Bonds payable
Liabilitas jangka panjang lainnya	-	-	-	1.126.588.038	1.126.588.038	Other Long-term liabilities
Liabilitas sewa	49.907.726	-	-	385.228.086	435.135.812	Lease liabilities
Total	17.176.368.707	-	24.314.765.215	11.313.880.105	52.805.014.027	Total

**47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)**

Liquidity Risk

Liquidity risk is a risk that occurs when short-term revenue cannot cover short-term expenditure.

Given that funding requirements of the Group are currently significant as a result of increased activity in development or expansion of business, in managing liquidity risk, the Group continues to monitor and maintain levels of adequacy of cash and cash equivalents to finance the operational needs of the Group.

In addition, the Group also regularly evaluates cash flow projections and actual cash to cope with the impact of fluctuations in cash flow, including the maturity schedule of long-term liabilities and continue to examine the condition of financial markets for placement and fund-raising initiatives, including bank loans, issuance of equity and debt securities.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual payments.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI

a) Pembangunan dan Pengoperasian

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi.

48. CONCESSION AGREEMENTS

a) Construction and Operation

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement.

Area Konsesi/ Concession Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Tarif Konsesi/ Concession Rate
Kalibaru	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ <i>The Company and Tanjung Priok Port Authority</i>	31 Agustus/ August 2012	70 tahun/years	0,5% dari pendapatan kotor/ <i>0.5% of gross revenue</i>
Kijing	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Pontianak/ <i>The Company and Pontianak Port Authority</i>	12 Juli/ <i>July</i> 2018	69 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Kuala Tanjung	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kuala Tanjung/ <i>The Company and Kuala Tanjung Port Authority</i>	23 Januari/ <i>January</i> 2015	69 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Belawan Fase 2	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ <i>The Company and Belawan Port Authority</i>	4 April/ <i>April</i> 2014	70 tahun/years	0,5% dari pendapatan kotor/ <i>0.5% of gross revenue</i>
Tanjung Perak (Alur Pelayaran Barat Surabaya)	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ <i>The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia</i>	8 Mei/ <i>May</i> 2014	25 tahun/years	3,5% dari pendapatan kotor/ <i>3.5% of gross revenue</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

a) Pembangunan dan Pengoperasian (lanjutan)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan dimana Perusahaan diberi hak untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan dalam area konsesi. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat perjanjian konsesi berakhir, Perusahaan diwajibkan untuk menyerahkan aset yang berada di atas area konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian konsesi. (lanjutan)

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

a) Construction and Operation (continued)

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to construction and operation of port where the Company is granted the rights to construct and operate port within concession area. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of the concession agreement, the Company is obliged to transfer the assets on concession area to the Port Authority in accordance with the terms stipulated in concession agreement. (continued)

Area Konsesi/ Concession Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Tarif Konsesi/ Concession Rate
Teluk Lamong	Perusahaan dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia/ <i>The Company and Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia</i>	19 Mei/May 2015	72 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ 2.5% of gross revenue
Makassar New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ <i>The Company and Makassar Port Authority</i>	19 Mei/May 2015	70 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ 2.5% of gross revenue
Jalan Tol Cibitung-Cilincing	CTP dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/ <i>CTP and Ministry of Public Works and Human Settlements</i>	29 Januari/ January 2007	50 tahun/years	-
Kendari New Port	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Kendari/ <i>The Company and Kendari Port Authority</i>	25 November/ November 2022	67 tahun/years dan/and 11 bulan/months	2,5% dari pendapatan kotor/ 2.5% of gross revenue

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

b) Pelabuhan yang Diusahakan Perusahaan

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian konsesi dengan Otoritas Pelabuhan sehubungan dengan kegiatan perusahaan di pelabuhan yang diusahakan oleh Perusahaan yang mencakup pemberian hak dari Otoritas Pelabuhan kepada Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan di area konsesi yang diusahakan oleh Perusahaan sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perusahaan diwajibkan untuk membayar biaya konsesi kepada Otoritas Pelabuhan sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam setiap perjanjian konsesi dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada saat berakhirnya perjanjian konsesi ini, seluruh aset Perusahaan di dalam area konsesi, termasuk tanah yang berstatus hak pengelolaan atas nama dan/atau tanah yang tercatat sebagai aset Perusahaan, tetap menjadi aset dan hak pengelolaan dan/atau tanah Perusahaan.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

b) Port Operated by The Company

The Company entered into several concession agreement with Port Authority in relation to operational activities at port that was operated by the Company which includes granting rights from the Port Authority to the Company to perform operation on providing and/or servicing of port services on operated concession area in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Sailing. The Company is obliged to pay concession fee to the Port Authority in accordance with the set rate in each of concession agreement in form of Non Tax State Income. At the end of Concession Agreement, all the Company's assets in the concession area, including landrights and/or land recorded as the Company's assets, will remain assets and landrights and/or land of the Company.

Area Konsesi/ Concession Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Tarif Konsesi/ Concession Rate
Tanjung Priok	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok/ <i>The Company and Tanjung Priok Port Authority</i>	11 November/ November 2015	50 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Belawan	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Belawan/ <i>The Company and Belawan Port Authority</i>	9 November/ November 2015	30 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Tanjung Perak	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak/ <i>The Company and Tanjung Perak Port Authority</i>	9 November/ November 2015	30 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Makassar	Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Makassar/ <i>The Company and Makassar Port Authority</i>	9 November/ November 2015	30 tahun/years	2,5% dari pendapatan kotor/ <i>2.5% of gross revenue</i>
Gresik	BMS dan Otoritas Pelabuhan Gresik/ <i>BMS and Gresik Port Authority</i>	15 Desember/ December 2017	76 tahun/years	2,75% dari pendapatan kotor/ <i>2.75% of gross revenue</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

c) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN)

Perusahaan memiliki sebidang tanah seluas 36.333m² yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tanah tersebut digunakan untuk area pembangunan fasilitas penunjang operasional dan dermaga curah cair Terminal *Multipurpose* Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Pada tanggal 31 Desember 2020, tanah tersebut diklasifikasikan sebagai aset tetap oleh Perusahaan.

Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan menerima surat Menteri BUMN No. S-747/MBU/09/2021 tentang Persetujuan Penghapusbukuan Aktiva Tetap Tanah di Terminal *Multipurpose* Pelabuhan Labuan Bajo. Berdasarkan surat tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pelepasan hak atas tanah kepada Negara Republik Indonesia c.q Kementerian Perhubungan dalam rangka pemanfaatan barang milik negara melalui penerbitan konsesi. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perusahaan melakukan reklasifikasi aset tanah Labuan Bajo ke aset takberwujud sebesar Rp79.905.949.

Pada tanggal 8 November 2021, Perusahaan mengadakan Perjanjian KSP BMN dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area Pelabuhan Labuan Bajo dengan jangka waktu selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Perusahaan diwajibkan untuk membayar Rp171.000 dan setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2,95%, dari total sebesar Rp19.005.671 selama 50 tahun serta keuntungan Bagi Hasil Perjanjian sebesar 16,81% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

c) Utilization Cooperation of State Property (KSP-BMN)

The Company owns a parcel of land of 36,333m² located in Wae Kelambu, Komodo District, West Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The land is used for the construction of operational support facilities and a liquid bulk dock at the Wae Kelambu *Multipurpose* Terminal at Labuan Bajo Port. As of December 31, 2020, the land is classified as fixed asset by the Company.

On September 29, 2021, the Company received a letter from the Minister of SOE No. S-747/MBU/09/2021 regarding Approval for The Write-off of Land Fixed Assets at Labuan Bajo *Multipurpose* Port. Based on the letter, the Company is obliged to release the land rights to the Republic of Indonesia c.q the Ministry of Transportation in relation to utilization of state property through the issuance of concessions. On October 1, 2021, the Company reclassified the land assets of Labuan Bajo to intangible assets amounting to Rp79,905,949.

On November 8, 2021, the Company entered into KSP BMN agreement with the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation. Based on the agreement, the company has the right to operate and carry out port service activities and port-related services in Labuan Bajo Port area for a period of 50 (fifty) years from the date of the signing of the agreement. The Company is obliged to pay Rp171,000 and an annual increase of 2.95%, totaling Rp19,005,671 for 50 years as well as a Profit Sharing Agreement of 16.81% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

d) Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN)

Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara ("KSP BMN") dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait kepelabuhanan di area kerjasama. Kerjasama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Adapun aset yang dikerjasamakan adalah aset yang dibiayai oleh APBN dan dimiliki oleh negara kemudian dimanfaatkan oleh Perusahaan tanpa mengubah status kepemilikan aset. Objek Kerjasama akan dikembalikan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada akhir periode perjanjian.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

d) Utilization Cooperation of State Property (KSP-BMN)

The Company entered into several Cooperation agreements for the Utilization of State Property ("KSP BMN") with the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation. The company is able to operate and carry out port service activities and port-related services in the cooperation area. This collaboration aims to increase non-tax state revenues. Meanwhile, the assets being collaborated are assets financed by the APBN and owned by the state and then utilized by the Company without changing the asset ownership status. The objects of cooperation will be returned to the Directorate of Sea Transportation at the end of the agreement period.

Area Kerjasama/ Cooperation Area	Pihak yang Terkait dengan Perjanjian/ Parties Related to Agreement	Tanggal Perjanjian/ Date of Agreement	Jangka Waktu Perjanjian/ Agreement Periods	Nilai Kontribusi Tetap/ Fixed Contribution Value	Persentase Bagi Hasil/ Percentage of Profit Sharing
Badas	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	7 April/April 2022	30 tahun/years	Rp916.390 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,88%/ Rp916,390 and annual increase of 2.88%	46,55% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi/ 46.55% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities
Waingapu	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	7 April/April 2022	30 tahun/years	Rp572.051 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 1,93% / Rp572,051 and annual increase of 1.93%	44,29% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi/ 44.29% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities
Bima	Perusahaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut/ The Company and the Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation	7 September/ September 2022	30 tahun/years	Rp759.982 dan selanjutnya naik setiap tahun sebesar 2,12%/ Rp759,982 and an annual increase of 2.12%	28,81% dari Arus Kas Bersih Kegiatan Operasi dan Kegiatan Investasi/ 28.81% of the Net Cash Flow from Operating Activities and Investing Activities

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

48. PERJANJIAN KONSESI (lanjutan)

e) Perjanjian Penugasan Kuala Tanjung

Pada tanggal 13 Februari 2015, sebagaimana telah digantikan dan diandendum masing-masing pada tanggal 10 Februari 2016 dan tanggal 20 Maret 2017, Perusahaan dan PMT menandatangani perjanjian untuk pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan terminal multipurpose Kuala Tanjung serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Berdasarkan perjanjian, PMT diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal multipurpose Kuala Tanjung kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan 12 Februari 2065.

f) Perjanjian Penugasan Belawan Fase 2

Pada tanggal 31 Oktober 2014, sebagaimana telah digantikan pada tanggal 18 Mei 2018, Perusahaan dan PTP1 menandatangani perjanjian untuk pembangunan dan pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2. Berdasarkan perjanjian, PTP1 diharuskan untuk melakukan pembayaran kompensasi sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor pengelolaan terminal petikemas Belawan Fase 2 kepada Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 Oktober 2044.

48. CONCESSION AGREEMENTS (continued)

e) Kuala Tanjung Assignment Agreement

On February 13, 2015, as replaced and amended on February 10, 2016 and March 20, 2017, respectively, the Company and PMT signed agreement for construction, financing, and operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal and land utilisation and management. Based on agreement, PMT is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Kuala Tanjung multipurpose terminal to the Company. The agreement is valid for 50 (fifty) years since February 13, 2015 until February 12, 2065.

f) Belawan Phase 2 Assignment Agreement

On October 31, 2014, as replaced on May 18, 2018, the Company and PTP1 signed agreement for construction and operation of Belawan Phase 2 container terminal. Based on agreement, PTP1 is obliged to pay compensation of certain percentage of gross revenue from the operation of Belawan Phase 2 container terminal to the Company. The agreement is valid for 30 (thirty) years since October 31, 2014 until October 30, 2044.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek - SPSL

Perusahaan mendirikan SPSL pada tanggal 5 November 2012. Berdasarkan Surat Perusahaan No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, Perusahaan menginstruksikan SPSL untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari Perusahaan kepada SPSL. SPSL juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan *advisory* yang saat ini dilaksanakan oleh Perusahaan akan dialihkan kepada SPSL dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari *proceed* yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. Perusahaan kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan SPSL agar segera memproses pekerjaan *Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor*.

Pada tanggal 30 Mei 2013, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), dimana Perusahaan memberikan kepada SPSL hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.

PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Perusahaan dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh Perusahaan dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum SPSL menandatangani COA. Transaksi ini masuk ke dalam kategori sewa keuangan berdasarkan PSAK 73.

Sesuai dengan PIA, Perusahaan dan SPSL selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perusahaan dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada PSK. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada SPSL.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS

a) Project Implementation Agreement - SPSL

The Company established SPSL on November 5, 2012. Based on Letter of the Company No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, the Company instructed SPSL to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal from PT Pembangunan Perumahan (Persero) as the Company's contractor to SPSL. SPSL was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with the Company shall be assigned to SPSL in which the consultants' fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. The Company then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed SPSL to process the *Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor* works.

On May 30, 2013, the Company and SPSL signed Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 ("PIA"), in which the Company granted to SPSL the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.

The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 entered into between the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by the Company and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which SPSL entered into the COA. This transaction is classified as finance lease based on PSAK 73.

In accordance with the PIA, the Company and SPSL shall then identify the existing agreements signed by the Company and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to SPSL. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to SPSL.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

a) Perjanjian Pelaksanaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 6 Agustus 2018, novasi tidak jadi dilaksanakan dan diganti menjadi sewa/site lease yang dituangkan dalam perjanjian perubahan PIA dan telah mengalami beberapa perubahan terakhir pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai perubahan nilai dan jangka waktu sewa.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Perubahan (Amendemen) Kelima tentang Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 dan No. PJK-621-30092021-001, yang mengatur mengenai:

- pengubahan Skema Kerja Sama yang sebelumnya Bangun Kelola Serah menjadi site lease/sewa;
- jangka waktu yang sebelumnya 70 (tujuh puluh) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun;
- jangka waktu kerjasama terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2043; dan
- besaran biaya sewa lokasi per tahun sejumlah Rp236.000.000 (belum termasuk PPN) dibayarkan setiap triwulan di setiap awal bulan berjalan.

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek - SPSL

- Pada tanggal 24 Februari 2014, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), dimana Perusahaan menunjuk SPSL untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada pendapatan untuk SPSL atas penyediaan jasa ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

a) Project Implementation Agreement – SPSL (continued)

As of August 6, 2018, the novation was not carried out and was changed to a lease/site lease as outlined in the PIA amendment agreement and has undergone several changes recently on December 23, 2020 regarding changes in the value and term of the lease.

On September 30, 2021, the Company and SPSL signed the Fifth Amendment Agreement regarding the Executor of the Kalibaru Terminal Project, Tanjung Priok Port No. KS.01/30/9/1/KRJ/UT/PI.II-21 and No. PJK-621-30092021-001, which regulates:

- changing the Cooperation Scheme which was previously Build Manage Handover to site lease;
- the previous period of 70 (seventy) years to 23 (twenty three) years;
- the cooperation period is from October 1, 2020 to September 30, 2043; and
- the annual rental fee is Rp236,000,000 (excluding VAT) and is carried out on a quarterly basis at the beginning of the current month.

b) Project Management Agreement - SPSL

- On February 24, 2014, the Company and SPSL signed Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 ("PMA"), in which the Company appointed SPSL as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no profit for SPSL for providing this service.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Pada tanggal 9 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Berita Acara No. PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 dan No. BAC-400-09102020-012 tentang Kesepakatan Bersama Rencana Pembaruan Manajemen Proyek Untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok.

Adapun maksud dalam Berita Acara ini adalah kesepakatan bersama untuk melakukan pembaruan terhadap PMA karena PIA telah mengalami perubahan skema kerja sama sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap PMA. Maka, Perusahaan dan SPSL bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama Baru yang akan menggantikan PMA.

- Pada tanggal 18 Desember 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I di Pelabuhan Tanjung Priok No.PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 dan No.PJK-621-18122020-006.

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerjasama manajemen proyek pembangunan Terminal Kalibaru I Pelabuhan Tanjung Priok.

- Pada tanggal 29 April 2019, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 dan No. PJK-KJG-06-29042019-010.
- Pada tanggal 23 Oktober 2020, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 dan No.PJK-621-23102020-009.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement- SPSL (continued)

On October 9, 2020, the Company and SPSL signed the Minutes No.PD.05.01/9/10/2/MPS/TEK/PI.II-20 and No. BAC-400-09102020-012 concerning Mutual Agreement on Project Management Renewal Plan for Construction Work on Phase 1 of North Kalibaru Container Terminal at Tanjung Priok Port.

The intention in this Minutes is a mutual agreement to make updates to PMA because PIA has undergone a change in the cooperation scheme so that adjustments need to be made to PMA. So, the Company and SPSL agreed to make a New Cooperation Agreement that would replace PMA.

- On December 18, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction of Phase I of the North Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port No. PD.05.01/18/12/1/MPS/TEK/PI.II-20 and No.PJK-621-18122020-006.

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing of cooperation in the management of the Kalibaru I Terminal construction project at the Port of Tanjung Priok.

- On April 29, 2019, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.01/29/4/1/KRJ/UT/PI.II-19 and No. PJK-KJG-06-29042019-010.
- On October 23, 2020, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. KS.02/23/10/1/MPS/TEK/PI.II-2020 and No. PJK-621-23102020-009.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL (lanjutan)

Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan SPSL dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.

- Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani perjanjian Kerjasama Khusus Manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Periode 2021 sampai dengan 2022 Pelabuhan Tanjung Priok No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 dan No. PJK-621-29092021-006.

Jangka waktu perjanjian ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp20.314.227 (termasuk PPN).

- Pada tanggal 29 September 2021, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 dan No.PJK-621-29092021-013.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) senilai Rp18.437.391 (belum termasuk PPN).

- Pada tanggal 3 November 2022, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Khusus Manajemen Proyek Terminal Kalibaru Tahap I Periode 2022 sampai dengan 2023 Pelabuhan Tanjung Priok No. PD.05/01/3/11/1/PM01/INVS/PLND-22 dan No. PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL -22.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

b) Project Management Agreement - SPSL (continued)

The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and SPSL in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.

- *On September 29, 2021, Company and SPSL signed a Special Cooperation Agreement for the Management of the North Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2021 to 2022 of Tanjung Priok Port No. PD.05.01/29/9/10/MPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-006.*

The term of agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days since the Minutes of Work Start (BAMK) is signed with a total cost of Rp20,314,227 (including VAT).

- *On September 29, 2021, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/29/9/12/HPS/TEK/PI.II-21 and No. PJK-621-29092021-013.*

The term of the agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days starting from the Minutes of Starting Work (BAMK) amounted to Rp18,437,391 (excluding VAT).

- *On November 3, 2022, the Company and SPSL signed a Special Cooperation Agreement for the Management for the Kalibaru Terminal Development Phase I for the 2022 to 2023 of Tanjung Priok Port No. PD.05/01/3/11/1/PM01/INVS/PLND-22 and No. PD.05.01/3/11/1/KPKB/DIUT/PLSL-22.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**b) Perjanjian Pengelolaan Proyek – SPSL
(lanjutan)**

Jangka waktu perjanjian ini adalah 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) ditandatangani dengan total biaya pelaksanaan sebesar Rp17.260.258 (belum termasuk PPN).

Pada tanggal 3 Oktober 2023, SPSL menandatangani berita acara atas pengalihan manajemen proyek Manajemen Proyek Terminal Kalibaru Tahap I dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, manajemen Proyek Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I beralih ke Perusahaan.

- Pada tanggal 14 November 2022, Perusahaan dan SPSL menandatangani Perjanjian tentang Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. PD.05.01/14/11/1/PMO2/INVS/PLND-22 dan No. PD.05.01/14/11/1/PRTE/DIUT/PLSL-22.

Jangka waktu perjanjian adalah selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender terhitung sejak Berita Acara Mulai Kerja (BAMK) senilai Rp19.299.347 (belum termasuk PPN).

- Pada tanggal 6 September 2023, SPSL menandatangani berita acara atas pengalihan kerja sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat yang dikelola SPSL berakhir pada tanggal 24 Oktober 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan kerjasama melainkan beralih ke Perusahaan.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**b) Project Management Agreement - SPSL
(continued)**

The term of agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days since the Minutes of Work Start (BAMK) is signed with a total cost of Rp17,260,258 (excluding VAT).

On October 3, 2023, SPSL signed a novation memorandum of project management for the Kalibaru Terminal Development Phase I with the Company. Based on the memorandum, project management for the Kalibaru Terminal Development Phase I is transferred to the Company.

- *On November 14, 2022, the Company and SPSL agreed on the Agreement on the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan No. PD.05.01/14/11/1/PMO2/INVS/PLND-22 and No. PD.05.01/14/11/1/PRTE/DIUT/PLSL-22.*

The term of the agreement is 365 (three hundred and sixty five) calendar days starting from the Minutes of Starting Work (BAMK) amounted to Rp19,299,347 (excluding VAT).

- *On September 6, 2023, SPSL signed a novation memorandum of the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan with the Company. Based on the memorandum, the Construction and Development of the Pontianak Port Kijing Terminal in West Kalimantan, managed by SPSL, ended on October 24, 2023, and there is no extension of cooperation, instead, transferred to the Company.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1

Berdasarkan PIA (Catatan 49a), pada tanggal 9 Juni 2014, SPSL dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana SPSL menunjuk NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada SPSL.

Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 ("SAA"), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan CY 570 meter. SPSL harus melakukan penyerahan dermaga 450 meter dan dermaga 850 meter kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 31 Juli 2015 dan 31 Desember 2015.

Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya. Pada tanggal 17 September 2014, SPSL menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1 dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 27).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1

Based on PIA (Note 49a), on June 9, 2014, SPSL and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which SPSL appointed NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meters quay and NPCT1 shall pay advance site rent and quarterly site rent to SPSL.

The advance rental fee of USD100,000,000 shall be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meters quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meters quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 ("SAA"), the final USD30,000,000 will be paid after the completion of additional yard area CY 570 meters. SPSL shall handover the 450 meters quay and the 850 meters quay to NPCT1 on July 31, 2015 and December 31, 2015, respectively.

The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 meters quay up to the commencement of operation of 850 meters quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter. On September 17, 2014, SPSL received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1 and are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 27).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, SPSL menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, SPSL menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan *Liquidated Damage Event*.

Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan SPSL pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, SPSL tidak menerima *Liquidated Damages Notice* dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.

Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh SPSL kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.

Pada tanggal 24 Juni 2016, SPSL menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 27).

Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**c) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

The handover of 450 meters quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, SPSL received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, SPSL responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1's construction hence it is not a Liquidated Damage Event.

In addition, the handover of 850 meters quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by SPSL on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the Company has not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.

450 meters and 850 meters quays have been handed over by SPSL to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.

On June 24, 2016, SPSL received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 meters quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position (Note 27).

On August 18, 2016, 450 meters quay has started its commercial operation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Penyediaan akses oleh SPSL kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
 - Perkuatan sisi utara tanggal 16 Maret 2017;
 - Penyediaan dan pemasangan *variable speed water drive* dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
 - Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
 - Penyelesaian fase kedua dari area *common gate* tanggal 16 Oktober 2017;
 - Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Jika SPSL *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows:

- Provision of access to certain areas within 850 meters quay from SPSL to NPCT1;
- Agreement on the date of commencement of operations of 450 meters quay, which was August 18, 2016;
- Site Works Confirmation Notice for 850 meters quay was issued on October 16, 2016 with note on certain outstanding works;
- SPSL will complete the following works within the time specified for each item:
 - Strengthening of north side by March 16, 2017;
 - Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;
 - Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;
 - Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;
 - Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.
- Agreement that the maintenance responsibility of concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer's report;
- Agreement that the date of commencement of operations of 850 meters quay will be no later than March 16, 2017;
- If SPSL *Undertakings* have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 13 Desember 2016, SPSL dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Jika terdapat salah satu SPSL *Undertaking* belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh SPSL *Undertaking* telah diselesaikan.

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- SPSL akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
- Jalan akses keluar sisi timur area CGA tanggal 15 Desember 2017;
- Pengoperasian *Go-live* atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
- Pengoperasian *Go-live* OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018;
- Tambahan area *buffer* untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
- Penyediaan fasilitas untuk petikemas *reefer* dan *cooling room* tanggal 30 April 2018;
- Pekerjaan perbaikan jalan akses keluar (lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
- Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 13, 2016, SPSL and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows: (continued)

- If any one of the SPSL *Undertakings* has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 meters quay, which is USD7,000,000 until the date that all SPSL *Undertakings* have been completed.

On January 16, 2018, SPSL and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows:

- SPSL will complete the following works within the time specified for each item:
- East area exit access road of CGA by December 15, 2017;
- *Go-live* IT system operation by December 31, 2017;
- *Go-live* OCR operation at CGA by January 31, 2018;
- Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;
- Entry access road west side CGA by February 28, 2018;
- Additional *buffer* area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018;
- Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018;
- Reparation work of exit access road (north side behandle dockyard at CGA) by April 30, 2018;
- Reparation of north side behandle dockyard at CGA by May 31, 2018;
- Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian -
NPCT1 (lanjutan)**

Pada tanggal 16 Januari 2018, SPSL dan NPCT1 menandatangani Nota Kesepakatan dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)

- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, SPSL akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.
- Kesepakatan dalam Surat Keputusan mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.

SPSL telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) *item* yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara Perusahaan dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.

Pada tanggal 18 Agustus 2020, telah disepakati bersama antara SPSL dan PP terkait kelanjutan 2 (dua) *item* pekerjaan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian, dimana jangka waktu pelaksanaan untuk 2 *item* pekerjaan akan berakhir pada tanggal 18 Mei 2022.

Pada tanggal 2 November 2020, SPSL membuat kesepakatan bersama dengan NPCT1 (SMA) mengenai sewa lokasi dimuka/*Advance Site Rent* (ASR) yang menjelaskan NPCT1 menyetujui untuk membayar kepada SPSL beberapa bagian dari sewa lokasi di muka (ASR) sebesar USD23.500.000 meskipun penyerahan CY 57 meter belum dipenuhi oleh SPSL. Sesuai dengan ketentuan SMA, SPSL diharuskan mengirimkan pemberitahuan kepada NPCT1 tentang dimulainya pelaksanaan pembangunan CY 57 meter. Pada tanggal 20 April 2020, pembangunan CY 57 meter telah dilanjutkan kembali dan ditargetkan selesai pada bulan Mei 2022.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**c) Construction and Operation Agreement -
NPCT1 (continued)**

On January 16, 2018, SPSL and NPCT1 signed Memorandum of Agreement which regulates items as follows: (continued)

- *If the above works have not been completed on the predetermined dates, SPSL will pay USD5,000/day for each work.*
- *Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.*

SPSL has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between the Company and the contractor implementing the work.

On 18 August 2020, it was mutually agreed between the SPSL and PP regarding the continuation of 2 (two) work items as outlined in the Agreement Letter, where the implementation period for 2 work items will end on May 18, 2022.

On November 2, 2020, SPSL entered into a joint agreement with NPCT1 (SMA) regarding Advance Site Rent (ASR) which explained that NPCT1 agreed to pay SPSL some part of the upfront location lease (ASR) of USD23,500,000 despite submission CY 57 meters has not been fulfilled by SPSL. In accordance with SMA regulations, SPSL is required to send a notification to NPCT1 regarding the commencement of the construction of the 57 meter CY. On April 20, 2020, the construction of the 57 meter CY has been resumed and is targeted for completion in May 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

c) Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian - NPCT1 (lanjutan)

Pada tanggal 29 Desember 2020, SPSL telah menerima ASR tersebut sebesar USD23.500.000 yang dicatat pada pendapatan diterima di muka.

Pada tanggal 30 Desember 2021, SPSL dan NPCT1 telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan tentang Serah Terima Area 57 Meter yang diantaranya menjelaskan bahwa NPCT1 telah menerima penyerahan Area 57 Meter sesuai *Site Work Confirmation Notice* (SWCN) yang diterbitkan oleh *Independent Engineer* (IE), biaya sewa *Quarterly Site Rent* (QSR) dibebaskan dari reduksi 11% menjadi sebesar USD14.000.000 (nilai penuh) mulai tanggal 27 Desember 2021, dan SPSL akan menerbitkan tagihan untuk sisa ASR sebesar USD6.500.000. Pada tanggal 2 Februari 2022, SPSL telah menerima sisa ASR sebesar USD6.500.000 tersebut.

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

Perjanjian Induk Kerjasama Operasi Koja antara Perusahaan dan HPI (Catatan 1c) mengatur syarat-syarat yang menjadi dasar operasional Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK Koja).

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut:

- Bagian investasi dari Partisipan yang dicantumkan dalam Perjanjian yang telah diubah adalah sebagai berikut:

Perusahaan	54,91%
HPI	45,09%

- Nilai investasi dari kedua Partisipan tergantung pada audit atas investasi yang dilakukan oleh auditor independen.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

c) Construction and Operation Agreement - NPCT1 (continued)

On December 29, 2020, SPSL received ASR amounting to USD23,500,000 which was recorded as unearned income.

On December 30, 2021, SPSL and NPCT1 has signed *Minutes of Agreement* regarding *Handover 57 Meter area* which among others explain that NPCT1 has received the handover of 57 Meters Area according to *Site Work Confirmation Notice* (SWCN) issued by *Independent Engineer* (IE), *Quarterly Site Rent* (QSR) rental fee is free from reduction 11% which has full value of USD14,000,000 (full amount) from December 27, 2021, and SPSL will issue a bill for the remaining ASR amounting to USD6,500,000. On February 2, 2022, SPSL has received such remaining ASR amounting to USD6,500,000.

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja

The *Master Cooperation Agreement* between the Company and HPI (Note 1c) sets out the terms and conditions under which *Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja* (KSO TPK Koja) is operating.

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows:

- The investment proportion of the Participants is specified in the revised Agreement as follows:

The Company
HPI

- Investments by the Participants are subject to audit by an independent auditor.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja
(lanjutan)**

Aspek keuangan penting yang diatur dalam Perjanjian ini termasuk Amendemennya adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Aset tetap yang diserahkan oleh Partisipan untuk dipergunakan dalam operasional terminal dimiliki secara langsung oleh Partisipan dan dicatat dalam masing-masing pembukuannya.
- Partisipan berhak atas pengembalian dana penyusutan aset tetap yang dimiliki oleh masing-masing Partisipan yang digunakan dalam operasi dan berhak menerima laba sesuai dengan investasi dari Partisipan.
- Laba yang dapat dibagikan kepada Partisipan ditentukan setelah pengurangan biaya operasional, royalti, biaya bank dan dana penyusutan aset tetap dari pendapatan.
- Royalti akan dibayarkan kepada Perusahaan apabila arus petikemas tahunan yang dihasilkan melebihi target minimum tahunan yang ditetapkan.
- Jika ada pengeluaran modal baru, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai belanja modal sesuai dengan persentase investasi Partisipan berdasarkan audit investasi tahun sebelumnya.
- Partisipan berhak untuk menerima dana penyusutan dan pembagian laba berdasarkan hasil audit investasi yang berlaku.

Pada tanggal 30 Maret 2021, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2020.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (continued)**

The principal financial aspects of this Agreement including its amendments are as follows: (continued)

- *Fixed assets provided by the Participants for use in the operations of the terminal are owned directly by the Participants and are recorded in their respective accounting records.*
- *The Participants are entitled to reimburse depreciation funds from fixed assets owned by the respective Participants used in operation and shall receive profit based on the investments made by the Participants.*
- *Profit distributable to the Participants is determined by deducting operating expenses, royalties, bank administration charges and depreciation funds from revenue.*
- *Royalties will be paid to the Company if the annual container throughput exceeds the minimum annual target.*
- *If there are new capital expenditures, both parties agreed to finance the capital expenditures in accordance with the investment percentages of the Participants based on the prior year investment audit.*
- *The Participants have the right to receive depreciation funds and distribution of profit based on prevailing investment audit result.*

On March 30, 2021, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2020 net income.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2021, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2020 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2020 sebesar USD0,35 juta atau setara dengan Rp4,92 miliar untuk Perusahaan dan USD0,21 juta atau setara dengan Rp3,03 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2020 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 24 Mei 2022, Partisipan menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investasi atas perhitungan dana depresiasi aset tetap yang dimiliki Partisipan dan sisa laba berdasarkan proporsi investasi Partisipan sehubungan dengan distribusi laba KSO TPK Koja tahun 2021 dan 2022.

Pada tanggal 14 Desember 2022, auditor independen telah selesai melakukan audit dan menerbitkan laporan audit investasi untuk tahun 2021 dimana Partisipan menyetujui sisa hasil investasi untuk tahun 2021 sebesar USD4,98 juta atau setara dengan Rp78,39 miliar untuk Perusahaan dan USD4,01 juta atau setara dengan Rp63,06 miliar untuk HPI. Laporan audit investasi juga menyimpulkan proporsi investasi Partisipan untuk tahun 2021 adalah 54,91% untuk Perusahaan dan 45,09% untuk HPI.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPI mengadakan Revisi atas Perjanjian Kerjasama untuk Pengelolaan Terminal Petikemas III Tanjung Priok (Revisi Perjanjian) dimana Perusahaan dan HPI sepakat untuk memperpanjang kerjasama pengoperasian Terminal Petikemas III Tanjung Priok sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Revisi Perjanjian ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8.750.000, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh TPK Koja kepada Perusahaan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja (continued)

On December 31, 2021, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2020 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2020 of USD0.35 million or equivalent to Rp4.92 billion for the Company and USD0.21 million or equivalent to Rp3.03 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2020 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On May 24, 2022, the Participants appointed independent auditors to perform an investment audit for the calculation of depreciation funds of assets owned by the Participants and the remaining net income on the basis of share of investment of the Participants in relation to the distribution of KSO TPK Koja's 2021 and 2022 net income.

On December 14, 2022, the independent auditors completed and released the investment audit report for the year 2021 whereby the Participants approved the outstanding return of investment for the year 2021 of USD4.98 million or equivalent to Rp78.39 billion for the Company and USD4.01 million or equivalent to Rp63.06 billion for HPI. The investment audit report also concluded that the investment proportions of the Participants for the year 2021 are 54.91% for the Company and 45.09% for HPI.

On August 5, 2014, the Company and HPI entered into a Revised Cooperation Agreement for the Management of Tanjung Priok Container Terminal III (Revised Agreement), whereby the Company and HPI agreed to extend the cooperation for operating Terminal Petikemas III Tanjung Priok until March 26, 2039. The Revised Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Revised Agreement, TPK Koja will have to pay quarterly rent fee amounting to USD8,750,000 to the Company, while royalty will no longer be paid by TPK Koja to the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja
(lanjutan)**

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPI telah melakukan perubahan terhadap Revisi Perjanjian di atas dimana pada akhir masa perjanjian, seluruh aset yang dimiliki HPI dan bagian HPI dalam aset bersama serta pekerjaan modal akan dialihkan kepada Perusahaan tanpa adanya pembebanan.

Sehubungan dengan Revisi Perjanjian tersebut, KSO TPK Koja akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD8,75 juta, sedangkan royalti tidak lagi dibayarkan oleh KSO TPK Koja kepada Perusahaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp542,44 miliar) dan USD35.000.000 (setara dengan Rp514,88 miliar).

Dalam Revisi Perjanjian tersebut, Perusahaan berhak memperoleh pembayaran premium sebesar USD50.000.000 dari HPI sehubungan dengan dilanjutkannya kerjasama antara Perusahaan dan HPI untuk pengelolaan TPK Koja. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp27.735.417. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo yang belum diamortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp402.163.542 dan Rp429.898.958 dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**d) Kerjasama Operasi Terminal Petikemas
Koja (continued)**

On June 22, 2015, the Company and HPI has amended the Revised Agreement mentioned above where at the end of the agreement period, all of the HPI's assets and HPI's interest in the joint assets and the capital works will be transferred to the Company free of encumbrances.

In consideration to the Revised Agreement, KSO TPK Koja will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD8.75 million, while royalty will no longer be paid by KSO TPK Koja to the Company.

For the years ended December 31, 2023 and 2022, the Company has recorded revenue from these quarterly rentals of USD35,000,000 (equivalent to Rp542.44 billion) and USD35,000,000 (equivalent to Rp514.88 billion) respectively.

In the Revised Agreement, the Company has the right to obtain payment of premium amounting to USD50,000,000 from HPI in relation to the continuing cooperation between the Company and HPI for the management of TPK Koja. For the year ended December 31, 2023 and 2022, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp27,735,417. As of December 31, 2023 dan 2022 the balance of unamortized premium amounted to Rp402,163,542 and Rp429,898,958 respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok ("Perjanjian Pemberian Kuasa") dimana Perusahaan menunjuk dan memberikan kuasa pada JICT untuk pengoperasian dan pemeliharaan properti yang telah dikuasakan (mencakup terminal kontainer, fasilitas pendukung terminal kontainer dan utilitas) sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian. Periode perjanjian adalah 20 (dua puluh) tahun sejak 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. Sehubungan dengan pemberian kuasa kepada JICT tersebut, JICT akan membayar royalti kepada Perusahaan sebesar 10% dari pendapatan kotor terminal kontainer secara bulanan. Disamping itu, JICT juga akan membayar kepada Perusahaan atas sewa peralatan dan tenaga kerja yang ditempatkan Perusahaan di JICT.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa) dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Pemberian Kuasa sampai dengan tanggal 26 Maret 2039. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi.

Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 (Catatan 49f), sedangkan royalti, sewa peralatan berupa 4 (empat) RTGC dan penempatan tenaga kerja tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan. Perjanjian jasa dan teknis "know how" yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Kuasa akan diakhiri. Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, kegiatan usaha dan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT kepada Perusahaan (Catatan 49i).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into Authorization Agreement for The Operation and Maintenance of Container Terminal in Tanjung Priok Seaport ("Authorization Agreement") whereby the Company appointed and conferred authorization on JICT for the operation and maintenance of the authorization property (including container terminal, container terminal support facilities and utilities) as defined in the agreement. The authorization period is 20 (twenty) years from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement. In consideration of the granting of the authorization to JICT, JICT will pay monthly royalties to the Company calculated at 10% of the preceding month container terminal gross revenue. Moreover, JICT will also pay to the Company for equipment rental and Company's employee secondment in JICT.

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Authorization Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (Amended Authorization Agreement), whereby the Company and JICT agreed to extend the Authorization Agreement until March 26, 2039. The Amended Authorization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent.

In consideration to the Amended Authorization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent to the Company fee amounting to USD21,250,000 (Note 49f), while royalty, equipment rental of 4 (four) RTGCs and secondment of employee will no longer be paid by JICT to the Company. As for the technical "know-how" and services agreement in Authorization Agreement, they will be terminated. Based on the Amended Authorization Agreement, Terminal 2 assets and business will be transferred from JICT to the Company (Note 49i).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Berdasarkan Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa tersebut, Perusahaan akan menerima pembayaran premium sebesar USD200.000.000 dari HPJ (Catatan 49h).

Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa ini perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana diatur dalam surat Menteri BUMN dan surat Menteri Perhubungan di bawah.

Pada tanggal 9 Juni 2015, Perusahaan menerima surat dari Menteri BUMN tentang Kerjasama Pengelolaan/Pengoperasian JICT dan TPK Koja dimana Menteri BUMN secara prinsip menyetujui rencana kerjasama usaha pengelolaan/pengoperasian JICT dan TPK Koja, dengan kepemilikan minimal di JICT sebesar 51%, dengan persyaratan sebagai berikut:

- Memperhatikan surat Menteri Perhubungan No. HK.201/3/4 Phb 2014 tanggal 18 September 2014, terkait dengan pemisahan fungsi operator dan regulator sesuai UU No. 17 Tahun 2008.
- Melaksanakan surat Wakil Menteri BUMN kepada Direktur Utama BUMN No. S-645/MBU/WK/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014 hal penyampaian Hasil Panja Aset BUMN dan Putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait kerjasama BUMN.

Pada tanggal 30 September 2021, Perusahaan dan HPJ telah menandatangani Pokok-Pokok Perjanjian menyepakati ketentuan-ketentuan utama yang diusulkan untuk diatur lebih lanjut dalam perjanjian - perjanjian perubahan terhadap amendemen perjanjian perpanjangan JICT saat ini dan dokumen-dokumen turunan yang relevan dari perjanjian perpanjangan JICT saat ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

Based on the Amended Authorization Agreement, the Company will receive payment of premium from HPJ amounting to USD200,000,000 (Note 49h).

On June 22, 2015, the Company and JICT entered into Amendment Agreement to the Amended Authorization Agreement which changed the amount of premium to be paid by HPJ to the Company amounting to USD215,000,000. The Amended Authorization Agreement needs to have adjustments to be in accordance with Law No. 17 Year 2008 of Shipping as regulated in the letter of the Minister of SOEs and letter of the Minister of Transportation below.

On June 9, 2015, the Company received a letter from the Minister of SOE regarding Cooperation of Management/ Operation of JICT and TPK Koja whereas the Minister of SOEs principally agrees with the plan of cooperation of JICT and TPK Koja management/operation, with minimum percentage of ownership of 51%, with requirements as follows:

- *To comply with the letter from Minister of Transportation No. HK.201/3/4 Phb 2014 dated September 18, 2014, related to the separation of operator and regulator functions in accordance with UU No. 17 Year 2008.*
- *To execute letter of Vice Minister of SOE Enterprise to President Director of SOE No. S-645/MBU/WK/10/2014 dated October 9, 2014 regarding result of Assets Working Committee of SOE and Decision of Constitutional Court, especially related to State Owned Enterprises cooperation.*

On September 30, 2021, the Company and HPJ have entered into the Heads of Agreement pursuant to which have agreed on the proposed key terms to be further stipulated in amendment of agreements to the existing extension agreements of JICT and the relevant derivatives documents to the existing extension agreements of JICT.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

e) Perjanjian Pemberian Kuasa Pengoperasian dan Pemeliharaan - JICT (lanjutan)

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, diantaranya mengatur pengalihan aset Terminal 2 dimana pada tanggal pengalihan, kepemilikan dan penguasaan aset Terminal 2 akan dialihkan dari JICT ke Perusahaan sesuai dengan Akta Pengalihan. Berdasarkan amendemen tersebut, nilai aset Terminal 2 akan didasarkan pada nilai barang sisa (*scrap value*) sebagaimana ditentukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.

f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas lainnya - JICT

Pada tanggal 27 Maret 1999, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Penggunaan Tanah HPL, Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Terminal Petikemas ("Perjanjian Penggunaan") dimana Perusahaan mengizinkan dan memberikan hak kepada JICT untuk menggunakan dan menyewa properti berikut dengan semua perbaikan yang telah dilakukan oleh JICT sejak tanggal efektif Perjanjian Pemanfaatan.

Atas pemberian hak Penggunaan oleh Perusahaan, JICT setuju untuk membayar biaya bulanan yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut, dihitung sebesar 5% dari pendapatan kotor.

Berdasarkan amendemen Perjanjian Pemanfaatan - Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok tanggal 5 Agustus 2014 (sebagaimana telah diubah), ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT, antara lain menyetujui JICT atas biaya sendiri, wajib membayar dan melunasi PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Perusahaan tetap memiliki hak kepemilikan properti tersebut. Jangka waktu perjanjian adalah 20 (dua puluh tahun) dari 27 Maret 1999, kecuali diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

e) Authorization Agreement for the Operation and Maintenance - JICT (continued)

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Amended Authorization Agreement, among others stipulated the transfer of Terminal 2 Assets in which at the date of transfer, the ownerships and the authority of Terminal 2 assets will be transferred from JICT to the Company in accordance with the Deed of Transfer. Based on the amendment, the value of Terminal 2 assets will be based on scrap value as determined by the independent appraisal appointed by the Company.

f) Utilization Agreement of Land Under HPL Owned by the Company, Port Facilities Building and Other Container Port Supporting Facilities - JICT

On March 27, 1999, the Company and JICT entered into an Agreement on Utilization of The HPL Land, Port Buildings Facility, and The Container Terminal Support Facility ("Utilization Agreement") whereby the Company granted and conferred the right to utilize and rent to JICT the properties together with all improvements held by JICT commencing from the effective date of the Utilization Agreement.

In consideration of the granting of the utilization right by the Company, JICT agreed to pay a monthly fee defined in these Agreement, calculated at 5% of gross revenue.

Based on amendment agreement to Utilisation Agreement - Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok dated August 5, 2014 (as amended), signed on March 30, 2022, the Company and JICT, agreed to, among others, JICT at its owned expense, shall duly pay and discharge PBB (Tax on Land and Building).

The Company retained the rights of the properties ownership. The utilization period is 20 (twenty years) from March 27, 1999, unless terminated earlier in accordance with the provisions of the agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**f) Perjanjian Penggunaan Tanah HPL,
Bangunan Fasilitas Pelabuhan dan Fasilitas
Penunjang Terminal Petikemas lainnya -
JICT (lanjutan)**

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan JICT mengadakan Amendemen Perjanjian Penggunaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk memperpanjang Perjanjian Penggunaan sampai dengan tanggal berakhirnya Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa. Amendemen Perjanjian Penggunaan ini berlaku efektif pada saat syarat pendahuluan yang terakhir telah dipenuhi. Sehubungan dengan Amendemen Perjanjian Penggunaan tersebut, JICT akan membayar biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan sebesar USD21.250.000 sedangkan kompensasi 5% dari pendapatan kotor JICT tidak lagi dibayarkan oleh JICT kepada Perusahaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD89.446.718.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Penggunaan, diantaranya mengatur mengenai kewajiban pembayaran PBB, kewajiban-kewajiban JICT dan biaya pemeliharaan.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan atas sewa kuartalan tersebut masing-masing sebesar USD35.000.000 (setara dengan Rp1.295.230.000) dan USD35.000.000 (setara dengan Rp1.238.407.500).

**g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham –
JICT**

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa JICT tanggal 24 November 2015, para pemegang saham JICT setuju antara lain:

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**f) Utilization Agreement of Land Under HPL
Owned by the Company, Port Facilities
Building and Other Container Port
Supporting Facilities - JICT (continued)**

On August 5, 2014, the Company and JICT entered into an Amended Utilization Agreement whereby the Company and JICT agreed to extend the Utilization Agreement until the date of termination of Amended Authorization Agreement. The Amended Utilization Agreement will commence on the date of the fulfilment of the last condition precedent. In consideration to the Amended Utilization Agreement, JICT will have to pay quarterly rent fee to the Company amounting to USD21,250,000 while compensation of 5% of JICT's gross revenue will no longer be paid by JICT to the Company.

For the year ended December 31, 2023 and 2022 the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD89,446,718, respectively.

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Utilization Agreement, among others stipulated the obligation of PBB payment, JICT's obligations and maintenance expenses.

For the year ended December 31, 2023 and 2022 the Company has recorded revenue from quarterly rent fee amounting to USD35,000,000 (equivalent to Rp1,295,230,000) and USD35,000,000 (equivalent to Rp1,238,407,500) respectively.

g) Amended Shareholders Agreement - JICT

Based on the Circular Resolution of Shareholders in Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders of JICT dated November 24, 2015, the shareholders of JICT agreed among others:

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

g) Amendemen Perjanjian Pemegang Saham - JICT (lanjutan)

- Bergantung pada persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk meningkatkan modal dasar JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 1 (satu) lembar saham Seri A dan 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham masing-masing Rp500 (nilai penuh).
- Bergantung pada persetujuan BKPM, untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh JICT dari Rp221.450.406 yang terbagi atas 442.900.812 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh) menjadi Rp230.489.198 yang terbagi atas 460.978.396 lembar saham Seri B dengan nilai nominal per saham Rp500 (nilai penuh).

Pada tanggal 7 Desember 2015, BKPM telah menyetujui perubahan modal JICT tersebut di atas.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan, HPJ, Kopegmar dan JICT telah menandatangani Amendemen terhadap Amendemen Perjanjian Pemegang Saham, diantaranya mengatur pengalihan saham JICT yang dimiliki HPJ kepada Perusahaan sebanyak 9.300.917 saham dengan harga pembelian sebesar USD1. Dengan demikian, kepemilikan Perusahaan di JICT menjadi 51,00% dari sebelumnya 48,90%.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas JICT No. 11 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham telah menyetujui pengalihan saham tersebut di atas serta perubahan anggaran dasar JICT. Akta tersebut telah diberitahukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 31 Mei 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

g) Amended Shareholders Agreement - JICT (continued)

- Subject to approval from the Capital Investment Coordinating Board (BKPM), to increase JICT's authorized capital from Rp221,450,406 divided into 1 (one) A Series share and 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 1 (one) A Series share and 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).
- Subject to approval from BKPM, to increase JICT's issued and paid-up capital from Rp221,450,406 divided into 442,900,812 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount) to become Rp230,489,198 divided into 460,978,396 B Series shares with each share having the nominal value of Rp500 (full amount).

On December 7, 2015, BKPM has already approved the above mentioned JICT's capital changes.

On March 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to the Amended Shareholder Agreement, among others stipulated the transfer of JICT shares owned by HPJ to the Company amounting to 9,300,917 shares with purchase price of USD1. Therefore, the ownerships of the Company in JICT became 51.00% from previously 48.90%.

Based on Deed of Decision of General Meeting of Shareholder of JICT No. 11 dated May 30, 2022, the shareholders agreed to such transfer of shares as mentioned above and amendmend of the JICT's article of association. The Deed has been notified to and approved by the Ministry of Law and Human Rights dated May 31, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT

Pada tanggal 5 Agustus 2014, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Pembayaran Premium dimana HPJ sepakat untuk melakukan pembayaran premium kepada Perusahaan sebesar USD200.000.000 sebagai imbalan atas tetap dilanjutkannya kerja sama usaha patungan Perusahaan dengan HPJ. Perjanjian ini berlaku efektif pada saat setiap dari persyaratan pendahuluan pada Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa telah dipenuhi (Catatan 49e). Pada tanggal 22 Juni 2015, Perusahaan dan HPJ mengadakan Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pembayaran Premium dimana jumlah premium yang dibayarkan oleh HPJ diubah menjadi sebesar USD215.000.000. Dalam keadaan tertentu dimana terjadinya pengakhiran secara lebih awal atas Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, maka premium harus dibayarkan kembali oleh Perusahaan kepada HPJ secara pro-rata. Pada tanggal 2 Juli 2015, Perusahaan telah menerima pembayaran premium tersebut.

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan dan HPJ sepakat mengenai tambahan premium sebesar USD17.940.000 yang harus dibayarkan oleh HPJ kepada Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) *Milestone* pertama sebesar USD8.940.000 pada saat penandatanganan amendemen-amendemen tersebut di atas.
- 2) *Milestone* kedua sebesar USD9.000.000 setelah yang lebih awal terjadi antara: (i) merger yang disepakati dan pengalihan saham yang diusulkan menjadi efektif secara hukum dan pengalihan atas aset Terminal 2 telah seluruhnya selesai; atau (ii) 10 tahun setelah penandatanganan amendemen-amendemen tersebut.

Perusahaan telah menerima pembayaran premium *milestone* pertama sebesar USD8.940.000 pada bulan April 2022 yang diamortisasi selama sisa masa Amendemen Perjanjian Pemberian Kuasa, yaitu sampai dengan 2039.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

h) Premium Payment Agreement - JICT

On August 5, 2014, the Company and HPJ entered into a Premium Payment Agreement, whereby HPJ agreed to pay premium to the Company amounting to USD200,000,000 as consideration for continuing the joint venture of the Company with HPJ. The Premium Payment Agreement will commence on the date on each of the condition precedent in the Authorization Agreement has been satisfied (Note 49e). On June 22, 2015, the Company and HPJ entered into Amendment Agreement to Premium Payment Agreement in which the amount of premium to be paid by HPJ was amended to USD215,000,000. In certain circumstances leading to early termination of the Amended Authorization Agreement, the premium shall be repaid by the Company to HPJ using a pro-rate basis. On July 2, 2015, the Company has received payment of the premium.

On March 30, 2022, the Company and HPJ agreed on additional premium of USD17,940,000 which should be paid by HPJ to the Company with terms as follows:

- 1) First milestone of USD8,940,000 at the signing of the above amendments.
- 2) Second milestone of USD9,000,000 after the earlier one occurs between: (i) the agreed merger and proposed share transfer become legally effective and the transfer of Terminal 2 assets is fully completed; or (ii) 10 years after the signing of the amendments.

The Company has received the first milestone premium payment of USD8,940,000 on April 2022 which is amortized over the remaining period of the Amendment of Authorization Agreement, which is until 2039.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

h) Perjanjian Pembayaran Premium - JICT (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan telah mencatat pendapatan yang berasal dari amortisasi premium masing-masing sebesar Rp89.446.718. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 saldo yang belum di amortisasi atas premium tersebut masing-masing sebesar Rp1.848.565.521 dan Rp1.967.827.813, dan dicatat sebagai bagian dari akun pendapatan diterima di muka pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

i) Perjanjian Pengalihan Aset - JICT

Pada tanggal 14 Desember 2015, Perusahaan dan JICT mengadakan Perjanjian Pengalihan Aset Terminal 2 dari JICT kepada Perusahaan dimana Perusahaan dan JICT sepakat untuk melakukan pengalihan aset-aset milik JICT yang terdapat di Terminal 2 kepada Perusahaan pada tanggal perjanjian ini. Atas pengalihan aset-aset tersebut, Perusahaan diharuskan melakukan pembayaran sebesar USD2.816.526, yang akan dibayarkan kepada JICT menggunakan mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 November 2015, yaitu sebesar Rp38.980.720.

Pada tanggal 30 Mei 2022, Perusahaan dan JICT telah menandatangani Amendemen Perjanjian Pengalihan Aset, diantaranya disepakati bahwa aset Terminal 2 belum dapat dialihkan secara fisik oleh JICT kepada Perusahaan berdasarkan Akta Pengalihan tanggal 14 Desember 2015 tersebut di atas karena Perusahaan belum melakukan pembayaran sebagaimana dipersyaratkan dalam Akta Pengalihan tersebut. Juga disepakati bahwa pengalihan aset Terminal 2 akan didasarkan pada *scrap value* sebesar Rp20,23 miliar sebagaimana ditentukan oleh penilai independen. Perusahaan telah melakukan pembayaran atas pengalihan aset Terminal 2 tersebut kepada JICT di tanggal 24 Juni 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

h) Premium Payment Agreement - JICT (continued)

For the year ended December 31, 2023 and 2022, the Company has recorded revenue from amortisation of premium amounting to Rp89,446,718, respectively. As of December 31, 2023 and 2022, the balance of unamortized premium amounted to Rp1,848,565,521 and Rp1,967,827,813, respectively, and was recorded as part of unearned revenue account in the consolidated statements of financial position.

i) Assets Transfer Agreement - JICT

On December 14, 2015, the Company and JICT entered into Terminal 2 Assets Transfer from JICT to the Company Agreement where the Company and JICT agreed to transfer assets owned by JICT at Terminal 2 to the Company on the date of this agreement. For the transfer of the assets, the Company is obliged to make payment amounting to USD2,816,526, which will be paid to JICT in Rupiah using BI middle rate as of November 30, 2015, amounted to Rp38,980,720.

On May 30, 2022, the Company and JICT have entered into Amendment to Asset Transfer Agreement, among others agreed that the transfer of Terminal 2 Assets can not be transferred physically from JICT to the Company based on the Assets Transfer Agreement dated December 14, 2015 as mentioned above because the Company has not paid as required in the Asset Transfer Agreement. It is also agreed that the transfer of Terminal 2 assets will be based on scrap value of Rp20.23 billion as determined by the independent appraisal. The Company has paid the Terminal 2 asset transfer to JICT on June 24, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

j) Perjanjian Pemegang Saham IPC TPK dan STMS

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapura ("STMS") menandatangani Perjanjian Pemegang Saham untuk Terminal Petikemas 1 dan Perjanjian Perubahannya pada tanggal 11 September 2014 dimana IPC TPK dan STMS akan mendirikan perusahaan dengan jumlah saham sebesar 1.000 saham yang terbagi menjadi 510 saham seri A yang dimiliki IPC TPK dan 490 saham seri B yang dimiliki STMS.

Perusahaan tersebut didirikan untuk menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian sehubungan dengan pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas 1 dan kegiatan lain sesuai dengan hukum yang berlaku sebagaimana disetujui oleh IPC TPK dan STMS.

Jika dalam suatu tahun buku, Perusahaan tersebut memiliki laba yang tersedia untuk didistribusikan maka distribusi akan dilakukan pertama untuk STMS hingga pengembalian modal yang diperbolehkan telah tercapai dan kedua dibagikan secara proporsional kepada STMS dan IPC TPK sesuai dengan kepemilikan saham masing-masing. Syarat dan ketentuan lainnya diatur dalam perjanjian.

Kepemilikan saham IPC TPK pada perusahaan yang didirikan tidak diikuti dengan pengendalian dan karenanya laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasi ke dalam laporan keuangan IPC TPK.

Perusahaan yang didirikan sehubungan dengan perjanjian tersebut di atas bernama PT New Priok Container Terminal One berdasarkan Akta No. 33 tanggal 28 Mei 2014.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

j) Shareholders Agreement IPC TPK and STMS

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., Singapore ("STMS") signed a Shareholders Agreement for Container Terminal 1 and the Amendment Agreement on September 11, 2014, wherein IPC TPK and STMS will establish a company with total shares amounting to 1,000 shares comprising of 510 series A Shares held by IPC TPK and 490 series B Shares held by STMS.

The company was set up to operate based on the Construction and Operation Agreement in connection with the operation and development of Container Terminal 1 and other activities in accordance with applicable law as agreed by IPC TPK and STMS.

If, in respect of any financial year, the Company has profit available for distribution then distribution will be made first for STMS until permitted equity return has been achieved and secondly distributed proportionally to STMS and IPC TPK in accordance with their respective ownerships. Other term and conditions are stipulated in the agreement.

IPC TPK's ownership in the company established is not followed by control and therefore, the company's financial statements are not consolidated in the IPC TPK's financial statements.

The company established in relation to the above agreement namely PT New Priok Container Terminal One based on Deed No. 33 dated May 28, 2014.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**k) Perjanjian Pinjaman - Sea Terminal
Management & Service Pte. Ltd., Singapura**

Pada tanggal 19 April 2014, IPC TPK dan Sea Terminal Management & Service Pte. Ltd., (STMS) menandatangani Perjanjian Pinjaman dimana STMS memberikan fasilitas pinjaman kepada IPC TPK untuk kepentingan pembayaran Saham Seri A pada NPCT1 sebesar USD15.096.000 dengan tingkat bunga tahunan 7%.

Fasilitas tersebut akan dibayarkan kembali melalui pengurangan modal pada NPCT1, dengan IPC TPK dan STMS sebagai pemegang sahamnya, dan dari dividen yang dapat dibagikan kepada IPC TPK. Seluruh bunga akan dibayarkan dari dividen IPC TPK.

Pada tanggal 11 September 2014, IPC TPK dan STMS menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman tertanggal 19 April 2014 untuk mengatur mengenai dilakukannya pembebanan bunga setiap tahun.

Pada tanggal 10 November 2016, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk merevisi tingkat bunga periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2018 menjadi 0%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, IPC TPK dan STMS menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang revisi tingkat bunga periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 menjadi 0%, lalu pada tanggal 31 Desember 2020, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2023, IPC TPK dan STMS kembali menandatangani kesepakatan untuk memperpanjang pengenaan bunga 0% untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2024.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**k) Loan Agreement - Sea Terminal
Management & Services Pte. Ltd.,
Singapore**

On April 19, 2014, IPC TPK and Sea Terminal Management & Services Pte. Ltd. (STMS) signed a Loan Agreement where STMS provides loan facilities to IPC TPK for the purpose of A Series Shares payments in NPCT1 amounting to USD15,096,000 with annual interest rate of 7%.

The facility will be repaid through reduction of capital in NPCT1, with IPC TPK and STMS as shareholders, and from dividends which can be distributed to IPC TPK. All interest will be paid from IPC TPK dividends.

On September 11, 2014, IPC TPK and STMS signed the Agreement Amendments to the Loan Agreement dated April 19, 2014 regarding interests that was to be charged per annum.

On November 10, 2016, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2016 to December 31, 2018 to become 0%.

As of December 31, 2018, IPC TPK and STMS signed an agreement to revise interest rate for period from January 1, 2019 to December 31, 2020 to become 0%, then on December 31, 2020, IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2021 to December 31, 2022. On January 1, 2023 IPC TPK and STMS re-signed the agreement to prolong the 0% interest period from January 1, 2023 to December 31, 2024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

I) Perjanjian Penggunaan Tanah - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

Pada tanggal 2 Maret 2012, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan Indofood atas penggunaan bagian tanah Hak Pengelolaan (HPL) milik Perusahaan sesuai Surat Perjanjian No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. Perjanjian ini mencakup pengelolaan tanah seluas 329.833 m² berlokasi di Jl. Sindang laut dan Jl. Raya Cilincing, Jakarta Utara dan berlaku selama 22 (dua puluh dua) tahun sampai dengan 31 Desember 2033.

Perjanjian kerjasama tersebut telah disetujui oleh Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-505/MBU/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Persetujuan Optimalisasi Tanah Perusahaan yang digunakan oleh Indofood.

Pendapatan yang diperoleh Perusahaan atas penggunaan lahan tersebut adalah sebesar Rp1.041.059.197 yang dibayar secara periodik selama 5 (lima) kali pembayaran dan pelunasan pembayaran ke 5 (lima) selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan setelah perjanjian ditandatangani. Perusahaan juga memperoleh pendapatan tambahan atas pengoperasian dermaga/jetty sebesar Rp104.260 per tahun yang dibayarkan setiap awal tahun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah nota tagihan diterima oleh Indofood.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, jumlah pembayaran yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp975.838.163. Pada tanggal 31 Desember 2023 and 2022, saldo yang belum diamortisasi atas penggunaan bagian tanah HPL masing-masing adalah sebesar Rp454,86 miliar dan Rp495,77 miliar (sebelum dikurangi dengan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

I) Land Usage Agreement - PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood)

On March 2, 2012, the Company entered into an agreement with Indofood for the use of a parcel of land under Rights to Manage (HPL) owned by the Company with Agreement No. HK.566/2/18/C.Tpk-12. The Agreement included land management with area of 329,833 m² which located at Jl. Sindang Laut and Jl. Raya Cilincing, North Jakarta and is valid for 22 (twenty two) years until December 31, 2033.

The agreement has been approved by the Minister of SOE through the letter No. S-505/MBU/2011 dated October 5, 2011 regarding Approval of Optimization of the Company's Land which is used by Indofood.

Revenue earned by the Company from the usage of land amounted to Rp1,041,059,197 and paid periodically for 5 (five) terms, the fifth payment will be settled at the latest 36 (thirty six) months after the agreement was signed. The Company also earned an additional revenue from jetty operations amounting to Rp104,260 annually which will be paid at the latest 7 (seven) work days after the invoice is received by Indofood.

Until December 31, 2023, the payment received by the Company amounted to Rp975,838,163. As of December 31, 2023, and 2022, the balance of unamortized use of a parcel of HPL land amounted to Rp454.86 billion and Rp495.77 billion, respectively, (before deducted by final income tax article 4(2)).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**m) Perjanjian Pembangunan Dermaga
Makassar New Port (MNP) Tahap I**

Perusahaan mengadakan Perjanjian Pembangunan Dermaga MNP Tahap IA dengan detail pekerjaan adalah sebagai berikut:

- Perjanjian pekerjaan Paket A mengenai pekerjaan reklamasi dan pembangunan dermaga MNP senilai Rp326.868.365 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 3 dari Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notaris di Cibubur, tanggal 3 Juni 2015 dengan jangka waktu selama 725 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum III No. 15/HK.301/7/Pl.IV-2018 tanggal 12 Juli 2018 menjadi senilai Rp345.785.871 dengan jangka waktu selama 1.227 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket B mengenai pekerjaan reklamasi, pengerukan, lapangan kontainer dan causeway MNP senilai Rp1.076.779.375 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 05 September 2016 dengan jangka waktu selama 830 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum II No. 1/HK.301/3/Pl.IV-2019 tanggal 15 Februari 2019 menjadi senilai Rp1.119.939.158 dengan jangka waktu selama 1.022 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket C mengenai pekerjaan pembangunan breakwater MNP senilai Rp226.725.699 dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) berdasarkan Akta No. 22 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 30 September 2016 dengan jangka waktu selama 600 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**m) Construction Agreement of Makassar New
Port (MNP) Quay Phase I**

The Company entered into a Construction Agreement of MNP Quay Phase IA, with details of work as follows:

- Agreement of work Package A regarding reclamation and construction of MNP Quay amounted to Rp326,868,365 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk based on Deed No. 3 from Grace Dameria Tiorina, S.H., M.Kn., Notary from Cibubur, dated June 3, 2015 with 725 calendar days period since the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum III No. 15/HK.301/7/Pl.IV-2018 dated July 12, 2018 with changes on the agreement amount into Rp345,785,871 and agreement period into 1,227 calendar days since the agreement was signed.
- Agreement of work Package B regarding reclamation of dredging work, container yard, and causeway of MNP amounted to Rp1,076,779,375 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 05 September 2016 with period of 830 calendar days since the agreement was signed.
- This agreement of work was last amended through Addendum II No. 1/HK. 301/3/Pl. IV-2019 dated February 15, 2019 with changes on the agreement amount into Rp1,119,939,158 and agreement period into 1,022 calendar days since from the agreement was signed.
- Agreement of work Package C regarding construction work of MNP breakwater amounted to Rp226,725,699 with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk - PT Bumi Karsa (KSO) based on Deed No. 22 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated 30 September 2016 with period of 600 calendar days since from the agreement was signed.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

m) Perjanjian Pembangunan Dermaga Makassar New Port (MNP) Tahap I (lanjutan)

- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum IV No. 3/HK.301/13/PI.IV-2019 tanggal 13 September 2019 dengan jangka waktu menjadi selama 1.160 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan Paket D mengenai pekerjaan bangunan fasilitas serta mekanikal dan elektrikal MNP senilai Rp258.089.700 dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta No. 30 dari Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, tanggal 31 Januari 2018 dengan jangka waktu selama 390 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.
- Perjanjian pekerjaan ini terakhir diubah dengan Addendum V No. 9/HK.301/10/PI.IV-2020 tanggal 04 September 2020 menjadi senilai Rp283.679.319 dengan jangka waktu selama 1.066 hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

n) Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda

Pada tanggal 20 Juli 2007, Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda dengan Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Samudera Palaran. Perjanjian ini berjangka waktu selama 50 tahun sejak masa uji coba, yaitu 3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian.

Dalam perjanjian, Perusahaan mendapatkan *management fee/compensation fee* sebesar 10% dari total pendapatan kotor dari hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran. Selain itu, Perusahaan juga menerima bagi hasil keuntungan sebesar persentase tertentu dari pendapatan kotor hasil pengoperasian Terminal Petikemas Palaran yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

m) Construction Agreement of Makassar New Port (MNP) Quay Phase I (continued)

- *This agreement of work was last amended through Addendum IV No. 3/HK.301/13/PI.IV-2019 dated September 13, 2019 with changes on the agreement period into 1,160 calendar days since the agreement was signed.*
- *Agreement of work Package D regarding construction of facility building including mechanical and electrical of MNP amounted to Rp258,089,700 with PT Adhi Karya (Persero) Tbk based on Deed No. 30 from Ahmad Tauzan Siata, S.H., M.Kn., Notary in Makassar, dated January 31, 2018 with period of 390 calendar days since from the agreement was signed.*
- *This agreement of work was last amended through Addendum V No. 9/HK.301/10/PI.IV-2020 dated September 04, 2020 with changes on agreement amount into Rp283,679,319 and agreement period into 1,066 calendar days since the agreement was signed.*

n) Cooperation Agreement for The Construction and Operation of The Palaran Container Terminal Samarinda Port

On July 20, 2007, the Company entered into a cooperation agreement for the construction and operation of the Palaran Container Terminal, Samarinda Port with the Samarinda City Government and PT Pelabuhan Samudera Palaran. This agreement has a term of 50 years from the trial period, which was 3 years since the contract signing.

In this agreement, the Company received the management fee/compensation fee amounting to 10% of gross revenue of operating Palaran Container Terminal. In addition, the Company also received the profit sharing at certain percentage from gross revenue of operating Palaran Container Terminal as regulated in this agreement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

n) Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas Palaran Pelabuhan Samarinda (lanjutan)

Pada akhir perjanjian, Perusahaan berhak memperoleh kepemilikan bangunan infrastruktur Terminal Petikemas Palaran dari PT Pelabuhan Samudera Palaran.

o) Perjanjian Pinjaman Biaya Pergantian Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing

Berdasarkan Akta Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk Penggantian Pembelian Tanah dalam Rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Cibitung-Cilincing antara Badan Layanan Umum - Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol ("BLU Set-BPJT") dan CTP dari Notaris Ny. Trie Sulistiowarni, S.H., No. 2 tanggal 4 Februari 2013, CTP memperoleh pinjaman untuk penggantian pembelian tanah dengan batas maksimal biaya pergantian Rp288.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Seksi I: Cibitung - Telaga Asih sebesar Rp11.519.488.
2. Seksi II: Telaga Asih - Tembalang sebesar Rp87.445.713.
3. Seksi III: Tembalang - Tarumajaya sebesar Rp118.906.715.
4. Seksi IV: Tarumajaya - Cilincing sebesar Rp70.128.083.

Jangka waktu pinjaman adalah sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah. Nilai tambah pinjaman (bunga) sebesar tingkat bunga Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") ditambah 1%. Nilai tambah diperhitungkan setiap bulan dan wajib dibayar setiap 3 (tiga) bulan. Denda tunggakan pembayaran nilai tambah sebesar 2% per bulan dari nilai tambah yang tertunggak.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp464.538.398 dan Rp466.538.398.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

n) Cooperation Agreement for The Construction and Operation of The Palaran Container Terminal Samarinda Port (continued)

At the end of the agreement, the Company has the right to acquire ownership of the Palaran Container Terminal infrastructure building from PT Pelabuhan Samudera Palaran.

o) Loan Agreement for Cibitung-Cilincing Toll Road Project Replacement Cost

Based on the Notarial Deed No. 2 dated February 4, 2013 by Mrs. Trie Sulistiowarni, S.H., a Notary in Jakarta, CTP has signed an agreement with Ministry of Public Works & Human Settlements - Public Service Agencies Secretariat of Toll Road Regulatory Body ("BLU Set-BPJT"). CTP obtained expense reimbursement loan on the purchase of land for Cibitung-Cilincing toll project for a maximum expense reimbursement amount of Rp288,000,000, with the following details:

1. Section 1: Cibitung - Telaga Asih amounting to Rp11,519,488.
2. Section 2: Telaga Asih - Tembalang amounting to Rp87,445,713.
3. Section 3: Tembalang - Tarumajaya amounting to Rp118,906,715.
4. Section 4: Tarumajaya - Cilincing amounting to Rp70,128,083.

The term of the loan is from the date the agreement was signed until the completion of the land acquisition process. The added value of the loan (interest) is the interest rate of the Deposit Insurance Corporation ("LPS") plus 1%. Value added is calculated every month and must be paid every 3 (three) months. The penalty for arrears in payment of value added is 2% per month of the value added in arrears.

As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balance of the payable amounting to Rp464,538,398 and Rp466,538,398, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**p) Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan
Infrastruktur BMS dan PT Freeport
Indonesia (PTFI)**

Pada tanggal 3 September 2021, BMS dan PT Freeport Indonesia ("PTFI") mengadakan perjanjian konstruksi dan penggunaan infrastruktur dimana BMS merancang, mengadakan, membangun, menguji dan melakukan uji kelayakan operasi atas pekerjaan sipil pada infrastruktur BMS sesuai dengan desain final, yang terdiri dari dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*), yang pelaksanaannya sesuai jadwal konstruksi yang tertuang di jadwal perjanjian, yaitu Desember 2021 - November 2022 untuk SWI, Desember 2021 - Desember 2022 untuk *trestle* dan jembatan, dan Desember 2021 - April 2023 untuk dermaga.

Pada tanggal 11 Mei 2023, BMS telah menerima Sertifikat Penerimaan Akhir dari PTFI dengan nomor MS-DD-0000-DCM-LTR-8606 dan mulai menerima *capacity payment*.

Beberapa ketentuan penting dalam perjanjian ini antara lain:

1. *Lease term* untuk perjanjian ini adalah 40 tahun terdiri dari 20 tahun jangka waktu awal ditambah 10 tahun perpanjangan pertama dan 10 tahun perpanjangan kedua.
2. Terdapat penalti yang akan dikenakan apabila PTFI membatalkan sewa pada 10 tahun awal dalam jangka waktu awal 20 tahun.
3. Pembatalan perjanjian harus disetujui kedua belah pihak atau tidak dapat dibatalkan sepihak saja, serta wajib memberikan pemberitahuan tertulis 180 hari sebelum tanggal pembatalan.
4. BMS membangun dermaga, trestle, jembatan, dan SWI (*sea water intake*). Freeport membangun alat-alat untuk menunjang operasionalnya seperti, *conveyer*, pipa, dan alat bongkar muat.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**p) BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI)
Infrastructure Construction and Use
Agreement**

On September 3, 2021, BMS and PT Freeport Indonesia ("PTFI") entered into Construction and Utilisation Agreement where BMS is responsible for designing, procuring, constructing, testing, and conducting operational feasibility tests on civil works on BMS infrastructure, such as the wharf, trestle, bridge, and SWI (*sea water intake*), which will be put into operation according to the agreement construction schedule, which is December 2021 to November 2022 for the SWI, December 2021 to December 2022 for the trestle and bridge, and December 2021 to April 2023 for the wharf.

On May 11, 2023, BMS has received Final Acceptance Certificate from PTFI with document number MS-DD-0000-DCM-LTR-8606 and began receiving its *capacity payment*.

The following are key points in this agreement:

1. The lease term for this agreement is 40 years, which includes a 20-year initial term plus ten years for the first and ten years for the second extensions.
2. If PTFI terminates the lease during the first ten years of the initial 20-year term, a penalty will be applied.
3. The agreement cannot be canceled unilaterally, and written notice must be received 180 days before the cancellation date. Both parties must agree to the cancellation.
4. BMS will build the wharf, bridge, trestle, and SWI (*sea water intake*). Freeport builds equipment to support its operations, such as conveyers, pipes and loading and unloading equipment.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

p) Perjanjian Konstruksi dan Penggunaan Infrastruktur BMS dan PT Freeport Indonesia (PTFI) (lanjutan)

Terdapat arus kas masuk yang diterima oleh BMS atas proyek ini:

- *Capacity payment* merupakan kas yang diterima oleh BMS karena memberikan hak eksklusif penggunaan infrastruktur kepada PTFI, di mana *capacity payment* dapat diterima setelah sertifikat penerimaan akhir diterbitkan, estimasi pada April 2023. BMS akan menerima sebesar USD7.936.000 per tahunnya selama 20 tahun, untuk 10 tahun perpanjangan pertama BMS akan menerima USD9.920.000/tahun, masa perpanjangan 10 tahun kedua adalah USD12.400.000/tahun. Apabila PTFI melakukan pembatalan sewa selama masa sewa 10 tahun (dalam jangka waktu sewa 20 tahun) maka akan dikenakan denda sesuai Perjanjian Konstruksi pasal 14.8.
- *Milestone I* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun pertama sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan pada periode 12 bulan sejak tanggal 3 September 2021. *Milestone II* yaitu kas yang diterima atas pencapaian pembangunan tahun kedua sebesar 12% dari keseluruhan biaya konstruksi yang dikeluarkan BMS untuk periode 24 bulan sejak 3 September 2021. Sampai dengan periode November 2022, BMS telah menerima *milestone payment* sebesar Rp55 miliar atas *Milestone I* yang dengan progres penyelesaian telah mencapai 70,476%. Apabila BMS mengalami keterlambatan dalam penyerahan akhir aset di mana tidak sesuai dengan jadwal konstruksi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp700 juta per hari, maksimal Rp63 miliar (Perjanjian Konstruksi pasal 4.2.3).
- Kompensasi sebesar Rp36 miliar, merupakan kompensasi tambahan untuk biaya konstruksi. BMS telah menerima kompensasi ini pada tanggal 30 September 2022.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

p) BMS and PT Freeport Indonesia (PTFI) Infrastructure Construction and Use Agreement (continued)

There are cash inflows received by BMS for this project:

- In exchange for granting PTFI exclusive use of infrastructure, BMS will receive capacity payments once the final acceptance certificate is issued in April 2023. BMS will earn USD7,936,000 annually for the next twenty years, USD9,920,000 annually for the first ten-year extension, and USD12,400,000 annually for the second 10 year extension. If PTFI terminates the lease within the initial ten years, Article 14.8 of the Construction and Use Agreement about the penalty will apply (within the 20 year lease duration).
- *Milestone I* is the cash payment of 12% of total construction expenses incurred over a 12-month period beginning on September 3, 2021, for the first year's construction. *Milestone II* is the payment for the second year's construction of 12% of BMS's total construction expenses for a period of 24 months beginning September 3, 2021. BMS has received Rp55 billion for *Milestone I* on November 17, 2022, according to the construction progress up to 70.476% by November 2022. BMS will be penalized Rp700 million per day, up to a maximum of Rp63 billion, if the final handover of assets is delayed and not in accordance with the construction schedule (Construction and Use Agreement article 4.2.3).
- The additional compensation for construction costs is Rp36 billion. This payment has been received by BMS on September 30, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**q) Perjanjian Pembangunan Jalan Tol
Cibitung-Cilincing**

CTP menunjuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing dengan nilai kontrak Rp5.591.934.626 (termasuk PPN).

Perjanjian ini telah mengalami beberapa addendum dengan addendum yang terakhir yaitu addendum XV pada tanggal 30 September 2021 dengan nilai kontrak Rp8.638.699.442 (termasuk PPN) dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung mulai dari tanggal ditandatangani kontrak yakni 7 Juli 2017 sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir yang terbagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi I Interchange Cibitung sampai dengan Interchange Telaga Asih (STA -0+440 s/d STA 2+700), seksi II Interchange Telaga Asih sampai dengan Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), seksi III Interchange Tambelang sampai dengan Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan seksi IV Interchange Tarumajaya sampai dengan Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

Pada tanggal 29 Juli 2022, mengubah nilai kontrak menjadi sebesar Rp9.351.671.626 (termasuk PPN), dan pada tanggal 27 Januari 2023 mengubah target penyelesaian menjadi 10 Maret 2023.

CTP juga menunjuk PT Waskita Beton Precast Tbk berdasarkan Perjanjian No. CTP-ADM-XII-2017-WBP-00001 tanggal 23 Desember 2017 sebagai kontraktor pembangunan jalan tol Cibitung - Cilincing (STA 30+200 s/d STA 32+800) dengan nilai kontrak Rp635.173.781 (termasuk PPN).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**q) Construction Agreement of Cibitung-
Cilincing Toll Road**

CTP appointed PT Waskita Karya (Persero) Tbk based on Agreement No. 007/KONTRAK/WK-CTP/VII/2017 as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road with a contract value of Rp5,591,934,626 (including VAT).

This agreement has been amended several times, the latest addendum of which is addendum XV dated September 30, 2021 with a contract value of Rp8,638,699,442 (including VAT) with the exercise period from the date of signing which was on July 7, 2017 until the signing of Final Hand Over which divided into 4 sections, which are section I Interchange Cibitung - Interchange Telaga Asih (STA -0+440 s/d STA 2+700), section II Interchange Telaga Asih - Interchange Tambelang (STA 2+700 s/d STA 13+140), section III Interchange Tambelang - Interchange Tarumajaya (STA 13+140 s/d STA 27+150), dan section IV Interchange Tarumajaya - Interchange Cilincing (STA 27+150 s/d STA 34+385).

On July 29, 2022, the contract value was changed to Rp9,351,671,626 (including VAT), and on January 27, 2023, the completion target was changed to March 10, 2023.

CTP appointed PT Waskita Beton Precast Tbk based on Agreement No. CTP- ADM-XII-2017-WBP-00001 dated on December 23, 2017, as a construction contractor for the Cibitung - Cilincing toll road (STA 30+200 s/d STA 32+800) with a contract value of Rp635,173,781 (including VAT).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

q) Perjanjian Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (lanjutan)

Berdasarkan Addendum V Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 tanggal 25 November 2020 nilai kontrak menjadi Rp422.155.854 (termasuk PPN).

Berdasarkan Addendum VII Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Cibitung - Cilincing dengan PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 tanggal 31 Mei 2021 jangka waktu pelaksanaan menjadi 1.369 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir pada tanggal 29 Juli 2022 dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp423.273.100 (termasuk PPN) dan mengubah jangka waktu pelaksanaan menjadi 1.775 hari kalender terhitung sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Pada tanggal 4 Agustus 2021, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance terkait Pekerjaan Jembatan Overpass pada Seksi II Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp97.280.699 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan pada tanggal 30 Mei 2022, dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp100.766.233 (termasuk PPN) dan untuk mengubah jangka waktu kontrak menjadi 210 hari berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

q) Construction Agreement of Cibitung-Cilincing Toll Road (continued)

Based on Addendum V of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-XI-2020-WBP-0000006 dated November 25, 2020, the contract value is Rp422,155,854 (including VAT).

Based on Addendum VII of the Contract for construction of Cibitung - Cilincing toll road with PT Waskita Beton Precast Tbk (STA 30+200 s/d 32+800) No. CTP-ADM-V-2021-WBP-0000008 dated May 31, 2021, the period of execution of the work is 1,369 calendar days commencing from December 21, 2017 up to September 30, 2021.

This agreement has been amended several times, most recently on July 29, 2022, wherein both parties agreed to change the total contract value to become Rp423,273,100 (including VAT) and to change the implementation period to become 1,775 days from December 21, 2017 to October 31, 2022.

On August 4, 2021, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Maintenance regarding the work of overpass at the Section II Cibitung-Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value amounting to Rp97,280,699 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work.

This agreement has been amended on May 30, 2022, wherein both parties agreed to change the contract value to become Rp100,766,233 (including VAT), and to change the term of the contract to become 210 days from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**q) Perjanjian Pembangunan Jalan Tol
Cibitung-Cilincing (lanjutan)**

Pada tanggal 21 Februari 2023, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tollroad Maintenance terkait Pekerjaan Pengaspalan dan Expansion Joint Pada Seksi IV Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp9.529.163.000 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (*Final Hand Over*) hasil pekerjaan.

Perjanjian ini telah mengalami perubahan pada tanggal 8 Maret 2023, dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp14.780.943 (termasuk PPN).

**r) Perjanjian Kerjasama Khusus
Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub
(BMTH)**

Pada tanggal 27 Mei 2022, Perusahaan membuat kesepakatan bersama dengan SPSL mengenai pelaksanaan kerjasama khusus pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang menjelaskan perjanjian dengan jenis kontrak biaya tambah imbalan jasa sebesar Rp18.186.625 di area Pelabuhan Benoa, Bali. Perusahaan menyetujui melakukan pembayaran secara bertahap kepada SPSL dengan *management fee* sebesar 15% dari komponen biaya langsung non personil dan biaya penunjang lainnya setiap akhir triwulan. Jangka waktu perjanjian ini selama satu tahun dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan kesepakatan.

Pada tanggal 11 Mei 2023, SPSL menandatangani berita acara atas Penyelesaian Kontrak Kerjasama Khusus Manajemen Proyek BMTH dengan Perusahaan. Berdasarkan berita acara tersebut, Kerjasama Khusus Manajemen Proyek BMTH yang dikelola SPSL berakhir pada tanggal 6 Juni 2023 dan tidak dilakukan perpanjangan kerjasama.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**q) Construction Agreement of Cibitung-
Cilincing Toll Road (continued)**

On February 21, 2023, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Maintenance regarding Asphalt Work and Expansion joints on Section IV of the Cibitung-Cilincing Toll Road with a contract value of Rp9,529,163,000 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Minutes of Final Handover of the Work are signed.

This agreement was amended on March 8, 2023, when the parties agreed to change the contract value to Rp14,780,943 (including VAT).

**r) Bali Maritime Tourism Hub Construction
Special Cooperation Agreement**

On May 27, 2022, the Company entered into a joint agreement with SPSL regarding the implementation of a special cooperation in the development of Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) which explained that agreement with the cost plus fee contract of Rp18,186,625 in the Benoa Port Area, Bali. The Company agreed to make incremental payments to SPSL with a management fee 15% of non-personnel direct cost component and other support cost every end of the quarter. The term of this agreement is one year and can be extended under the agreement.

On May 11, 2023, SPSL signed a memorandum of completion of the the Cooperation Agreement for the Management of the BMTH with the Company. Based on the memorandum, Agreement for the Management of the BMTH, managed by SPSL, ended on June 6, 2023, and there is no extension of cooperation.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s) Perjanjian Proyek Pembangunan Pelindo Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Kontraktor Terintegrasi Rancang Bangun (*Design and Build*) Proyek Pembangunan Pelindo Tower tanggal 6 Desember 2018 antara MMI dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP"), MMI mempekerjakan PP untuk melaksanakan proyek pembangunan Maritime Tower. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 730 hari. Nilai kontrak adalah sebesar Rp664,29 miliar (termasuk PPN) yang akan dibayarkan berdasarkan progres fisik pekerjaan setiap bulan.

Pada tanggal 20 Desember 2018, MMI telah melakukan pembayaran uang muka kepada PP sebesar Rp60,39 miliar belum termasuk PPN dan disajikan sebagai uang muka pembangunan aset tetap dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Berdasarkan addendum tanggal 26 November 2020, MMI dan PP sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 730 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Desember 2020, diperpanjang menjadi 993 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Agustus 2021, serta nilai pekerjaan berubah dari Rp664,29 miliar (termasuk PPN) menjadi Rp706,13 miliar (termasuk PPN).

Berdasarkan addendum No. KS.02/6/12/1/A1.MMI-18 tanggal 16 Agustus 2021, MMI dan PP sepakat untuk menambah dan mengubah beberapa pasal dalam perjanjian, diantaranya, jangka waktu perjanjian adalah selama 993 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 31 Agustus 2021, diperpanjang menjadi 1.023 hari dengan penyerahan pekerjaan selambat-lambatnya 30 September 2021.

Berdasarkan berita acara serah terima pertama pekerjaan pelaksanaan No. 705.1/C-139/18/FNC/IX/2021 tanggal 30 September 2021, PP menyerahkan kepada MMI seluruh pekerjaan pelaksanaan untuk pengadaan barang dan jasa kontraktor terintegrasi rancang bangun (*design and build*) proyek pembangunan Maritime Tower.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

s) Construction of Pelindo Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Based on Procurement Agreement on Integrated Design and Build of Goods and Contractor Services for Pelindo Tower Construction Project dated December 6, 2018, between MMI and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk ("PP"), MMI engaged PP to conduct the construction of Maritime Tower. The period of work is 730 days. The contract price is Rp664.29 billion (including VAT) which shall be paid based on monthly physical progress.

On December 20, 2018, MMI paid advances to PP amounting to Rp60.39 billion excluding VAT and presented as advance for construction of fixed assets in the consolidated statement of financial position.

Based on addendum dated November 26, 2020, MMI and PP agreed to add and change several articles in the agreement, among others, the term of agreement is 730 days with the handover of the construction work not later than December 31, 2020, extended to 993 days with the handover not later than August 31, 2021, and the contract price change from Rp664.29 billion (including VAT) to Rp706.13 billion (including VAT).

Based on addendum No. KS.02/6/12/1/A1.MMI-18 dated August 16, 2021, MMI and PP agreed to add and change several articles in the agreement, among others, the term of agreement is 993 days with the handover of the construction work not later than August 31, 2021, extended to 1,023 days with the handover not later than September 30, 2021.

Based on the first handover minutes of work implementation No. 705.1/C-139/18/FNC/IX/2021 dated September 30, 2021, PP handed over to MMI all implementation work for the procurement of goods and services of an integrated contractor for design and build of the Maritime Tower project.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

s) Perjanjian Proyek Pembangunan Pelindo Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (lanjutan)

Berdasarkan berita acara serah terima kedua pekerjaan pelaksanaan No. 242.2/C-139/18/FNC/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022, PP menyerahkan kepada MMI seluruh hasil perbaikan pekerjaan yang di timbul selama masa pemeliharaan Maritime Tower.

MMI tidak melakukan perpanjangan perjanjian dengan PP, dan seluruh kewajiban sudah diselesaikan oleh MMI.

t) Garongkong

Pada tanggal 14 Juni 2022, Perusahaan dan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan barang milik negara bersifat khusus dalam rangka penyediaan infrastruktur pada kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas II Garongkong.

Ketentuan-ketentuan penting dalam Perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

- Perusahaan berhak mengoperasikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan jasa kepelabuhanan di area pelabuhan Garongkong dengan skema Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara.
- Perusahaan diharuskan untuk membayar kontribusi tetap sebesar Rp2,66 miliar per tahun yang selanjutnya naik setiap tahun sebesar 5%, dan melakukan pembayaran pembagian keuntungan sebesar 5,25% dari pendapatan. Perusahaan juga diwajibkan untuk melakukan investasi awal dengan total sebesar Rp739,83 miliar selama 9 tahun pertama.
- Jangka waktu perjanjian adalah selama 50 tahun, terhitung sejak 14 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.

49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

s) Construction of Pelindo Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (continued)

Based on the second handover minutes of work implementation No. 242.2/C-139/18/FNC/XII/2022 dated December 22, 2022, PP handed over to MMI all the results of corrective work carried out during the maintenance period of the Maritime Tower.

MMI did not extend the agreement with PP, and all obligations have been completed by MMI.

t) Garongkong

On June 14, 2022, the Company and Ministry of Transportation Directorate of Sea Transportation entered into a cooperation agreement regarding the use of special state property in the context of providing infrastructure at the unit management office of class II Garongkong port .

Important provisions in the Agreement are as follows:

- The company has the right to operate and carry out port service activities in the Garongkong port area under the State Property Utilization Cooperation scheme.
- The Company is required to pay a fixed contribution amounting to Rp2.66 billion per annum which will increase by 5% annually, and makes a profit sharing payment of 5.25% from the revenues. The Company is also required to make an initial investment totaling Rp739.83 billion for the first 9 years.
- The term of the agreement is 50 years, starting from June 14, 2022 and can be extended based on a written application by the Company to the Ministry of Sea Transportation no later than 3 months before the end of the agreement period.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

t) Garongkong (lanjutan)

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan belum melakukan investasi sesuai yang disepakati dalam perjanjian karena kinerja Garongkong yang merugi. Pada tanggal 31 Juli 2023, Perusahaan menunjuk konsultan PT Yuchi Kaji Tama (pihak ketiga) untuk melakukan kajian riviur kerjasama Pelabuhan Garongkong untuk rekomendasi kedepan. Hasil kajian riviur tersebut telah terbit pada 20 Maret 2024. Sampai dengan laporan keuangan konsolidasian ini terbit, Perusahaan masih melakukan riviur atas kajian tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.

u) Perjanjian Kerja Sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Pada tanggal 8 Februari 2023, Perusahaan melakukan perjanjian kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) tentang Layanan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pengelolaan dana PPIP karyawan Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perusahaan berhak menentukan usia pensiun normal dan mengubah pilihan paket investasi, serta berhak menerima pemberitahuan mengenai hasil pengelolaan dana setiap bulan.
- Perusahaan juga dapat menyampaikan perubahan dan penambahan daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran, serta karyawan Perusahaan memperoleh manfaat perlindungan jiwa dengan uang pertanggungan jiwa senilai Rp10.000.000 dan tidak dikenakan premi dan/atau biaya apapun.
- Perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan iuran untuk dan atas nama karyawan Perusahaan serta daftar rincian data karyawan dan jumlah iuran kepada DPLK BNI.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

t) Garongkong (continued)

As of December 31, 2023, the Company has not made the investment as agreed in the agreement due to Garongkong's loss-making performance. On July 31 2023, the Company appointed consultant PT Yuchi Kaji Tama (third party) to conduct a review study of the Garongkong Port collaboration for future recommendations. The results of the review study were published on March 20, 2024. Until this consolidated financial report is published, the Company is still conducting a review of the review study to determine the next steps.

u) Cooperation agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) regarding Defined Contribution Pension Program Services (PPIP)

On February 8, 2023, the Company entered into a cooperation agreement with Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) regarding Defined Contribution Pension Program Services (PPIP).

The scope of this agreement is the management of PPIP funds of the Company's employee, with the following conditions:

- *The Company has the right to determine the normal retirement age and change the choice of investment packages, and has the right to receive notifications about the results of fund management on monthly basis.*
- *The Companies can also submit changes and additions to the list of employee data and the amount of contributions, and the Company's employees receive life protection benefits with a sum of life insurance amounting to Rp10,000,000 and are not subject to any premiums and/or fees.*
- *The Company are required to deposit contributions for and on behalf of the Company's employees as well as a detailed list of employee data and the amount of contributions to DPLK BNI.*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**v) Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa
Layanan Operasi dan Pemeliharaan**

Pada tanggal 23 Desember 2019, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Jasamarga Tol Road Operator terkait Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Operasi dan Pemeliharaan Pada Jalan Tol Cibitung-Cilincing dengan nilai kontrak Rp244.082.023 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Pengakhiran Kontrak.

Pada tanggal 23 Maret 2022, kontrak ini diamendemen dimana para pihak sepakat untuk mengubah nilai kontrak menjadi Rp125.494.149 (termasuk PPN).

Total biaya yang dibayarkan oleh CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing berjumlah Rp10.687.968 dan Rp12.771.420, yang dicatat sebagai biaya jasa.

**w) Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP**

Pada tanggal 15 Juni 2021, CTP mengadakan perjanjian dengan PT Mobyco Magno Indonesia, No. CTP-ADM-CTR-VI-2021-KTR-00001, terkait Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP, Kantor Operasional, dan Bangunan Penunjang Lainnya dengan nilai kontrak Rp50.476.800.000 (termasuk PPN). Jangka waktu kontrak tersebut berlaku sejak tanggal ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Final Hand Over) hasil pekerjaan. Jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan adalah 180 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja.

Berdasarkan Addendum I No. CTP-ADM-CTR-XII-2021-KTR-00002 tanggal 10 Desember 2021 jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan (construction period) menjadi 230 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**v) Agreement of Procurement of Operating
and Maintenance Service**

On December 23, 2019, CTP entered into an agreement with PT Jasamarga Tollroad Operator regarding the work of Procurement of Operating and Maintenance Service at the Cibitung-Cilincing Toll Road Construction Project with a contract value of Rp244,082,023 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Minutes of Termination are signed.

On March 23, 2022, this contract was amended wherein both parties agreed to change the contract value to become Rp125,494,149 (including VAT).

The total expenses paid by CTP for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to Rp10,687,968 and Rp12,771,420, respectively, which are recorded under cost of services.

**w) Agreement for CTP Head Office Building
Construction Services**

On June 15, 2021, CTP entered into an agreement with PT Mobyco Magno Indonesia regarding Head Office, Operational Office, and Other Supporting Buildings of CTP, Construction Services with a contract value of Rp50,476,800,000 (including VAT). The term of the contract is valid from the date the contract is signed until the Final Hand Over of work. The construction period is 180 calendar days commencing after the date of issuance of better work to Proceed ("SPMK").

Based on Addendum I No. CTP-ADM-CTR-XII-2021-KTR-00002 dated December 10, 2021, the construction period will be 230 calendar days from the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

**w) Perjanjian Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Gedung Kantor Pusat CTP
(lanjutan)**

Berdasarkan Addendum II No. CTP-ADM-CTR-I-2022-KTR-00003 tanggal 28 Januari 2022 nilai kontrak menjadi Rp32.058.124.000 (belum termasuk PPN) dan jangka waktu masa pelaksanaan pekerjaan (construction period) menjadi 319 hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

x) Perjanjian Konstruksi dan Operasi BNCT

Pada tanggal 27 September 2023, PTP1 dan BNCT menandatangani Perjanjian Konstruksi dan Operasi ("COA") - Belawan New Container Terminal dimana PTP1, pada tanggal mulai, akan menyerahkan hak atas:

1. Lokasi Terminal Petikemas Belawan Fase I dan Fase II;
2. Seluruh peralatan awal yang berkaitan dengan kegiatan operasional terminal.

Selain itu, PTP1 juga memberikan, selama jangka waktu perjanjian, hak untuk:

1. Membangun dan menjalankan kegiatan operasional terminal;
2. Menjalankan usaha sesuai dengan Rencana Usaha Perpanjangan jika ada perpanjangan;
3. Menempati dan menggunakan lokasi terminal untuk kegiatan usaha;
4. Berbagi penggunaan akses jalan Pelindo;
5. Menggunakan peralatan awal yang tersedia.

Atas perjanjian ini, BNCT diwajibkan untuk melakukan pembayaran Uang Muka Sewa sebesar USD70.000.000 (nilai penuh) ke rekening escrow. Selain itu, BNCT diwajibkan untuk membayar sewa lokasi per triwulan untuk periode sejak tanggal mulai hingga tanggal penyesuaian sewa lokasi triwulan pertama dalam rupiah yang setara dengan USD8.750.000 (nilai penuh) pada nilai tukar. Setelah tanggal penyesuaian pertama, BNCT harus membayar kepada PTP1 dalam rupiah yang setara dengan USD10.000.000 (nilai penuh) pada nilai tukar.

Periode perjanjian ini adalah 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan periode 20 (dua puluh) tahun berikutnya.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

**w) Agreement for CTP Head Office Building
Construction Services (continued)**

Based on Addendum II No. CTP-ADM-CTR-I-2022-KTR-00003 dated January 28, 2022 the contract value is Rp32,058,124,000 (excluding VAT) and the construction period is 319 calendar days from the issuance of the Work Commencement Order (SPMK).

**x) Construction and Operation Agreement
BNCT**

On September 27, 2023, PTP1 and BNCT entered into the Construction and Operation Agreement ("COA") - Belawan New Container Terminal whereby PTP1, on the commencement date, will assign the rights to:

1. Location of Belawan Container Terminal Phase I and Phase II;
2. All initial equipments related to terminal operations.

In addition, PTP1 also grants, during the term of the agreement, the rights to:

1. Build and conduct terminal operation activities;
2. Conduct business in accordance with the Extension Business Plan if there is an extension;
3. Occupy and use the terminal location for business activities;
4. Share the Pelindo road access usage;
5. Use initial equipment available.

For this agreement, BNCT is required to pay Advanced Site Rent ("ASR") fee of USD70,000,000 (full amount) into an escrow account. In addition, BNCT is required to pay Quarterly Site Rent ("QSR") for the period from the commencement date to the first quarterly site rent adjustment date in rupiah equivalent to USD8,750,000 (full amount) at the exchange rate. After the first adjustment date, BNCT must pay to PTP1 in rupiah equivalent to USD10,000,000 (full amount) at the exchange rate.

The period of this agreement is 30 (thirty) years and may be extended for up to a further period of 20 (twenty) years.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

49. PERJANJIAN SIGNIFIKAN LAINNYA (lanjutan)

y) Perjanjian Pemanfaatan Dermaga - BNCT

Pada tanggal 27 September 2023, PTP1 dan BNCT menandatangani Perjanjian Pemanfaatan Dermaga ("WUA") – Terminal Petikemas Belawan Internasional ("TPKB") dengan jangka waktu perjanjian selama 6 (enam) tahun. Dalam perjanjian ini PTP1, pada tanggal mulai, akan menyerahkan hak atas:

1. Lokasi TPKB;
2. Seluruh peralatan awal yang berkaitan dengan kegiatan operasional terminal.

Selain itu, PTP1 juga memberikan, selama jangka waktu perjanjian, hak untuk:

1. Membangun dan menjalankan kegiatan operasional terminal;
2. Menempati dan menggunakan lokasi terminal untuk kegiatan usaha;
3. Berbagi hak untuk menggunakan atau menempati yang manapun dari Fasilitas Bersama;
4. Berbagi penggunaan akses jalan Pelindo dan gerbang akses utama;
5. Menggunakan peralatan awal, jaringan TI dan perangkat keras yang tersedia.

50. PERKARA HUKUM

a) Gugatan dari Sapriadi dkk atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Sapriadi dkk mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan nomor register 95/Pdt.G/2021/PN.KIS di Pengadilan Negeri Kisaran. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan penggugat atas nilai ganti rugi tanah yang diberikan oleh Perusahaan atas pengadaan tanah untuk pembangunan Terminal Multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung.

Pada tanggal 8 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, memutus perkara tersebut, dengan amar putusan:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar baya perkara sejumlah Rp2.024.

**49. OTHER SIGNIFICANT AGREEMENTS
(continued)**

y) Wharf Utilization Agreement - BNCT

On September 27, 2023, PTP1 and BNCT signed Wharf Utilization Agreement ("WUA") - Belawan International Container Terminal ("BICT") with period of the agreement is 6 (six) years. Under this agreement PTP1, on the commencement date, will grants the rights of:

1. Location of BICT;
2. All initial equipment related to terminal operations.

In addition, PTP1 also grants, during the term of the agreement, the rights to:

1. Build and conduct terminal operation activities;
2. Occupy and use the terminal premises for business activities;
3. Occupy and use the terminal location for business activities;
4. Share the Pelindo road access and main gate access usage;
5. Use initial equipment, IT network and hardware equipment available.

50. LAWSUIT

a) The lawsuit from Sapriadi et al to claim for compensation for the construction of the Kuala Tanjung Port

Sapriadi et al filed a lawsuit against the Company with registration number 95/Pdt.G/2021/PN.KIS at the Kisaran District Court. The lawsuit regarding to the plaintiff's objection to the value of land compensation provided by the Company for land acquisition for the construction of the Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung.

On March 8, 2022, the Panel of Judges at the Kisaran District Court decided on this case, with the verdict:

- a. Declare that the plaintiff's lawsuit is unacceptable (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Punish the Plaintiff to pay court fees in the amount of Rp2,024.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

a) Gugatan dari Sapriadi dkk atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung (lanjutan)

Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 5 April 2022.

Kemudian, penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding melalui kepanitraan Pengadilan Negeri kisaran kepada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Juni 2022.

Pada tanggal 7 September 2022, perkara telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan nomor register 415/Pdt/2022/PT MDN dengan amar putusan yang intinya menerima permohonan banding, yang mana menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 95/Pdt.G/2021/PN Kis.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana Relaas Pemberitahuan pernyataan kasasi dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Oktober 2022. Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi pada tanggal 9 November 2022.

Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b) Gugatan dari Ramadhan Abadi atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung

Ramadhan Abadi mengajukan gugatan kepada Perusahaan dengan register no 82/Pdt.G/2021/PN.KIS di Pengadilan Negeri Kisaran. Gugatan tersebut berkaitan dengan keberatan penggugat atas nilai ganti rugi yang diberikan oleh Perusahaan atas penggantian pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Terminal Multipurpose pada Pelabuhan Kuala Tanjung. Gugatan tersebut ditetapkan berdasarkan Penetapan Konsinyasi Pengadilan Negeri Kisaran No. 23/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.

50. LAWSUIT (continued)

a) The lawsuit from Sapriadi et al to claim for compensation for the construction of the Kuala Tanjung Port (continued)

The plaintiff then submitted an appeal as referred to in the Relaas Notice of Appeal Statement on April 5, 2022.

Then, the plaintiff submitted a Counter Memorandum of Appeal through the Partnership of the District Court to the Medan High Court on June 2, 2022.

On September 7, 2022, the case was decided by the Panel of Judges of the Medan High Court with register number 415/Pdt/2022/PT MDN with a decision which basically accepted the appeal, which upheld the decision of the Kisaran District Court number 95/Pdt.G/2021/PN Kis.

Based on the High Court's decision, the plaintiff filed a cassation as referred to in the Notification Release of the cassation statement from the Medan District Court on October 24, 2022. The Company has submitted a counter cassation memorandum on November 9, 2022.

As of the date of publication of these consolidated financial statements, the Company is still waiting for the cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

b) Lawsuit from Ramadhan Abadi over demands for compensation for the construction of Kuala Tanjung Port

Ramadhan Abadi filed a lawsuit against the Company with register no 82/Pdt.G/2021/PN.KIS at the Kisaran District Court. The lawsuit relates to the plaintiff's objection to the value of compensation given by the Company for compensation for land acquisition for the benefit of the construction of the Multipurpose Terminal at the Port of Kuala Tanjung. The lawsuit was determined based on the Kisaran District Court Consignment Decree No. 23/Pdt.P.Kos/2021/PN.Kis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM

b) Gugatan dari Ramadhan Abadi atas tuntutan ganti rugi atas pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung (lanjutan)

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah memutus Perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Kis Tanggal Putusan tgl 8 Maret 2022 dengan Amar Putusan:

- a. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.034;

Pada tanggal 1 April 2022, penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding.

Kontra Memori Banding Telah disampaikan melalui kepanitraan Pengadilan Negeri kisaran kepada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 2 Juni 2022.

Perkara telah diputus oleh Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan nomor register perkara 277/Pdt/2022/PT MDN, dengan amar putusan yang pada intinya menerima permohonan banding yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor 82/Pdt.G/2021/PN Kis.

Penggugat kemudian mengajukan upaya hukum Kasasi sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan kasasi dari Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2022.

Perusahaan telah menyampaikan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Oktober 2022. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c) Gugatan dari PT Artha Sempana tentang pemberian Hak Penggunaan Lahan

Gugatan dari PT Artha Sempana yang meminta pembatalan atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.128/HPL/DA/86 tanggal 18 Desember 1986 tentang pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m² di Pelabuhan Sunda Kelapa.

50. LAWSUIT

b) Lawsuit from Ramadhan Abadi over demands for compensation for the construction of Kuala Tanjung Port (continued)

The Panel of Judges at the Kisaran District Court has decided on Case Number 82/Pdt.G/2022/PN Kis Decision Date March 8, 2022 with the Decision Verdict:

- a. Declare that the plaintiff's lawsuit is unacceptable (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- b. Punish the Plaintiff to pay court fees in the amount of Rp2,034;

On April 1, 2022 the Plaintiff filed an Appeal as referred to in the Relas Notification of Statement of Appeal.

Counter Memorandum of Appeal It has been submitted through the partnership of the District Court to the Medan High Court on June 2, 2022.

The case was decided by the Panel of Judges of the Medan High Court on August 1, 2022 with case register number 277/Pdt/2022/PT MDN, with a decision which essentially accepted the appeal request which upheld the Kisaran District Court decision number 82/Pdt.G/2021/PN Kis.

The plaintiff then filed an appeal for cassation in accordance with the release of the notification of the cassation statement from the Medan District Court on September 14, 2022.

The Company has submitted a counter cassation memorandum on October 10, 2022. As of the date of publication of these consolidated financial statements, the Company is still waiting for the cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

c) Lawsuit from PT Artha Sempana regarding the granting of Land Use Rights

Lawsuit from PT Artha Sempana requesting cancellation of Minister of Home Affairs Decree No.128/HPL/DA/86 dated December 18, 1986 regarding the granting of Land Management Rights (HPL) to the Company over a land area of 592,771 m² in Sunda Kelapa Port.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

c) Gugatan dari PT Artha Sempana tentang pemberian Hak Penggunaan Lahan (lanjutan)

Pada tahun 2019, PT Artha Sempana mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dengan pokok gugatan pembatalan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 128/HPL/DA/86 pada tanggal 18 Desember 1986 yang berisi pemberian HPL kepada Perusahaan atas tanah seluas 592.771 m² di Pelabuhan Sunda Kelapa dan permintaan ganti kerugian terhadap lahan yang dikuasai oleh PT Artha Sempana apabila Perusahaan ingin menguasai lahan tersebut.

Pada tanggal 23 April 2019, Direktur Utama Perusahaan menerbitkan Surat Kuasa khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Jaksa Pengacara Negara dengan nomor surat KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 tanggal 23 April 2019.

Pada tanggal 24 November 2021, Perusahaan menerima salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 450/Pdt/2021/PT.DKI, yang pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 18 Juni 2020.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Perusahaan menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi No. 3200K/Pdt/2022 yang amar putusannya menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat sehingga Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) (Perusahaan menang).

Pada tanggal 12 April 2023, Penggugat mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali. Perusahaan mengajukan kontra memori atas peninjauan kembali.

Pada tanggal 23 November 2023, Perusahaan menerima putusan atas Peninjauan Kembali yang dalam inti amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari Penggugat (Perusahaan menang).

50. LAWSUIT (continued)

c) Lawsuit from PT Artha Sempana regarding the granting of Land Use Rights (continued)

In 2019, PT Artha Sempana filed a lawsuit with the North Jakarta District Court No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr with the principal claim for canceling the Decree of the Minister of Home Affairs No. 128/HPL/DA/86 on December 18, 1986 which contained the granting of HPL to the Company for a land area of 592,771 m² in Sunda Kelapa Port and a request for compensation for land controlled by PT Artha Sempana if the Company wants to control the land.

On April 23, 2019, the President Director of the Company issued a special Power of Attorney to the North Jakarta District Attorney's Head as State Attorney Attorney with letter number KP.20.04/23/4/1/LGI/UT/PI.II-19 dated April 23, 2019.

On November 24, 2021, the Company received a copy of the DKI Jakarta High Court Decision No. 450/Pdt/2021/PT.DKI, which in essence strengthens the North Jakarta District Court Decision No. 194/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dated June 18, 2020.

*On October 17, 2022, the Company received a copy of the Supreme Court's decision at cassation level no. 3200K/Pdt/2022 whose ruling rejected the Cassation Application from the Cassation Appellant/Plaintiff so that the Decision has permanent legal force (*In Kracht Van Gewijsde*) (the Company won).*

On April 12 2023, the Plaintiff submitted a request for legal action for judicial review. The Company filed a counter memo for judicial review

On November 23 2023, the Company received a decision on Judicial Review which in essence of the decision rejected the Plaintiff's request for reconsideration (the Company won).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

d) Gugatan dari Siti Hawa binti Umar dkk tentang sengketa kepemilikan tanah di Kotawaringin Barat

Gugatan yang diajukan oleh Siti Hawa Binti Umar, dkk di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan nomor register 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 14.150 M² yang terletak di Sungai Kalap/ Sungai Kumai RT.12, kelurahan Kumai Hulu, kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat.

Majelis Hakim PN Pangkalan Bun telah memutuskan perkara No. 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu tanggal 6 Oktober 2022 dengan Amar Putusan:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Dalam subjek kasus:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagian tanah terletak di Sungai Kumai Rt.18, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas 14.150 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kumai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perusahaan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Ahli Waris dan KPC; belum terbayar oleh Tergugat I;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan batal sebagian Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi atas sebagian bidang tanah seluas 14.150 m² dari total keseluruhan seluas seluas 273.728 m²;
5. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan sisa sebagian tanah seluas 14.150 m² yang dikuasai kepada Para Penggugat (Ahli Waris) Alm. Muhammad bin Mat Amin secara suka rela tanpa dibebani kewajiban apa pun untuk digunakan secara bebas;

50. LAWSUIT (continued)

d) Lawsuit from Siti Hawa binti Umar et al regarding disputes over land ownership in West Kotawaringin

The lawsuit filed by Siti Hawa Binti Umar, DKK at the Pangkalan Bun District Court with register number 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu is related to a land ownership dispute with an area of 14,150 M² which is located in Sungai Kalap/ Sungai Kumai RT. 12, Kumai Hulu sub-district, Kumai sub-district, West Kotawaringin Regency.

The Panel of Judges for the Pangkalan Bun District Court has decided on case Number 13/Pdt.G/2022/PN.Pbu on October 6, 2022 with the following verdict:

In exception:

- Rejected the exceptions of Defendant I, Defendant III, Defendant IV and Defendant V;

In subject of the case:

1. Partially granted the Plaintiff's lawsuit;
2. Declare that part of the land is located in Sungai Kumai RT.18, Kumai Hulu Village, Kumai District, Kotawaringin Barat Regency, Central Kalimantan Province, with an area of 14,150 m² with the following boundaries:
 - To the east it is bordered by Kumai River;
 - West side is bordered by Road;
 - North side is bordered by the Company;
 - South side is bordered by Land owners by heirs and KPC; has not been paid by the defendant I;
3. Declare that Defendant I has defaulted;
4. Declare the cancellation of part of the land acquisition agreement with compensation for a portion of the land area of 14,150 m² out of a total area of 273,728 m²;
5. Punish by ordering Defendant I to voluntarily return the remaining portion of the land area of 14,150 m² which owned to the Plaintiffs (Heirs) of the late Muhammad bin Mat Amin without being burdened with any obligation to use it by free;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

**d) Gugatan dari Siti Hawa binti Umar dkk
tentang sengketa kepemilikan tanah di
Kotawaringin Barat (lanjutan)**

Dalam subjek kasus: (lanjutan)

6. Menyatakan sah demi hukum Berita Acara Penilaian Ganti Rugi Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh untuk Lokasi Pelabuhan CPO milik Perusahaan Cabang Kumai yang terletak di Sungai Kalap/Sungai Kumai, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor: 295.580.42/PAN-PT/2000;
7. Menyatakan Sertifikat HPL No.5 Tahun 2001 atas nama Tergugat I (Perusahaan) yang diterbitkan oleh Tergugat III tidak memiliki nilai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Perusahaan telah menyatakan Banding sebagai Akta pernyataan Banding pada tanggal 20 Oktober 2022 dan telah menyampaikan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2022.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memutuskan Perkara Nomor 97/PDT/2022/PT.PLK tanggal 15 Desember 2022 dengan amar putusan yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 13/Pdt.G/2022/P.Pbu yang dimohonkan banding tersebut.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 97/PDT/2022/PT.PLK tanggal 15 Desember 2022, Siti Hawa Binti Umar, dkk mengajukan upaya hukum kasasi melalui Paniteria Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 2 Januari 2023.

Pada tanggal 23 Februari 2023, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mengirimkan dokumen konsesi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hingga tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

50. LAWSUIT (continued)

**d) Lawsuit from Siti Hawa binti Umar et al
regarding disputes over land ownership in
West Kotawaringin (continued)**

In subject of the case: (continued)

6. Declare legally valid Minutes of Assessment of Compensation for Land, Buildings and Growing Planting for the CPO Port Location of the Company Kumai Branch located on the Kalap River/Kumai River, Kumai Hulu Village, Kumai District, West Kotawaringin Regency, Number: 295.580.42/PAN-PT/2000;
7. Declare the HPL Certificate No. 5 Year 2001 on behalf of Defendant I (the Company) issued by Defendant III has no binding legal force value;
8. Punish Defendant I to submit and comply with the contents of this decision;
9. Rejecting the Plaintiff's claim for other than and the rest;

The Company has stated the Appeal as a Deed of Appeal statement on October 20, 2022 and has submitted a memory of appeal on October 25, 2022.

The Panel of Judges of the Palangka Raya High Court has decided on Case Number 97/PDT/2022/PT.PLK dated December 15, 2022 with a decision which essentially cancels the decision of the Pangkalan Bun District Court number 13/Pdt.G/2022/P.Pbu which is being appealed.

Based on the Decision of the Palangka Raya High Court Number 97/PDT/2022/PT.PLK dated December 15, 2022, Siti Hawa Binti Umar, et al filed an appeal through the Pangkalan Bun District Court Committee on January 2, 2023.

On February 23 2023, the Pangkalan Bun District Court sent the concession documents to the Supreme Court of the Republic of Indonesia. As of the date of publication of these consolidated financial statements, the Company is still waiting for the cassation decision from the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

e) Gugatan dari PT Kapuas Prima Coal Tbk

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum atas sengketa kepemilikan tanah dengan seluas 3.029 m²/0,39 Ha yang terletak di Jalan CPO Pelabuhan Kalap, RT 018, Kumai Hulu, Kumai, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada 27 Oktober 2022, telah dibacakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu yang amar putusannya menyatakan Perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan penyerobotan tanah milik penggugat dengan luas 0,39 Ha. Atas putusan tersebut, Perusahaan menyampaikan upaya hukum banding.

Pada 26 Desember 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah memutus Perkara Nomor 102/PDT/2022/PT PLK dengan amar Putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 37/Pdt.G/2022/PN Pbu yang dimohonkan banding tersebut.

Pada tanggal 5 Januari 2023, penggugat mengajukan upaya hukum kasasi melalui Paniteria Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pada tanggal 15 Februari 2023, Perusahaan telah mengajukan kontra memori konsesi. Kemudian pada tanggal 3 Maret 2023, dokumen konsesi telah dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Februari 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dengan amar putusan pada intinya menolah permohonan kasasi dari Penggugat (Perusahaan menang) atas gugatan dari PT Kapuas Prima Coal Tbk.

50. LAWSUIT (continued)

e) The lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal Tbk

The plaintiff has filed a lawsuit to Pangkalan Bun District Court Number 37/Pdt.G/2022/PN.Pbu related to an Act Against Law a land ownership dispute with an area of 3,029 m²/0.39 Ha which located on Jalan CPO Pelabuhan Kalap, RT 018, Kumai Hulu, Kumai, West Kotawaringin, Central Kalimantan Province.

On October 27, 2022, has been read the Decision of the Pangkalan Bun District Court Number 37/Pdt.G/2022/PN Pbu dated which in stated that the Company had conducted illegal act by expropriating land belonging to PT Kapuas Prima Coal Tbk with an area of 0.39 Ha. Based on this decision, the Company submitted an appeal.

On December 26, 2022, the Panel of Judges of the Palangka Raya High Court has decided on Case Number 102/PDT/2022/PT PLK with a ruling that cancels the decision of the Pangkalan Bun District Court number 37/Pdt.G/2022/PN Pbu which the appeal was filed for.

On January 5, 2023, the plaintiff filed a cassation through the Pangkalan Bun District Court Committee.

On February 15, 2023, the Company submitted a concession counter. Then on March 3 2023, the concession documents were sent by the Pangkalan Bun District Court to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

On February 19, 2024, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a Letter of Notification of the Contents of the Decision with a ruling in essence rejecting the Plaintiff's cassation request (the Company won) for the lawsuit filed by PT Kapuas Prima Coal Tbk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

f) Gugatan dari Ibrahim L Dg Sitaba

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan di Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan klaim tanah milik Perusahaan yang terletak di Kelurahan Ujung Tanah berdasarkan sertifikat HPL No. 1. Penggugat klaim atas 14,57 Ha berdasarkan Surat "Simana Boetaja Tanae" dari Hoofd Van Landreate Makassar, Cap Crown tanggal 27/09/1858 an. Ipadjallo, Persil No.24, dvv III, Kohir No. 9 CI (Lampok Camboko). Tanah tersebut merupakan tanah milik adat a.n. Ipadjallo. Penggugat mempermasalahkan tanah seluas 5 Ha yang disewakan ke Pertamina, menurut Penggugat tanah tersebut merupakan bagian dari luasan 14,57 Ha.

Pada 7 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan Perkara Nomor 358/Pdt.G/2019/PN.Mks dengan amar putusan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp2.886.

Pada 14 Desember 2020, penggugat mengajukan banding dan Perkara telah diputus pada Tingkat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 346/PDT/2020/PT MKS dengan amar putusan:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 7 Juli 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.

Pada tanggal 10 Februari 2021, penggugat mengajukan kasasi dan Perusahaan sudah menyerahkan kontra memori kasasi pada tanggal 1 April 2021.

Pada 21 April 2022, Mahkamah Agung telah memutuskan perkara tingkat Kasasi Nomor 1664K/PDT/2022 yang pada amar putusannya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Salinan putusan resmi telah diterima oleh kuasa hukum Perusahaan pada tanggal 27 Juli 2022.

50. LAWSUIT (continued)

f) The lawsuit by Ibrahim L Dg Sitaba

The plaintiff has filed a lawsuit to the Makassar District Court is related to land claims owned by the Company which is located in Ujung Tanah Village based on HPL certificate No. 1. The Plaintiff claims on 14.57 Ha are based on Letter "Simana Boetaja Tanae" from Hoofd Van Landreate Makassar, Stamp Crown dated 27/09/1858 an. Ipadjallo, Persil No. 24, dvv III, Kohir No. 9 CI (Lampok Camboko). The land is owned by customary land on behalf of Ipadjallo. The Plaintiff disputed the 5 Ha land that was leased to Pertamina which according to the Plaintiff the land was part of an area of 14.57 Ha.

On 7 July 2020, the Makassar District Court Panel of Judges decided on Case Number 358/Pdt.G/2019/PN.Mks with the verdict:

- Rejecting the plaintiff's lawsuit in its entirety;
- Punish the plaintiff to pay court fees incurred in this case which until now has been estimated at Rp2,886.

On December 14, 2020, the plaintiff filed an appeal and the case was decided at the Makassar High Court with Number 346/PDT/2020/PT MKS with the verdict:

- Received the original Appellant's appeal from the Plaintiff;
- Strengthening the decision of the Makassar District Court Number 358/Pdt.G/2019/PN Mks dated July 7, 2020 which is being appealed;
- Sentenced the plaintiff's original appellant to pay the costs of the case at both court levels which at the appeal level was set at Rp150.

On February 10, 2021, the plaintiff filed an appeal and the Company has submitted a counter cassation memorandum on April 1, 2021.

On April 21, 2022, The Supreme Court has decided on the cassation case Number 1664K/PDT/2022 that rejected the cassation request from the Cassation Appellant. The copy of the official decision was received by the Company's attorney on July 27, 2022.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

50. PERKARA HUKUM (lanjutan)

f) Gugatan dari Ibrahim L Dg Sitaba (lanjutan)

Pada 6 Desember 2022, Penggugat mengajukan upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali sebagaimana Relas pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Makassar. Perusahaan telah menyampaikan Kontra memori Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Januari 2023.

Pada tanggal 3 Januari 2023, Perusahaan telah menyampaikan Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Pada tanggal 31 Oktober 2023, Mahmah Agung telah memutus perkara Peninjauan Kembali No 1042 PK/PDT/2023 dengan amar putusan yang pada intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Penggugat (Perusahaan menang).

g) Gugatan dari Makis Sasambe/ PT Dian Osiania

Penggugat mengajukan gugatan kepada Perusahaan terkait kerugian yang dialami penggugat atas rusaknya kapal milik penggugat yang diklaim akibat dari kegiatan tergugat dengan nomor perkara 384/pdt.G/2017/PN.Mnd.

Pada 22 Maret 2018, Pengadilan Negeri Manado telah memutuskan perkara nomor 384/pdt.G/2017/PN.Mnd dengan amar putusan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijke Verklaard*).

Pada 17 Januari 2019, penggugat mengajukan upaya hukum banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado telah memutus Perkara Nomor 176/PDT/2018/PT MND dengan amar putusan:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.

Pada 12 Juni 2019, penggugat mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 19 Oktober 2023, Mahkamah Agung telah memutus perkara kasasi dengan nomor perkara 2605 k/PDt/2023 yang pada amar putusannya menolak permohonan kasasi dan menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara.

Pada tanggal 11 Januari 2024, kuasa hukum Perusahaan telah menerima salinan putusan resmi atas gugatan dari Makis Sasambe/PT Dian Osiania.

50. LAWSUIT (continued)

f) The lawsuit by Ibrahim L Dg Sitaba (continued)

On December 6, 2022, the Plaintiff filed an Extraordinary Judicial Review Remedy according to the Relas notification from the Makassar District Court. The Company has submitted a Judicial Review Counter memory on January 5, 2023.

On January 3, 2023, the Company submitted its Counter Memorandum of Judicial Review to the Supreme Court.

On October 31 2023, the Supreme Court decided the case for judicial review No. 1042 PK/PDT/2023 with a decision which essentially rejected the Plaintiff's request for judicial review (the Company won).

g) The lawsuit by Makis Sasambe/ PT Dian Osiania

The plaintiff has filed a lawsuit the Company regarding the loss suffered by the plaintiff due to the damage to the plaintiff's ship claimed as a result of the activities of the defendant with case number 384/pdt.G/2017/PN.Mnd.

On March 22, 2018, the Manado District Court decided case number 384/pdt.G/2017/PN.Mnd with a ruling declaring the plaintiff's claim unacceptable (*Niet On Vanklijke Verklaard*).

On January 17 2019, the plaintiff filed an appeal. The Panel of Judges of the Manado High Court decided on Case Number 176/PDT/2018/PT MND with the following verdict:

- Declare that the lawsuit was unacceptable (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Penalize the plaintiff's to pay court costs at the appeal level which is Rp150.

On June 12, 2019, the plaintiff filed a Memorandum of Cassation to the Supreme Court. On October 19 2023, the Supreme Court has decided on the cassation case with case number 2605 k/PDt/2023, which in its decision rejected the cassation petition and sentenced the cassation applicant to pay court fee.

On January 11, 2024, the Company's attorney has received the copy of the official decision for the lawsuit by Makis Sasambe/PT Dian Osiania.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-2/MBU/01/2024 tanggal 3 Januari 2024, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Ellies Daini, S.H.,M.Kn No.12 tanggal 22 Januari 2024, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan diantaranya menetapkan perubahan nomenklatur serta susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/ Independen	Agus Suhartono
Komisaris	Andus Winarno
Komisaris	Arif Toha Tjahjagama
Komisaris	Didi Sumedi
Komisaris	Jodi Mahardi
Komisaris Independen	Sudung Situmorang
Komisaris Independen	Heru Sukanto

Direksi

Direktur Utama	Arif Suhartono
Wakil Direktur Utama	Hambra
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Mega Satria
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Ihsanuddin Usman
Direktur Strategi	Prasetyo
Direktur Investasi	Boy Robyanto
Direktur Pengelola	Putut Sri Muljanto

- b. Pada tanggal 11 Januari 2024, PTP1 dan BNCT menandatangani Berita Acara Serah Terima Lokasi dan Peralatan Awal - Belawan New Container Terminal No. KS.02/11/1/2/OT.2/DU/TPTP-24. Berdasarkan berita acara ini, PTP1 dan BNCT sepakat bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024, PTP1 menyerahkan lokasi dan peralatan awal kepada BNCT, bebas dari segala pembebanan serta memberikan hak atas lokasi dan peralatan awal untuk dioperasikan dan digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan COA.
- c. Pada tanggal 11 Januari 2024, PTP1 dan BNCT menandatangani Berita Acara Serah Terima Lokasi dan Peralatan Awal - Kawasan International TPKB No. KS.02/11/1/1/OT.2/DU/TPTP-24. Berdasarkan berita acara ini, PTP1 dan BNCT sepakat bahwa terhitung sejak tanggal 12 Januari 2024, PTP1 menyerahkan lokasi dan peralatan awal kepada BNCT, bebas dari segala pembebanan serta memberikan hak atas lokasi dan peralatan awal untuk dioperasikan dan digunakan sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan WUA.

51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

- a. Based on The Decree of The Minister of SOEs No. SK-2/MBU/01/2024 dated January 3, 2024 which notarized through Notarial Deed of Ellies Daini, S.H.,M.Kn., No. 12 dated January 22, 2024, the Minister of SOEs as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company stipulated among other changes of nomenclature and the Board of Commissioners and Directors as follows:

Board of Commissioners

President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

Directors

President Director
Vice President Director
Director of Finance and Risk Management
Director of Human Resources and General Affair
Strategy Director
Investment Director
Managing Director

- b. On January 11, 2024, PTP1 and BNCT signed the Minutes of Handover of of Site and Initial Equipment of Belawan New Container Terminal No. KS.02/11/1/2/OT.2/DU/TPTP-24. Based on this minute, PTP1 and BNCT agree that as of January 12, 2024 PTP1 will hand over the initial location and equipment to BNCT, free from all burden and give the rights to the initial location and equipment to be operated and used in accordance with the terms and conditions based on the COA.
- c. On January 11, 2024, PTP1 and BNCT signed the Minutes of Handover of of Site and Initial Equipment of TPKB International Space No. KS.02/11/1/1/OT.2/DU/TPTP-24. Based on this minute, PTP1 and BNCT agree that as of January 12, 2024 PTP1 will hand over the initial location and equipment to BNCT, free from all burden and give the rights to the initial location and equipment to be operated and used in accordance with the terms and conditions based on the WUA.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- d. Pada tanggal 29 Januari 2024, Perusahaan melakukan addendum II Perjanjian Konsesi Pengusahaan Terminal Perikemas Makassar New Port (MNP) Tahap I dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang pada intinya menambah ruang lingkup area konsesi dari semula tahap 1A menjadi tahap 1A, 1B, 1C dan 1D.
- e. Pada tanggal 1 Februari 2024, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham (Keputusan RUPS Sirkuler) No. 01, para pihak menyetujui pemindahan hak atas seluruh saham milik Perusahaan dalam PDS sebanyak 31.500 lembar saham atau setara dengan 90,00% dengan nilai nominal Rp15.750.000.000 (nilai penuh) ke PMLI. Sehingga susunan pemegang saham PDS menjadi sebagai berikut:
- PMLI memiliki sebesar 90,00% atau sebanyak 31.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp15.750.000.000 (nilai penuh).
 - Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia sebesar 10,00% atau sebanyak 3.500 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.750.000.000 (nilai penuh).
- f. Pada tanggal 27 Februari 2024, EDII menerima surat pemberitahuan persetujuan perpanjangan sementara jangka waktu fasilitas pinjaman sehingga waktu fasilitas pinjaman tersebut berlaku sampai dengan 10 Maret 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- EDII harus melunasi fasilitas KRK hingga outstanding berjumlah Rp3.000.000 pada saat realisasi PPJS, kemudian sisa outstanding diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
 - seluruh available limit fasilitas DL CPFP, fasilitas BG, dan fasilitas KRK di blokir;
 - perpanjangan sementara untuk fasilitas DL CPFP, fasilitas BG, dan fasilitas KRK berikut seluruh turunan akseptasi/multiple drawdown fasilitas terkait (jika ada);
 - wajib terdapat surat permohonan perpanjangan sementara atas fasilitas berjalan dari EDII;
 - tidak terdapat perubahan syarat dan ketentuan kredit dari sebelumnya, dan tidak terdapat default termasuk keterlambatan pembayaran pokok dan bunga.

**51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- d. On January 29, 2024, the Company entered into addendum II to the Makassar New Port (MNP) Terminal Concession Agreement Phase I with the Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar which essentially increased the scope of the concession area from originally stage 1A to stages 1A, 1B, 1C and 1D.
- e. On February 1, 2024, based on the Shareholders' Decision Outside the General Meeting of Shareholders (Circular GMS Decision) No. 01, the parties agreed to transfer rights to all shares owned by the Company in PDS totaling 31,500 shares or the equivalent of 90.00% with a nominal value of Rp15,750,000,000 (full amount) to PMLI. So the composition of PDS shareholders is as follows:
- PMLI owns 90.00% or 31,500 shares with total amount of Rp15,750,000,000 (full amount).
 - Koperasi Pegawai Pelabuhan Indonesia owns 10.00% or 3,500 shares with total amount of Rp1,750,000,000 (full amount).
- f. On February, 2024, EDII received an approval notification letter for a temporary extension of the loan facility term stating that the loan facility is valid until March 10, 2024, with the following conditions.
- EDII must pay off the KRK facility until the outstanding amount is Rp3,000,000 at the time of PPJS realization, then the remaining outstanding amount is extended until March 10, 2024;
 - all available limits for DL CPFP facilities, BG facilities and KRK facilities are blocked;
 - temporary extension for DL CPFP facilities, BG facilities and KRK facilities along with all acceptance derivatives/multiple drawdowns of related facilities (if any);
 - there must be a letter requesting a temporary extension of current facilities from EDII;
 - there is no changes to the previous credit terms and conditions, and there are no defaults including late payments of principal and interest.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**51. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

- g. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.2/29/2/1/RKTK/UTMA/PLND-24 tanggal 29 Februari 2024, mengalih tugaskan pekerja Ardhy Wahyu Basuki dengan jabatan lama sebagai Regional Head 3 pada Regional 3 menjadi jabatan baru sebagai Group Head Sekretariat Perusahaan pada Group Sekretariat Perusahaan Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) efektif per tanggal 1 Maret 2024.
- h. Pada tanggal 7 Maret 2024, EDII menerima surat pemberitahuan persetujuan perpanjangan sementara jangka waktu fasilitas pinjaman sehingga waktu fasilitas pinjaman tersebut berlaku sampai dengan 28 Juni 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
- perpanjangan sementara jangka waktu fasilitas pinjaman dengan kondisi fasilitas diblokir;
 - seluruh fasilitas DL CFPF dan fasilitas BG diblokir;
 - EDII diharapkan melakukan angsuran secara bertahap atas outstanding Fasilitas KRK dengan skema dibawah ini:
 - Rp500.000 pada tanggal 30 April 2024
 - Rp500.000 pada tanggal 31 Mei 2024
 - Sisa outstanding wajib dilunasi pada tanggal 28 Juni 2024Setiap adanya pelunasan bertahap maka limit akan diblokir sebesar pelunasan yang sudah dijalankan.
 - perpanjangan sementara untuk fasilitas KRK, fasilitas DL CFPF, dan fasilitas BG berikut seluruh turunan akseptasi/*multiple drawdown* fasilitas terkait (jika ada);
 - wajib terdapat surat permohonan perpanjangan sementara atas fasilitas berjalan dari EDII; dan
 - tidak terdapat perubahan syarat dan ketentuan kredit dari sebelumnya, dan tidak terdapat default termasuk keterlambatan pembayaran pokok dan bunga.

**51. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD
(continued)**

- g. Based on The Decree of the Directors of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) No: KP.10.2/29/2/1/RKTK/UTMA/PLND-24 dated 29 February 2024, transferring worker Ardhy Wahyu Basuki from his old position as Regional Head 3 at Regional 3 to new position as Group Head of Corporate Secretariat at the Corporate Secretariat Group Head Office of PT Pelabuhan Indonesia (Persero) effective March 1, 2024.
- h. On March 7, 2024, EDII received an approval notification letter for a temporary extension of the loan facility term stating that the loan facility is valid until June 28, 2024, with the following conditions:
- temporary extension of the term of the loan facility with the condition that the facility is blocked;
 - all DL CFPF facilities and BG facilities are blocked;
 - EDII are expected to make installments in stages for the outstanding KRK Facilities using the scheme below:
 - Rp500,000 on April 30, 2024
 - Rp500,000 on May 31, 2024
 - The remaining balance must be paid by June 28, 2024Every time there is a gradual repayment, the limit will be blocked in the amount of the repayment that has been made.
 - temporary extension for KRK facilities, DL CFPF facilities, and BG facilities along with all related facility acceptance derivatives/*multiple drawdowns* (if any);
 - there must be a letter requesting a temporary extension of current facilities from EDII; and
 - there are no changes to the previous credit terms and conditions, and there are no defaults including late payments of principal and interest.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut:

52. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the Group's business segments is as follows:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	29.451.930.330	1.566.287.372	31.018.217.702	-	31.018.217.702	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	9.246.559.197	4.210.107.472	13.456.666.669	(13.456.666.669)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen	38.698.489.527	5.776.394.844	44.474.884.371	(13.456.666.669)	31.018.217.702	Total segment operating revenues
Beban operasi	(32.928.997.190)	(4.438.766.463)	(37.367.763.653)	13.024.532.182	(24.343.231.471)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	898.965.716	36.410.459	935.376.175	(624.779.982)	310.596.193	Other operating income - net
Laba usaha	6.668.458.053	1.374.038.840	8.042.496.893	(1.056.914.469)	6.985.582.424	Operating income
Pendapatan keuangan	958.854.788	45.257.489	1.004.112.277	(376.816.845)	627.295.432	Finance income
Beban keuangan	(2.658.904.342)	(999.659.646)	(3.658.563.988)	798.444.135	(2.860.119.853)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	3.624.842.044	11.741.432	3.636.583.476	(3.266.205.916)	370.377.560	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan	8.593.250.543	431.378.115	9.024.628.658	(3.901.493.095)	5.123.135.563	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(379.564.883)	(137.688.334)	(517.253.217)	1.771.849	(515.481.368)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan	8.213.685.660	293.689.781	8.507.375.441	(3.899.721.246)	4.607.654.195	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(917.092.565)	(83.817.991)	(1.000.910.556)	1.364.854	(999.545.702)	Current
Tangguhan	302.756.394	101.716.376	404.472.770	-	404.472.770	Deferred
Laba tahun berjalan	7.599.349.489	311.588.166	7.910.937.655	(3.898.356.392)	4.012.581.263	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	136.898.730.984	22.076.667.455	158.975.398.439	(40.634.332.764)	118.341.065.675	Segment assets
Liabilitas segmen	70.581.813.990	18.596.255.902	89.178.069.892	(17.678.219.375)	71.499.850.517	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	(3.841.177.585)	(300.275.350)	(4.141.452.935)	467.616.743	(3.673.836.192)	Segment depreciation and amortization

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

52. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2022						
	Operasi Kepelabuhanan/ Port Operation	Jasa Lainnya/ Other Services	Total Sebelum Eliminasi/Total Before Elimination	Eliminasi/ Elimination	Total/ Total	
Pendapatan operasi segmen						Segment operating revenues
Pendapatan operasi eksternal	26.781.758.791	2.918.845.344	29.700.604.135	-	29.700.604.135	External operating revenues
Pendapatan operasi antar segmen	8.981.833.109	2.018.437.644	11.000.270.753	(11.000.270.753)	-	Inter-segment operating revenues
Total pendapatan operasi segmen					29.700.604.135	Total segment operating revenues
Beban operasi	(29.756.772.868)	(4.038.359.251)	(33.795.132.119)	10.640.702.928	(23.154.429.191)	Operating expenses
Pendapatan operasi lainnya - neto	372.153.179	193.379.261	565.532.440	3.113.057	568.645.497	Other operating income - net
Laba usaha					7.114.820.441	Operating income
Pendapatan keuangan	759.759.720	42.360.298	802.120.018	(421.629.748)	380.490.270	Finance income
Beban keuangan	(2.723.614.361)	(685.118.179)	(3.408.732.540)	837.689.572	(2.571.042.968)	Finance costs
Bagian laba entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas - neto	3.194.119.075	(256.639.058)	2.937.480.017	(2.634.864.325)	302.615.692	Equity in income of associates and joint control entity - net
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan					5.226.883.435	Income before final tax and corporate income tax
Beban pajak final	(375.850.289)	(112.379.013)	(488.229.302)	-	(488.229.302)	Final tax expense
Laba sebelum pajak penghasilan badan					4.738.654.133	Income before corporate income tax
Pajak penghasilan badan						Corporate income tax
Kini	(898.369.096)	(59.968.402)	(958.337.498)	-	(958.337.498)	Current
Tangguhan	43.164.362	84.988.860	128.153.222	-	128.153.222	Deferred
Laba tahun berjalan					3.908.469.857	Income for the year
Posisi keuangan						Financial position
Aset segmen	134.500.471.592	25.724.382.172	160.224.853.764	(41.874.275.858)	118.350.577.906	Segment assets
Liabilitas segmen	71.737.725.596	21.366.079.896	93.103.805.492	(17.557.920.361)	75.545.885.131	Segment liabilities
Penyusutan dan amortisasi segmen	3.701.971.300	335.928.632	4.037.899.932	(470.037.799)	3.567.862.133	Segment depreciation and amortization
Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year then Ended December 31,						
			2023	2022		
Pendapatan Operasi					Operating Revenues	
Regional 1			4.436.095.246	3.854.214.067	Region 1	
Regional 2			11.546.506.772	11.584.512.249	Region 2	
Regional 3			9.809.747.824	9.123.938.134	Region 3	
Regional 4			5.225.867.860	5.137.939.685	Region 4	
Total			31.018.217.702	29.700.604.135	Total	

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

52. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Informasi yang menyangkut segmen usaha Grup adalah sebagai berikut: (lanjutan)

52. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the Group's business segments is as follows: (continued)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Aset tidak lancar			Non-current asset
Regional 1	12.802.718.063	14.719.906.514	Region 1
Regional 2	50.379.896.561	42.940.361.555	Region 2
Regional 3	24.106.205.318	27.859.314.239	Region 3
Regional 4	10.733.144.759	11.210.828.204	Region 4
Total	98.021.964.701	96.730.410.512	Total

53. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Aktivitas non-kas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

53. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Non-cash of investing activities for the year ended December 31, 2023 and 2022, are as follow:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year then Ended December 31,		
	2023	2022	
Penambahan aset tetap melalui penambahan utang	204.146.503	933.015.517	Acquisition of fixed assets through payable
Penambahan aset takberwujud melalui kapitalisasi bunga pinjaman	423.995.273	325.254.601	Acquisition of intangible assets through interest capitalization
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap	71.560.858	47.306.746	Capitalization of borrowing costs
Penambahan aset tetap melalui uang muka	2.454.975	248.304.048	Acquisition of fixed assets through advance
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	42.703.592	38.288.643	Addition of right-of-use assets through lease liabilities

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Non- arus kas/Non-cash flow			31 Desember 2023/ December 31, 2023	
		Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	105.361.831	(102.031.659)	-	-	3.330.172	Short-term bank loans
Utang bank	7.842.812.658	6.469.255.760	84.794.235	-	14.396.862.653	Bank loan
Utang obligasi	42.754.634.125	(8.928.084.369)	(702.497.259)	-	33.124.052.497	Bonds payable
Dividen	-	(1.453.964.849)	-	-	(1.453.964.849)	Dividend
Liabilitas sewa	435.135.812	(417.597.215)	-	470.184.867	487.723.464	Lease liabilities
Total	51.137.944.426	(4.432.422.332)	(617.703.024)	470.184.867	46.558.003.937	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

53. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Arus kas/ Cash flow	Non- arus kas/Non-cash flow		31 Desember 2022/ December 31, 2022	
			Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others		
Pinjaman bank jangka pendek	138.493.774	(33.131.943)	-	-	105.361.831	Short-term bank loans
Utang bank	8.888.945.339	(1.046.132.681)	-	-	7.842.812.658	Bank loan
Utang obligasi	40.176.176.480	(1.272.889.596)	3.851.347.241	-	42.754.634.125	Bonds payable
Dividen	-	(1.316.854.000)	-	-	1.316.854.000	Dividend
Liabilitas sewa	333.885.712	(138.892.333)	-	240.142.433	435.135.812	Lease liabilities
Total	49.537.501.305	(3.807.900.553)	3.851.347.241	240.142.433	52.454.798.426	Total

**53. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS
INFORMATION (continued)**

Movement of liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows: (continued)

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2.455.790.931	3.095.425.541	Cash and cash equivalents
Investasi jangka pendek	3.754.582.414	3.908.050.108	Short-term investment
Piutang usaha			Trade receivables
Pihak ketiga	360.361.482	352.615.665	Third parties
Pihak berelasi	1.044.698.818	652.391.728	Related parties
Piutang lain-lain			Other receivables
Pihak ketiga	11.081.743	23.013.642	Third parties
Pihak berelasi	12.663.900	274.544.601	Related parties
Uang muka dan beban dibayar di muka	84.754.820	197.320.412	Advance payments and prepaid expenses
Pendapatan yang masih akan diterima	839.627.778	1.054.631.247	Accrued income
Persediaan	15.249.031	17.566.041	Inventories
Pajak dibayar di muka	374.438.590	313.352.611	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	43.492.609	48.829.587	Other current assets
Total Aset Lancar	8.996.742.116	9.937.741.183	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada entitas asosiasi	20.396.242.387	22.420.232.719	Investment in associate entities
Piutang non-usaha jangka panjang	5.866.721.251	5.849.630.586	Long-term non-trade receivable
Properti investasi - neto	670.576.654	554.796.272	Investment properties - net
Aset tetap - neto	35.303.318.734	39.748.711.315	Fixed assets - net
Aset kerjasama operasi - neto	352.176.368	372.763.800	Joint operation assets - net
Aset hak-guna - neto	391.272.216	250.119.499	Right-of-use assets - net
Aset pajak tangguhan	213.968.728	230.779.774	Deferred tax assets
Aset takberwujud - neto	26.895.056.996	22.277.683.302	Intangible assets - net
Taksiran tagihan restitusi pajak	1.120.296.351	777.567.551	Estimated claims for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	345.561.265	655.520.491	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar	91.555.190.950	93.137.805.309	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET	100.551.933.066	103.075.546.492	TOTAL ASSETS

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS			LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang usaha			Trade payables
Pihak ketiga	252.824.154	298.285.704	Third parties
Pihak berelasi	675.458.094	800.085.305	Related parties
Pendapatan diterima di muka			Short-term unearned revenues
jangka pendek	1.173.962.078	1.136.275.202	Taxes payable
Utang pajak	375.201.815	372.032.518	Accrued expenses
Beban akrual	2.535.566.428	4.179.654.354	Current maturities of long-term liabilities:
Bagian lancar atas liabilitas			Bonds payable
jangka panjang			Bank loans
Utang obligasi	7.574.312.147	8.637.804.928	Lease liabilities
Utang bank	369.670.832	-	Other current liabilities
Liabilitas sewa	47.273.867	15.708.590	Third parties
Liabilitas jangka pendek lainnya			Related parties
Pihak ketiga	293.300.776	401.031.506	
Pihak berelasi	90.292.678	133.124.727	
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.387.862.869	15.974.002.834	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah			Long-term liabilities - net of
dikurangi bagian lancar			of current maturities
Utang obligasi	25.659.903.374	34.229.532.153	Bonds payable
Utang bank	7.293.292.708	-	Bank loans
Liabilitas sewa	391.369.245	256.310.102	Lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	-	135.184.367	Deferred tax liabilities
Pendapatan diterima di muka			Long-term unearned revenues
jangka panjang	3.344.527.965	3.399.845.605	Other non - current liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	237.535.798	170.012.480	Employee benefit liabilities
Liabilitas imbalan kerja	5.733.068.589	5.307.891.454	
Total Liabilitas Jangka Panjang	42.659.697.679	43.498.776.161	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS	56.047.560.548	59.472.778.995	TOTAL LIABILITIES

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(continued)**

**31 Desember 2023/
December 31, 2023**

**31 Desember 2022/
December 31, 2022**

EKUITAS

EQUITY

**Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk**

**Equity attributable to owners
of the parent entity**

Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham masing-masing untuk saham Seri A Dwiwarna dan Seri B	
Modal dasar - 156.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham seri A Dwiwarna dan 155.999.999 saham Seri B	
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.575.584 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdiri dari: 1 saham Seri A Dwiwarna dan 40.575.583 saham Seri B	40.575.584.000
Modal donasi	26.825.982
Tambahan modal disetor	(31.573.383.783)
Komponen ekuitas lainnya	1.466.121
Selisih nilai transaksi dengan pihak non-pengendali	836.072.934
Saldo laba	
Ditentukan penggunaannya	34.149.265.425
Belum ditentukan penggunaannya	1.090.227.825
Penghasilan komprehensif lain	(601.685.986)

Share capital - par value of Rp1,000,000 (full amount) per share for Series A Dwiwarna and Series B shares, respectively	
Authorized capital - 156,000,000 shares as of December 31, 2022 and 2023, consist of: 1 Series A Dwiwarna share and 155,999,999 Series B shares	
Issued and fully paid - 40,575,584 shares as of December 31, 2023 and 2022 consists of: 1 Series A Dwiwarna share and 40,575,583 Series B shares	40.575.584.000
Donated capital	26.825.982
Additional paid-in capital	(31.573.383.783)
Other equity component	1.466.121
Difference in value of transactions with non-controlling interest	836.072.934
Retained earnings	
Appropriated	34.502.497.085
Unappropriated	1.023.968.341
Other comprehensive income	(1.790.263.183)

Ekuitas - neto 44.504.372.518

43.602.767.497

Equity - net

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 100.551.933.066

103.075.546.492

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2023	2022	
Pendapatan operasi	15.052.941.466	15.475.961.876	Operating revenue
Pendapatan konstruksi	2.493.123.587	787.426.308	Construction revenues
Beban operasi	(13.083.801.925)	(13.219.160.193)	Operating expense
Beban konstruksi	(2.493.123.587)	(787.426.308)	Construction expense
Pendapatan (beban) operasi lainnya - neto	868.313.858	726.619.042	Others operating income (expense) - net
LABA USAHA	2.837.453.399	2.983.420.725	INCOME FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	632.698.043	551.924.719	Finance income
Beban keuangan	(2.214.059.347)	(2.112.208.142)	Finance costs
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN	1.256.092.095	1.423.137.302	INCOME BEFORE FINAL TAX AND CORPORATE INCOME TAX
Beban pajak final	(340.249.585)	(333.173.903)	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	915.842.510	1.089.963.399	INCOME BEFORE CORPORATE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN			CORPORATE INCOME TAX EXPENSE
Kini	-	(22.835.917)	Current
Tangguhan	174.385.315	(43.159.143)	Deferred
LABA PERIODE BERJALAN	1.090.227.825	1.023.968.339	INCOME FOR THE PERIOD
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbangan pasti - neto setelah pajak	(124.680.593)	787.157.534	Remeasurements of defined benefit plans - net off tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	1.313.257.791	(2.820.468.471)	Effective portion of gains and losses on hedging instrument in relation to cash flow hedge
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.278.805.023	(1.009.342.599)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in Thousands of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK (lanjutan)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Share capital - issued and fully paid	Modal donasi/ Donated capital	Tambahkan modal disetor/ Additional paid-in capital	Komponen ekuitas lainnya/ Other equity component	Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali/ Difference in value of transaction with non-controlling interest	Saldo laba/Retained earnings		Penghasilan komprehensif lainnya/ Other comprehensive income		Total ekuitas/ Total equity	
						Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Pengukuran kembali program imbalan pasti/ Remeasurements of defined benefit plans	Bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas/ Effective portion of gains and losses on hedging instrument in cash flow hedge		
Saldo 31 Desember 2021	8.475.067.000	26.825.982	527.133.217	1.466.121	836.072.934	34.362.009.896	1.457.341.189	243.047.754	-	45.928.964.093	Balance as of December 31, 2021
Penambahan modal berdasarkan penetapan nilai definitive	32.100.517.000	-	(32.100.517.000)	-	-	-	-	-	-	-	Additional capital based on determination of definitive value
Cadangan umum	-	-	-	-	-	1.457.341.189	(1.457.341.189)	-	-	-	General reverse
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	-	(1.316.854.000)	-	-	-	(1.316.854.000)	Distribution of cash dividend
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1.023.968.341	-	-	1.023.968.341	Income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	787.157.534	(2.820.468.472)	(2.033.310.938)	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2022	40.575.584.000	26.825.982	(31.573.383.783)	1.466.121	836.072.934	34.502.497.085	1.023.968.341	1.030.205.288	(2.820.468.472)	43.602.767.496	Balance as of December 31, 2022
Cadangan umum	-	-	-	-	-	1.023.968.341	(1.023.968.341)	-	-	-	General reserves
Pembagian dividen kas	-	-	-	-	-	(1.377.200.000)	-	-	-	(1.377.200.000)	Distribution of cash dividend
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1.090.227.825	-	-	1.090.227.825	Income for the year
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-	-	(124.680.593)	1.313.257.791	1.188.577.198	Other comprehensive income
Saldo 31 Desember 2023	40.575.584.000	26.825.982	(31.573.383.783)	1.466.121	836.072.934	34.149.265.426	1.090.227.825	905.524.695	(1.507.210.681)	44.504.372.519	Balance as of December 31, 2023

54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION (continued)

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELABUHAN INDONESIA
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year then Ended
(Expressed in Thousands of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

**54. INFORMASI KEUANGAN ENTITAS INDUK
(lanjutan)**

**54. PARENT ENTITY FINANCIAL INFORMATION
(continued)**

LAPORAN ARUS KAS

STATEMENT OF CASH FLOW

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/
Year ended December 31,

	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	18.198.063.921	15.974.163.474	Cash receipts from customers
Pembayaran kepada kontraktor, pemasok dan lainnya	(8.125.361.579)	(5.088.442.896)	Payment to contractors, suppliers and others
Pembayaran kepada karyawan	(1.897.796.526)	(2.266.478.971)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(2.718.739.827)	(1.931.386.284)	Payment for income taxes
Penerimaan pendapatan bunga	43.270.021	90.827.895	Receipt of interest income
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	5.499.436.010	6.778.683.218	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pencairan investasi jangka pendek	192.609.825	2.241.101.132	Withdrawal of short-term investments
Penerimaan dividen	585.771.970	44.254.802	Receipt of dividend
Hasil penjualan aset tetap	284.197	-	Proceed on sales assets
Perolehan aset tetap, properti investasi dan aset takberwujud	(2.288.142.827)	(3.737.146.084)	Acquisition of fixed assets, investment properties and intangible assets
Penjualan (penambahan) pada penyertaan saham	76.636.727	(2.570.123.049)	Sale (addition) to investment in shares
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.432.840.108)	(4.021.913.199)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	7.531.000.000	-	Receipt of loans
Pembayaran pinjaman bank dan utang obligasi	(8.938.521.869)	(1.975.328.801)	Payment of bank loans and bonds payable
Pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya	(1.907.777.227)	(1.164.210.682)	Interest payment and other finance expense
Pembayaran dividen	(1.377.200.000)	(1.316.854.000)	Payment of dividend
Pembayaran liabilitas sewa	(13.672.211)	(5.654.095)	Payments of lease liabilities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(4.706.171.307)	(4.462.047.578)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(639.575.406)	(1.705.277.559)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas	(59.205)	(50.361)	Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	3.095.425.541	4.800.753.461	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.455.790.931	3.095.425.541	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF YEAR